



BerAKHLAK

**BERORIENTASI PELAYANAN AKUNTABEL KOMPETEN
HARMONIS LOYAL ADAPTIF KOLABORATIF**

*bangga
melayani
bangsa*



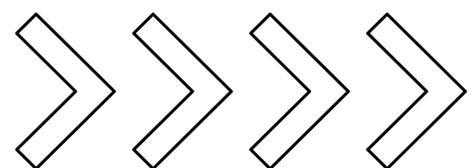
**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

2021

LKjIP



Tahun 2021 LAPORAN KINERJA Lampung Barat



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kepada Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 dapat terselesaikan dengan baik.

Dasar penyusunan laporan kinerja ini adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan ini merupakan laporan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban berupa informasi kinerja. Laporan ini berisi isu strategis, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai sasaran strategis, akuntabilitas anggaran, inovasi kinerja, penghargaan yang telah diraih tahun 2021, dan hasil serta dampak kinerja Pemerintah Lampung Barat.

Laporan kinerja ini kami sadari sepenuhnya masih terdapat kekurangan. Maka kami menerima kritik dan saran yang akan menjadi masukan untuk memperbaiki kinerja kami ditahun mendatang. Kami juga berharap laporan kinerja ini akan bermanfaat bagi publik sebagai informasi atau evaluasi, serta menjadi upaya berkesinambungan bagi Kabupaten Lampung Barat meningkatkan kinerja.

Akhirul kalam. Wassalaamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Liwa, 29 Maret 2022

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
IKHTISAR EKSEKUTIF	x
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM	2
C. TUJUAN DAN SASARAN.....	3
D. RUANG LINGKUP.....	3
E. GAMBARAN UMUM	3
F. ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT	10
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	13
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	19
C. PERJANJIAN KINERJA	22
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. SKALA NILAI PENGUKURAN KINERJA	29
B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	30
C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	34
1. Sasaran Strategis 1 Tersedianya Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	34
2. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	39
3. Sasaran Strategis 3 Tersedianya Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	55
4. Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Perumahan yang Memenuhi Standar Kelayakan dan Kesehatan	59
5. Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	73
6. Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Pemanfaatan Tata Ruang sesuai dengan Peruntukan	81
7. Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana.....	85
8. Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat.....	93
9. Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	102
10. Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Minat Baca Masyarakat.....	111
11. Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.....	115
12. Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Prestasi Olahraga	118
13. Sasaran 13 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan.....	124
14. Sasaran Strategis 14 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	128
15. Sasaran Strategis 15 Meningkatnya Ketahanan Pangan	133



16.	Sasaran Strategis 16 Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian.....	142
17.	Sasaran Strategis 17 Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sub Sektor perikanan	154
18.	Sasaran Strategis 18 Meningkatnya Pertumbuhan Industri Sektor Pariwisata	160
19.	Sasaran Strategis 19 Meningkatnya Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Industri dan Perdagangan	167
20.	Sasaran Strategis 20 Meningkatnya Nilai Investasi.....	173
21.	Meningkatnya Kontribusi dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perekonomian Daerah	178
22.	Sasaran Strategis 22 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.....	184
23.	Sasaran Strategis 23 Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	188
24.	Sasaran Strategis 24 Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.....	195
25.	Sasaran Strategis 25 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah ...	198
26.	Sasaran Strategis 26 Menurunnya Desa Tertinggal	200
27.	Sasaran Strategis 27 Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Tertib ..	203
28.	Sasaran Strategis 28 Menurunnya Kasus Kekerasan kepada Perempuan dan Anak.....	211
29.	Sasaran Strategis 29 Meningkatnya Kesetaraan Gender.....	214
30.	Sasaran Strategis 30 Menurunnya Kemiskinan dan Ketimpangan Daerah ...	218
31.	Sasaran Strategis 31 Menurunnya Pengangguran	223
D.	AKUNTABILITAS ANGGARAN TAHUN 2021	227
E.	INOVASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT	235
BAB IV		
PENUTUP.....		245



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Pekon/Kelurahan, dan Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Lampung Barat.....	4
Tabel 2. Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Barat.....	7
Tabel 3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022	15
Tabel 4. Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021	20
Tabel 5. Uraian Program dan Anggaran Program Perubahan Tahun 2021	23
Tabel 6. Capaian Indikator Sasaran Makro Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021.....	27
Tabel 7. Skala Nilai Pengukuran Peringkat Kerja	30
Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021.....	30
Tabel 9. Cara Perhitungan Capaian Indikator Sasaran Ketersediaan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Tahun 2021	34
Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD	35
Tabel 11. Cara Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2021.	40
Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021.....	41
Tabel 13. Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD	42
Tabel 14. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021	42
Tabel 15. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD	43
Tabel 16. Cara Perhitungan Capaian Indikator Sasaran Desa yang Teraliri Listrik.....	45
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD	46
Tabel 18. Cara Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi	55
Tabel 19. Cara Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman.....	61
Tabel 20. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD	61
Tabel 21. Cara Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rumah Layak Huni Tahun 2021 .	62
Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD	62
Tabel 23. Cara Perhitungan Capaian IKLH	74
Tabel 24. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD	75
Tabel 25. Indikator dan Parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	76
Tabel 26. Cara Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Ketaatan Pemanfaatan Ruang	81
Tabel 27. Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD.....	81
Tabel 28. Cara Perhitungan Capaian Indikator Sasaran.....	86
Tabel 29. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018-2021	86
Tabel 30. Cara Perhitungan Indikator Kinerja Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Lampung Barat Tahun 2021	94
Tabel 31. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Empat Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2018-2022.....	95
Tabel 32. Cara perhitungan Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan di Lampung Barat.....	105
Tabel 33. Realisasi 6 Indikator Kinerja untuk Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	106
Tabel 34. Cara Perhitungan Capaian Indikator Minat Baca Masyarakat.....	112
Tabel 35. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD	113
Tabel 36. Jenis Kepustakaan di Lampung Barat dan Jumlahnya.....	113
Tabel 37. Perkembangan Pendapatan Per Kapita Lampung Barat Tahun 2018-2021	116



Tabel 38. Perbandingan Realisasi Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD	119
Tabel 39. Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan 2021, Target Akhir RPJMD, serta Capaian Kinerja RPJMD	125
Tabel 40. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021, Target Akhir RPJMD, dan Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2021	130
Tabel 41. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021, Target Akhir RPJMD, dan Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2021	134
Tabel 42. Cara Perhitungan Indikator Kinerja Skor PPH	134
Tabel 43. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 15: Meningkatnya Ketahanan Pangan Tahun 2021.	135
Tabel 44. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD	136
Tabel 45. Kelompok Prioritas Daerah Rawan Pangan	137
Tabel 46. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD	143
Tabel 47. Perkembangan Komoditas Perkebunan Lampung Barat.....	146
Tabel 48. Perbandingan Komoditas Peternakan di Lampung Barat	147
Tabel 49. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 17.....	155
Tabel 50. Target dan Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun 2020-2021	155
Tabel 51. Target dan Realisasi Produksi Usaha Penangkapan Perairan Umum dan Budidaya Ikan Tahun 2021	157
Tabel 52. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021, Target Akhir RPJMD, dan Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2021	162
Tabel 53. Perbandingan Capaian Tahun 2020 dan 2021, Target Kinerja Tahun 2022, dan Capaian Kinerja Provinsi Lampung Tahun 2021	168
Tabel 54. Jenis dan Jumlah Usaha IKM Tahun 2020 dan 2021	172
Tabel 55. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD	174
Tabel 56. Realisasi Investasi per Sektor Usaha di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021	176
Tabel 57. Rekapitulasi Realisasi Investasi Tahun 2021 Kabupaten Lampung Barat	177
Tabel 58. Cara Perhitungan Capaian Indikator Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra Tahun 2021	179
Tabel 59. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tahun 2020 dan 2021, Target Akhir RPJMD, dan Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2021	179
Tabel 60. Sebaran Koperasi di 15 Kecamatan	181
Tabel 61. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2022	185
Tabel 62. Target dan Realisasi Indikator Peningkatan Kualitas Penerapan AKuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Lampung Barat Tahun 2021	188
Tabel 63. Perkembangan Hasil Evaluasi SAKIP Lampung Barat Tahun 2016-2020 dan Target Akhir RPJMD	189
Tabel 64. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Opini BPK Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD	189
Tabel 65. Rincian Penilaian Laporan Keuangan Daerah Lampung Barat Tahun 2021	193
Tabel 66. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKM Tahun 2019-2022	196
Tabel 67. Penyajian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Lampung Barat Tahun 2021	196
Tabel 68. Perkembangan Realisasi Kinerja Indikator LPPD Tahun 2021.....	199
Tabel 69. Perkembangan Capaian Predikat LPPD Lampung Barat Tahun 2014-2018.....	199
Tabel 70. Perkembangan Penyebaran Status Pekon di Kabupaten Lampung Barat	202
Tabel 71. Cara Perhitungan Indikator Penyelesaian Konflik SARA dan Penyelesaian Kasus K3	204
Tabel 72. Perbandingan Realisasi Kinerja Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Tertib Tahun 2019-2021 serta Target Akhir RPJMD.....	204



Tabel 73. Cara Perhitungan Indikator Persentase Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan yang Tertangani	211
Tabel 74. Perkembangan Realisasi Kinerja Indikator Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga	212
Tabel 75. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kesetaraan Gender	216
Tabel 76. Perkembangan Kemiskinan di Lampung Barat Tahun 2018-2021	219
Tabel 77. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019-2022	220
Tabel 78. Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD	224
Tabel 79. Efisiensi Anggaran selama Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2021	227
Tabel 80. Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran Startegis Daerah Tahun 2021	228
Tabel 81. Pengelompokan Inovasi Berdasarkan Perangkat Daerah	244

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Batas Wilayah Kabupaten Lampung Barat.....	5
Gambar 2. Jembatan Lumbok Seminung Sebelum dan Sesudah Pembangunan.....	37
Gambar 3. Ruas Jalan Kabupaten Tawan-Suka Banjar Sebelum dan Sesudah Pembangunan	38
Gambar 4. Beberapa Alat Uji Kelaikan Kendaraan	46
Gambar 5. Peta Letak Menara Telekomunikasi di Lampung Barat.....	49
Gambar 6. Keterbukaan Informasi Publik Melalui Surat Kabar Harian, Media Online, dan Liputan Berita.....	50
Gambar 7. Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Energi dan Air.....	52
Gambar 8. Salah Satu Jenis Bangunan Irigasi Permukaan dalam Kondisi Sesudah dan Sebelum Pembangunan.....	58
Gambar 9. Kondisi Sebelum dan Sesudah Irigasi Jenis Bendungan Way Haru	59
Gambar 10. Reservoir Air Bersih Pajar Agung Sebelum dan Sesudah Pembangunan	67
Gambar 11. Drainase SMP 1 Liwa sebagai Sampel Penanganan Limparan Air	69
Gambar 12. Ruas Jalan Lingkungan di Kelurahan Pasar Liwa dalam Kondisi Sebelum dan Sesudah Pembangunan.....	70
Gambar 13. Salah Satu Contoh Kondisi Unit Sebelum dan Sesudah Pembangunan Rumah Layak Huni	72
Gambar 14. Proses Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah.....	77
Gambar 15. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	78
Gambar 16. Responstime Tanggap Bencana	88
Gambar 17. Gotong Royong Penanggulangan Bencana	91
Gambar 18. Kegiatan Pusdalops-PB Responstime Tanggap Bencana.....	92
Gambar 19. Contoh Kegiatan untuk Meningkatkan Prestasi Olahraga	122
Gambar 20. Dokumentasi Pemuda Berprestasi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan Petugas Paskibraka	127
Gambar 21. Program Pangan Mandiri dan Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat.....	138
Gambar 22. Kerangka Fikir Petani Makmur	149
Gambar 23. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil dan Pembelajaran Penangkar Ikan Asli Perairan Umum Indonesia	158
Gambar 24. Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Pembudidaya Ikan, Fasilitas Bantuan Pendanaan dan Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha, dan Pembinaan Rekomendasi Izi Usaha Perikanan.....	159
Gambar 25. Bantuan Benih dan Pakan Ikan Nilem, Pemasaran Hasil Produksi Perikanan dan Bantuan Sarana Pemasaran Perikanan Keliling	160
Gambar 26. Budaya sebagai Salah Satu Destinasi Wisata Lampung Barat.....	164
Gambar 27. Salah Satu Kegiatan Stabilitas Harga Pasar	169
Gambar 28. Pertemuan Pemkab Lambar dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait penyelesaian permasalahan listrik di Pekon Roworejo-Sidorejo Suoh dan Penyelesaian Sengketa Agraria Sukapura.....	208
Gambar 29. Kegiatan Penertiban Pelanggaran Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19....	209
Gambar 30. Kegiatan Penertiban dan Keamanan	210
Gambar 31. Salah Satu Contoh Pembangunan Rumah Swadaya	235
Gambar 32. Kegiatan RS RTLH oleh Dinas Sosial.....	236
Gambar 33. Kegiatan Penyusunan Grand Design Kabupaten Tangguh Bencana	237
Gambar 34. Kegiatan Tuman Balita	239
Gambar 35. Pembinaan Pokjanal Posyandu Dalam Konvergensi Stunting	240
Gambar 36. Salah Satu Kegiatan PM BERAKSI.....	240
Gambar 37. Aplikasi Pelangi Pesagi	242
Gambar 38. Kegiatan Fasilitasi Layanan Partai Politik	243
Gambar 39. Proses Pembentukan Puspaga	244



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Kategori Jenis Kelamin.....	8
Grafik 2. Aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Kategori Jenjang Pendidikan	9
Grafik 3. Aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Kategori Rentang Usia.....	9
Grafik 4. Capaian Kinerja Jalan dan Jembatan Mantap Tahun 2018-2022	36
Grafik 5. Grafik Keterhubungan Transportasi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021. ..	41
Grafik 6. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2018-2022.....	44
Grafik 7. Target dan Realisasi Indikator Desa yang Dialiri Listrik Tahun 2018-2022	45
Grafik 8. Perbandingan Target dan Realisasi Jaringan Irigasi Tahun 2018-2022.....	56
Grafik 9. Perbandingan Target dan Realisasi Rumah Layak Huni Tahun 2018-2022.....	63
Grafik 10. Perkembangan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2022	75
Grafik 11. Perbandingan Target dan Realisasi Ketaatan Penataan Ruang	82
Grafik 12. Perkembangan Target dan Realisasi Persentase Cabang Olahraga Berprestasi Tahun 2018- 2022.....	120
Grafik 13. Perbandingan Target dan Realisasi Pemuda Berprestasi Lampung Barat Tahun 2018-2022.....	125
Grafik 14. Perbandingan Target dan Realisasi Angka Kelahiran Total dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2022.....	130
Grafik 15. Perkembangan Gizi kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2021	140
Grafik 16. Perbandingan Target dan Realisasi PDRB Perkebunan dan Peternakan Tahun 2020 dan 2021 serta Perbandingan Capaiannya dengan Target Akhir RPJMD	144
Grafik 17. Perbandingan Target dan Realisasi PDRB TPH Tahun 2018-2022	145
Grafik 18. Perbandingan Target dan Realisasi Lama Tinggal dan Kunjungan Wisatawan Tahun 2019-2022.....	162
Grafik 19. Perkembangan Realisasi Investasi di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2021	174
Grafik 20. Perbandingan Target dan Realisasi Koperasi Sehat dan UMKM Bermitra Tahun 2020-2022.....	180
Grafik 21. Perbandingan Target dan Realisasi Penurunan Desa Tertinggal Tahun 2019-2022.....	201
Grafik 22. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Tahun 2018-2022	217
Grafik 23. Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Barat dan Provinsi Lampung Tahun 2018-2021.....	224
Grafik 24. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Lampung Barat Tahun 2018-2021.....	226



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Keterkaitan Visi, Misi, Program Unggulan dan Program Perangkat Daerah	18
--	----



Ikhtisar Eksekutif





BUPATI LAMPUNG BARAT

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021. Laporan ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis kepada masyarakat.

Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merupakan formulasi laporan kinerja semua perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja ini sangat berguna untuk evaluasi dan upaya perbaikan kinerja di tahun mendatang dengan penyesuaian kegiatan yang sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk merealisasikan visi misi Kabupaten Lampung Barat sebagai wujud praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menetapkan APBD Lampung Barat dalam Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Realisasi pendapatan daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp.71.466.961.447,47 atau sebesar 98,43% dari rencana anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya realisasi belanja sebesar Rp.1.025.317.695.528,95 atau 93,45% dari rencana anggaran belanja, termasuk dalam belanja daerah belanja tidak terduga yang terserap 55,45%. Sehingga defisit tahun 2021 lebih sedikit dibandingkan perkiraan awal, yaitu sebesar 24,59% atau senilai -

Rp.18.206.007.711,48 dengan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2021 sebesar Rp.56.927.424.998,69.

Hasil evaluasi yang dilakukan atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021, pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Lampung Barat. Kebijakan *refocussing* kegiatan mengharuskan realokasi anggaran dilakukan oleh masing-masing satuan kerja pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pergeseran APBD di realokasi kepada kegiatan dan pengadaan barang jasa yang mendukung pencegahan dan penyelesaian pandemi Covid-19 di Kabupaten Lampung Barat. Hal ini tentu berdampak pada penurunan kinerja pemerintah Lampung Barat karena banyak kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya kemudian di *refocussing*. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, berikut ini adalah laporan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran:

1. 43 indikator sasaran memperoleh predikat sangat tinggi (capaian $91 < 100\%$);
2. 8 indikator sasaran berpredikat tinggi (capaian $76 < 90\%$);
3. 2 indikator sasaran berpredikat sangat rendah (capaian $< 50\%$).

Capaian kinerja dari 31 sasaran strategis dan 55 indikator kinerja didominasi oleh capaian kinerja berpredikat sangat tinggi, artinya pencapaian kinerja berada dalam rentang nilai 91 sampai dengan lebih dari 100. Selanjutnya indikator dengan predikat tinggi berjumlah 8 indikator, dan 2 indikator lainnya mencapai predikat sangat rendah. Kedua indikator ini adalah capaian indikator persentase desa tangguh bencana yang realisasi pembentukan desa tangguh bencana belum sesuai target. Kedua adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang jumlahnya di tahun 2021 melebihi target, yang artinya jumlah TPT lebih banyak dari jumlah minimum TPT yang menjadi target.

Sementara itu, ada 2 indikator yang tidak dapat dicapai karena pelaksanaannya telah dihentikan. Kedua indikator tersebut adalah nilai rata-rata ujian nasional jenjang SD dan SMP. Ujian nasional telah dihapuskan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Meski anggaran daerah di realokasi untuk penanganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan daerah. Rencana pembangunan strategis tetap dilanjutkan walaupun target kinerja harus dirasionalisasi dengan kondisi saat ini. Selama tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga telah penghargaan skala nasional dan provinsi sejumlah 11 (sebelas) penghargaan. Berbagai penghargaan ini merupakan bagian dari wujud kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja ini tidak lepas dari kerja sama baik, sinergi serta partisipasi dan peran aktif seluruh satuan kerja dan masyarakat Lampung Barat.

Sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang dijadikan dasar penyusunan laporan kinerja tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022. Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021, diharapkan mampu memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat kepada masyarakat.

Selain itu, laporan kinerja ini dapat juga digunakan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dalam rangka peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Lampung Barat, guna mewujudkan visi bersama yaitu: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA”**.

Liwa, 29 Maret 2022


BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS



BAB I

Pendahuluan



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik harus sesuai amanat undang-undang yang meletakkan kepentingan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan pelayanan publik. Hal ini yang melatarbelakangi urgensi akuntabilitas diadopsi dalam sistem penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Akuntabilitas merupakan salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Azas ini bermakna bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu wujud akuntabilitas adalah melalui penyusunan laporan kinerja.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sistem manajemen kinerja yang mengamanatkan integrasi informasi keuangan dan kinerja dalam sebuah sistem, termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah menekan keuangan dan capaian kegiatan pemerintah daerah. Kebijakan *refocussing* kegiatan dan realokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) menjadi dasar pemerintah daerah melakukan pergeseran anggaran. Efek samping dari kebijakan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran ini adalah tidak tercapainya beberapa target kinerja pemerintah daerah. Meski mendapat pemakluman, kondisi ini harus menjadi catatan penting dan acuan perbaikan untuk penyelenggaraan pemerintahan

daerah tahun selanjutnya. Hal ini karena kebijakan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran bukanlah solusi jangka panjang untuk semua penyelenggara pemerintahan. Pemerintah, masyarakat, lembaga non pemerintah dan sektor privat harus mulai membiasakan diri dan beradaptasi pada kondisi insidental seperti saat ini.

Pergeseran anggaran dan ketidaktercapaian target kinerja juga mempengaruhi laporan kinerja pemerintah daerah. Pemakluman ketidaktercapaian kinerja harus didasarkan alasan rasional. Dalam laporan kinerja yang merupakan implementasi SAKIP pemerintah daerah ini akan secara gamblang menyampaikan kinerja selama tahun 2021, didalamnya ada penyampaian ketercapaian dan ketidaktercapaian target kinerja pemerintah.

Inti laporan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat ini adalah menyandingkan secara jujur target kinerja pemerintah daerah dan realisasinya, hasil-hasil implementasi program dan kegiatan, dampak-dampak yang telah dirasakan masyarakat atau sasaran program, serta kerja sama antar satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program atau kegiatan.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang berisi informasi capaian kinerja dan dinamika proses pencapaiannya: faktor penghambat, faktor pendukung, kerjasama yang terjadi, upaya yang telah dilakukan, inovasi, hasil dan dampak program, serta evaluasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja Pemerintah Lampung Barat yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Lampung Barat untuk meningkatkan kinerja.

Sementara sasaran laporan kinerja ini adalah:

1. Menjadikan pemerintah Lampung Barat yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan;
2. Terwujudnya transparansi pemerintah Lampung Barat;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Lampung Barat.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1. Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Lampung Barat;
2. Program kerja yang menjadi isu strategis;
3. Aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi Pemerintah Lampung Barat.

E. GAMBARAN UMUM

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung

Barat. Luas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah 2.064,4 km² atau sekitar 6,2% dari luas wilayah administrasi Provinsi Lampung (Luas Provinsi Lampung ± 34.623,80 km²). Berikut ini adalah sebaran wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Pekon/Kelurahan, dan Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Lampung Barat

Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Pekon	Jumlah Kelurahan	Ibu Kota Kecamatan
1. Balik Bukit	175.63	10	2	Liwa
2. Sukau	223.10	10	0	Buay Nyerupa
3. Lumbok Seminung	22.40	11	0	Lumbok
4. Belalau	217.93	10	0	Kenali
5. Sekincau	118.28	4	1	Pampangan
6. Suoh	170.77	7	0	Bandar Agung
7. Batubrak	261.55	11	0	Kegeringan
8. Pagar Dewa	110.19	10	0	Pagar Dewa
9. Batu Ketulis	103.70	10	0	Bakhu
10. Bandar Negeri Suoh	170.85	10	0	Suoh
11. Sumber Jaya	195.38	5	1	Tugu Sari
12. Way Tenong	116.67	8	1	Mutar Alam
13. Gedung Surian	87.14	5	0	Gedung Surian
14. Kebun Tebu	14.58	10	0	Pura Jaya
15. Air Hitam	76.23	10	0	Sumber Alam
Lampung Barat	2064.40	131	5	

Sumber: Dinas PMP Lampung Barat, 2022.

Secara geografis, Kabupaten Lampung Barat berbatasan dengan:

a) Sebelah Utara

Kabupaten OKU Selatan

b) Sebelah Timur

Kabupaten Pesisir Barat

c) Sebelah Selatan

Kabupaten Pesisir Barat

d) Sebelah Barat

Kabupaten Lampung Utara



Gambar 1. Batas Wilayah Kabupaten Lampung Barat
Sumber: Bappeda Lampung Barat, 2020.

2. Letak dan Kondisi Geografis

a) Posisi Astronomis

Rata-rata ketinggian dataran Lampung Barat adalah +645 meter di atas permukaan laut. Secara astronomis, Kabupaten Lampung Barat terletak diantara 103035'08"-104033'51" Bujur Timur dan antara 4047'16"-5056'42" Lintang Selatan. Jarak antara kecamatan ke ibu kota kabupaten adalah:

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1) Balik Bukit | : 04 km; |
| 2) Sukau | : 16 km; |
| 3) Lumbok Seminung | : 48 km; |
| 4) Batubrak | : 21 km; |
| 5) Belalau | : 34 km; |
| 6) Bandar Negeri Suoh | : 88 km; |
| 7) Batu Ketulis | : 40 km; |
| 8) Suoh | : 48 km; |
| 9) Pagar Dewa | : 77 km; |
| 10) Sekincau | : 30 km; |
| 11) Sumber Jaya | : 67 km; |
| 12) Way Tenong | : 60 km. |

b) Posisi Geostrategis

Posisi Kabupaten Lampung Barat secara geostrategis merupakan:

- 1) Pintu gerbang Provinsi Lampung di bagian barat (merupakan fungsi ekonomi dan sosial), dilalui jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten OKUS, dan menghubungkan jalan lintas barat dengan jalan nasional lintas tengah;
- 2) Sebagai *catchment area* (daerah resapan air) untuk mempertahankan fungsi hidrologi Provinsi Lampung;
- 3) Sebagai paru-paru Provinsi Lampung, yaitu untuk mempertahankan iklim mikro, sekaligus memperkuat fungsi jasa lingkungan. Salah satu pemanfaatan jasa lingkungan adalah ketersediaan energi baru terbarukan, baik PLTA, PLTMH, maupun PLTP (*geothermal*). Potensi ini akan mendukung program kedaulatan energi.

c) Kondisi/Kawasan

Kabupaten Lampung Barat secara *ekoregion* merupakan wilayah yang dominan masuk dalam ekosistem dataran tinggi hingga pegunungan, yang dicirikan dengan bentang alam yang bergelombang, dan berbukit-bukit. Wilayahnya terletak di sisi bagian timur dari punggung perbukitan Bukit Barisan Selatan yang membentang dari utara hingga selatan sepanjang sisi barat pulau Sumatera, membentuk cincin api (*ring of fire*) Sumatera.

Sebagian besar wilayah Lampung Barat merupakan kawasan perdesaan (96%), sedangkan sisanya merupakan kawasan perkotaan (4%). Terdapat beberapa gunung di Kabupaten Lampung Barat yang membentuk benteng alam, yaitu Gunung Pesagi (2.127 m) yang merupakan gunung tertinggi di Lampung Barat. Gunung Seminung (1.804 m), Gunung Sekincau (1.718 m), Gunung Subhanallah (1.744 m), dan beberapa perbukitan seperti Bukit Sepulang, Bukit Rigin, Bukit Palakiah, Bukit Serarukuh. Sebagian besar masuk dalam kawasan hutan lindung dan hutan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

3. Kondisi Demografis

Kabupaten Lampung Barat meliputi 15 kecamatan, 131 pekon dan 5 kelurahan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Lampung Barat sebanyak 302.14 ribu jiwa yang terdiri dari

156.942 penduduk laki-laki (51,94%) dan 145.197 penduduk perempuan (48,06%). Sementara kepadatan penduduk Lampung Barat tahun 2020 mencapai 142-243 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kebun Tebu sebesar 1.484 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kecamatan Batu Brak sebesar 49 jiwa/km². Secara lengkap jumlah penduduk dan kepadatan penduduk serta laju pertumbuhan penduduk disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Barat

Nama Kecamatan	Penduduk (ribu)	Kepadatan Penduduk (km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)
Balik Bukit	41,60	260,99	0,88
Sukau	24,76	169,53	0,87
Lumbok Seminung	8,03	81,16	0,84
Belalau	12,49	133,01	0,81
Sekincau	18,87	163,99	0,81
Suoh	18,45	122,83	0,89
Batu Brak	14,99	75,23	0,88
Pagar Dewa	17,35	87,75	0,91
Batu Ketulis	13,37	73,44	0,89
Bandar Negeri Suoh	24,63	92,16	0,86
Sumber Jaya	24,04	184,27	0,84
Way Tenong	34,79	268,27	0,89
Gedung Surian	16,64	216,20	0,88
Kebun Tebu	20,50	333	0,90
Air Hitam	11,63	107,55	0,81
Lampung Barat	302,14	142,75	0,86

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2021.

4. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan berdasarkan hasil pemilu. Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh sekretaris daerah dan banyak perangkat daerah lainnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah:

- Sekretariat Daerah (11 bagian);
- Sekretariat DPRD (3 bagian);
- Dinas Daerah (19 dinas);
- Badan Daerah (6 badan);
- Inspektorat Daerah;

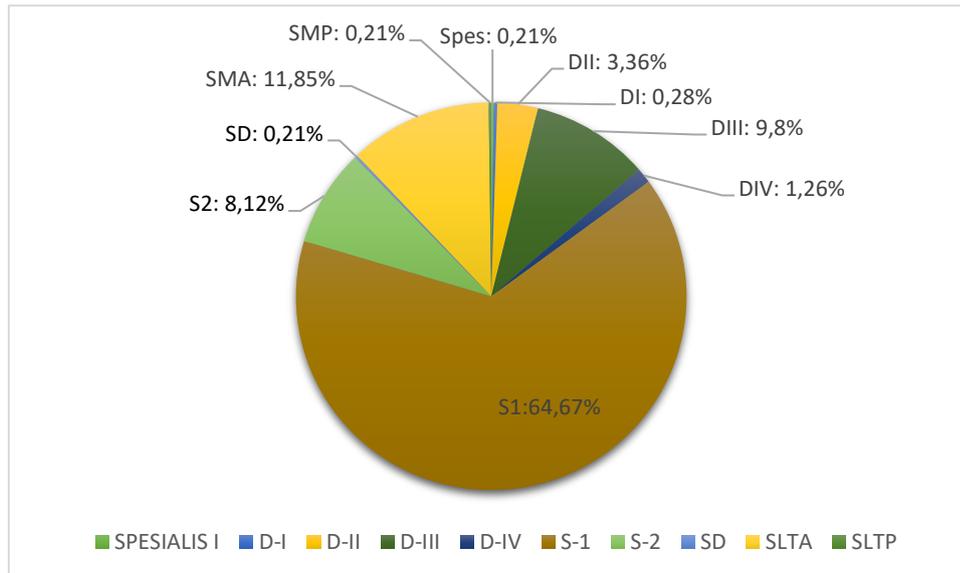
f) Kecamatan berjumlah 15 (lima belas) Kecamatan.

Sumber daya aparatur di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berjumlah 3.805 orang, terdiri dari 1.777 laki-laki (46,70%) dan 2.028 perempuan (53,29%). Jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, sumber daya aparatur didominasi oleh jenjang Strata 1 (S1) sebanyak 2.461 orang, jenjang SLTA sederajat sebanyak 451 orang, jenjang Diploma III (DIII) sebanyak 373 orang, jenjang S2 sebanyak 309 orang, sisanya sebanyak 211 orang berjenjang pendidikan DII, DIV, DI, Spesialis I, Sekolah Dasar, dan SLTP sederajat. Berikut ini adalah grafik aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan beberapa kategori.



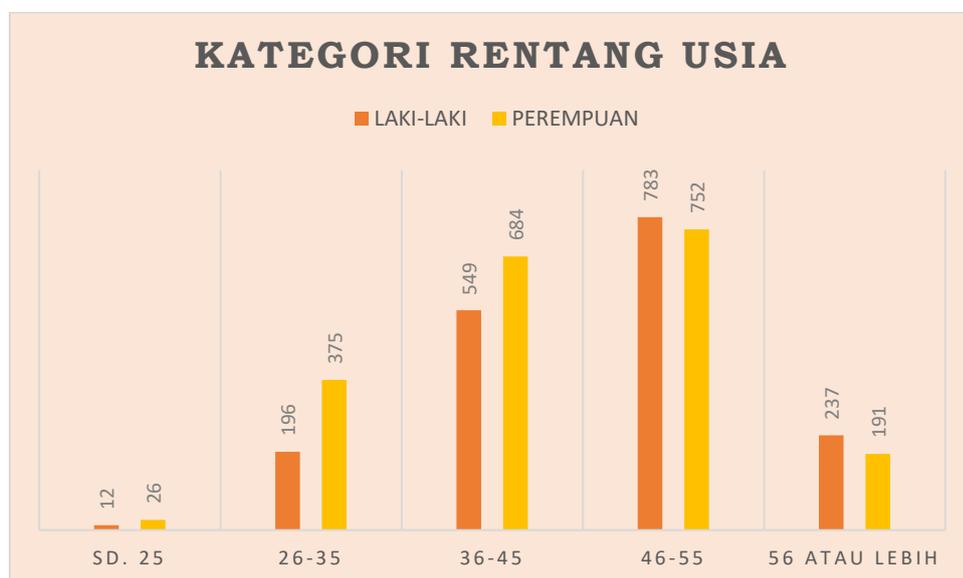
Grafik 1. Aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Kategori Jenis Kelamin

Sumber: BKPSDM Lampung Barat diolah tim, 2021.



Grafik 2. Aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Kategori Jenjang Pendidikan
Sumber: BKPSDM Lampung Barat diolah tim, 2021.

Sementara jika dilihat dari kategori rentang usia, sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat didominasi oleh aparatur dalam rentang usia 46-55 tahun. Sementara yang paling rendah adalah aparatur dalam rentang usia 22-25 tahun.



Grafik 3. Aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Kategori Rentang Usia
Sumber: BKPSDM Lampung Barat diolah tim, 2021.

Berdasarkan gambar 4 tersebut, dapat dipahami bahwa rekrutmen sumber daya aparatur sudah sesuai kebutuhan. Rata-rata berada pada fase produktif, dapat terlihat dari jumlah aparatur yang mendekati masa

purna tugas jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah total pegawai usia produktif. Jumlah sumber daya aparatur produktif akan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

F. ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diutamakan dalam perencanaan pembangunan daerah karena sifatnya yang mendesak, penting, mendasar, dan berjangka panjang. Tingkatan isu strategis dimulai dari isu utama, isu sekunder, isu fungsional, dan isu minor. Isu strategis Kabupaten Lampung Barat ditetapkan berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat. Permasalahan dibahas dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan beberapa kriteria, diantaranya: (a) memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan nasional; (b) luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan daerah Lampung Barat; (c) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan Lampung Barat; (d) kemungkinan dan kemudahannya untuk dikelola; (e) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan; (e) merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah Lampung Barat.

Isu strategis juga berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Barat, isu strategis Provinsi Lampung, dan memperhatikan isu strategis nasional. Sehingga isu-isu strategis Kabupaten Lampung Barat yang menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan selama periode pemerintahan kepala daerah Kabupaten Lampung Barat terpilih telah selaras dengan isu strategis Provinsi Lampung dan isu strategis nasional, tertuang dalam RPJMD periode 2017-2022. Berikut ini adalah isu strategis Kabupaten Lampung Barat:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

- a) Pengendalian jumlah penduduk melalui KB dan Pembangunan keluarga;
- b) Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia;
- c) Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- d) Peningkatan akses pelayanan kesehatan;
- e) Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun secara berkualitas;
- f) Penguatan tata kelola pendidikan;
- g) Peningkatan pendidikan keagamaan;
- h) Pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca;
- i) Penguatan partisipasi pemuda dalam pembangunan;

- j) Peningkatan budaya dan prestasi olah raga;
- k) Pelestarian warisan budaya;
- l) Peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia;
- m) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan kelembagaan perlindungan perempuan;
- n) Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak;
- o) Peningkatan perlindungan anak dan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

2. Bidang Ekonomi

- a) Peningkatan penerimaan daerah dan kualitas belanja daerah;
- b) Optimalisasi peran BUMD dalam pembangunan daerah;
- c) Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
- d) Peningkatan pariwisata;
- e) Peningkatan ekonomi kreatif;
- f) Peningkatan investasi;
- g) Peningkatan daya saing produk unggulan daerah;
- h) Pengembangan kerja sama bidang ekonomi.

3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- a) Pemanfaatan IPTEK bagi pembangunan daerah.

4. Bidang Hukum dan Birokrasi

- a) Kualitas penegakan hukum;
- b) Pembangunan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi kepada pelayanan publik.

5. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

- a) Pembangunan data dan informasi geospasial;
- b) Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c) Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah;
- d) Ketersediaan tanah bagi pembangunan;
- e) Pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- f) Pembangunan kawasan strategis;
- g) Pembangunan daerah/ desa tertinggal.

6. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

- a) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah;
- b) Kesiapan infrastruktur dalam menghadapi globalisasi ekonomi;
- c) Diversifikasi dan konservasi energi;
- d) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur.

7. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- a) Kemandirian pangan;
- b) Pengembangan agribisnis;
- c) Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan dan peternakan;
- d) Konservasi dan tata kelola hutan;
- e) Penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana.

Isu strategis Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan berdasarkan permasalahan-permasalahan di Lampung Barat, juga mendukung terselesaikannya isu strategis Provinsi Lampung (tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024) dan tercapainya visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.



BAB II

Perencanaan

Kinerja



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017–2022, tahun 2021 adalah tahun keempat pelaksanaan RPJMD periode 2017-2022. RPJMD memuat visi, misi, dan terjemahan agenda kepala daerah terpilih dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, pelaksanaannya terencana dan bertahap dengan pembiayaan APBD. Dokumen RPJMD Lampung Barat periode 2017-2022 juga berisi isu strategis daerah Kabupaten Lampung Barat yang selaras dengan isu strategis daerah Provinsi Lampung dan isu strategis nasional. Visi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai RPJMD Tahun 2017–2022 adalah:

***“ TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT HEBAT
DAN SEJAHTERA ”***

Visi tersebut merupakan akronim dari: Harmoni, Elok, Berdaya Saing, Aman dan Taqwa, bermakna ‘semangat untuk mengoptimalkan potensi yang ada dan sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat’. Adapun penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:

‘Harmoni’ bermakna keseimbangan atau kesesuaian, yaitu suatu keadaan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan keseimbangan dan kesesuaian daya dukung sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya budaya yang dimiliki dengan menjaga kelestarian lingkungan.

‘Elok’ bermakna Lampung Barat yang dikurniakan Tuhan dengan kondisi alam yang elok atau indah, dan kehidupan sosial-budaya serta sosial-kemasyarakatan yang berkepribadian dan berkarakter luhur menjadi modal penting dalam pelaksanaan pembangunan.

‘Berdaya Saing’ bermakna segenap kemampuan sumber daya yang dimiliki Lampung Barat diarahkan untuk mampu berkompetensi baik pada tingkat regional maupun internasional.

'Aman' bermakna mempertahankan keamanan dan kondusifitas sehingga setiap orang merasakan ketenangan dan kenyamanan dan dapat melakukan berbagai aktivitas. Memelihara dan mempertahankan kondisi ini menjadi salah satu prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

'Taqwa' bermakna perwujudan dari keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan landasar serta sumber motivasi dalam melaksanakan seluruh aspek pembangunan.

'Sejahtera' bermakna makmur secara ekonomi, dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Sejahtera merupakan tujuan akhir keadaan yang diharapkan, yaitu kehidupan masyarakat yang religius, toleran, seluruh warga bebas menjalankan aktivitas keagamaan, bermoral tinggi, rukun, harmonis dan berbudaya.

Selanjutnya, visi dapat dicapai melalui rumusan misi. Misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing;
3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumber daya lokal;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik;
5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

Visi dan misi tersebut kemudian menjadi dasar penetapan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai sesuatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan. Sasaran dan strategi kemudian menyusul ditetapkan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing perangkat daerah. Berikut ini adalah informasi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan IKU yang disajikan dalam bentuk tabel agar dapat mudah dipahami keterkaitannya.

Tabel 3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022

Visi: Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat HEBAT dan Sejahtera			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan	a. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	1. Tersedianya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur/prasarana, sarana, fasilitas pendukung sistem jaringan transportasi daerah
		2. Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Perluasan cakupan layanan infrastruktur telekomunikasi dan informasi
		3. Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi
		4. Meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	- Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan fasilitas umum pelayanan dasar permukiman - Fasilitasi peningkatan akses dan kualitas infrastruktur jaringan listrik daerah
		5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		6. Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan	Pelaksanaan penataan ruang wilayah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan (<i>stake holder</i>)
	b. Meningkatnya daya tanggap masyarakat terhadap bencana	1. Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Pemantapan prasarana, sarana, fasilitas, dan utilitas pendukung mitigasi bencana dengan menerapkan teknologi
Misi 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing	a. Terwujudnya masyarakat Lampung Barat yang berdaya saing	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat	- Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara adil dan merata - Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
		3. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Peningkatan dan perluasan akses layanan pendidikan masyarakat yang bermutu
		4. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Meningkatkan sarana dan Prasarana Perpustakaan

Visi: Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat HEBAT dan Sejahtera			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		5. Meningkatnya pendapatan masyarakat	Peningkatan kompetensi dan pengembangan sikap mental dan etos kerja angkatan kerja
		6. Meningkatnya prestasi olahraga	Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
		7. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Peningkatan kualitas pelayanan kepemudaan
		8. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Pengendalian pertumbuhan penduduk dan penguatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		9. Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan produktivitas dan Pengamanan lahan pertanian pangan.
Misi 3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumber daya lokal	a. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Lampung barat	1. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Revitalisasi sektor pertanian, perkebunan dan peternakan
		2. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan	Revitalisasi sektor perikanan
		3. Meningkatnya pertumbuhan industri sektor pariwisata	Peningkatan Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas wisata
		4. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri dan perdagangan	- Peningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas pendukung perdagangan, Pariwisata dan Investasi - Pengembangan sektor industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri)
		5. Meningkatnya nilai investasi	Optimalisasi Promosi Investasi dan kualitas pelayanan perizinan
		6. Meningkatkan kontribusi dan daya saing koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah	Peningkatan akses pembiayaan dan jangkauan pemasaran UMKM
Misi 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada	a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa	1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah	- Peningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah dengan stake holder terkait



Visi: Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat HEBAT dan Sejahtera			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
pelayanan publik		Kabupaten Lampung Barat	- Penguatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah
		2. Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah - Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah
		3. Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Peningkatan kapasitas dan kualitas ASN dalam mengimplementasikan pelayanan prima
		4. Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan	Peningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan, anggaran, dan pengawasan pembangunan daerah dengan stake holder terkait
		5. Menurunnya desa tertinggal	Penguatan kelembagaan masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya lokal
Misi 5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif	a. Terwujudnya masyarakat yang tertib dan sejahtera	1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib	Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum masyarakat, perlindungan masyarakat
		2. Menurunnya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak	- Peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi - Peningkatan pemenuhan hak-hak anak dalam pembangunan
		3. Meningkatnya kesetaraan gender	Peningkatan Peran Perempuan dalam Pembangunan
		4. Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah	Peningkatan kesempatan kerja dan menumbuhkembangkan kewirausahaan
		5. Menurunnya pengangguran	Peningkatan kompetensi dan pengembangan sikap mental dan etos kerja angkatan kerja

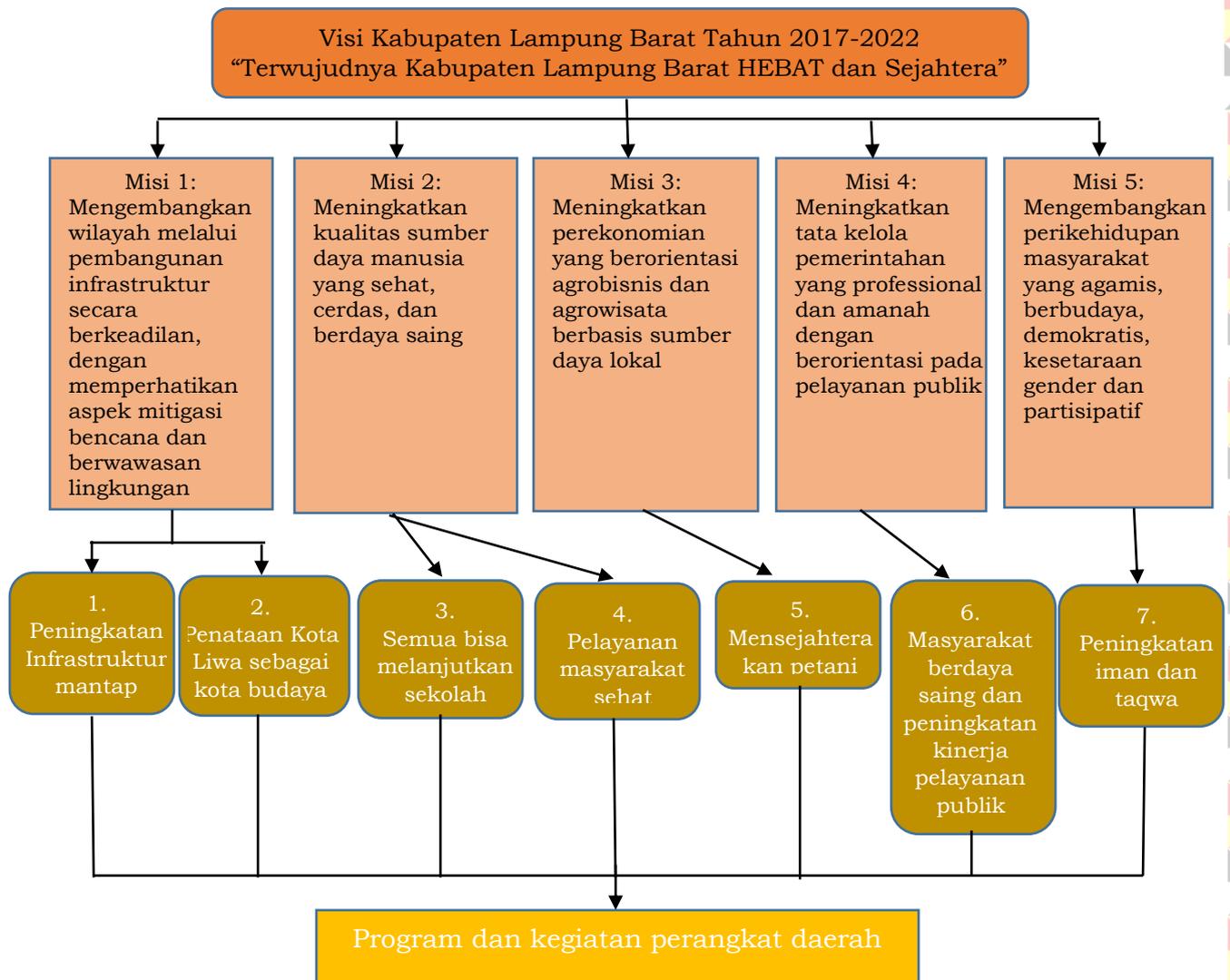
Sumber: RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, diolah tim, 2022.

Misi selanjutnya diuraikan dalam berbagai program dari masing-masing perangkat daerah. Semua program dari perangkat daerah tersebut mendukung

ketercapaian program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang biasa disebut Pitu (7) Program. Berikut ini adalah rincian Pitu Program:

1. Peningkatan infrastruktur mantap;
2. Penataan Kota Liwa sebagai kota budaya;
3. Semua bisa melanjutkan sekolah;
4. Pelayanan masyarakat sehat;
5. Mensejahterakan petani;
6. Masyarakat berdaya saing dan peningkatan kinerja pelayanan publik;
7. Peningkatan iman dan taqwa.

Keterkaitan antara visi, misi, Pitu Program, dan program perangkat daerah dapat dilihat dengan jelas dalam bagan dibawah ini:



Bagan 1. Keterkaitan Visi, Misi, Program Unggulan dan Program Perangkat Daerah
Sumber: RPJMD Lampung Barat tahun 2017-2022, diolah tim, 2022.

Berdasarkan Bagan 1 terlihat bahwa dalam rangka mencapai visi, digunakan rumusan misi yang di uraikan dalam program dan kegiatan.

Program unggulan bukan merupakan satu-satunya program. Ada banyak program dari masing-masing perangkat daerah, namun kesemuanya mengutamakan pencapaian Pitu Program. Pitu Program 1 dan 2 merupakan uraian dari misi pertama, yaitu pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang adil dan memperhatikan mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan. Mengingat kondisi geografis Lampung Barat yang 60% merupakan hutan lindung maka program unggulan 1 dan 2 menjadi program unggulan. Program unggulan 3 dan 4 menguraikan misi 2 yang mengamanatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Selanjutnya program unggulan 5 adalah uraian dari misi 3, yaitu peningkatan perekonomian yang berorientasi agrobisnis dan agrowisata berbasis sumber daya local masyarakat Lampung Barat. Hal ini selaras dengan program unggulan kedua yang mencita-citakan kota budaya. Sementara program unggulan 6 menguraikan misi 4 yang berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang professional dan amanah dengan menempatkan pelayanan publik sebagai orientasi kerja. Terakhir, program unggul ketujuh sesuai dengan misi 5 yang berupaya mewujudkan kehidupan masyarakat Lampung Barat yang agamis, berbudaya, demokratis, partisipatif serta kesetaraan gender.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Barat ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 36 tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022, adalah ukuran sebuah instansi mencapai tujuan. IKU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU membantu optimalisasi pencapaian sasaran.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Berikut ini adalah indikator kinerja dan target dari masing-masing sasaran:

Tabel 4. Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dengan kondisi mantap	74%
		Persentase jembatan dengan kondisi mantap	84,22%
2	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi	36,76%
		Persentase desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet	97,79%
		Persentase desa yang dialiri listrik	97,06%
3	Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi	56,00%
4	Meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	47,40%
		Persentase perumahan layak huni	95,22%
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas lingkungan hidup	63,57 Poin
6	Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan	Persentase ketaatan RT RW	100%
7	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Persentase desa tangguh bencana	17,64%
		<i>Respon</i> time tanggap bencana	1x24 Jam
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat	Usia harapan hidup	67,84 Tahun
		angka kematian ibu (per 1.000 kelahiran hidup)	121 Poin
		angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	4,1 Poin
		Persentase kasus gizi buruk yang ditangani	100%
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	angka partisipasi kasar (APK)	
		SD	111,91%
		SMP	99,93%
		angka partisipasi murni (APM)	
		SD	100%
		SMP	91,94%
		Angka rata-rata lama sekolah	7,42 Tahun
		Angka Harapan lama sekolah	12,33 Tahun



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
		Angka melanjutkan sekolah	90,83 Tahun
		Nilai rata Ujian Nasional (UN)	
		SD	210,21 Poin
		SMP	236,21 Poin
10	Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase pengunjung yang menjadi anggota perpustakaan	2,74%
11	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita	27.561.067
12	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	70%
13	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah pemuda yang berprestasi	40 Orang
14	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	laju pertumbuhan penduduk	1,02%
		angka kelahiran total (TFR)	2,27%
15	Meningkatnya ketahanan pangan	skor pola pangan harapan	91,1 Poin
16	Meningkatnya Pertumbuhan produk Domestik Regional bruto (PDRB) Subsektor Pertanian, Peternakan, Pemburuan dan jasa Pertanian	Produk Domestik Regional bruto (PDRB) Subsektor Pertanian, Peternakan, Pemburuan dan jasa Pertanian (Juta Rupiah)	3.622.160, 33 Juta Rupiah
17	Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Subsektor perikanan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Subsektor perikanan (Juta Rupiah)	180.391,57 Juta Rupiah
18	Meningkatnya Pertumbuhan Industri sektor Pariwisata	Rata-rata lama tinggal	2,5 Hari
		Jumlah Kunjungan wisatawan (Orang)	17.805 Orang
19	Meningkatnya Pertumbuhan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri dan perdagangan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (Juta Rupiah)	255.200 Juta Rupiah
		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor perdagangan (Juta Rupiah)	669.269 Juta Rupiah
20	Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi	3.849.756. 556 Rupiah
21	Meningkatnya kontribusi dan daya saing koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam perekonomian daerah	Jumlah Koperasi yang sehat	12 Unit
		Tingkat Pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM)	8%
22	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat C

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
23	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat BB
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Predikat WTP
24	Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat C
25	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintah	Predikat laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD)	Predikat sangat tinggi
26	Menurunnya desa tertinggal	Presentase desa tertinggal	0%
27	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib	Persentase konflik SARA yang terselesaikan	100%
		Persentase kasus ketertiban, keamanan, dan keindahan (K3) yang terselesaikan	100%
28	Menurunnya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani	100%
29	Meningkatnya kesejahteraan gender	Indeks pembangunan gender	91,74 Poin
		Indeks Pemberdayaan gender	53,2 Point
30	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah	angka kemiskinan	12,50%
		Indeks Gini	0,28 Poin
31	Menurunnya Pengganguran	tingkat Pengangguran terbuka	0,75%

Sumber: RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022; Bappeda Lampung Barat, diolah tim, 2022.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja (PK) adalah dokumen berisi penugasan pimpinan perangkat daerah yang lebih tinggi kepada pimpinan perangkat daerah yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja, seperti yang tertera di Tabel 4 Penyusunan PK adalah salah satu tahap dalam SAKIP, tertera dalam Perpres No.29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Dasar penyusunan PK adalah dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), maka berikut ini adalah uraian program dan anggaran program dalam perubahan tahun 2021 yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Tabel 5. Uraian Program dan Anggaran Program Perubahan Tahun 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pengelolaan Pendidikan	87.510.064.732,00
2	Program Pengembangan Kurikulum	304.344.100,00
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	51.103.897.031,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.736.467.847,00
5	Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	169.084.000,00
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.768.967.399,00
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	15.946.927.300,00
8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.856.800.000,00
9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.778.000.000,00
10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	936.802.500,00
11	Program Pengembangan Permukiman	13.411.183.054,00
12	Program Penataan Bangunan Gedung	10.733.566.160,00
13	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	3.869.052.000,00
14	Program Penyelenggaraan Jalan	55.553.667.919,00
15	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	156.198.000,00
16	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	317.548.000,00
17	Program Pengembangan Perumahan	148.948.500,00
18	Program Kawasan Permukiman	2.995.050.000,00
19	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	277.821.300,00
20	Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.022.503.300,00
21	Program Penanggulangan Bencana	3.007.384.836,00
22	Program Pemberdayaan Sosial	253.955.000,00
23	Program Rehabilitasi Sosial	5.643.671.046,00
24	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	365.470.100,00
25	Program Penanganan Bencana	624.002.000,00
26	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	24.646.000,00
27	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	331.567.900,00
28	Program Penempatan Tenaga Kerja	76.560.000,00
29	Program Hubungan Industrial	52.869.000,00



NO	PROGRAM	ANGGARAN
30	Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	234.984.000,00
31	Program Perlindungan Perempuan	51.843.000,00
32	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	428.462.100,00
33	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	43.420.000,00
34	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	212.403.800,00
35	Program Perlindungan Khusus Anak	44.000.000,00
36	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	656.522.500,00
37	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.347.014.100,00
38	Program Penanganan Kerawanan Pangan	60.000.000,00
39	Program Pengawasan Keamanan Pangan	122.866.000,00
40	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	97.825.000,00
41	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1.145.614.000,00
42	Program Pengelolaan Tanah Kosong	471.267.500,00
43	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	347.062.526,00
44	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	3.083.521.096,00
45	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	36.744.600,00
46	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	64.080.900,00
47	Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	33.189.500,00
48	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	63.776.835,00
49	Program Pengelolaan Persampahan	3.263.078.257,00
50	Program Pendaftaran Penduduk	718.115.700,00
51	Program Pencatatan Sipil	106.094.000,00
52	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	74.977.600,00
53	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	46.766.000,00
54	Program Penataan Desa	846.910.000,00
55	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.045.952.700,00
56	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat. Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	844.101.200,00
57	Program Pengendalian Penduduk	73.347.500,00



NO	PROGRAM	ANGGARAN
58	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	5.633.307.500,00
59	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	328.129.000,00
60	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1.441.472.650,00
61	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.612.478.606,00
62	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.619.929.976,00
63	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	24.418.900,00
64	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	0,00
65	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	0,00
66	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	38.291.100,00
67	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	277.697.300,00
68	Program Promosi Penanaman Modal	982.828.900,00
69	Program Pelayanan Penanaman Modal	323.089.900,00
70	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	326.122.000,00
71	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	34.000.000,00
72	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	990.511.700,00
73	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.580.094.600,00
74	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	143.449.000,00
75	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	405.029.250,00
76	Program Pengembangan Kebudayaan	1.905.410.000,00
77	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	752.376.000,00
78	Program Pembinaan Perpustakaan	1.782.844.304,00
79	Program Pengelolaan Arsip	24.143.000,00
80	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	190.708.000,00
81	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.418.479.120,00
82	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	392.024.900,00
83	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	456.833.300,00
84	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.810.248.624,00
85	Program Pemasaran Pariwisata	1.093.679.100,00
86	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.986.272.700,00
87	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.424.593.400,00



NO	PROGRAM	ANGGARAN
88	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	36.491.500,00
89	Program Penyuluhan Pertanian	386.521.500,00
90	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	379.000.000,00
91	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	0,00
92	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.010.040.100,00
93	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	444.102.000,00
94	Program Pengembangan Ekspor	158.774.500,00
95	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	86.162.900,00
96	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	0,00
97	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.691.514.000,00
98	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	14.017.897.000,00
99	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.145.249.800,00
100	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	21.711.484.555,00
101	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	22.044.758.500,00
102	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.821.404.400,00
103	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.459.013.500,00
104	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	190.876.170.371,06
105	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.469.417.400,00
106	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.654.452.200,00
107	Program Kepegawaian Daerah	3.088.723.282,00
108	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	888.922.500,00
109	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.354.504.000,00
110	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi	311.785.500,00
111	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	520.090.800,00
112	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.971.936.540,00
113	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	614.214.300,00
114	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	354.288.700,00
115	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	731.808.100,00
116	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100.000.000,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN
117	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.140.185.872,00
118	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	915.047.000,00
119	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	0,00
120	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.542.951.155,00
	Total	Rp 603.466.334.243

Sumber: Bappeda Lampung Barat, 2022.

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dalam Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat karena merupakan arena yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang akan dicapai. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam pengelolaan program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan seluruh kegiatan instansi menjadi terarah. Setelah satu tahun berjalan, banyak program dan kegiatan dari masing-masing perangkat daerah telah memberi nilai tambah pada capaian indikator makro ekonomi dan sosial Kabupaten Lampung Barat untuk tahun 2021. Capaian ini sangat penting dan berpengaruh terhadap keterbangunan daerah Lampung Barat, berdasar capaian indicator makro ini dapat dilihat sampai mana keterbangunan daerah Lampung Barat. Berikut ini adalah rincian capaian indikator makro hasil perhitungan statistik oleh BPS Lampung Barat tahun 2021.

Tabel 6. Capaian Indikator Sasaran Makro Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No	Indikator Strategis	Satuan	Capaian			
			2018	2019	2020	2021
Ekonomi						
1	Pertumbuhan ekonomi	% (2010=100)	5,09	5,18	-1,16	2,58
2	Pertumbuhan ekonomi pertanian	% (2010=100)	1,93	0,48	0,01	0,14
3	Pertumbuhan ekonomi industri	% (2010=100)	11,66	20,05	-5,04	5,36
4	Pertumbuhan	% (2010=100)	7,75	9,00	-6,64	8,88



	ekonomi perdagangan					
5	PDRB nominal per kapita	Juta Rp/Tahun	21,92	23,43	23,41	24,71
6	PDRB riil per kapita	Juta Rp/Tahun	15,76	16,46	16,16	16,69
Sosial						
1	Kemiskinan (Maret)	%	13,54	12,92	12,52	12,82
2	Garis Kemiskinan	%	391,444	400,662	443,313	457,478
3	Indeks Kedalaman (P1)	%	1,84	1,84	1,86	2,00
4	Indeks Keparahan (P2)	%	0,36	0,38	0,55	0,80
5	Gini Ratio (September)	-	-	0,314	0,296	0,295
6	Pengangguran (TPT) (Agustus)	%	2,72	1,66	2,13	2,83
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	66,74	67,50	67,80	67,87
8	Rasio Ketergantungan	%	46,21	45,99	45,79	45,62
9	Angka Partisipasi Sekolah (16-18 tahun)	%	67,38	69,29	70,79	70,93

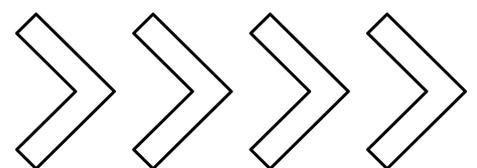
Sumber: BPS Lampung Barat Tahun 2021.



BAB III

Akuntabilitas

Kinerja



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perwujudan tata pemerintahan yang baik salah satunya adalah melalui akuntabilitas kinerja. Sistem yang efektif dan koordinatif serta regulasi yang tepat menjadi landasan bagi setiap pemerintah daerah dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja. Dasar implementasi akuntabilitas kinerja adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas kinerja Kabupaten Lampung Barat ini berusaha menyajikan realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang tertuang dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten. Selain itu, laporan kinerja ini juga akan menyajikan realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.

Seiring dengan kemajuan zaman, implementasi akuntabilitas kinerja tidak lagi cukup mengedepankan efisiensi semata. Indikasi kepatuhan kepada aturan formal semata menjadi alasan kuat, sehingga akuntabilitas kinerja di masa lampau diyakini kurang mengembangkan pengukuran kinerja yang normatif. Saat ini telah banyak kajian ilmiah yang menyebutkan bahwa akuntabilitas kinerja seharusnya mencakupi aspek yang berjangka panjang, sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan lebih lama dan akhirnya memberi timbal balik yang baik bagi pemerintahan itu sendiri. Misalnya program semua harus sekolah yang dalam jangka panjang akan menciptakan sumber daya manusia Kabupaten Lampung Barat yang unggul dan berdaya saing.

A. SKALA NILAI PENGUKURAN KINERJA

Urgensi skala nilai dalam pengukuran kinerja adalah membantu pengkategorian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Skala nilai peringkat kinerja yang digunakan untuk memudahkan interpretasi pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 7. Skala Nilai Pengukuran Peringkat Kerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% < 100%	Sangat Tinggi
2	76% < 90%	Tinggi
3	66% < 75%	Sedang
4	51% < 65%	Rendah
5	< 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86/2017.

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Melalui bidang perencanaan, ketercapaian indikator kinerja utama pada masing-masing perangkat daerah dievaluasi dan dipantau setiap triwulan (3 bulanan). Selanjutnya dilaporkan kepada Inspektorat dan Bappeda Kabupaten Lampung Barat. Mekanisme ini adalah mutlak, tujuannya untuk mengukur kinerja perangkat daerah melalui perbandingan antara realisasi capaian dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian kinerja tahun 2021. Berdasarkan skala nilai pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam Permendagri 86/2017, berikut ini adalah pemetaan target dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021:

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021			Kriteria
			TARGET	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dengan kondisi mantap	74%	66,10%	89,32%	Tinggi
		Persentase jembatan dengan kondisi mantap	84,22%	82,33%	97,75 %	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi	36,76%	37,40%	101,74%	Sangat Tinggi
		Persentase desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet	97,79%	98,50%	100,72%	Sangat Tinggi
		Persentase desa yang dialiri listrik	97,06%	98,53%	101,51%	Sangat Tinggi



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021			Kriteria
			TARGET	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi	56,00%	56,00%	100%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	47,40%	85,80%	181%	Sangat Tinggi
		Persentase perumahan layak huni	95,22%	98,58%	103,52%	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas lingkungan hidup	63,57 Poin	65,99 Poin	103%	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan	Persentase ketaatan RT RW	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Persentase desa tangguh bencana	17,64%	9,56%	54,19 %	Sangat Rendah
		Respon time tanggap bencana	1x24 Jam	1x24 Jam	100%	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat	Usia harapan hidup	67,84 Tahun	67,65 Tahun	99,71 %	Sangat Tinggi
		angka kematian ibu (per 1.000 kelahiran hidup)	121 Poin	145 poin	80,16 %	Tinggi
		angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	4,1 Poin	4,55 poin	90,24 %	Tinggi
		Persentase kasus gizi buruk yang ditangani	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	angka partisipasi kasar (APK)				
		SD	111,91 %	103,32 %	92,32 %	Sangat Tinggi
		SMP	99,93%	103,66 %	103,73 %	Sangat Tinggi
		angka partisipasi murni (APM)				
		SD	100%	94,97%	94,97 %	Sangat Tinggi
		SMP	91,94%	75,49%	82,10 %	Tinggi
		Angka rata-rata lama sekolah	7,42 Tahun	8,07 Tahun	108,76 %	Sangat Tinggi
		Angka Harapan lama sekolah	12,33 Tahun	12,26 Tahun	99,43 %	Sangat Tinggi
		Angka melanjutkan sekolah	90,83 Tahun	100%	110,09 %	Sangat Tinggi
		Nilai rata Ujian Nasional (UN)				
		SD	210,21 Poin	-	-	
		SMP	236,21 Poin	-	-	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021			Kriteria
			TARGET	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase pengunjung yang menjadi anggota perpustakaan	2,74%	3,49%	127,37 %	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita	27.561.067 juta rupiah	24.714.990 juta rupiah	89,67 %	Tinggi
12	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	70%	178%	254,28 %	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah pemuda yang berprestasi	40 Orang	32 orang	80%	Tinggi
14	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	laju pertumbuhan penduduk	1,02%	0,98%	103,92 %	Sangat Tinggi
		angka kelahiran total (TFR)	2,27%	2,39%	94,71 %	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya ketahanan pangan	skor pola pangan harapan	91,1 Point	91,62 poin	101%	Sangat Tinggi
16	Meningkatnya Pertumbuhan produk Domestik Regional bruto (PDRB) Subsektor Pertanian, Peternakan, Pemburuan dan jasa Pertanian	Produk Domestik Regional bruto (PDRB) Subsektor Pertanian, Peternakan, Pemburuan dan jasa Pertanian (Juta Rupiah)	3.622.160,33 Juta Rupiah	663.893.500.00 juta rupiah	18.339 %	Sangat Tinggi
17	Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Subsektor perikanan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Subsektor perikanan (Juta Rupiah)	180.391,57 Juta Rupiah	283.434,75 juta rupiah	157,12 %	Sangat Tinggi
18	Meningkatnya Pertumbuhan Industri sektor Pariwisata	Rata-rata lama tinggal	2,5 Hari	2 hari	80%	Tinggi
		Jumlah Kunjungan wisatawan (Orang)	17.805 Orang	153.414 orang	861%	Sangat Tinggi
19	Meningkatnya Pertumbuhan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri dan perdagangan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (Juta Rupiah)	255.200 Juta Rupiah	400,61 juta rupiah	150,3%	Sangat Tinggi
		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor perdagangan (Juta Rupiah)	669.269 Juta Rupiah	961,79 juta rupiah	143,70%	Sangat Tinggi
20	Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi	3.849.756.556 Rupiah	112.921.542.189 rupiah	2.933 %	Sangat Tinggi
21	Meningkatnya kontribusi dan daya saing koperasi dan usaha mikro kecil menengah	Jumlah Koperasi yang sehat	12 Unit	27 unit	225%	Sangat Tinggi
		Persentase Peningkatan Kemitraan UMKM	8%	67,4%	842,5 %	Sangat Tinggi



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021			Kriteria
			TARGET	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(UMKM) dalam perekonomian daerah					
22	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat C	CC	183,53 %	Sangat Tinggi
23	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat BB	B	90%	Tinggi
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Predikat WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi
24	Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat C	B	110%	Sangat Tinggi
25	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintah	Predikat laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD)	Predikat sangat tinggi	Sangat Tinggi	100%	Sangat Tinggi
26	Menurunnya desa tertinggal	Presentase desa tertinggal	0%	0%	100%	Sangat Tinggi
27	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib	Persentase konflik SARA yang terselesaikan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase kasus ketertiban, keamanan, dan keindahan (K3) yang terselesaikan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
28	Menurunnya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
29	Meningkatnya kesejahteraan gender	Indeks pembangunan gender	91,74 Poin	93 poin	101,37 %	Sangat Tinggi
		Indeks Pemberdayaan gender	53,2 Poin	68,21 poin	128,21 %	Sangat Tinggi
30	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah	angka kemiskinan	12,50%	12,82%	102,56 %	Sangat Tinggi
		Indeks Gini	0,28 Poin	0,295 poin	94,64 %	Sangat Tinggi
31	Menurunnya Pengangguran	tingkat Pengangguran terbuka	0,75%	2,83%	-177%	Sangat Rendah

Sumber: Laporan kinerja perangkat daerah terkait, diolah tim, 2022.

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

1. Sasaran Strategis 1 Tersedianya Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap

Capaian Sasaran

Infrastruktur memegang peran penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Sejak tahun 2008, pemerintah memberi perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi, mendorong laju investasi, dan menggerakkan sektor riil. Sampai dengan saat ini, infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi sasaran strategis pembangunan, termasuk Kabupaten Lampung Barat yang menargetkan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, jalan dengan kondisi mantap adalah ruas-ruas jalan dalam kondisi baik atau sedang. Ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten memiliki panjang 724 Km, menurut Surat Keterangan Bupati Nomor B/243/KPTS/III.03/2017 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten.

Ketersediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap terus diupayakan setiap tahun, pengukuran capaian dibantu dengan 2 indikator kinerja yaitu persentase jalan dengan kondisi mantap dan persentase jembatan dalam kondisi mantap. Realisasi kinerja pembangunan jalan dengan kondisi mantap adalah 66,10% dari target kinerja 74%, sementara realisasi jembatan dengan kondisi mantap adalah 82,33% dari target kinerja 84,22%. Berikut ini adalah cara perhitungan capaian indikator sasaran ketersediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap.

Tabel 9. Cara Perhitungan Capaian Indikator Sasaran Ketersediaan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Tahun 2021

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik + sedang}}{\text{Panjang jalan kabupaten di Lambar}} \times 100\%$	74%	66,10%	89,32 %
Persentase jembatan dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Jumlah jembatan kondisi baik}}{\text{Jumlah jembatan di Lambar}} \times 100\%$	84,22 %	82,33%	97,76 %

Sumber: Laporan Kinerja Dinas PUPR Lampung Barat Tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja kemantapan jalan Provinsi Lampung yang sebesar 101,86%, capaian kinerja kemantapan jalan Kabupaten Lampung Barat lebih rendah. Sementara pembangunan jembatan Provinsi Lampung berjumlah 7 unit dan rehabilitasi jembatan sebanyak 8 unit, lebih banyak dibandingkan dengan realisasi pembangunan jembatan di Lampung Barat yang berjumlah 1 unit.

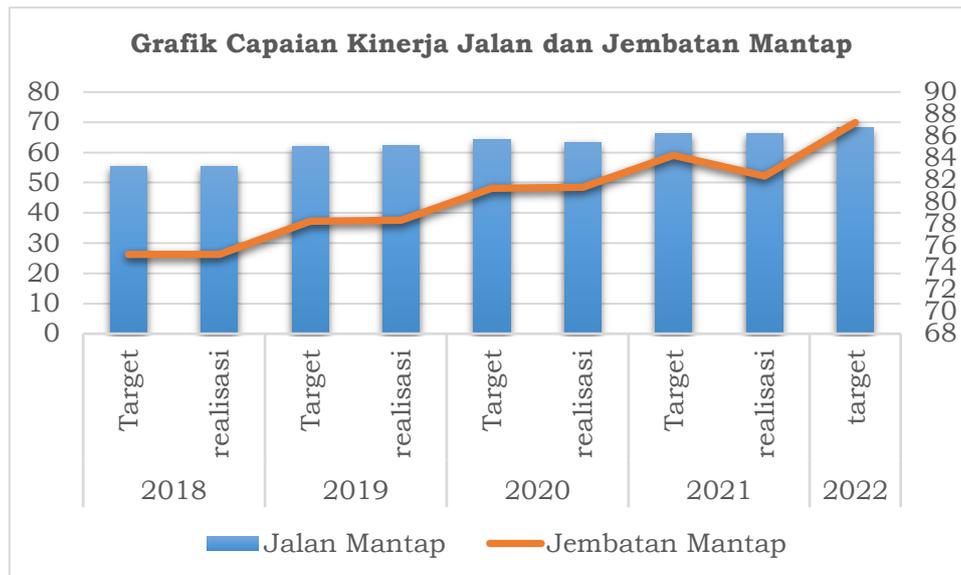
Total panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang adalah 478,56 Km, jika dibandingkan dengan total panjang jalan kabupaten 724 Km menghasilkan persentase hasil kinerja sebesar 66,10%. Capaian kinerja tahun 2021 ini meningkat 6,74% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian kinerja tahun 2021 sudah sebesar 97,06%. Sementara jumlah jembatan dalam kondisi baik sebanyak 144 unit dari total jembatan di Lampung Barat sebanyak 180 unit. Sehingga capaian kinerja pembangunan jembatan dalam kondisi baik mencapai 82,33%, menurun 2,38% dari capaian tahun 2020. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, kinerja tahun 2021 mencapai 94,52%. Berikut ini perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021 serta target akhir RPJMD.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD
1	Persentase jalan dengan kondisi mantap	63,43%	66,10%	80%
2	Persentase jembatan dengan kondisi mantap	81,33%	82,33%	87,22%

Sumber: diolah tim, 2022.

Capaian kinerja jalan dan jembatan ini mengalami fluktuasi sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini. Berikut ini adalah grafik capaian kinerja peningkatan kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.



Grafik 4. Capaian Kinerja Jalan dan Jembatan Mantap Tahun 2018-2022
Sumber: Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Capaian kinerja pembangunan jalan mantap menurun tahun 2020, dampak pandemi Covid-19 yang berhasil menguras tenaga dan keuangan pemerintah. Pandemi Covid-19 adalah kondisi insidental yang belum pernah dialami Indonesia dan negara-negara di dunia, sehingga ketika melanda pertama kali tahun 2020 sangat berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat dan implementasi program pemerintah tidak terkecuali pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Meski masih dalam kondisi pandemi, peningkatan capaian di tahun 2021 didukung oleh APBD Provinsi Lampung dalam bantuan penanganan ruas jalan. Sementara capaian pembangunan jembatan menurun di tahun 2021.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi program prioritas utama yang berkelanjutan dan berkesinambungan oleh pemerintah pusat dan daerah. Muara pembangunan jalan dan jembatan ini adalah mendukung kemandirian pemerintah daerah. Pada tahun 2021, jalan di Lampung Barat dengan kondisi baik sepanjang 338,542 Km (45,83%), kondisi jalan sedang sepanjang 116,447 Km (16,35%), kondisi jalan rusak ringan sepanjang 109,667 Km (8,8%), dan kondisi jalan rusak berat sepanjang 159,827 Km (29,02%). Peningkatan kondisi jalan baik sejak tahun 2019 berbanding lurus dengan pengurangan panjang jalan dengan kondisi rusak berat. Meski jalan dengan kondisi mantap sudah mencapai

478,56 Km, masih ada 245,44 Km jalan kondisi rusak ringan dan berat. Sementara dari total 180 jembatan yang ada di Lampung Barat, berhasil di perbaiki dalam kondisi mantap sebanyak 144 unit. Jumlah penanganan jembatan di tahun 2021 adalah sebanyak 1 jembatan. Masih ada 39 unit jembatan dalam kondisi rusak. Capaian persentase jalan 66,10% dan jembatan 82,33% dalam kondisi mantap ini merupakan pencapaian besar mengingat besarnya jumlah dana yang dibutuhkan dalam pembangunan.



Gambar 2. Jembatan Lumbok Seminung Sebelum dan Sesudah Pembangunan
Sumber: Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021.

Pemerintah Lampung Barat berkomitmen terus meningkatkan kondisi jalan dan jembatan dalam keadaan baik untuk meningkatkan pembangunan daerah. Upaya peningkatan persentase jalan dan jembatan bukan hanya membangun jalan dan jembatan baru, melainkan juga rekonstruksi dan pemeliharaan. Termasuk didalamnya adalah penanganan tanggap darurat bencana yang berakibat pada kerusakan jalan dan jembatan. Jalan dan jembatan merupakan prasarana transportasi darat. Ketersediaan jalan dan jembatan akan sangat berpengaruh terhadap konektivitas wilayah dalam kabupaten. Kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap akan memperlancar transportasi yang memindahkan barang dan orang antar wilayah dalam kabupaten, memperlancar pertumbuhan perekonomian daerah, pemerataan ekonomi, kelancaran lalu lintas, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menghubungkan antar wilayah, memeratakan keamanan daerah, mempercepat pertukaran antar daerah dan aktivitas masyarakat. Oleh karena fungsinya yang vital dalam pembangunan daerah, peningkatan jalan dan jembatan masih menjadi prioritas pembangunan daerah berkelanjutan. Pandemi Covid-19 memang mempengaruhi pembangunan infrastruktur

daerah, namun pembangunan tetap dilanjutkan meski dengan mengurangi target capaian. Pembangunan infrastruktur daerah juga menjadi bagian dari program pemulihan ekonomi nasional.



Gambar 3. Ruas Jalan Kabupaten Tawan-Suka Banjar Sebelum dan Sesudah Pembangunan

Sumber: Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021

Capaian kinerja pembangunan jalan dan jembatan ini dipengaruhi beberapa hal. Pertama, kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan persentase jalan dan jembatan merupakan amanat pembangunan berkelanjutan, sehingga harus diimplementasikan. Kedua, pembagian tugas dan fungsi masing-masing penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Pemahaman terhadap fungsi dan tugas akan membantu optimalisasi implementasi program. Ketiga, suasana kerja yang kondusif, kemudahan akses komunikasi dan koordinasi internal Dinas PUPR dan antar perangkat daerah. Keempat, pemantauan dan evaluasi berkala pada setiap kegiatan. Hal ini akan membantu penanganan secara cepat masalah-masalah yang muncul ketika program diimplementasikan.

Dasar pemerintah mengencarkan pembangunan infrastruktur adalah menggerakkan perekonomian. Maka sebenarnya dampak pertama dari pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan adalah konektivitas wilayah, yang pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Adanya jalan dan jembatan yang mantap membuat transportasi dapat masuk ke wilayah tersebut. Pengiriman logistik di Indonesia saat ini 90% memanfaatkan jalur darat, 10% lainnya menggunakan transportasi laut. Transportasi yang dapat membawa orang dan barang mempermudah jual beli logistik dan kebutuhan masyarakat lainnya antar wilayah, sehingga mengurangi disparitas harga terutama di wilayah terdalam kabupaten. Bersama dengan terbukanya

akses transportasi, jalan dan jembatan mantap juga menjadi daya dukung pembangunan menara telekomunikasi yang menghubungkan masyarakat dengan wilayah lain melalui jaringan. Konektivitas wilayah melalui jaringan membantu komunikasi dan hubungan timbalik antara pemerintah dan masyarakat, akses informasi juga semakin dekat.

Dampak jangka panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap bersifat multi fungsi, diantaranya adalah untuk ketahanan pangan dan ketahanan wilayah. Konektivitas wilayah melalui mobilitas transportasi ini membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang tidak diproduksi didalam wilayah, sehingga ketahanan pangan wilayah dapat terjaga. Ketahanan wilayah juga merupakan aspek terdampak dari ketersediaan jalan dan jembatan mantap. Dalam antisipasi menghadapi ancaman musuh, infrastruktur jalan dan jembatan mantap dapat mempermudah mobilitas sarana prasarana alat utama sistem senjata angkatan bersenjata Indonesia. Dalam penanggulangan bencana, Dinas PUPR termasuk dalam Tim Penilai Infrastruktur bersama dengan Bappeda, BPKD, BPBD, Dinas Dikbud, dan Bagian Administrasi Pembangunan. Tim ini berfungsi untuk melakukan mitigasi bencana, tanggap darurat dan pembangunan wilayah kembali pasca bencana.

2. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah

Capaian Kinerja

Dalam mewujudkan konektivitas antar wilayah, didukung oleh 3 indikator kinerja yang kesemuanya menjadi keincayaan dalam pembangunan. Pertama, transportasi merupakan salah satu urusan vital dalam pembangunan daerah, karena transportasi dapat membuka aksesibilitas. Sehingga pengembangan transportasi harus berkelanjutan. Sebagai urat nadi pembangunan, transportasi membantu memindahkan orang, memindahkan barang, menjaga stabilitas harga barang, meningkatkan nilai ekonomi daerah, dan perkembangan daerah. Kedua, layanan informasi yang sering kali menjadi indikator kemajuan daerah atau negara. Perkembangan industri teknologi 4.0 merupakan transformasi komprehensif yang sederhananya merevolusi setiap yang manual menjadi otomatisasi. Keterbukaan informasi dan kemampuan masyarakat menjangkauanya merupakan satu bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah. Informasi yang tepat sasaran, terbuka, jujur dan memberi timbal balik saling membangun adalah apa yang dicita-citakan dalam pembangunan daerah. Melalui timbal balik informasi dengan masyarakat yang kontinu dan berdasar, pemerintah dapat mengetahui setiap kebutuhan masyarakat dan perkembangan kemandirian desa.

Ketiga, aliran listrik pada desa-desa di Lampung Barat. Pengaruh tenaga listrik dalam pembangunan daerah menempati peran pada kemampuannya mendorong peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Seiring kemajuan teknologi, banyak kegiatan produksi dan konsumsi masyarakat yang membutuhkan energi dan tenaga listrik. Sehingga kegiatan perekonomian masyarakat yang lebih efektif karena bantuan listrik tersebut kemudian berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, tenaga listrik juga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai faktor pendukung pertahanan keamanan. Banyak sistem keamanan memanfaatkan tenaga listrik di zaman kemajuan teknologi seperti sekarang. Pasokan listrik utama yang stabil ke Pulau Jawa dan Bali cukup menunjukkan bukti bahwa Pulau Jawa memiliki peran strategis dalam pertahanan keamanan negara. Dalam perannya mewujudkan pembangunan daerah melalui sasaran strategis kedua, bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Sumber Daya Alam, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat selalu berupaya meningkatkan konektivitas antar wilayah. Berikut ini adalah cara perhitungan capaian kinerja tahun 2021.

Tabel 11. Cara Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
Meningkatnya Konektivitas antar wilayah	Meningkatnya jangkauan transportasi antar wilayah	Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi	$\frac{\text{Jumlah desa terhubung moda transportasi}}{\text{Jumlah seluruh desa di Lampung Barat}} \times 100$
	Meningkatnya layanan informasi kepada masyarakat	Persentase pemanfaatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	$\frac{\text{Jumlah informasi yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah seluruh informasi}} \times 100\%$
		% desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet	$\frac{\text{Jumlah desa yang terkoneksi internet}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$
	Persentase desa yang dialiri listrik	Persentase desa yang dialiri listrik	$\frac{\text{Jumlah pekon yang sudah teraliri listrik}}{\text{Jumlah pekon di Lampung Barat}} \times 100\%$

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021.

Berdasarkan cara perhitungan tersebut, realisasi rata-rata capaian kinerja sasaran strategis tahun 2021 telah mencapai 109,08%. Konektivitas antar wilayah ini didukung dengan 3 sasaran yang masing-masing sasaran menggunakan indikator untuk mengukur ketercapaian target kinerja. Berikut ini adalah uraian capaian sasaran kinerja.

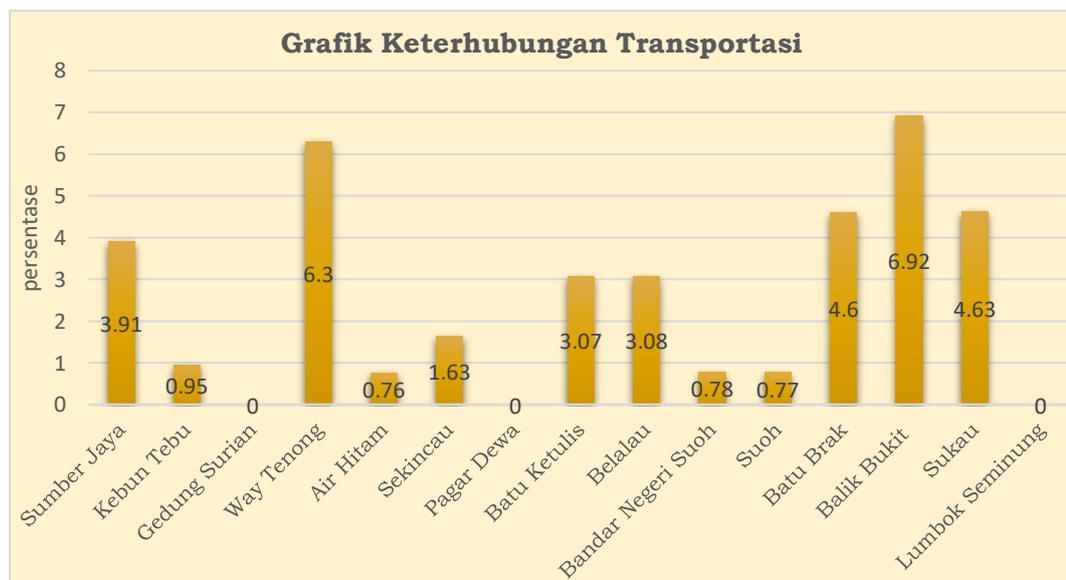
Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021.

Tujuan	Sasaran	Capaian	Predikat
Meningkatnya Konektivitas antar wilayah	Meningkatnya jangkauan transportasi antar wilayah	101,74%	Sangat tinggi
	Persentase desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet	100,72%	Sangat tinggi
	Persentase desa yang dialiri listrik	101,51%	Sangat tinggi

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan dan Bagian Sumber Daya Alam Tahun 2021, diolah tim, 2022.

a) Desa yang Terhubung dengan Moda Transportasi

Target kinerja sasaran 1 yang sebesar 36,76% berhasil direalisasikan sebesar 37,40% atau tercapai 101,74%. Sejak tahun 2019, pencapaian tahun 2021 adalah pencapaian realisasi tertinggi. Tahun 2019 tercapai 101,57% dan tahun 2020 tercapai 101,61%. Berikut ini grafik konektivitas wilayah tahun 2021.



Grafik 5. Grafik Keterhubungan Transportasi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021.

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021.

Sejumlah 49 pekon dan kelurahan di 12 kecamatan terhubung moda transportasi angkutan desa. Ketiga kecamatan yang belum terkoneksi tersebut adalah Kecamatan Lumbok Seminung, Kecamatan Pagar Dewa, dan Kecamatan Gedung Surian. Maka capaian konektivitas wilayah per tahun 2021 masih mencapai 37,40%, ada 87 pekon dan kelurahan yang belum terkoneksi dengan transportasi pekon atau daerah. Pekerjaan rumah yang masih cukup besar untuk menyambung urat nadi di seluruh pekon di Lampung Barat. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diperlukan peningkatan 0,84% untuk mencapai target akhir 38,24%. Berikut ini adalah perbandingan capaian realisasi tahun 2020 dan 2021 serta target akhir RPJMD.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD
Persentase Desa yang Terhubung dengan Moda Transportasi	35,86%	37,40%	38,24%

Sumber: diolah tim, 2022.

b) Peningkatan Layanan Informasi kepada Masyarakat

Capaian sasaran yang dibantu dengan 2 indikator ini mencapai rata-rata 124%. Pertama, indikator persentase pemanfaatan keterbukaan informasi publik mencapai kinerja 147% dan indikator desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet mencapai 100,72%. Berikut ini adalah cara perhitungan dan capaian kinerja tahun 2021.

Tabel 14. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	2021			
		Target	Realisasi	Capaian	Predikat
Persentase pemanfaatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	$\frac{886}{1000} \times 100\%$	60%	88,6%	147%	Sangat tinggi
% desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet	$\frac{134}{136} \times 100\%$	97,79%	98,5%	100,72 %	Sangat tinggi

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Barat Tahun 2021.

Sejumlah 886 informasi yang ditayangkan ini bersumber dari 185 media *online*, 23 media SKM, 49 tayangan liputan berita, 9 liputan

khusus, 9 liputan berita, dan 48 media SKHU. Media menjadi alat yang dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan Lampung Barat kepada masyarakat luas. Banyaknya jumlah media yang meliput kegiatan masyarakat, pemerintah, budaya dan pariwisata Lampung Barat menunjukkan ketertarikan masyarakat luar terhadap Lampung Barat. Sementara jumlah pekon dan kelurahan yang sudah terjangkau internet dan telekomunikasi berjumlah 134, sementara 2 pekon lainnya masih berada dalam *blank spot*.

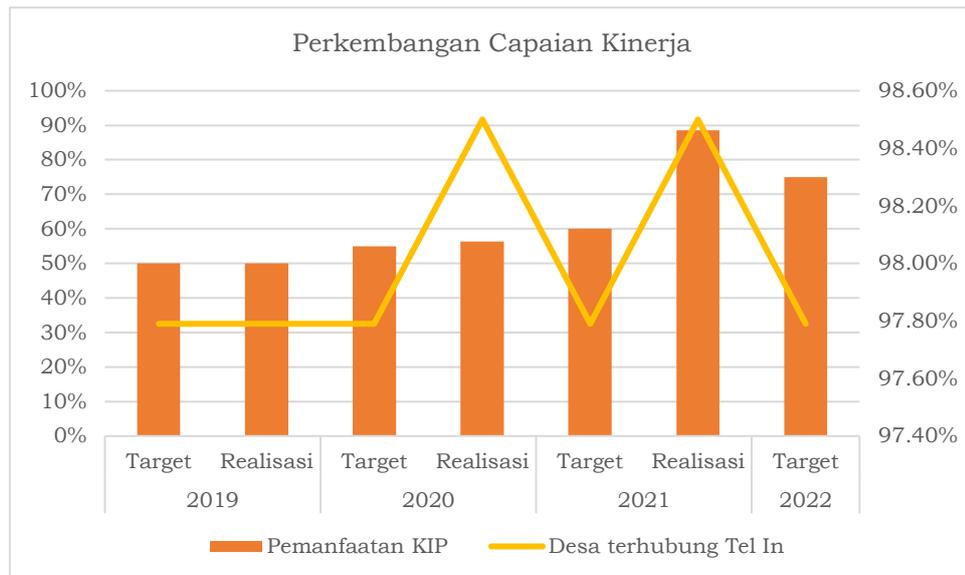
Dari kedua indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Kominfo ini, salah satu nya merupakan indikator kinerja utama sasaran strategis. Indikator tersebut adalah persentase desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet. Berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 serta target akhir RPJMD.

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD
Persentase desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet	97,79%	98,50%	97,79%

Sumber: diolah tim, 2022.

Melihat capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun ini merupakan capaian tertinggi sejak periode RPJMD dimulai tahun 2018. Begitu pula dengan perbandingan target kinerja akhir RPJMD, capaian tahun 2021 telah melebihi target akhir RPJMD. Berikut ini adalah perkembangan capaian kinerja tahun 2018 sampai dengan 2022.



Grafik 6. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2018-2022.

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Telekomunikasi Tahun 2021.

c) Desa yang Teraliri Listrik

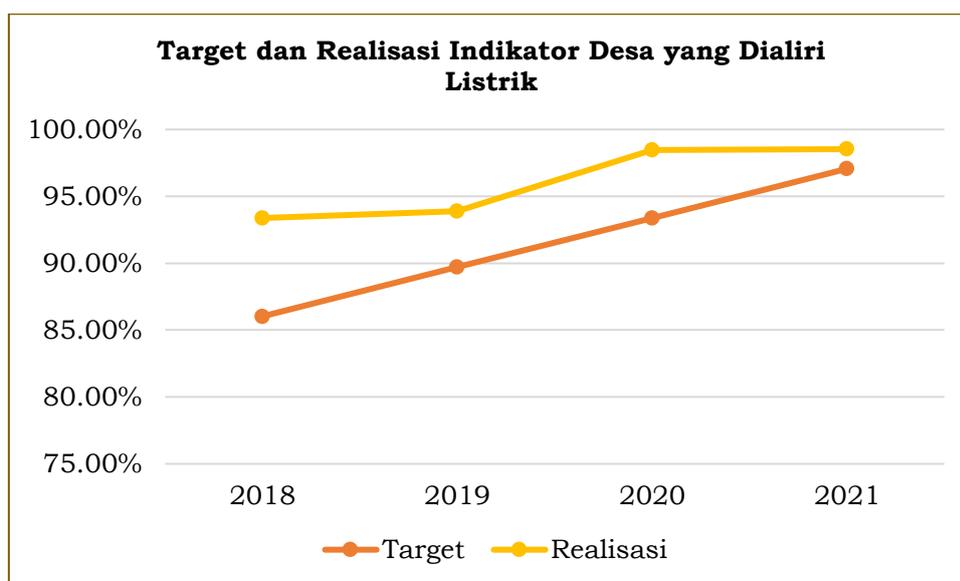
Capaian sasaran melalui indikator ini mencapai 98,53%, melebihi target kinerja tahun 2021 yang sebesar 97,06%. Dalam tahun keempat RPJMD periode 2017-2022 ini, masih ada 2 pekon yang belum teraliri listrik. Sementara 7 pekon masih menjadi perbedaan persepsi karena menurut PT. PLN Persero telah tealiri listrik, namun memang masih non PLN (listrik tenaga surya dan listrik tenaga mikrohidro). Konektivitas kelistrikan belum merata. Namun, meski non PLN, keberhasilan keteraliran listrik pada 7 pekon ini merupakan prestasi yang membanggakan, tentu saja berkat kerjasama masif Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan PT.PLN Persero, Dinas ESDM dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pentingnya kerjasama ini karena sebagian besar wilayah Lampung Barat yang merupakan kawasan hutan lindung, sehingga untuk dapat membangun jaringan listrik di beberapa pekon yang melewati kawasan hutan lindung harus berizin kepada Kementerian LHK. Berikut ini adalah hasil perhitungan capaian indikator sasaran kelistrikan.

Tabel 16. Cara Perhitungan Capaian Indikator Sasaran Desa yang Teraliri Listrik

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	2021			
		Target	Realisasi	Capaian	Predikat
Persentase desa yang dialiri listrik	$\frac{129 \text{ pekon}}{131 \text{ pekon}} \times 100\%$	97,06%	98,53%	101,51%	Sangat tinggi

Sumber: Bagian Sumber Daya Alam Setdakab, 2022.

Ketercapaian sasaran ini mengalami fluktuatif sejak tahun 2018 sampai tahun 2022. Capaian tahun 2018 sebesar 108,55%, kinerja 2019 mencapai 104,65%, tahun 2020 sebesar 105,45%, dan kinerja tahun 2021 mencapai 101,51%. Mengingat ijin pembangunan jaringan listrik memang membutuhkan proses yang tidak sebentar dan mudah, dibutuhkan izin vertikal sampai ke Kementerian LHK untuk dapat melewati kawasan hutan lindung. Berikut ini adalah grafik capaian kinerja indikator sasaran tahun 2018-2022.



Grafik 7. Target dan Realisasi Indikator Desa yang Dialiri Listrik Tahun 2018-2022

Sumber: Bagian Sumber Daya Alam Setdakab, 2022.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian tahun 2021 belum mencapai target akhir. Secara angka masih diperlukan 1,47% untuk mencapai target akhir RPJMD. Secara kualitas, dua pekon yang belum sama sekali teraliri listrik berpengaruh pada belum optimalnya koneksi jaringan telekomunikasi dan internet ke kedua pekon tersebut. Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika, menara telekomunikasi di Kecamatan Suoh hanya ada 3 yang masing-masing berdiri di Kelurahan Sumber Agung (2 menara) dan Pekon

Sukamarga. Berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 serta target akhir RPJMD.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD
Persentase desa yang dialiri listrik	98,47%	98,53%	100%

Sumber: diolah tim, 2022.

Pelaksanaan, Inovasi, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

a) Desa yang Terhubung dengan Moda Transportasi

Dalam mendukung tercapainya target sasaran strategis kedua, Dinas Perhubungan telah berhasil melebihi target kinerja karena tidak terlepas dari berbagai upaya dan terobosan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Seperti sejak tahun 2020, meski pandemi Covid-19 melanda tetapi pemberian izin trayek untuk moda angkutan antar wilayah masih berjalan. Selain itu, untuk meningkatkan mobilitas antar wilayah, dilakukan juga sosialisasi jaringan trayek baru antar pekon. Sementara untuk menjaga kualitas kendaraan, pelayanan pengujian kir masih terus dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini karena tentu saja untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi. Keamanan dan kenyamanan pengguna kendaraan bermotor ini dijamin dengan pemasangan sistem Bukti Lulus Uji elektornik (BLUe) yang menjadi tanda bahwa kendaraan bermotor sudah diuji kelayakannya, serta terekam ke Kementrian Perhubungan untuk uji kelayakan berkala.



Gambar 4. Beberapa Alat Uji Kelaikan Kendaraan
Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021.

Kelancaran peningkatan moda transportasi sehingga mendukung konektivitas antar wilayah ini beririsan dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan menjadi daya dukung utama moda angkutan dapat berjalan baik. Mengingat bentang alam yang bergelombang dan berbukit-bukit, akan sangat menyulitkan mobilitas masyarakat dan barang jika belum ada infrastruktur jalan yang layak. Dampaknya adalah tidak berkembangnya perekonomian masyarakat, sehingga perkembangan daerah pun akan semakin jauh dari harapan. Pencapaian kinerja yang melebihi target kinerja tahun 2021 ini menyisakan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah. Hal ini karena meski telah mencapai target kinerja tahun 2021, namun secara keseluruhan kinerja baru mencapai 35,87%. Artinya masih ada 64,12% atau 87 pekon yang belum terhubung moda transportasi. Keseriusan pemerintah diwujudkan dengan rencana pembukaan trayek baru Liwa-Sumber Jaya-Kebun Tebu, Liwa-Bandar Negeri Suoh-Suoh, dan Liwa-Pagar Dewa. Usulan pengembangan trayek ini telah diusulkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung (Perum Damri). Selain itu, retribusi izi trayek bagi pemilik angkutan umum juga dihapuskan. Alasannya karena retribusinya tidak signifikan, serta untuk menarik minat pelaku usaha bidang transportasi umum.

Menelaah keterkaitan moda transportasi dengan sasaran strategis lainnya, keterhubungan moda transportasi antar pekon mempengaruhi ketahanan pangan masyarakat. Transportasi yang bukan hanya memindahkan orang, tetapi juga barang termasuk diantaranya kebutuhan pangan masyarakat. Meski memiliki ladang dan pekarangan yang dapat dikelola untuk tanaman pangan, namun tidak semua tanaman pangan cocok ditanam. Sehingga masih diperlukan pasokan pangan yang tidak diproduksi dalam pekon tersebut. Selain mendatangkan kecukupan pangan dalam pekon, transportasi juga membantu membawa hasil tanaman pangan yang berlebihan untuk dijual keluar pekon. Keterhubungan telah membantu masyarakat bertahan dan berhubungan antar pekon.

Kendala menjadi penghambat dalam kesempurnaan pencapaian sasaran, namun kendala juga menjadi pemicu berupaya lebih baik

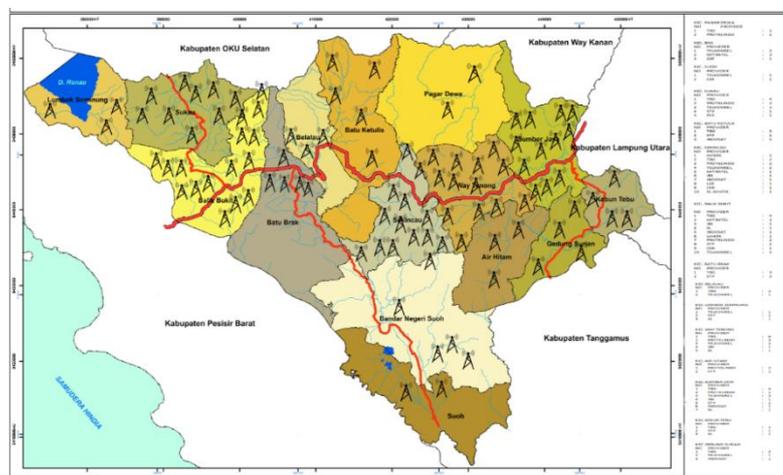
dalam menyediakan moda transportasi angkutan antar pekon. Beberapa kendala yang ditemui dalam proses implementasi program kegiatan adalah:

- 1) Masih kurangnya kualitas sumber daya manusia teknis perhubungan;
- 2) Belum memiliki alat pengujian kendaraan bermotor yang disyaratkan, sehingga alat uji kendaraan bermotor belum terakreditasi sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB). Dampaknya pelayanan pengujian kendaraan bermotor belum optimal;
- 3) Masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan;
- 4) Kurangnya angkutan umum penumpang pedesaan dalam kabupaten;
- 5) Rendahnya minat masyarakat membuka jasa angkutan umum penumpang dalam kabupaten;
- 6) Beralihnya fungsi angkutan pedesaan menjadi kendaraan abudemen untuk pelajar;
- 7) Belum ada perbaikan kualitas pelayanan angkutan pedesaan;
- 8) Belum terlaksana analisis jaringan trayek angkutan pedesaan;
- 9) Masih kurangnya disiplin dan pengetahuan berlalu lintas pengguna jalan;
- 10) Fungsi terminal yang belum optimal.

Beberapa diantara kendala tersebut membutuhkan proses penyelesaian yang berkala, hal ini karena dalam menghadapi kondisi tersebut harus realistis. Mempertimbangkan beberapa faktor pendukung dan penghambat yang terhubung dengan urusan pemerintah lainnya. Beberapa rekomendasi kebijakan untuk mengurai kendala-kendala tersebut diantaranya adalah mengikuti diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), mengajukan kalibrasi alat uji untuk mendapatkan rekomendasi guna mengajukan akreditasi UPUBKB, meningkatkan anggaran pengadaan rambu-rambu lalu lintas, serta meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan usaha bidang angkutan umum.

b) Meningkatkan Layanan Informasi kepada Masyarakat

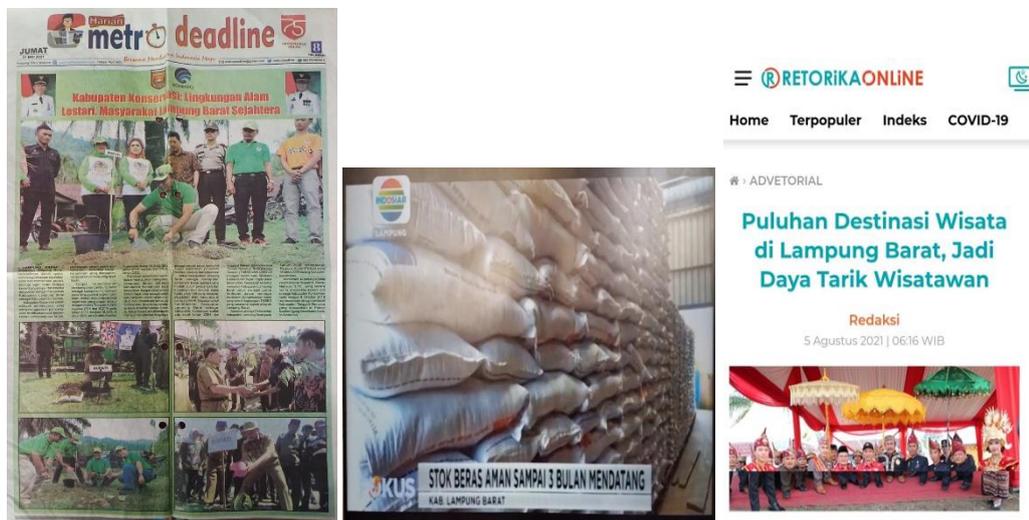
Melalui indikator persentase pemanfaatan KIP dan persentase desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet, sasaran ini berhasil tercapai 124%. Tentu saja kedua indikator ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran. Utamanya dalam implementasi setiap program dan kegiatan tetap mengutamakan kebermanfaatan yang akan dirasakan masyarakat. Komitmen menghubungkan antar wilayah dalam urusan telekomunikasi dan internet diwujudkan dengan keterbukaan informasi seputar Lampung Barat yang dapat diakses dari berbagai media. Selain itu, di masing-masing dari 15 kecamatan telah berdiri menara telekomunikasi dengan jumlah total menara sebanyak 101 menara. Memang tidak setiap kecamatan terdapat menara telekomunikasi semua *provider*, berdampak pada dua pekan *blind spot* yaitu Pekan Batu Api Kecamatan Pagar Dewa dan Pekan Tembelang Kecamatan Bandar Negeri Suoh. Sementara Pekan Ujung Rembun Kecamatan Lumbok Seminung dan Pekan Rigis Jaya Kecamatan Air Hitam masih terdapat beberapa area yang belum terkoneksi sinyal telekomunikasi dan internet.



Gambar 5. Peta Letak Menara Telekomunikasi di Lampung Barat.
Sumber: Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud akuntabilitas pemerintah. Setiap kinerja pemerintah, keberhasilan atau kegagalan, wajib disampaikan kepada publik. Kemajuan digital mengefisiensi waktu dan ruang cukup besar untuk menyampaikan kinerja pemerintah. Maka, pemerintah daerah bertanggungjawab atas

setiap informasi yang akan dikonsumsi publik. Kejujuran pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat akan mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kehati-hatian pemerintah dalam menggunakan digital sebagai alat penyampai informasi publik berlandaskan pada meningkatnya penggunaan internet (Indonesia peringkat ke 8 di dunia) dikalangan masyarakat namun tidak dibarengi dengan kecerdasan dalam penggunaan internet tersebut. Beberapa hasil penelitian ilmiah menerangkan bahwa sebagian besar masyarakat belum menggunakan aspek kecerdasan ketika menggunakan internet. Artinya, setiap informasi yang didapat melalui internet tidak dipilih berdasarkan konten informasi dan korelasi dengan kebutuhan dirinya.



Gambar 6. Keterbukaan Informasi Publik Melalui Surat Kabar Harian, Media Online, dan Liputan Berita.

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021.

Maka tugas pemerintah daerah bukan hanya sampai pada ketersediaan menara telekomunikasi, melainkan juga mencerdaskan masyarakat pengguna internet. Jika dimanfaatkan dengan baik, internet dapat membawa kemajuan besar dalam segala aspek kehidupan. Pemasaran hasil produksi ekonomi, memamerkan wisata daerah, berinovasi dengan belajar lebih banyak kepada daerah lain, beropini, berdiskusi, dan banyak manfaat lainnya. Sebaliknya, internet juga bisa menjadi bumerang ketika tidak digunakan dengan baik. Keterbukaan informasi yang luar biasa di media sosial yang dapat diakses oleh siapapun cukup mengkhawatirkan untuk perkembangan kecerdasan masyarakat. Terlebih, 80% pengguna internet di Indonesia

adalah usia 15-19 tahun. Keberadaan pemerintah mutlak dalam menjamin kesehatan konsumsi informasi masyarakat.

Dalam proses implementasi program dan kegiatan, terjadi beberapa kendala yang ditemukan setelah evaluasi kinerja internal perangkat daerah. Beberapa kendala yang ditemui dalam proses implementasi diantaranya adalah (1) masih belum meratanya pendirian menara telekomunikasi semua *provider* di masing-masing kecamatan; (2) masih ada 2 pekon *blind spot* dan 2 pekon dengan area belum terjangkau jaringan telekomunikasi menunjukkan bahwa keterjangkauan telekomunikasi dan internet di Lampung Barat belum merata. Maka Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk terus meningkatkan konektivitas jaringan telekomunikasi dan internet melalui program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, aplikasi dan informatika, serta penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Tujuan utamanya adalah meratanya jaringan telekomunikasi dan internet untuk melancarkan konektivitas antar wilayah dalam Kabupaten Lampung Barat.

c) Desa yang dialiri Listrik

Indikator sasaran ini ditugaskan implementasinya kepada Bagian Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah. Pemenuhan energi di Kabupaten Lampung Barat menjadi dilema karena bersinggungan dengan masalah kehutanan, kondisi geografis yang bergelombang dan berbukit-bukit menjadi masalah utama. Konstruksi tanah yang labil dan berkelok-kelok serta iklim yang cenderung penghujan menyebabkan jaringan listrik yang terpasang sering rusak. Upaya pemerataan jaringan listrik diseluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat masih dalam proses hingga saat ini. Pembangunan jaringan listrik di Pekon Sidorejo dan Pekon Roworejo telah masuk dalam *roadmap* program listrik perdesaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2019-2029 PT. PLN Persero Unit Induk Distribusi Lampung yang ditetapkan pada tahun 2019. Hasil telaah Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung, permasalahannya terletak pada kebutuhan 80 tiang listrik di Pekon Sidorejo dan 110 tiang listrik di Pekon Rowo Rejo. Selain itu, lokasi

kedua pekon yang berada dalam kawasan hutan lindung register 39 Kota Agung Utara menyebabkan pembangunan jaringan listrik harus berizin Kementerian LHK sesuai Permen LHK Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

PT. PLN Unit Induk Distribusi Lampung juga telah menyampaikan permohonan izin kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung perihal perizinan pembangunan jaringan listrik pedesaan Pekon Rowo Rejo dan Desa Sido Rejo Lampung Barat (Surat Nomor: 1074/REN.00.03/DIST-LAMPUNG/2019). Sementara itu, untuk percepatan dan kelancaran proses pembangunan jaringan listrik, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menyampaikan izin ke Kementerian LHK melalui Surat Bupati Lampung Barat Nomor: 500/313/07/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung untuk Infrastruktur Kelistrikan. Melalui Surat Dirjen Planologi dan Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: S.446/REN/PPKH/PLAO/7/2021 tanggal 16 Juli 2021 perihal Tanggapan atas Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Infrastruktur Kelistrikan di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memperoleh izin penggunaan kawasan hutan lindung untuk pemasangan jalur listrik masuk desa dengan tegangan lebih kecil atau sama dengan 70 KV (Kilo Volt).



Gambar 7. Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Energi dan Air.
Sumber: Bagian Sumber Daya Alam, 2022.

Setelah proses izin pembangunan jaringan dalam kawasan hutan lindung yang panjang tersebut diperoleh pada pertengahan tahun 2021, maka pembangunan jaringan listrik akan dapat berjalan dibawah

koordinasi PT. PLN Persero. Izin pembangunan jaringan listrik yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari koordinasi yang terus dilakukan Pemerintah Lampung Barat kepada pihak-pihak yang terkait dengan perizinan dan pembangunan jaringan listrik untuk Pekon Sido Rejo dan Pekon Rowo Rejo Kecamatan Suoh. Melalui PT. PLN, pembangunan jaringan listrik bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Pemerintah Lampung Barat juga berkoordinasi dengan Ketua Komisi IV DPR RI untuk memperoleh dukungan pemanfaatan hutan lindung untuk infrastruktur kelistrikan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan konektivitas antar wilayah bidang kelistrikan adalah kondisi geografis Lampung Barat yang bergelombang dan berbukit-bukit, tentu saja dilengkapi dengan konstruksi tanah yang tidak stabil membutuhkan sarana prasarana tambahan dalam pembangunan jaringan listrik. Kendala lainnya yang tidak kalah urgen adalah lokasi Lampung Barat yang 60% wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung yang setiap pembangunan yang dibangun didalam atau melewati kawasan hutan lindung harus berizi Kementrian LHK. Proses perizinan dimulai dengan pengajuan telaah ke BPKH hingga dikeluarkannya surat tanggapan Dirjen Planologi dan Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementrian LHK. Rekomendasi yang disarankan untuk mencapai pemerataan keterhubungan jaringan listrik di semua wilayah Lampung Barat dengan meningkatkan koordinasi pembangunan jaringan listrik yang telah sampai pada diperolehnya izin pembangunan jaringan listrik. Selain itu, memasifkan pemanfaatan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik seperti sumber daya air. Meski non PLN, listrik yang memanfaatkan sumber daya alam juga dapat memenuhi kebutuhan ringan masyarakat, serta dapat menjadi cadangan energi masyarakat.

Masing-masing indikator kinerja pada sasaran kedua ini memang diimplementasikan oleh 3 perangkat daerah berbeda. Selain melaksanakan program dan kegiatan yang berdasar pada kebutuhan masyarakat, beberapa inovasi dilakukan untuk mengatasi masalah yang spontanitas terjadi dan dibutuhkan saat tahun pelaksanaan program berjalan. Inovasi menjadi jalan akselerasi pencapaian target kinerja, sehingga yang tercapai bukan

hanya target kinerja tapi juga kepuasan masyarakat atas kinerja yang telah dilakukan. Berikut ini adalah inovasi-inovasi yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis kedua:

- a) Seiring digunakannya BLUe, Dinas Perhubungan akan mengeluarkan *chip* atau *barcode* sebagai identitas kendaraan yang lulus uji kelayakan dan dapat diakses melalui *smart phone* sehingga dimanapun kendaraan itu berada dapat diperiksa dengan mudah;
- b) Memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi dilakukan untuk mendukung terwujudnya *e-government* dengan menciptakan beberapa aplikasi pelayanan. Tujuan inovasi ini agar pelayanan dapat berjalan transparan, meminimalisir pemungutan liar, terbuka, cepat dan tepat. Diantara aplikasi pelayanan yang menjadi inovasi adalah (a) Aplikasi SULE (Surat Layanan Elektronik), adalah aplikasi yang memudahkan mengirim, menerima, memantau dan mendisposisikan surat masuk. Manfaatnya pengarsipan surat menjadi otomatis dan lebih cepat, efisien, serta meningkatkan produktivitas kerja; (b) Aplikasi Covid-19, adalah kanal informasi berbasis web yang berisi data dan informasi penyebaran Covid-19 di Lampung Barat. Manfaat aplikasi ini adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga dapat menjadi sumber data satu pintu yang valid dan dapat dijadikan rujukan; (c) Aplikasi SINETRON (Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian *Online*), bersama dengan BKPSDM, Dinas Kominfo berupaya mempermudah pelayanan administrasi kepegawaian. Aplikasi ini mempermudah pelayanan untuk mengurus kenaikan gaji berkala secara *online*. Aplikasi ini menawarkan efektivitas dan efisiensi sebagai keunggulan; (d) Aplikasi PM-OKE, adalah system aplikasi pelayanan kerjasama media secara *online*. Mengurus, mengusulkan dan menyampaikan proposal kerjasama menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien; (e) Aplikasi BIG DATA, adalah pengembangan system database yang berproses lebih cepat, volume dan jenis data yang tersedia banyak dan bervariasi daripada DBMS (*Database Management System*);
- c) Rencana inovasi yang akan dilakukan tahun selanjutnya adalah menciptakan Aplikasi *Marketplace*, bertujuan memudahkan pelaku usaha (UMKM dan IKM) memasarkan hasil produksinya di wilayah Lampung Barat.

3. Sasaran Strategis 3 Tersedianya Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Capaian Kinerja

Irigasi adalah sistem pengairan ke lahan budidaya. Irigasi erat kaitannya dengan ketahanan pangan, karena secara langsung adanya jaringan irigasi menambah air di lahan pertanian dan mencukupi kebutuhan air saat tidak turun hujan. Secara tidak langsung, jaringan irigasi menunjang usaha pertanian, mengatur suhu tanah, dan meningkatkan kualitas air. Urgensi peran irigasi inilah yang menjadikan pembangunan jaringan irigasi prioritas dalam pembangunan infrastruktur. Meski biasanya masyarakat membangun system pengairan mandiri, namun pemerintah juga menggalakkan pembangunan irigasi untuk memenuhi kebutuhan irigasi masyarakat karena irigasi yang dibangun masyarakat biasanya berukuran kecil dan sederhana. Sementara itu sektor privat biasanya juga membangun irigasi untuk kepentingan produksi usahanya sendiri.

Jaringan irigasi merupakan prasarana vital dalam menentukan keberhasilan tujuan pemerintah dalam mewujudkan bangsa berkedaulatan pangan. Setiap pemerintah daerah berkewajiban mendukung program ketahanan pangan nasional, termasuk Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Dalam mencapai peningkatan kualitas jaringan irigasi, digunakan persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik sebagai indikator kinerja. Berdasarkan SK Menteri PUPR Nomor 239 Tahun 2014 tentang Status Daerah Irigasi (DI), DI di Kabupaten Lampung Barat berjumlah 118 dengan luas sawah 11.442,51 Ha. Realisasi peningkatan kualitas jaringan irigasi di Lampung Barat tahun 2021 adalah 56%, tercapai 100% dari target kinerja. Berikut ini adalah cara perhitungan capaian indikator kinerja peningkatan kualitas jaringan irigasi.

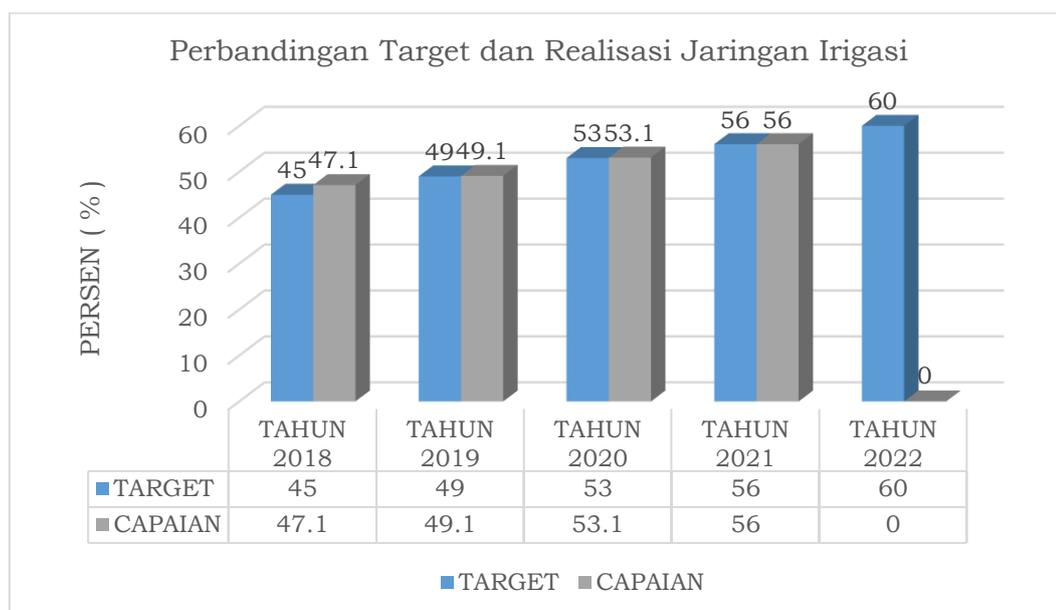
Tabel 18. Cara Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kondisi baik}}{\text{Luas irigasi Lambar}} \times 100\%$	56%	56%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Dinas PUPR Lampung Barat Tahun 2021.

Seluas 6.407,8 Ha (56%) irigasi dalam kondisi baik, dibandingkan dengan total luas irigasi di Lampung Barat menghasilkan realisasi kinerja sebesar 56%. Jaringan irigasi dengan kondisi sedang sepanjang 2.056,60 Ha

(17,97%), sementara jaringan irigasi dalam kondisi rusak masih sepanjang 2.978,22 Ha (18,12). Capaian kinerja tahun 2021 ini menurun 0,18 poin dari tahun 2020. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, kinerja tahun 2021 telah membawa capaian sebesar 93,3%. Suplai air bendungan merupakan salah satu program strategis nasional di bidang sumber daya air, harapannya dapat membantu petani padi meningkatkan intensitas tanamnya, jika dibandingkan dengan metode tadah hujan. Selain pembangunan irigasi bendungan yang dilakukan Kementerian PUPR di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat juga terus mengelola sistem pengairan wilayah. Tahun 2021 telah dibangun bendungan Way Haru di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, dan beberapa pembangunan irigasi sawah di beberapa lokasi dengan total panjang 6.407,8 Ha. Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi jaringan irigasi dalam kondisi baik tahun 2018-2022.



Grafik 8. Perbandingan Target dan Realisasi Jaringan Irigasi Tahun 2018-2022
Sumber: Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021.

Pelaksanaan, Permasalahan, Rekomendasi Kebijakan

Sejak jaman kolonial, irigasi merupakan strategi pemanfaatan lahan untuk dikelola menjadi sektor pertanian yang akan mampu menghasilkan banyak jenis tanaman pokok pemenuhan pangan masyarakat. Sampai dengan fase keempat sejak sistem irigasi digunakan, tantangan utama perkembangan pemerintahan adalah mengatasi kesenjangan yang semakin besar antara permintaan sumber daya alam (lahan dan air) yang diperlukan

untuk mendukung produksi pangan dan ketersediaannya. Maka sejak saat itu program peningkatan kualitas irigasi menjadi prioritas pemerintah. Implementasi program dan kegiatan dalam rangka menyediakan jaringan irigasi dalam kondisi baik terdiri dari pembangunan *seawall* dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dengan target pembangunan di 1 lokasi dengan realisasi penuh, rehabilitasi cek dam parit pada 2 lokasi, normalisasi/ restorasi sungai di 9 lokasi, menyusun rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa, pembangunan jaringan irigasi rawa seluas 8 Ha, peningkatan jaringan irigasi permukaan seluas 51 Ha, rehabilitasi jaringan irigasi permukaan pada 18 lokasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 633 Ha.

Jenis irigasi yang di bangun di Lampung Barat adalah jenis irigasi permukaan, yaitu teknik mengambil air dari sumbernya, biasanya sungai, menggunakan bangunan berupa bendung atau pengambilan bebas. Air kemudian disalurkan ke lahan pertanian memanfaatkan daya gravitasi. Jenis irigasi ini dipilih karena banyaknya sumber daya air yang bisa dimanfaatkan di hampir seluruh wilayah di Lampung Barat. Total ada 38 sungai yang tercatat menjadi sumber kehidupan masyarakat dan dipantau kualitasnya. Seperti dasar pembangunan irigasi nasional, pembangunan irigasi di wilayah-wilayah di Lampung Barat adalah juga mendukung optimalisasi pengelolaan sektor pertanian. Pengairan lahan pertanian membantu memberantas hama, mengatur suhu tanah, membersihkan tanah, dan mempertinggi permukaan air tanah. Banyaknya manfaat pengairan bagi pertanian, terutama padi, membuat pemerintah memprioritaskan ketersediaan irigasi yang berfungsi baik dengan memanfaatkan sumber daya air yang ada.

Klasifikasi jaringan irigasi yang digunakan di Lampung Barat adalah jaringan irigasi teknis, yaitu memisahkan saluran pembawa (yang mengalirkan air ke sawah) dan saluran pembuang (mengalirkan kelebihan air sawah ke saluran pembuang) agar masing-masing saluran dapat berfungsi optimal. Panjang jaringan irigasi teknis yang sudah dibangun dan berfungsi dengan baik sampai dengan tahun 2021 adalah 126.371 meter, telah membantu mengairi daerah seluas 11.442,51 Ha. Sementara luas sawah beririgasi non teknis adalah 5.425,2 Ha. Dari total 118 unit bangunan, ada beberapa jenis irigasi yang dibangun di Lampung Barat,

diantaranya bendung, *intake*, *sand trap*, bangunan ukur, bangunan bagisadap, bangunan talang, bangunan *shipon*, bangunan *culvert*, bangunan terjun, *washing step*, *boks tersier*, dan jembatan. Jenis-jenis irigasi ini dipilih menyesuaikan kontur tanah yang bergelombang dan kebutuhan lahan pertanian masing-masing wilayah. Saluran irigasi primer sampai dengan tahun 2021 sebagian besarnya sudah dalam kondisi baik, sepanjang 70.368 meter. Sementara lainnya dalam kondisi sedang sepanjang 18.752,50 meter, kondisi rusak ringan sepanjang 10.097,50 meter, dan kondisi rusak berat sepanjang 27.153 meter.



Gambar 8. Salah Satu Jenis Bangunan Irigasi Permukaan dalam Kondisi Sesudah dan Sebelum Pembangunan

Sumber: Laporan Kinerja Dinas PUPR Lampung Barat Tahun 2021.

Kondisi irigasi yang beraneka ragam tersebut berpengaruh pada kualitas hasil produksi sektor pertanian. Pada tahun 2021, hasil produksi padi di Lampung Barat sebanyak 108.721 ton dari target 128.478 ton atau terealisasi sebesar 85%. Hasil produksi ini mengalami penurunan 130.206 ton dibandingkan tahun 2020. Penurunan ini diakibatkan oleh alih fungsi lahan pertanian, ditambah kondisi petani yang belum semuanya bisa melaksanakan tanam hingga 3 kali setahun. Maka pada tahun 2021 pemerintah mengencarkan pembangunan bendungan Way Haru di Kecamatan Bandar Negeri Suoh yang fungsinya menampung air hujan yang sering menyebabkan banjir menjadi dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian. Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh merupakan penghasil terbanyak produksi padi dalam daerah karena lokasinya yang paling menguntungkan, maka pembangunan bendungan Way Haru yang mampu mengairi 500 Ha lahan pertanian ini diharapkan dapat mengoptimalkan produksi padi. Sehingga kinerja Dinas PUPR untuk meningkatkan kualitas

irigasi berdampak pada ketahanan pangan masyarakat yang merupakan kinerja Dinas Ketahanan Pangan.



Gambar 9. Kondisi Sebelum dan Sesudah Irigasi Jenis Bendungan Way Haru
Sumber: Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021.

Berada dalam daerah yang bercurah hujan tinggi membuat urgensi irigasi bukan untuk pengairan lahan pertanian saja, tapi juga untuk menanggulangi banjir. Keberadaan irigasi yang berfungsi baik akan mampu menampung air hujan dan mengalirkannya sehingga dapat dimanfaatkan. Kontur tanah yang labil juga menyebabkan irigasi dan infrastruktur lainnya rawan rusak akibat bencana alam. Sehingga upaya peningkatan kualitas irigasi bukan hanya soal pembangunan irigasi baru, tetapi juga perawatan dan perbaikan irigasi agar dapat berfungsi dengan baik. Peningkatan kualitas irigasi yang menjadi tanggungjawan Dinas PUPR ini berdampak pada penanggulangan bencana yang menjadi tugas BPBD, tepatnya pada proses mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian peningkatan kualitas irigasi adalah karena pemahaman yang baik terhadap tugas dan fungsi serta kerjasama yang baik antar perangkat daerah.

4. Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Perumahan yang Memenuhi Standar Kelayakan dan Kesehatan

Capaian Kinerja

a) Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni, dimana konstruksi bangunan tidak handal, luas tidak sesuai standar per orang dan tidak menyehatkan bagi penghuninya dan atau membahayakan bagi penghuninya. Rumah tidak layak huni yang dihuni oleh masyarakat ini adalah dampak dari masalah

ekonomi berkepanjangan, pengangguran dan pendapatan masyarakat yang masih rendah. Sehingga mereka yang dalam kondisi tersebut mencari tempat tinggal atau membangun dengan kemampuan seadanya sehingga tumbuh dan berkembang rumah-rumah tidak layak huni atau kumuh. Pemerintah Lampung Barat menyadari fungsinya sebagai Pembina, pengawas dan pengendali pembangunan perumahan, sehingga secara berkelanjutan melakukan penanganan terhadap rumah tidak layak huni. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas hidup sehat masyarakat.

Pada tahun 2021, pemerintah menargetkan penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 47,40% dari total rumah tidak layak huni. Jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun oleh pemerintah menjadi rumah layak huni tahun 2021 berjumlah 246 unit, 143 unit implementasi anggaran Dinas PUPR Lampung Barat dan 103 unit lainnya merupakan implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sehingga jumlah total rumah layak huni sampai dengan tahun 2021 adalah 83.410 unit yang artinya menyisakan 6.294 unit rumah tidak layak huni. Jumlah penanganan rumah tidak layak huni Lampung Barat tersebut melebihi jumlah penanganan rumah tidak layak huni Kota Bandar Lampung di tahun yang sama, berjumlah 105 unit. Sementara jumlah rumah layak huni yang dibangun pemerintah Provinsi Lampung menggunakan APBDP sebanyak 131 unit.

Penanganan rumah tidak layak huni tidak hanya dilakukan pada perbaikan fisik konstruksi bangunan sehingga memenuhi standar saja, tetapi juga pada penanganan sanitasi, penanganan limpasan air, penggunaan air bersih dan perbaikan kondisi jalan lingkungan. Keempat hal ini menjadi indikator perumahan layak dan sehat. Rumah layak huni adalah rumah yang disyaratkan memiliki kualitas pada prasarana sarana dan utilitas permukiman. Pada tahun 2021, 3 dari 4 aspek indikator sasaran persentase rumah sehat telah tercapai rata-rata diatas 100%. Jumlah rumah dengan sanitasi layak tercapai 108,48%, jumlah rumah tangga pengguna air bersih tercapai 100%, jumlah lokasi limpasan air yang tertangani tercapai 105,51%, dan panjang jalan lingkungan dengan kondisi baik tercapai 99,46%. Angka capaian tersebut menunjukkan 83.410 unit rumah layak huni memang benar layak huni

dengan terpenuhi kategori layak huni tersebut. Capaian indikator kinerja ini mengalami fluktuasi sejak tahun 2018, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan indikator kinerja tersebut. Seperti kondisi sosial politik dan pendanaan. Berikut ini cara pengukuran capaian indicator kinerja kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman.

Tabel 19. Cara Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah rumah dengan sanitasi layak	$\frac{\text{Jmlh rumah tangga dgn sanitasi layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	90,82%	98,52%	108,48%
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	85,75%	85,75%	100%
Jumlah lokasi limpasan air yang tertangani	$\frac{\text{Lokasi limpasan air tertangani}}{\text{Jumlah seluruh lokasi limpasan}} \times 100\%$	95%	100,23%	105,51%
Panjang jalan lingkungan dengan kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan lingkungan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan lingkungan seluruhnya}} \times 100\%$	59%	58,68%	99,46%

Sumber: Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021.

Berdasarkan cara perhitungan masing-masing indikator kinerja tersebut diperoleh realisasi persentase penanganan rumah tidak layak huni sebesar 85,80% dari target 47,40%. Sehingga capaian penanganan rumah tidak layak huni Lampung Barat tahun 2021 adalah 181%. Capaian ini menurun 41,14% dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Sementara jika dibandingkan realisasi tahun 2021 dengan target akhir RPJMD, capaiannya sudah sebesar 147,6%. Berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021 serta target akhir RPJMD.

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD
Persentase penanganan rumah tidak layak huni	82,19%	85,80%	58,13%

Sumber: diolah tim, 2022.

b) Persentase Perumahan Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Jumlah rumah di Lampung Barat per tahun 2021 adalah 89.704 unit yang ditargetkan layak huni sebanyak 95,22%. Target tersebut berhasil di realisasikan sebesar 98,58%, mencapai kinerja 103,52% atau meningkat 4,53% dari capaian tahun 2020. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2022, capaiannya sudah mencapai 102,47%. Berikut ini adalah cara perhitungan capaian indikator kinerja rumah layak huni.

Tabel 21. Cara Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rumah Layak Huni Tahun 2021

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perumahan layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah rumah di Lambar}} \times 100\%$	95,22%	98,58%	103,52%

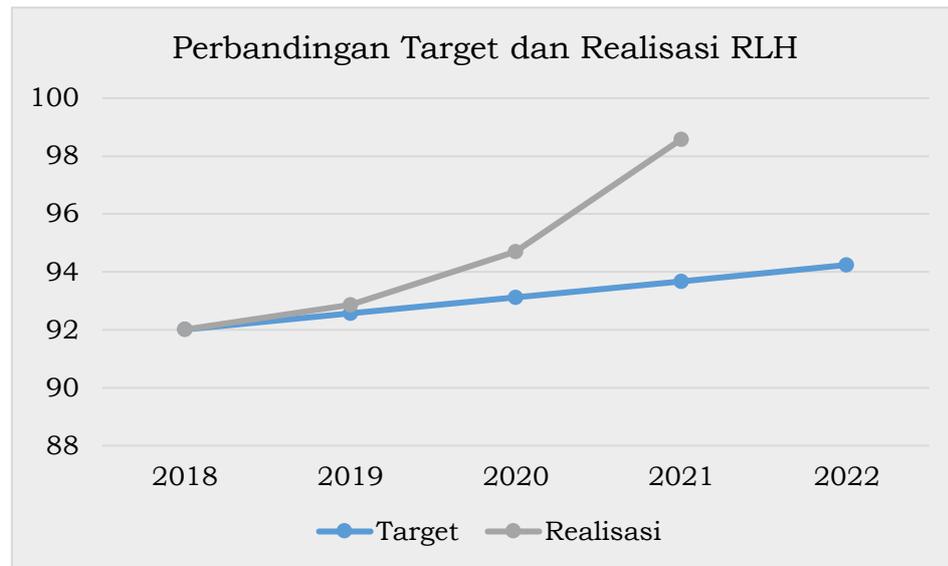
Sumber: Laporan Kinerja Dinas PUPR Lampung Barat Tahun 2021.

Berdasarkan cara perhitungan capaian indikator tersebut, selanjutnya dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021 serta target akhir RPJMD tahun 2022.

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD
Persentase perumahan layak huni	94,70%	98,58%	96,20%

Sebanyak 83.410 unit rumah layak huni dibandingkan dengan jumlah total rumah di Lampung Barat sebanyak 89.704 unit menghasilkan realisasi 98,58%. Berikut ini adalah perbandingan target dan capaian indikator kinerja rumah layak huni.



Grafik 9. Perbandingan Target dan Realisasi Rumah Layak Huni Tahun 2018-2022

Sumber: Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Total ada 2.647 unit rumah yang telah terbangun dan layak huni sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dari luas perumahan dan permukiman 5.696,10 Ha dan banyak rumah 89.704 unit, maka luas perumahan dan permukiman per unit adalah 0,063 Ha. Pada tahun 2021 Jumlah rumah Kabupaten Lampung Barat dari total 89.704 Unit Rumah. Rumah Layak Huni (RLH) 83.410 Unit (98,58 %), dan Kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah dibangun sebanyak 246 unit jadi jumlah RTLH yang tersisa menjadi 6.294 Unit (1,42%).

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

a) Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni memberi dampak social dan ekonomi. Rumah tidak layak huni mempunyai dampak langsung dan tidak langsung secara fisik atau non fisik kepada penghuni. Dampak terhadap fisik penghuni RTLH karena kurang mampu memberi perlindungan dari panas dan hujan serta bahaya konstruksi, adalah masalah kesehatan dan ancaman bencana , dan dampak terhadap non fisik adalah kecemasan yang berkepanjangan. Dampak secara fisik rumah tidak layak huni karena kecukupan luas ruang (sempit) adalah khususnya pertumbuhan bagi anak- anak dan keleluasaan bergerak bagi orang dewasa dan dampak secara non fisik membuat penghuni tidak betah tinggal didalam rumah (anak remaja keluyuran atau banyak di jalanan).

Dampak fisik rumah tidak layak huni karena kurang pencahayaan dan penghawaan adalah pada kesehatan, mudah sakit, mudah lelah dan tidak produktif dan dampak non fisik membuat penghuninya kurang/tidak betah tinggal didalam rumah. Dampak Rumah tidak layak huni terhadap penghuni karena sistim limbah yang tidak baik atau tidak ada dan ketersediaan air bersih yang cukup adalah kesehatan penghuni.

Secara ekonomi, karena kurang produktif maka penghuni RTLH pendapatannya relatif kecil baik sebagai penyedia jasa atau sebagai wiraswasta, dampak ikutannya mereka terjebak dalam lingkaran “setan” kemiskinan yang menerus.

Wilayah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak di Kabupaten Lampung Barat adalah Kecamatan Balik Bukit (681 unit) dan Kecamatan Suoh (624 unit), sementara jumlah rumah layak huni terbanyak ada di Kecamatan Balik Bukit (9.980 unit) dan Kecamatan Way Tenong (9.639 unit). Posisi Kecamatan Balik Bukit yang memiliki jumlah RLH dan RTLH terbanyak diantara 15 kecamatan lainnya disebabkan oleh jumlah rumah di Kecamatan Balik Bukit yang memang terbanyak diantara 15 kecamatan lainnya (10.661 unit). Meski secara persentase selisih perwujudan rumah layak huni hanya kurang 1,42%, namun secara angka masih ada 6.294 unit rumah tidak layak huni yang perlu kerjasama pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta pihak ketiga dan masyarakat itu sendiri untuk mampu mewujudkan rumah layak huni. Pihak ketiga dalam hal ini adalah akademisi yang rutin melakukan kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, termasuk faktor-faktor penyebab kemiskinan masyarakat. Hasil penelitian ilmiah ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan peningkatan rumah layak huni. Rekomendasi yang bisa disampaikan untuk meningkatkan rumah layak huni di tahun mendatang adalah optimalisasi implementasi peningkatan rumah layak huni baik target kinerja yang bersumber dari pendanaan Lampung Barat atau yang bersumber dari pendanaan APBD Provinsi Lampung.

Permukiman sehat adalah suatu tempat untuk tinggal secara permanen, berfungsi sebagai tempat untuk bermukim, beristirahat, berekreasi dan tempat berlindung dari pengaruh lingkungan yang

memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis, bebas dari penularan penyakit dan kecelakaan. Sementara prasarana lingkungan permukiman adalah pelengkap dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana utama meliputi sanitasi layak, penggunaan air bersih, penanganan limpasan air, jaringan jalan, jaringan pembuangan air limbah, dan sebagainya. Prasarana sarana dan utilitas permukiman menjadikan perumahan sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.

Ada sebanyak 84.030 total rumah tangga di Lampung Barat sampai dengan tahun 2021, ditargetkan bersanitasi layak sebanyak 90,82%. Melalui pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan air limbah domestik, realisasi sanitasi layak tahun 2021 mencapai 98,52% atau tercapai 108,44%. Meningkatkan 1,48% dari tahun 2020, membandingkannya dengan target akhir RPJMD tercapai 106,73%. Sanitasi menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kesehatan, nutrisi, dan produktivitas masyarakat. Hasil survei UNICEF tahun 2017 di Yogyakarta menemukan 89% sumber air dan 67% air minum rumah tangga terkontaminasi bakteri tinja, sementara di Indonesia hanya 7% air limbah yang telah diolah. Kondisi ini menjadi pelajaran untuk pemerintah dan masyarakat Lampung Barat untuk lebih memperhatikan sanitasi. Melalui konstruksi jalan lingkungan yang mampu menyaring sampah, pemerintah berupaya memelihara sanitasi. Selain itu, sanitasi yang sesuai standar juga merupakan fasilitas dalam program rumah layak huni. Sehingga pembangunan rumah layak huni otomatis berdampak pada meningkatkan sanitasi dan kualitas air bersih. Target penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah 100%, sehingga upaya-upaya yang mendukung pemenuhan kebutuhan air minum terus diupayakan.

Rumah tangga di 14 kecamatan telah 100% mampu mengakses sanitasi layak per tahun 2021, kecuali Kecamatan Gedung Surian yang masih 24% masyarakat yang mampu mengakses sanitasi layak. Sebanyak 5.662 rumah tangga di Kecamatan Balik Bukit telah 100% memiliki akses sanitasi layak, 5.177 rumah tangga Sukau 100%, 3.827 rumah tangga Lumbok Seminung 100%, 7.641 rumah tangga Belalau

100%, 6.246 rumah tangga Sekincau 100%, 5.026 rumah tangga Suoh 100%, 7.580 rumah tangga Batu Brak 100%, 4.867 rumah tangga Pagar Dewa 100%, 8.078 rumah tangga Batu Ketulis 100%, 5.169 rumah tangga Bandar Negeri Suoh 100%, 4.214 rumah tangga Sumber Jaya 100%, 3.434 rumah tangga Way Tenong 100%, 2.205 rumah tangga Gedung Surian 24% dari total rumah tangga 9.188 unit, 5.765 rumah tangga Kebun Tebu 100%, 2.156 rumah tangga Air Hitam 100%.

Sementara pengelolaan limbah domestik sebagai parameter sanitasi layak, juga terealisasi 100% dari target. Hal ini berarti bahwa seluruh rumah tangga telah memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik. Limbah domestik yang dapat menimbulkan perubahan warna sungai dan terkadang menimbulkan bau tidak sedap atau busuk, penumpukan limbah menyebabkan tersumbatnya aliran sungai sehingga terjadi banjir dan berkembangnya nyamuk dan lalat. Sehingga penyediaan pelayanan pengolahan limbah domestik akan sangat berdampak pada kualitas lingkungan hidup masyarakat yang menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup, dampak jangka panjangnya adalah kualitas kesehatan masyarakat.

Air adalah salah satu elemen utama di bumi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain untuk konsumsi minum, air bersih juga digunakan untuk menunjang kehidupan seperti kebutuhan rumah tangga lainnya seperti mandi dan cuci, memasak dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan mandi dan mencuci adalah aktivitas dengan pemakaian air terbesar. Sebanyak 72.055 rumah tangga dari total 80.030 rumah tangga di Lampung Barat telah menggunakan air bersih. Realisasi rumah tangga pengguna air bersih sebesar 85,75%, capaian 100%. Realisasi lebih besar 2% dari realisasi tahun 2020 dan telah mencapai 97,72% dibandingkan dengan target akhir RPJMD (87,75%). Standar pelayanan minimum penyediaan kebutuhan pokok air bersih adalah 100%, artinya semua rumah tangga harus terpenuhi kebutuhan air bersihnya, namun penyediaan kebutuhan air bersih tidak selalu mudah. Meski hampir semua wilayah di Lampung Barat memiliki sumber mata air murni yang bersih, namun harus tetap dikelola agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Biaya pembangunan dan rekonstruksi yang tidak murah kadang menjadi

kendala konstruksi pengelolaan air bersih. Sehingga dalam implementasinya, konstruksi penyediaan air bersih dilakukan bertahap dan berkelanjutan. Rumah tangga yang mampu mengakses penggunaan air bersih terbanyak di tahun 2021 ada di Kecamatan Air Hitam yang 98,79% masyarakatnya telah menggunakan air bersih untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Sementara rumah tangga yang menempati posisi terendah penggunaan air bersih ada di Kecamatan Batu Ketulis, sebesar 71,80%.



Gambar 10. Reservoir Air Bersih Pajar Agung Sebelum dan Sesudah Pembangunan
Sumber: Laporan Kinerja Dinas PUPR Lampung Barat Tahun 2021.

Air bersih adalah salah satu bentuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) karena air bersih mempengaruhi kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Urgensi air minum adalah untuk menjaga kesehatan tubuh, melarutkan nutrisi, oksigen dan hormon ke seluruh sel tubuh. Ketiadaan air minum yang bersih akan menyebabkan penurunan kesehatan masyarakat karena air yang kotor membawa banyak parasit dan bakteri patogen yang akan menyebabkan timbulnya penyakit. Selain itu, air yang kotor juga mengandung pH yang lebih tinggi dari 8,5 yang berarti tercemar bahan kimia dan logam berat. Maka menyediakan air minum yang bersih menjadi pelayanan wajib pemerintah kepada masyarakat agar terjamin pemenuhan kebutuhan air minum. Penggunaan air bersih akan menghindarkan warga dari penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacangan, penyakit kulit hingga keracunan. Kondisi yang mengkhawatirkan saat ini adalah berkurangnya air bersih. Hal ini karena pencemaran limbah, area resapan air yang sedikit, banyaknya pembalakan liar dan sebagainya. Maka sanitasi dan air bersih merupakan bagian yang saling berkesinambungan. Air bersih akan didapat melalui sanitasi yang baik.

Prasarana sarana dan utilitas permukiman lainnya selain sanitasi layak dan penggunaan air bersih, ada prasarana ketiga yang menjadi parameter pemenuhan utilitas permukiman, yaitu penanganan limpasan air. Limpasan air permukaan atau air larian yang tidak tertangani akan menyebabkan genangan di darat atau banjir. Limpasan yang menyebabkan banjir adalah ketika jumlah curah hujan yang melampaui infiltrasi air kedalam tanah. Mengingat Kabupaten Lampung Barat adalah wilayah dengan cuaca yang cenderung penghujan, hal ini tentu saja berpengaruh terhadap jumlah curah air hujan ke permukaan. Intensitas curah hujan dan lamanya curah hujan menjadi penyebab utama kemungkinan terjadinya banjir. Oleh karena hal tersebut, pemerintah Lampung Barat melalui Dinas PUPR berupaya mendistribusikan curah hujan lebat ke daerah dengan curah hujan sedang dan rendah. Distribusi ini dilakukan dengan membangun drainase di tempat-tempat yang menjadi limpasan air.

Lokasi limpasan air yang ada di wilayah Lampung Barat berjumlah 21 titik. Lokasi ini ditargetkan dapat tertangani 95% di tahun 2021, namun realisasinya justru mencapai 100,23% atau sebanyak 22 lokasi limpasan air telah tertangani. Capaian ini meningkat 5% dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Pemerintah bahkan telah menambah 1 lokasi limpasan air baru untuk mengoptimalkan penanganan limpasan air. Drainase adalah solusi paling tepat untuk menangani limpasan air. Kemampuannya menyerap dan mengalirkan air sangat cocok untuk membantu mendistribusikan curah hujan yang berlebih. Selain itu, distribusi aliran dalam drainase ini mengikuti kontur jalan, sehingga air permukaan lebih mudah mengalir secara gravitasi.



Gambar 11. Drainase SMP 1 Liwa sebagai Sampel Penanganan Limplanan Air
Sumber: Laporan Kinerja Dinas PUPR Lampung Barat Tahun 2021

Terkahir, parameter prasarana permukiman yang layak adalah jalan lingkungan kondisi baik. Berdasarkan SK Bupati Nomor B/273/KPTS/II.08/2013 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Desa, panjang jalan lingkungan di Lampung Barat adalah 382,47 Km. Target jalan lingkungan kondisi baik tahun 2021 adalah 59%, terealisasi 58,68% dengan capaian 99,45% atau sepanjang 224.433 meter. Capaian ini meningkat 2,65% dari tahun 2020, sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaiannya sebesar 94,64%. Maka sisa panjang jalan lingkungan berada dalam kondisi sedang (26,91 Km), kondisi rusak ringan (28,1 Km), dan rusak berat (103,007 Km). Pembangunan jalan lingkungan menjadi kondisi baik ini akan terus berlanjut sampai tidak ada lagi jalan dalam kondisi rusak berat. Hal ini karena meski capaian kinerja sebesar 99,45%, nyatanya panjang jalan dengan kondisi rusak berat lebih banyak dibandingkan panjang jalan dengan kondisi baik. Pemerintah menyadari bahwa pemerataan jalan lingkungan dalam kondisi baik membutuhkan waktu yang tidak cukup satu tahun, maka pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki jalan lingkungan secara berkelanjutan.



Gambar 12. Ruas Jalan Lingkungan di Kelurahan Pasar Liwa dalam Kondisi Sebelum dan Sesudah Pembangunan
Sumber: Laporan Kinerja Dinas PUPR Lampung Barat Tahun 2021.

b) Persentase Perumahan Layak Huni

Papan merupakan salah satu dari 3 serangkai kebutuhan pokok kehidupan manusia, selain sandang dan pangan. Sehingga pemenuhan rumah layak huni harus dipenuhi karena merupakan hak dasar manusia. Papan yang dimaksud tentu saja adalah rumah layak huni, yang karenanya masyarakat dapat merasa aman dan nyaman. Dampak yang diharapkan dari rumah layak huni adalah kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan rumah layak huni memberikan pengaruh positif pada psikologis dan kesehatan rumah tangga. Kondisi ini akan mempengaruhi peningkatan produktivitas rumah tangga, yang akan berdampak pada meningkatnya pendapatan secara berkelanjutan sehingga mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Masyarakat yang ekonominya sudah mampu dan terpenuhi, maka akan cenderung sadar untuk menjaga kualitas rumah dan lingkungan sekitarnya meningkat. Sehingga penurunan kualitas lingkungan perumahan di masa yang akan datang dapat diminimalisir. Faktor ekonomi menjadi alasan rumah tangga tidak mampu mewujudkan rumah yang layak huni. Sektor ekonomi juga menjadi satu bagian yang paling terdampak secara positif dari terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat.

Beberapa aspek yang dapat dilihat sebagai hasil pembangunan rumah tidak layak huni adalah pertama, aspek fisik yang artinya siapapun dapat melihat perubahan rumah yang layak huni. Kedua, aspek psikis, perasaan aman, nyaman dan tenang dirasakan keluarga penerima manfaat. Ketiga, aspek sosial sebagai aspek yang mengeratkan

hubungan antar anggota keluarga dan dengan tetangga keluarga penerima manfaat. Salah satu dari 2 jenis program pembangunan rumah layak huni adalah BSPS yang teknis pembangunannya dilakukan swadaya oleh keluarga dan tetangga sekitar rumah keluarga penerima manfaat. Interaksi yang terjalin intens selama proses pembangunan telah menciptakan banyak norma sosial seperti rasa gotong royong, jiwa sosial untuk saling membantu jelas terbentuk dalam proses ini.

Selain berdampak pada peningkatan ekonomi warga secara berkelanjutan, rumah layak huni juga berdampak pada terpeliharanya kesehatan warga. Rumah layak huni dengan standar sanitasi meningkatkan pola hidup sehat yang berlangsung sehari-hari. Debu dari lantai beralas tanah akan mengganggu pernafasan, genting bocor akan menyebabkan genangan air yang digemarin nyamuk, maka hunian yang layak telah meningkatkan derajat kesehatan warga penerima manfaat. Maka peningkatan persentase rumah layak huni telah berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat yang ada dibawah kendali tanggungjawab Dinas Kesehatan.

Konstruksi hunian sangat berpengaruh terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari bencana alam yang terjadi. Maka pembangunan rumah dan atau bangunan lainnya yang memenuhi standar kelayakan akan membantu mencegah terjadinya kerusakan berat jika terjadi bencana alam. Mengingat konstruksi tanah di Lampung Barat yang labil, pengendalian ijin pembangunan menjadi bagian penting untuk menjamin kelayakan bangunan baik yang menjadi program bantuan pemerintah atau pembangunan mandiri oleh masyarakat. Pembangunan perumahan harus dikendalikan agar tetap berada pada rencana tata ruang wilayah yang tidak mengurangi kebutuhan tutupan lahan daerah. Selain konstruksi bangunan yang handal, ciri lain dari rumah layak huni adalah standar luasan ruang per orang, pencahayaan alami yang mencukupi, ventilasi yang baik untuk kecukupan penghawaan, bangunan rumah terletak di posisi yang aman, ketersediaan air bersih, dan sanitasi yang layak.



Gambar 13. Salah Satu Contoh Kondisi Unit Sebelum dan Sesudah Pembangunan Rumah Layak Huni
Sumber: Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021.

Dalam mewujudkan perumahan layak huni, Dinas PUPR bersama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan memiliki irisan kerja yang akan berdampak pada perwujudan perumahan layak huni. Jika Dinas PUPR bertanggungjawab atas perubahan fisik berupa pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni, maka Dinas Sosial bertanggungjawab atas pengamanan jaringan dan struktur social yang mendukung masyarakat mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Sementara Dinas Kesehatan bertanggungjawab terhadap sanitasi dan kebersihan air yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan program peningkatan kualitas rumah layak huni ini adalah: pertama, pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menentukan tujuan meningkatkan kualitas perumahan dengan sasaran peningkatan kualitas perumahan dan peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman; kedua, ketersediaan sumber daya pendanaan dan sumber daya manusia. Pendanaan implementasi sasaran strategis ini adalah bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat dan Kementerian PUPR melalui program BSPS. Sementara sumber daya manusia adalah aparatur Dinas PUPR, pemerintah kecamatan dan kerabat serta tetangga dari keluarga penerima manfaat; ketiga, koordinasi yang baik dan dukungan antar pihak yang terlibat dalam implementasi peningkatan rumah layak huni; keempat, lingkungan sosial yang kondusif akan membantu proses pelaksanaan pembangunan rumah layak huni.

Sasaran strategis meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan memiliki 2 indikator yaitu persentase penanganan rumah tidak layak huni yang dalam pencapaiannya dilihat dari 4 aspek. Keempat aspek itu adalah jumlah rumah dengan sanitasi layak (98,52%), jumlah rumah tangga pengguna air bersih (85,75%), jumlah lokasi limpasan air yang tertangani (100,23%), dan panjang jalan lingkungan dengan kondisi baik (58,68%). Maka rata-rata keempat aspek tersebut menghasilkan realisasi indikator persentase penanganan rumah tidak layak huni adalah 85,80% atau capaian kinerjanya sebesar 181%. Indikator kedua adalah persentase perumahan layak huni capaian kinerjanya mencapai 103,52%. Faktor penghambat yang mempengaruhi capaian permukiman sehat, khususnya pada kegiatan pembangunan jalan lingkungan dalam kondisi baik, adalah kurangnya anggaran kegiatan yang direncanakan diawal penyusunan renstra perangkat daerah. Maka rekomendasi kebijakan untuk tahun selanjutnya adalah menambah anggaran kegiatan.

5. Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian Kinerja

Lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap warga negara, diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1. Pengelolaan urusan lingkungan hidup menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kualitas lingkungan hidup akan berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga kebijakan yang mendukung perbaikan kualitas lingkungan hidup perlu kesungguhan dan konsistensi dari seluruh pihak. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup tercermin pada kualitas air, udara dan lahan/hutan dan didukung dengan kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat. Maka digunakan indeks untuk mereduksi banyak data dan informasi dari ketiga sektor kualitas lingkungan hidup tersebut.

Realisasi kinerja sasaran kualitas lingkungan hidup Lampung Barat tahun 2021 adalah sebesar 65,99 poin atau tercapai 103,8%. Capaian

kinerja ini menggunakan Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang memformulasikan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Ketiga indikator IKLH tersebut didapat dari 2 indikator sasaran yaitu meningkatnya pengelolaan dan penataan ruang terbuka yang tercapai 100%, dan meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tercapai 63%. Berikut ini adalah cara perhitungan capaian kinerja sasaran strategis.

Tabel 23. Cara Perhitungan Capaian IKLH

Indikator	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	Predikat
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$(IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKL \times 30\%)$	63,57 poin	65,99 poin	103,8%

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Kualitas air di Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 mencapai angka 60, kualitas udara masih sangat baik yaitu mencapai 84,73, sementara tutupan lahan mencapai nilai 41,63. Berdasarkan nilai indeks ketiga indikator IKLH tersebut, didapat akumulasi nilai kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Barat sebesar 65,99 poin. Meski lebih dari setengah luas daerahnya berada di kawasan hutan lindung, tidak menutup kemungkinan kualitas lingkungan hidup akan buruk jika tidak dikendalikan melalui kerjasama pemerintah dan masyarakat. Pendirian pemukiman, industri usaha kecil, pengelolaan limbah rumah tangga dan industri, pemeliharaan lingkungan dan pelestarian lingkungan akan menjadi sangat sulit jika tidak didukung sarana prasarana, kesadaran, pengetahuan, pendanaan, dan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat.

Sebanyak 2.243,09 ton sampah berhasil ditangani dan 620,34 ton sampah berhasil dikurangi secara optimal dari total timbulan sampah yang ada sebanyak 43.192,38 ton. Sementara ruang terbuka hijau yang terkelola sampai dengan tahun 2021 adalah 25 taman terpelihara dan 300 lampu taman terpasang, sesuai dengan target kinerja. Capaian kinerja IKLH tahun 2021 menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, sekitar 10,42%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian kinerja IKLH tahun 2021 sudah mencapai 102,91%. Berikut ini adalah

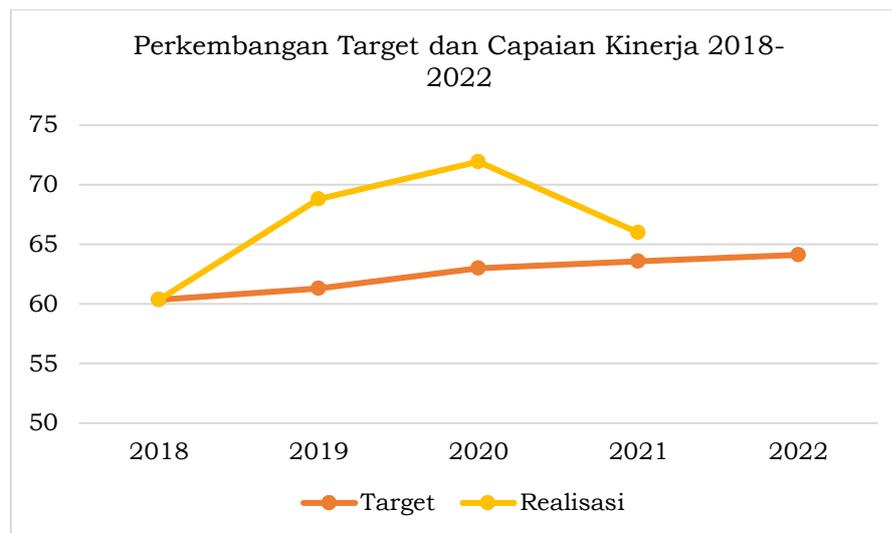
perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 serta target akhir RPJMD tahun 2022.

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD
Indeks kualitas lingkungan hidup	71,94	65,99 poin	64,12 poin

Sumber: diolah tim, 2022.

Realisasi kinerja tahun 2021 memang menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020, bahkan realisasi tahun 2021 juga merupakan realisasi paling rendah selama periode RPJMD sejak 2018. Namun realisasi tahun 2021 ini sudah lebih tinggi dari target akhir RPJMD tahun 2022. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.



Grafik 10. Perkembangan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018-2022
Sumber: Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Kualitas lingkungan hidup adalah isu yang sangat penting bagi hampir semua negara di dunia. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan manusia yang hampir seluruhnya berasal dari alam. Pemanasan global dan kegiatan usaha yang tidak lestari berpotensi besar mengubah kondisi lingkungan, berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup berkorelasi dengan pemenuhan

kebutuhan dasar, maka urusan kualitas lingkungan hidup sudah menjadi fokus pembangunan daerah berkelanjutan secara internasional.

Status kualitas lingkungan hidup sebelumnya hanya dapat dilihat melalui proses laboratorium atau citra satelit yang tentu saja tidak dapat diakses oleh masyarakat biasa, maka ditentukanlah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mempermudah pemerintah dan masyarakat biasa melihat tingkat kualitas lingkungan hidup di Indonesia. IKLH didasarkan pada cara analisis yang dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University yang menggunakan indikator kualitas udara, kualitas sungai, dan kualitas tutupan hutan. Berikut ini adalah indikator dan parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 25. Indikator dan Parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator	Parameter
1	Kualitas Air Sungai (Bobot 30%)	Total suspended solid
		Dissolved Oxygen
		Biological Oxygen Demand
		Chemical oxygen demand
		Total fosfat
		Fecal coli
2	Kualitas Udara (Bobot 30%)	Total coliform
		SO ₂ (Sulfur Dioksida)
		NO ₂ (Nitrogen Dioksida)
3	Kualitas Tutupan Lahan (Bobot 40%)	Luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2017.

Dalam implementasinya, indikator IKLH tersebut didapat dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Hutan (ITH). Nilai IKA Lampung Barat tahun 2021 adalah sebesar 60, melebihi target IKA Lampung Barat tahun 2021 sebesar 58,34 poin. Nilai IKA tersebut merupakan akumulasi dari 6 sungai berstatus memenuhi baku mutu atau kondisi baik (nilai: 10), 30 sungai lainnya ada dalam status tercemar ringan (nilai: 49), 2 sungai berstatus tercemar sedang (nilai: 1), dan nihil sungai tercemar berat. Selanjutnya adalah IKU yang terindeks 84,73, melebihi target IKU Lampung Barat tahun 2021 sebesar 83,84. Tingginya kualitas udara di Lampung Barat disebabkan rendahnya kadar Sulfur Dioksida, yaitu zat beracun udara ambien yang bersumber dari aktivitas transportasi, permukiman kawasan perkotaan dan kegiatan industri. Akibat dari pencemaran SO₂ adalah iritasi sistem pernafasan, oleh sebab itu SO₂ menjadi parameter IKU.

Selain SO₂, NO₂ atau Nitrogen Dioksida juga menjadi parameter IKU. Pencemaran NO₂ dapat menyebabkan pembengkakan paru-paru sehingga terjadi kesulitan nafas. Lokasi *sampling* yang diambil untuk perhitungan IKU di Lampung Barat tahun 2021 adalah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran. Rerata nilai pemantauan SO₂ adalah 10,98 dengan baku mutu 40 terindeks 0,147 dan rerata NO₂ adalah 5,88 dengan baku mutu 20 terindeks 0,549. Sehingga berdasarkan formula IKU IKLH, didapat nilai IKU sebesar 84,73. ITH melengkapi 3 serangkai indikator IKLH. Perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif menghasilkan indeks tutupan lahan sebesar 41,63%, lebih besar dari target 40,42%.

Sampah adalah satu urusan yang menjadi penentu kualitas lingkungan. Oleh karena hal tersebut, pengelolaan sampah menjadi indikator sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Timbulan sampah sebanyak 44.891,93 ton ditargetkan pengelolaannya sebanyak 74%. Jika dibandingkan antara jumlah sampah yang terkelola dengan jumlah timbulan sampah dan jumlah penduduk di Lampung Barat, realisasi pengelolaan sampah mencapai 46,66% atau tercapai 63%. Capaian ini bukan hanya lebih rendah dari target pemerintah daerah Lampung Barat, namun juga lebih rendah dari target nasional yang ditetapkan sebesar 74%. Penyebab belum tercapainya target pengelolaan sampah ini adalah kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah, pengurangan anggaran, serta kurangnya sumber daya manusia kompeten dalam pengelolaan persampahan di Dinas Lingkungan Hidup.



Gambar 14. Proses Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah
Sumber: Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021.

Selain pengelolaan sampah, ruang terbuka juga perlu ditata dan dikelola agar tetap mencukupi keseimbangan tutupan lahan dan area pemukiman warga. Pada tahun keempat RPJMD ini, kinerja kualitas

tutupan lahan tercapai 100% dari target atau berhasil mengelola dan menata ruang terbuka sebanyak 25%. Proporsi RTH suatu daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRINT/M/2008/ yaitu minimal 30% dari luas wilayah. Sehingga ruang terbuka hijau saat ini mencapai luas 14.869,93 Ha. Pencapaian kinerja penataan ruang sejak tahun 2018 selalu mencapai target, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD kinerja tahun 2021 mencapai 83,33%. Selain penataan taman, penerangan jalan umum juga merupakan bagian dari penataan ruang terbuka. Sebanyak 300 titik telah terpasang lampu penerangan jalan, sehingga total sampai dengan tahun 2021 telah terpasang PJU sebanyak 801 titik di 15 kecamatan. Penerangan jalan umum memegang peran penting bukan hanya untuk keindahan tata ruang wilayah, melainkan juga menunjang keselamatan pengguna jalan. Selain itu, penerangan jalan juga mendukung keamanan lingkungan. Kondisi lingkungan yang terang akan mencegah terjadinya tindak kejahatan karena dapat langsung terlihat oleh masyarakat.



Gambar 15. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Sumber: Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021.

Pemerintah telah berupaya maksimal untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di Lampung Barat dengan mengendalikan izin pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada pelaku usaha, mengawasi dan membimbing pemegang izin usaha, melakukan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat, dan tentu saja mengelola sampah. Kualitas lingkungan hidup berhubungan erat dengan indeks pembangunan manusia dan kesehatan masyarakat. Manusia yang hidup membutuhkan lingkungan, kemampuan manusia mengubah dan memodifikasi kualitas lingkungannya bergantung pada taraf sosial budayanya. Masyarakat primitif hanya mampu membuka lahan secukupnya untuk memberi perlindungan pada masyarakat, sedangkan masyarakat

maju dapat mengubah lingkungan hidup sampai pada taraf yang *irreversible* (tidak dapat diubah lagi). Maka pengetahuan dan kesadaran masyarakat, serta pengendalian pemerintah terhadap pembangunan wilayah sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Semetara kaitan kualitas lingkungan hidup dengan kesehatan masyarakat terletak pada pengaruh fenomena alam dan lingkungan terhadap penyakit, seperti yang diungkapkan Hipocrates. Lingkungan dengan kualitas buruk akan berpengaruh terhadap terjadinya penyakit, misalnya nyamuk yang gemar bersarang di kubangan air.

Pencapaian kualitas lingkungan hidup ini disebabkan karena dukungan dari aparat pemerintah sebagai wujud komitmen konservasi sumber daya alam. Misalnya pengendalian izin mendirikan bangunan oleh Dinas PUPR. Melalui analisis dampak lingkungan, setiap bangunan yang akan dan sudah didirikan harus lestari sehingga tidak merusak kualitas lingkungan. Maka kinerja Dinas PUPR di bidang pendirian bangunan berdampak pada kendali kualitas udara, air dan tutup lahan yang menjadi indikator kualitas lingkungan hidup. Peningkatan capaian kualitas lingkungan hidup ini akan berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab terhadap kesehatan masyarakat. Banyak studi ilmiah yang membuktikan bahwa lingkungan hidup berpengaruh dominan terhadap kesehatan. Perkembangan epidemiologi menggambarkan secara spesifik peran lingkungan dalam terjadinya penyakit dan wabah. Pencemaran udara menyebabkan darah kekurangan oksigen serta terserang malaria, pencemaran air menyebabkan penyakit menular. Maka tingginya kualitas lingkungan hidup akan berpengaruh terhadap kualitas kesetahan masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Secara tidak langsung, lingkungan memberikan bahan mentah berbagai kebutuhan seperti kayu, obat-obatan, papan, pangan, dan lain-lain. Pemenuhan kesejahteraan ini diharapkan meningkatkan kesehatan. Secara langsung, lingkungan menyediakan sumber energi seperti makanan, mengandung unsur yang membahayakan kesehatan fisik seperti hewan buas, menyebabkan penyakit seperti mikroorganisme dan vektor penyakit seperti tungau.

Beberapa inovasi dilakukan untuk mendukung program perwujudan lingkungan hidup yang berkualitas, diantara beberapa inovasi tersebut adalah: a) pembentukan TEKAT PJU (Tim Reaksi Cepat Penerangan Jalan

Umum) yang berperan melakukan pengecekan dan perbaikan kerusakan PJU. TEKAT PJU ini sementara masih ada di ara Liwa, menjamin penerangan jalan di malam hari terpenuhi; b) GEMPITA LIWA BUDAYA (Gerakan Memperindah Kota dan Lingkungan Berwawasan Budaya), adalah gerakan yang menjadikan budaya sebagai pakaian dalam berkehidupan. Bertujuan menjadikan Liwa sebagai tempat singgah atau tujuan wisata yang nyaman, indah dan berbudaya; c) GADI HEBAT (Gas dari Sampah Hebat, memanfaatkan buangan sampah di TPA Bahway untuk diolah menjadi gas pengganti energi alternatif gas LPG dengan sistem *sanitary land fill*. Mengolah limbah menjadi produk gas metan bermanfaat untuk pendidikan biologi, tempat penelitian berkelanjutan, edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan sampah (*kompos, reuse, reduce, recycle*, dan penghasil energi alternatif), serta mengurangi pencemaran lingkungan.

Dalam implementasi program dan inovasi tahun 2021, masih ada beberapa permasalahan yang ditemui dan menjadi perhatian, diantaranya:

- a) Pembinaan dan penegakkan hukum lingkungan;
- b) Peningkatan dan penataan kelestarian dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- c) Belum optimalnya pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan;
- d) Kurangnya sarana prasarana dalam pengelolaan persampahan;
- e) Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang lingkungan hidup;
- f) Kurangnya sarana prasarana penerangan jalan umum;
- g) Belum optimalnya penanganan sampah dengan cara 3R;
- h) Masih kurangnya luasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dimiliki pemerintah;
- i) Belum adanya kerjasama penanganan dengan sektor privat.

Setelah mengkaji beberapa permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan ditahun mendatang adalah: (a) meningkatkan sosialisasi lingkungan hidup kepada masyarakat; (b) menambah sarana prasarana pengelolaan sampah dan penerangan jalan umum; (c) menambah sumber daya manusia kompeten di bidang lingkungan hidup, termasuk penyidik pegawai negeri sipil.

6. Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Pemanfaatan Tata Ruang sesuai dengan Peruntukan

Capaian Kinerja

Penataan ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Target pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2021 adalah 100%. Menggunakan indikator kinerja persentase ketaatan pemanfaatan ruang, realisasi kerjanya adalah 100% atau tercapai 100%. Capaian kinerja sasaran meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai RTRW dihitung berdasarkan jumlah permintaan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2021 yang sesuai dengan peraturan RTRW (Permendagri 32/2010 tentang Pedoman Pemberian IMB, Perda 05/2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda 7/2016 tentang Bangunan Gedung, dan Perbud 7/2015 tentang Pedoman IMB. Berikut ini adalah cara perhitungan capaian indikator kinerja ketaatan pemanfaatan ruang tahun 2021.

Tabel 26. Cara Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Ketaatan Pemanfaatan Ruang

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
Persentase ketaatan pemanfaatan ruang	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan lahan sesuai RTRW}}{\text{Jumlah pemanfaatan lahan}} \times 100\%$	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Dinas PUPR Lampung Barat Tahun 2021.

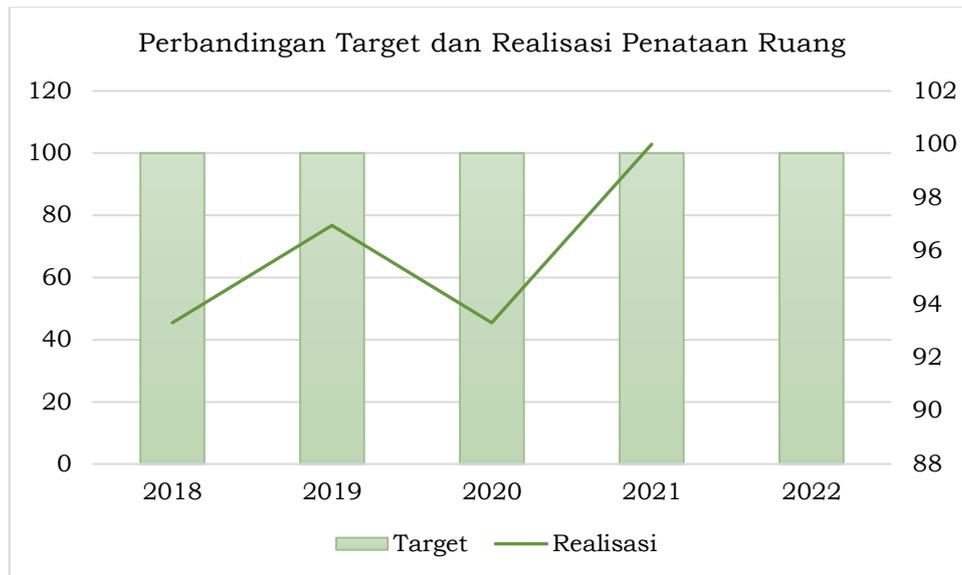
Sejak tahun 2018, target pemanfaatan lahan sesuai RTRW adalah 100% dari total 60 dokumen usulan pemanfaatan lahan. Capaian tahun 2021 meningkat 6,7% dari capaian tahun 2020, sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah tercapai 100%. Berikut ini adalah perbandingan realisasi ketaatan pemanfaatan ruang tahun 2020 dan 2021 serta target akhir RPJMD.

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD
Persentase ketaatan RTRW	93,30%	100%	100%

Sumber: diolah tim, 2022.

Realisasi kinerja pemanfaatan ruang sesuai peruntukkan sempai menurun tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, namun di tahun 2021 mengalami peningkatan realisasi kembali setelah dilakukan penyesuaian target dan penggunaan dan sumber pendanaan. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi ketaatan pemanfaatan ruang.



Grafik 11. Perbandingan Target dan Realisasi Ketaatan Penataan Ruang
Sumber: Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Sempai fluktuatif, target ketaatan penataan ruang akhirnya dapat tercapai 100% di tahun 2021. Hal ini berarti bahwa penataan ruang di Lampung Barat telah sesuai dengan dokumen RTRW Kabupaten Lampung Barat yang tentu saja sejalan dengan RTRW Provinsi Lampung dan RTRW Nasional. Langkah selanjutnya dari implementasi ketaatan penataan ruang ini adalah pemantauan tata ruang kota melalui pengendalian pembangunan dan evaluasi dokumen RTRW.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Perencanaan tata ruang bermanfaat untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah kabupaten, mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya, dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RTRW adalah: pertama, aspek sosial, yaitu jumlah penduduk dan proyeksi jumlah penduduk kedepan. Bertambahnya jumlah penduduk berbanding lurus dengan perkembangan industri dan kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal. Keduanya membutuhkan lahan.

Meski lebih dari setengah luas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah kawasan hutan lindung yang keberadaannya dilindungi negara dan tidak diperbolehkan alih lahan hutan menjadi kawasan industri dan permukiman. Namun hal ini bukan berarti tidak dibutuhkan penataan ruang, wilayah administrasi tetap dipadati penduduk dan bangunan usaha. Penataan ruang tetap menjadi keharusan bagi setiap wilayah.

Kedua, aspek ekonomi. Pengembangan potensi ekonomi yang berbeda memiliki kebutuhan infrastruktur berbeda. Beragamnya potensi ekonomi di Lampung Barat membutuhkan infrastruktur penunjang ekonomi juga akan berubah. Seperti pengembangan potensi pariwisata Geopark Suoh yang membutuhkan fasilitas penunjang bagi para pengunjung, berbeda dengan infrastruktur untuk mengelola potensi ekonomi perikanan kolam dan keramba jaring Lumbok Seminung. Ketiga, aspek lingkungan. Melalui pembangunan yang lebih terencana, maka kondisi lingkungan dapat lebih terjaga. Masyarakat memang berhak membangun di atas tanah yang dimilikinya secara legal, namun pemerintah masih perlu ikut campur dalam hal pemberian izin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan pendirian bangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bangunan yang dibangun untuk tempat tinggal atau tempat usaha sudah memenuhi persyaratan bangunan lestari, yang tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Mempertimbangkan lingkungan dalam RTRW sama dengan menjaga kualitas lingkungan dalam jangka panjang. Terlebih Lampung Barat yang geografisnya berbukit dan bergelombang menyebabkan tanah labil, sehingga perencanaan tata ruang harus benar-benar diperhatikan agar tidak menjadi pemicu terjadinya bencana.

Keempat, aspek teknologi. Perkembangan teknologi menyebabkan perilaku dan mobilitas manusia berubah. Teknologi memang menjadi inovasi besar yang banyak membantu pekerjaan manusia, dari pekerjaan rumah sampai produksi usaha. Teknologi juga telah membantu penyampaian informasi yang sangat cepat. Namun, teknologi memiliki dampak buruk terhadap perubahan perilaku dan mobilitas manusia. Model komunikasi massa untuk melakukan kehidupan sehari-hari berbeda ketika teknologi berkembang pesat dan dapat diakses semua orang, dunia dalam genggaman. Teknologi transportasi juga membuat semakin mudah

berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Kontrol pemerintah berperan untuk mengendalikan pembangunan infrastruktur pendukung kemajuan zaman ini.

Perencanaan tata ruang dibagi atas 3 wilayah, meliputi tata ruang nasional, tata ruang provinsi, dan tata ruang kabupaten/kota. Struktur ruang yang diatur dalam RTRW kabupaten Lampung Barat meliputi arahan pengembangan keciptakaryaannya seperti prasarana sarana air minum, air limbah, persampahan, drainase, RTH, rumah susun sederhana sewa (rusunawa), dan agropolitan. Sementara arahan pengembangan pola ruang meliputi pengembangan kawasan hutan lindung dan budi daya serta arahan pengembangan pola ruang terkait bidang cipta karya seperti RTH. Hal-hal yang dimuat dalam tata ruang Kabupaten Lampung Barat adalah tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten (penataan kabupaten), rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Rencana tata ruang wilayah dapat berubah 20 tahun sekali dengan peninjauan 5 tahun sekali, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perubahan RTRW diantaranya adalah jumlah penduduk yang sangat besar dan kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, bencana alam yang tinggi, krisis pangan energi air dan perubahan iklim. Maka kunci dari keberhasilan RTRW yang ideal adalah proaktif dari semua pihak, karena pada dasarnya RTRW mengakomodir kepentingan banyak pihak. Penyusunan RTRW melibatkan pemangku kepentingan dan akademisi yang akan membantu memberi masukan berdasarkan penelitian ilmiah. Kerja sama yang baik dan memahami tugas fungsi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah pusat dalam penataan ruang akan menciptakan penataan ruang yang ideal, misalnya penataan ruang pasca bencana di jalan provinsi yang berada dalam wilayah Lampung Barat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Lampung.

Maka dapat disimpulkan bahwa penataan ruang dan wilayah sesuai dengan peruntukan di Lampung Barat berdampak besar pada pencegahan bencana dan kualitas lingkungan hidup masyarakat, yang menjadi tanggungjawab BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup. Implementasi penataan

ruang dan wilayah yang sesuai dengan kategori ideal RTRW akan menciptakan keserasian antara kebutuhan hunian warga dengan kebutuhan terpenuhinya ruang terbuka hijau, tata wilayah menjadi berkualitas dan elok dipandang serta memberi dampak sanitasi layak dan air bersih. Selain itu, penataa ruang wilayah juga akan membantu menangani masalah kebencanaan. Drainase yang memadai dan berfungsi baik akan menghindarkan suatu wilayah dari bencana banjir, penataan bangunan akan mencegah terjadinya bencana longsor, dan lain sebagainya. Dampak ini menunjukkan bahwa kinerja antar perangkat daerah tersebut saling terhubung dan memberi dampak satu dengan yang lainnya. Sementara kendala yang dihadapi Dinas PUPR dalam mengimplementasi penataan ruang di wilayah Lampung Barat adalah belum adanya legalitas daerah tentang rencana tata ruang wilayah yang sesuai dengan kebutuhan daerah saat ini. Maka rekomendasi yang disampaikan adalah menyelesaikan draf peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah saat ini di tahun 2022.

7. Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana

Capaian Kinerja

Letak geografis Kabupaten Lampung Barat yang dianugerahi kesuburan tanah dan keindahan bentang alam sepaket dengan resiko rawan terjadi bencana alam. Iklim yang cenderung penghujan, tekstur tanah yang labil, dan patahan Semangko yang melewati bawah tanah Lampung Barat mewajibkan pemerintah bersama dengan masyarakat harus tanggap bencana. Bencana alam adalah sesuatu yang terjadi diluar kehendak dan kendali manusia, maka yang dapat dilakukan adalah penanggulangan bencana secara sinergi antar banyak pihak. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berkomitmen meningkatkan persentase desa tanggap bencana dan *respon time* tanggap bencana untuk mencapai kesiapsiagaan bencana yang dapat terjadi kapan saja. Respon tim tanggap bencana sudah baik dalam menanggapi laporan kebencanaan yaitu 1x24 jam, capaiannya 100%. Sementara desa dengan tanggap bencana masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2021. Target 17,64% desa

tanggap bencana terealisasi sebesar 9,56% atau tercapai 54,19%. Berikut ini adalah cara perhitungan capaian kinerja dengan 2 indikator tersebut.

Tabel 28. Cara Perhitungan Capaian Indikator Sasaran

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
% desa tangguh bencana	Bencana yang direspon 1x24 jam x 100%	17,64%	9,56%	54,19%
	Total kejadian bencana			
Respon time tanggap bencana	Desa tangguh bencana yang dibentuk x 100%	1x24 jam	1x24 jam	100%
	Total pekon rawan bencana			

Sumber: Laporan Kinerja BPBD Lampung Barat Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Target mewujudkan pekon tangguh bencana tahun 2021 adalah sebanyak 24 pekon dari total 136 pekon dan kelurahan yang ada di Lampung Barat. Hingga akhir tahun 2021 terbentuk 13 pekon sebagai pekon tangguh bencana, capaiannya setengah dari target kinerja. Sementara *respon time* tim tanggap bencana telah siaga 1x24 jam atas 72 bencana yang terjadi sepanjang tahun 2021. Sejak periode RPJMD dimulai yaitu tahun 2018, pembentukan desa tangguh bencana belum pernah mencapai target kinerja. Justru cenderung mengalami penurunan capaian. Meski begitu, *respon time* tim tanggap bencana selalu siaga 1x24 jam. Berikut ini adalah perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2018-2021.

Tabel 29. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018-2021

No	Indikator Kinerja	2018		2019		2020		2021		Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	% desa tangguh bencana	4,41%	1,47%	8,82%	5,14%	13,23%	7,35%	17,64%	9,56%	22,05%
2	Respon time tanggap bencana	1x24 jam	1x24 jam	1x24 jam						

Sumber: Laporan Kinerja BPBD Lampung Barat Tahun 2021.

Target akhir RPJMD untuk sasaran ini adalah mewujudkan 30 pekon yang tangguh bencana. Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD, maka persentase capaiannya adalah 43,35%. Pekerjaan rumah yang cukup besar tentu saja bagi pemerintah. Persoalan kebencanaan adalah berbicara tentang manajemen penanggulangan. Maka pekerjaan terbesarnya bukan pada ketersediaan alat penanggulangan bencana, melainkan pada keselarasan pemahaman tentang kebencanaan dan penanggulannya antara pemerintah dan masyarakat. Memahami masyarakat tentu menjadi tugas pemerintah.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

a) *Respon*time tanggap bencana

Wilayah Kabupaten Lampung Barat terletak di sisi bagian timur dari punggung perbukitan Bukit Barisan Selatan yang membentang dari utara hingga selatan sepanjang sisi barat pulau Sumatera, membentuk cincin api (*ring of fire*) Sumatera. Tepatnya adalah patahan atau sesar Semangko yang membentang sepanjang 1.900 Km dari Aceh hingga Teluk Semangka. Patahan ini melewati Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus telah menempatkan ketiga kabupaten ini berada dalam wilayah rawan gempa. Tercatat sebanyak 187 gempa berkekuatan 1,1 sampai 4,6 Magnitudo terjadi sepanjang tahun 2021 akibat pergerakan patahan Semangko. Selain rawan gempa, tekstur tanah di Lampung Barat juga labil. Jalan lintas Liwa–Krui, jalan lintas Liwa–Ranau, dan jalan lintas Sumber Jaya–Liwa merupakan 3 titik yang sangat berpotensi terjadi pergerakan tanah atau longsor.

Beberapa bencana yang terjadi sepanjang tahun 2021 di Kabupaten Lampung Barat adalah kebakaran 11 kejadian, tanah longsor 21 kejadian, banjir 6 kejadian, angin kencang 1 kejadian, korban tenggelam 1 kejadian, gempa bumi 13 kejadian, pohon tumbang 12 kejadian, dan serangan gajah 3 kejadian. Dalam penanggulangan bencana, ada standar operasional yang ditetapkan untuk diterapkan oleh tim tanggap bencana. Sejak menerima laporan kejadian hingga penanganan pasca bencana, ada tahapan yang sudah dibakukan namun tidak kaku. Artinya, kondisi kedaruratan bencana dapat berbeda antara 1 kejadian dengan kejadian lainnya, maka tindakan yang tepat dan cepat harus segera dilakukan meski belum ada tim penanggulangan bencana yang terjun di lokasi. Beruntungnya masyarakat kita yang majemuk menghargai perbedaan, menjunjung gotong royong dan saling asih. Sehingga hal ini yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membentuk tim reaksi cepat bencana di level pekon sebagai basis pertama mengoordinatori penanggulangan bencana yang terjadi di lokasi terdekatnya. Selain tim reaksi cepat bencana longsor, BPDB juga bekerjasama dengan beberapa pihak seperti TNI, POLRI, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kehutanan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam,

pemerintah kecamatan dan pekon, serta masyarakat sekitar lokasi kejadian.



Gambar 16. *Respon time Tanggap Bencana*

Sumber: Laporan Kinerja BPBP Lampung Barat Tahun 2021.

Penanggulangan bencana sebenarnya terdiri dari 3 tahap, dimulai sejak tidak terjadi bencana atau ketika sedang dalam ancaman potensi bencana, disebut pra bencana. Pra bencana adalah tahap pencegahan dan mitigasi bencana, dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Upaya yang dilakukan berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun kesadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Penanggulangan bencana tahap pra bencana selama ini rutin dilakukan oleh pemerintah daerah Lampung Barat melalui sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat melalui berbagai media (ceramah, cetak, digital). Satuan tugas penanggulangan bencana yang telah dibentuk juga dilatih untuk tangguh dalam setiap kejadian bencana yang mungkin terjadi. Saat ini, telah terbentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana di masing-masing pekon. TRC bertugas untuk mengkaji secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu untuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumber daya dalam menangani bencana. Pembangunan infrastruktur oleh Dinas PUPR juga berpengaruh terhadap penanggulangan bencana tahap pra bencana. Pembangunan irigasi, pemasangan beronjong pada tanah miring yang menjadi akses lalu lintas atau pemukiman warga, dan lain sebagainya.

Tahap kedua adalah tanggap darurat, yaitu ketika bencana terjadi. Pemerintah telah menyediakan sarana prasarana kesiapsiagaan

bencana dan alat perlindungan diri bagi tim cepat tanggap bencana. Selain kompetensi satuan tugas tanggap bencana dan sarana prasarana yang dimiliki BPBD, saat bencana terjadi dibutuhkan lebih banyak pihak terlibat. Bersama TNI dan POLRI, tanggap darurat saat bencana terjadi dapat dilakukan dengan cepat dan penuh semangat. Pengetahuan ketanggapdaruratan bencana yang juga dimiliki TNI dan POLRI sangat membantu BPBD dalam menangani kebencanaan secara tepat dan efektif. Sementara posisi Dinas Kehutanan dan BKSDA dalam koordinasi dengan BPBD adalah untuk menanggulangi kebencanaan kehutanan, seperti gangguan gajah yang beberapa kali masuk ke perkampungan warga. Pengetahuan tentang kondisi dan karakter gajah lebih dipahami oleh kedua instansi tersebut. Sering kali Dinas PUPR juga terlibat dalam aksi tanggap darurat bencana dengan memberi bantuan alat berat untuk mengatasi bencana. Satpol PP juga menjadi mitra penting dalam penanggulangan bencana, sesuai fungsinya sebagai pemelihara ketertiban dan perlindungan masyarakat. Terlebih saat ini unit pemadam kebakaran sudah berada dibawah kewenangan instansi Satpol PP. Masyarakat juga mutlak terlibat dalam tahap ini. Menjadi korban bencana bukan berarti masyarakat menjadi yang paling dikasihani, justru dampak kematangan mitigasi bencana sebelumnya akan sangat berguna ketika bencana benar-benar terjadi. Masyarakat akan mampu mengontrol dirinya, menolong sesama dan bahu membahu mengatasi bencana.

Tahap ketiga adalah pasca bencana, tahap ini berisi serangkaian agenda tentang bantuan darurat, inventarisasi kerusakan, evaluasi kerusakan, pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi dan pemantauan. Langkah awal pasca bencana adalah memberikan bantuan kepada korban terdampak bencana seperti pakaian layak, bantuan logistik, obat-obatan, tenaga medis, pengamanan lokasi kejadian bencana, tempat tinggal darurat sementara, termasuk tenaga kejiwaan untuk mengatasi trauma. Selain pihak-pihak yang terlibat aktif dalam tahap tanggap darurat diatas, tim penilai infrastruktur (Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Bagian Administrasi Pembangunan) mengambil peran lebih besar pada tahap ini. Agenda

pemulihan wilayah dan pemulihan ekonomi menjadi pekerjaan yang juga tidak mudah. Membutuhkan kerjasama dan kemauan bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk bangkit dari bencana alam yang menimpa.

b) Persentase pekon/kelurahan tangguh bencana

Pekon tangguh bencana adalah pekon yang sadar resiko bencana, memiliki kegotongroyongan melakukan upaya pengurangan resiko bencana, memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana dan kemampuan memulihkan diri dari dampak bencana yang merugikan. Urgensi mewujudkan desa tangguh bencana terutama didaerah yang rawan terjadi bencana seperti di Kabupaten Lampung Barat, didasarkan atas nama perlindungan masyarakat dan pembangunan daerah. Pekon adalah ujung tombak penanggulangan bencana sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat sekaligus melindungi pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah. Sejak 2016 sampai dengan tahun 2021, sudah ada 13 pekon tangguh bencana dari 11 kecamatan yang terbentuk. Capaian ini memang tidak sesuai target kinerja tahun 2021, namun pergerakan kecil tetaplah sebuah progres. Bertambahnya pekon tangguh bencana menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk tetap siaga dan berkemampuan menghadapi bencana yang bisa terjadi kapan saja.

Regulasi dan pendanaan menjadi pondasi pertama dalam ketangguhan bencana daerah. Ada banyak regulasi yang mengatur tentang penanggulangan bencana, mulai dari penyelenggaraan sampai pada peran serta lembaga internasional. Beberapa contoh regulasi penanggulangan bencana adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/129/KPTS/IV.05/2021 tentang Tim Penilai Bencana Infrastruktur, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/30/KPTS/IV.05/2021 tentang Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/128/KPTS/IV.05/2021, dan beberapa standar operasional setiap kegiatan penanggulangan bencana.

Pondasi kedua adalah modal sosial. Karakteristik gotong royong yang memang sudah ada di masyarakat menjadi daya ungkit utama dalam mewujudkan pekon tangguh bencana. Modal sosial telah dimiliki, selanjutnya adalah menciptakan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dengan menumbuhkan kemauan mempelajari manajemen bencana yang menjadi program kegiatan rutin BPBD. Menumbuhkan kesadaran dan minat manajemen kebencanaan inilah yang tidak kalah penting dari penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana. Modal social diasah dan ditingkatkan dengan sosialisasi, kaderisasi, dan penguatan kapasitas. Masyarakat juga diajak untuk mengkaji resiko bencana diwilayahnya, dikuatkan dengan regulasi level pekon.



Gambar 17. Gotong Royong Penanggulangan Bencana
Sumber: Laporan Kinerja BPBD Lampung Barat Tahun 2021.

Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diadakan rutin BPBD, kesadaran masyarakat meningkat terbukti dengan keberadaan Pusdalops-BP (Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana) dan Satgas-PBS (Satuan Tugas Penanggulangan Bencana). Keterlibatan komunitas masyarakat atau mahasiswa, serta pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari terwujudnya pekon tangguh bencana. Penyelenggaraan PRB berjalan dengan baik jika empat pilar desa tanggap bencana (partisipasi masyarakat, kelembagaan, rencana penanggulangan bencana, dan regulasi desa) telah terwujud. Pembentukan Pusdalops-PB dan Satgas-PB merupakan inovasi yang dilakukan BPBD untuk menunjang terbentuknya pekon tangguh bencana. BPBD juga menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon untuk memfasilitasi pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan yang menunjang pembentukan pekon tangguh bencana.

Pekon tangguh bencana menjadi indikator pembentukan pekon mandiri, maka sinergitas ini mendapat 2 dampak sekaligus.



Gambar 18. Kegiatan Pusdalops-PB Responstime Tanggap Bencana
Sumber: Laporan Kinerja BPBD Lampung Barat Tahun 2021.

Jika melihat belum tercapainya target jumlah pekon tangguh bencana tahun 2021, kelemahan implementasinya berada pada belum ada regulasi kebencanaan di tingkat pekon. Hal ini berdampak pada tidak lengkapnya pondasi desa tangguh bencana. Maka rekomendasi kebijakan untuk tahun selanjutnya adalah mengarahkan sosialisasi dan pelatihan untuk fokus juga pada penyusunan regulasi kebencanaan di tingkat pekon. Pengetahuan dan kemampuan perangkat pekon juga harus ditingkat pada bidang administrasi kebencanaan, bukan hanya kompetensi teknis. BPBD juga tetap bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon melalui pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa (ADD). Pada tahun 2022, rencana pekon yang akan dibentuk menjadi pekon tangguh bencana berjumlah 17 pekon dari 6 kecamatan. Kerjasama dan upaya akan dioptimalkan untuk membentuk pekon tangguh bencana di tahun terakhir RPJMD, disertai rencana inovasi dengan membentuk *Psychosocial Centre*. Inovasi ini merupakan komitmen menuntaskan penanggulangan bencana melalui penyediaan media pemulihan trauma psikososial pasca bencana kepada para korban bencana hingga dapat kembali normal dalam beraktivitas dan menumbuhkan semangat optimisme baik sosial, budaya, dan ekonomi.

8. Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat

Capaian Kinerja

Kesehatan masyarakat adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang oleh karenanya pemerintah berkewajiban memenuhi pelayanannya. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, karena kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomian. Pembangunan manusia meletakkan kesehatan sebagai salah satu komponen pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lampung Barat. Melalui 4 indikator kinerja, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat perkembangannya. Indikator-indikator tersebut adalah angka kematian ibu (per 1.000 kelahiran hidup), angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup), usia harapan hidup, dan persentase kasus gizi buruk yang ditangani.

Realisasi Angka Kematian Hidup (AKI) per Kelahir Hidup (KH) tahun 2021 adalah 145/100.000 KH. Realisasi ini melebihi target yang direncanakan yaitu sebanyak 121/100.000 KH, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 80,16%. Capaian kinerja ini menurun dari capaian kinerja tahun 2020 yang sebesar 144,53%. Capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan hasil survei terakhir dalam Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 dengan hasil survei AKI di Indonesia masih sebesar 305/100.000 KH. Indikator kedua, realisasi Angka Kematian Neonatus (AKN) tahun 2021 juga lebih banyak dari target, yaitu 4,55/1.000 KH dari target 4,1/1.000 KH. Capaian kinerjanya adalah 90,24%, menurun 56,27% dari capaian tahun 2020. Meski menurun dari tahun 2020, capaian ini masih lebih sedikit dari AKN Provinsi Lampung tahun 2021 yang masih sebanyak 20/1.000 KH.

Indikator kinerja ketiga adalah Usia harapan hidup, yang berdasarkan data BPS Lampung Barat diketahui bahwa rata-rata usia harapan hidup saat lahir tahun 2021 adalah 67,65 tahun. Realisasi ini belum mencapai target yang sebesar 67,84 tahun, sehingga capaian kinerjanya adalah 100,02%. Dibandingkan dengan tahun 2020, usia

harapan hidup tahun 2021 meningkat 0,07 tahun atau capaiannya meningkat 0,10%. Namun capaian ini masih berada dibawah capaian usia harapan hidup Provinsi Lampung tahun 2021 yang mencapai 70,73 tahun. Indikator keempat adalah kasus gizi buruk yang tertangani. Target penanganan gizi buruk adalah 100% dari jumlah kasus gizi buruk yang ada. Realisasi penanganan gizi buruk di tahun 2021 adalah 100%, artinya jumlah kasus gizi buruk atau stunting berhasil ditekan sangat dalam. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2020, dimana kasus stunting di Lampung Barat berhasil ditangani melebihi target penanganan yang ditetapkan dalam renstra Dinas Kesehatan. Renstra Dinas Kesehatan Lampung Barat menargetkan kasus stunting sebesar 24% dari jumlah seluruh penduduk, realisasinya berhasil ditekan sampai angka 5,5% atau tercapai kinerjanya sebesar 761%. Angka stunting ini berhasil mengungguli capaian angka stunting Provinsi Lampung yang berada dalam 18,5%. Berikut ini adalah cara perhitungan keempat indikator kinerja yang digunakan sebagai parameter derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 30. Cara Pehitungan Indikator Kinerja Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Lampung Barat Tahun 2021

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
Angka Kematian Ibu (AKI)	$\frac{\text{Jml kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas s.d 42 hari}}{\text{Kelahiran hidup}} \times 100.000$	121	145	80,16
Angka Kematian Neonatus (AKN)	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi usia s.d kurang dari 4 minggu}}{1.000 \text{ kelahiran hidup}}$	4,1	4,55	90,24%
Usia Harapan Hidup (UHH)	BPS Lampung Barat	67,84	67,65	100,02%
Persentase Kasus Gizi Buruk (Stunting)	$\frac{\text{Jumlah balita stunting}}{\text{Balita diukur}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah baduta stunting}}{\text{Balita diukur}} \times 100\%$	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Lampung Barat Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Sementara itu, cara perhitungan capaian kinerja indikator ini sedikit berbeda dengan perhitungan capaian indikator kinerja pada umumnya. Ada perhitungan yang semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Kedua, perhitungan yang semakin rendah realisasi menggambarkan semakin baik tingkat pencapaian kinerja, seperti indikator

kinerja sasaran peningkatan derajat kesehatan masyarakat ini. Berikut ini cara perhitungannya:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Maka berikut ini adalah perbandingan target, realisasi, dan capaian keempat indikator kinerja peningkatan derajat kesehatan masyarakat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun terakhir RPJMD.

Tabel 31. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Empat Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	Capaian Target Akhir RPJMD s.d 2021
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
1	Angka Kematian Ibu (AKI)/10.000	KH	130	72.1	121	145	110	68,18%
2	Angka Kematian Neonatus (AKN)/1.000	KH	4,3	2.3	4,1	4,55	3,9	84,68%
3	Persentase Kasus Gizi Buruk Ditangani (Stunting)	%	100	100	100	100	100	100
4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,54	67,58	67,84	67,65	68,14	99,28%

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021, BPS Lampung Barat Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

a) Angka Kematian Ibu (AKI)

Target AKI dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) adalah 70/100.000 KH di tahun 2030. Realisasi Lampung Barat tahun 2021 ini masih jauh dari target SDG's, berada pada angka 145/100.000 KH. Kematian ibu per kelahiran hidup ini lebih banyak dibandingkan tahun 2020, dipengaruhi paling besar karena pandemi Covid-19. Banyak ibu hamil terpapar Covid-19 dan memiliki komorbid sehingga memperparah kondisi ibu hamil. Selain itu, peningkatan AKI juga dipengaruhi oleh banyaknya bidan dan perawat pekon serta tenaga kesehatan lain yang berada di pekon terpapar Covid-19 sehingga akses

layanan kesehatan terdekat dengan masyarakat mengalami penurunan dan berakibat pada munculnya 3 masalah, diantaranya: 1) terlambat mengambil keputusan sehingga terlambat untuk mendapat penanganan; 2) terlambat sampai ketempat rujukan karena kendala transportasi; 3) terlambat mendapat penanganan karena terbatasnya sarana dan sumber daya manusia.

Pemerintah Lampung Barat telah berupaya mengatasi penyebab umum tingginya AKI selain karena faktor insidental pandemi Covid-19, antara lain status kesehatan ibu dan kesiapan untuk hamil. Upaya persiapan ini sebenarnya telah dilakukan sejak awal melalui pembatasan usia minimal menikah. Upaya ini bersifat preventif untuk memaksimalkan kesiapan seorang perempuan untuk mengandung dan menjadi ibu. Sifat alami di usia anak-anak dan remaja yang masih suka bermain dan manja tidak memungkinkan memiliki mental dan fisik yang kuat untuk bereproduksi. Maka kematangan fisik dan emosional seorang perempuan berpengaruh erat dengan kesiapan hamil. Melalui kegiatan Posyandu rutin, pemerintah menyediakan fasilitas pemeriksaan masa kehamilan. Tujuannya adalah keterjangkauan semua kalangan masyarakat. Jika masyarakat kalangan tengah keatas mampu melakukan pemeriksaan kehamilan secara mandiri ke fasilitas kesehatan dengan membayar, Posyandu memotong disparitas kesenjangan ini. Sehingga ibu hamil di setiap daerah baik dengan ekonomi bawah, menengah atau atas dapat melakukan pemeriksaan masa kehamilan secara rutin kepada tenaga kesehatan profesional dan jarak terdekat dari tempat tinggalnya.

Penyebab peningkatan AKI lainnya adalah pertolongan persalinan dan perawatan segera setelah persalinan. Terkadang, masyarakat perlosok terlalu jauh jangkauannya terhadap fasilitas kesehatan dasar atau Puskesmas, pemerintah berusaha mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat-masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan dengan mengangkat dan menetapkan bidan desa. Fase melahirkan yang menyakitkan, membutuhkan waktu penanganan segera dan kadang disertai kondisi yang kurang baik dapat menyebabkan kematian pada ibu hamil. Faktor terakhir adalah sosial budaya masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal ibu melahirkan.

Kesadaran keluarga dan masyarakat tentang kesehatan ibu berpengaruh terhadap perlakuan yang akan diterima ibu hamil dan melahirkan sehingga memberi dampak secara psikis dan fisik kepada sang ibu.

Maka menurunkan AKI bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, melainkan juga kesadaran ibu hamil, pengetahuan keluarga dan masyarakat sekitar tempat tinggal ibu hamil, serta perangkat desa untuk mengerakkan potensi desa mendukung penurunan AKI. Misalnya pemanfaatan transportasi desa untuk pertolongan kepada ibu hamil yang akan melahirkan.

b) Angka Kematian Neonatus (AKN)

AKN merupakan salah satu derajat kesehatan dalam SDG's dan rencana pembangunan nasional. Standar kematian bayi menurut SDG's adalah 12/1.000 KH, Lampung Barat belum mencapai standar ini namun masih akan terus mengupayakan penurunan AKN secara berkelanjutan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kematian bayi adalah berat badan bayi saat lahir, pemeriksaan ANC (*Antenatal Care*), status pekerjaan ibu, dan biaya kesehatan. Angka kematian bayi menggambarkan level kesehatan sebuah daerah dan Negara karena dapat diketahui kondisi fasilitas kesehatan daerah, kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal ini karena penyebab kematian ibu bukan hanya dari penyakit bawaan bayi saja, melainkan juga karena kesehatan ibu.

Target AKN di Lampung Barat tahun 2021 memang belum tercapai 100%, ada 25 kasus kematian bayi dari 5.204 kelahiran hidup atau 4,55/1.000 KH. Secara keseluruhan, kematian bayi terjadi pada periode neonatus atau usia 0-28 hari dengan faktor penyebab antara lain asifiksi, BBLR, kelainan kongenital, aspirasi dan pneumonia. Kondisi umum kesehatan Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu, pelayanan kesehatan terdiri dari ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan dasar yang sudah ada di 15 kecamatan di Lampung Barat. Dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat, pemerintah Lampung Barat telah merenovasi gedung puskesmas dan melengkapi

sarana prasarana puskesmas sehingga mampu dan layak menjadi fasilitas pelayanan dasar masyarakat di masing-masing kecamatan. Beberapa permasalahan yang terjadi dilapangan dan berdampak pada peningkatnya kematian bayi adalah:

- 1) Adat budaya yang masih melekat di masyarakat sehingga menghambat upaya promotif dan preventif yang berakibat masih kurangnya masyarakat memahami masalah kesehatan di lingkungannya;
- 2) Masih terjadi disparitas akses pelayanan kesehatan anak antara kabupaten dan provinsi terkait dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah;
- 3) Masih rendahnya pengetahuan & kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan bayinya.

Maka berikut ini adalah rekomendasi kebijakan yang disarankan untuk menurunkan kasus kematian bayi:

- 1) Mengembangkan kemitraan bidan dan dukun;
 - 2) Optimalisasi pendanaan APBD untuk masyarakat miskin luar kuota;
 - 3) Perekrutan tenaga bidan melalui pengangkatan PNS ataupun melalui program Bidan PTT yang terdistribusi sampai dengan di daerah sulit terjangkau;
 - 4) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga bidan seperti pelatihan manajemen asfiksia dan BBLR;
 - 5) Meningkatnya komitmen pemerintah baik daerah maupun pusat terhadap program kesehatan ibu dan anak, antara lain melalui program BOK dan adanya kegiatan DAK Jampersal yang memberikan kemudahan akses untuk ibu hamil yang akan melakukan persalinan;
 - 6) Meningkatkan sarana dan ketersediaan tenaga Spesialis *Obstetri & Gynecology* pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (RSUD Alimuddin Umar).
- c) Persentase Kasus Gizi Buruk Ditangani (Stunting)
- Status gizi yaitu keadaan kesehatan individu-individu atau kelompok yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik akan energi dan zat-zat gizi lain yang diperoleh dari pangan dan makanan yang dampak fisiknya diukur secara antropometri. Balita adalah anak yang berumur di

bawah 5 tahun (0-59 bulan). Kasus gizi buruk adalah balita dengan status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan nilai $Z\text{-score} < -3\text{ SD}$ (sangat kurus) dan atau terdapat tanda klinis gizi buruk lainnya. Kasus gizi buruk yang mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang dirawat inap maupun rawat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat. Persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan adalah jumlah kasus balita gizi buruk yang dirawat inap maupun rawat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat dibagi jumlah kasus balita gizi buruk yang ditemukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dikali 100%.

Kinerja penanganan kasus balita gizi buruk dinilai baik jika seluruh balita gizi buruk yang ditemukan mendapat perawatan, baik rawat inap maupun rawat jalan sesuai tata laksana gizi buruk di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat. Untuk menekan kematian bayi atau balita, dan menurunkan prevalensi gizi kurang dan buruk, pemerintah menetapkan target bahwa semua balita gizi buruk dirawat. Dengan demikian target indikator Balita gizi buruk mendapat perawatan adalah 100%.

Lampung Barat menjadi salah satu dari 5 kabupaten di Provinsi Lampung yang mengalami peningkatan prevalensi kekerdilan, meski begitu peningkatannya adalah yang paling kecil, sebesar 0,37%. Penyebabnya adalah kondisi sosial ekonomi dan sanitasi tempat tinggal. Kondisi ekonomi erat kaitannya dengan kemampuan dalam memenuhi asupan yang bergizi seimbang dan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita. Kondisi stunting ini merupakan dampak dari tidak seimbang kualitas gizi pangan yang tersedia, seperti yang dilaporkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Sementara sanitasi layak pada rumah sudah mencapai target 108% dari target rumah dengan sanitasi layak, nyatanya memang belum mencakupi seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Lampung.

Penanganan stunting di Lampung Barat berhasil mencapai angka 5,5% dari target minimal 24% balita stunting. Peningkatan ini merupakan hasil peran serta seluruh komponen internal dan eksternal sehingga memiliki dampak yang signifikan dalam penanganan gizi

buruk. Pihak eksternal adalah pemerintah pekon yang berperan aktif dalam pemantauan dan juga pemberian intervensi terkait temuan stunting di wilayah pekonnya yang dibuktikan dengan penganggaran intervensi terkait kesehatan minimal 8% dari jumlah pendanaan APBDDes. Pemerintah terus berupaya meningkatkan status gizi masyarakat melalui kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung peningkatan status gizi masyarakat. Faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian realisasi indikator ini antara lain:

- 1) Berjalannya program perbaikan gizi melalui pemberian obat gizi (tablet tambah darah pada ibu hamil, tambah darah remaja putri, pemberian kapsul vitamin A balita dan ibu hamil dan pemberian mineral mix untuk balita gizi buruk) serta pemberian PMT untuk balita KEP dan ibu hamil KEK;
- 2) Adanya alokasi anggaran biaya operasional kesehatan (BOK) yang diperuntukkan bagi pelaksanaan penyuluhan gizi di posyandu, sekolah kelas ibu hamil dan pemberian PMT lokal dengan bahan baku lokal;
- 3) Jumlah posyandu yang semakin meningkat dan tersebar ke berbagai pekon di 15 kecamatan.

Sementara itu, terdapat kendala yang masih dihadapi hingga saat ini antara lain:

- 1) Pengetahuan masyarakat yang masih rendah mengenai gizi keluarga dan diperburuk dengan status ekonomi masyarakat sehingga meskipun ada kesadaran namun secara pembiayaan tidak mampu;
- 2) Jumlah Posyandu belum menyebar ke seluruh pekon sehingga berpengaruh terhadap daya jangkau petugas kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi balita;
- 3) Peran aktif masyarakat masih rendah untuk mengakses pelayanan kesehatan untuk balita di posyandu;
- 4) Peran lintas sektor yang masih sangat kurang, pemahaman yang diyakini hingga saat ini adalah bahwa persoalan gizi masyarakat adalah semata-mata menjadi beban dan tanggung jawab sektor kesehatan saja.

Maka kebijakan yang dapat direkomendasi untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang adalah

dengan bekerjasama dengan Dinas PMP dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemahaman dan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah pekan tentang kesehatan keluarga dan pentingnya menjaga sanitasi yang layak Dinas PMP dan Dinas Lingkungan Hidup. Kedua, menambah jumlah Posyandu sehingga tersebar merata ke seluruh pekan dan kelurahan di Lampung Barat, sehingga pelayanan kesehatan semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Bersama dengan Dinas PUPR, membangun infrastruktur jalan lingkungan pekan dan infrastruktur Posyandu sehingga akses menuju Posyandu dapat mudah dan aman dilalui warga. Kelayakan infrastruktur jalan berpengaruh pada minat masyarakat mengunjungi fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan.

d) Usia Harapan Hidup (UHH)

UHH adalah rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Ukuran yang umum yang digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. UHH adalah cerminan kinerja pemerintah. AHH yang tinggi menggambarkan derajat kesehatan terjamin dan kemiskinan teratasi lebih baik. Rata-rata AHH Indonesia antara 75-77,5 tahun, angka ini meningkat dari tahun 2017 yang kala itu AHH nya sebesar 71,1 tahun, berdasarkan Biro Pusat Statistik. Beberapa hal yang mempengaruhi AHH adalah AKN, kematian sebab penyakit menular, kematian sebab penyakit tidak menular, dan kematian karena kecelakaan lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja antar perangkat daerah dan antar program berkaitan. AKN yang ternyata memberi dampak pada UHH manusia. Sementara kondisi infrastruktur jalan yang menjadi tanggungjawab Dinas PUPR dan kelengkapang lalu lintas yang menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan ternyata memberi pengaruh terhadap UHH. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperpanjang UHH adalah dengan menerapkan pola makan sehat dan lingkungan yang berkualitas. Sekali lagi indikator kinerja UHH dipengaruhi oleh hasil kinerja perangkat daerah lain, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Lingkungan Hidup.

Realisasi UHH Lampung Barat tahun 2021 ini memang telah mencapai target, capaiannya sebesar 100,02%. Namun pemerintah akan

terus berupaya secara berkelanjutan meningkatkan usia harapan hidup. Urgensinya dalam pembangunan adalah bahwa UHH menjadi indikator penting ketercapaian pembangunan di beberapa sektor, seperti perekonomian, kesehatan, politik, sosial dan budaya. Kondisi perekonomian masyarakat yang stabil akan menciptakan kecukupan pangan dan kebutuhan tersier lainnya sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sementara kondisi kesehatan akan memberi pengaruh kepada harapan hidup lama. Kemudian kondisi politik, sosial dan budaya yang kondusif dan arif akan mewujudkan kehidupan yang asri dan damai, tidak menimbulkan stres yang dapat mendatangkan berbagai penyakit.

Maka rekomendasi yang bisa disampaikan adalah bahwa untuk meningkatkan UHH Lampung Barat, diperlukan kerjasama antar perangkat daerah yang menunjang ketercapaian UHH untuk dapat meningkatkan kualitas implementasi program dan kegiatannya. Misalnya ketersediaan pangan dengan gizi seimbang dan lingkungan yang berkualitas.

9. Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Capaian Kinerja

Pendidikan adalah satu dari 3 serangkaian prasyarat indeks pembangunan manusia. Artinya, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab krisis sumber daya manusia. Terutama di era industri 4.0 ini, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersinergi dan berinovasi serta menempatkan diri mengikuti kemajuan era.

Maka urusan pendidikan menjadi satu urusan wajib pemerintah pusat dan daerah. Urusan pendidikan bahkan menjadi salah satu dari Pitu Program Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat terpilih, yaitu 'semua bisa melanjutkan sekolah'. Hal ini karena pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa dengan pendidikan, generasi penerus daerah Lampung Barat harus unggul, sehat dan cerdas sehingga dapat memajukan daerah dengan prestasi dan kontribusinya dalam pembangunan. Urusan pendidikan yang

menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah adalah pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama), sementara jenjang menengah atas merupakan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah provinsi.

Dalam melihat grafik aksesibilitas dan kualitas pendidikan, digunakan beberapa indikator untuk menjadi parameter ketercapaian peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Pertama, Angka Partisipasi Kasar (APK), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK digunakan untuk a) berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan; b) menunjukkan berapa besar kapasitas system pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu; c) indikator pelengkap APM, sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. APK SD di Lampung Barat tahun 2021 di targetkan sebesar 111,91%, terealisasi 103,32% atau tercapai 92,32%. Capaian APK SD ini meningkat sebesar 0,06% dari capaian tahun 2020, namun lebih rendah dari APK SD Provinsi Lampung tahun 2021 yang mencapai 105,63%. Sementara APK SMP Lampung Barat tahun 2021 terealisasi 103,66%, capaiannya sebesar 103,73% dari target 99,93%. Capaian APK SMP Lampung Barat ini lebih besar dibandingkan APK SMP rata-rata Provinsi Lampung yang sebesar 93,12%.

Kedua, Angka Partisipasi Murni (APM), adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah di tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur sesuai dengan ketentuan kelompok usian sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Target APM SD Lampung Barat tahun 2021 adalah 100% dan terealisasi sebesar 94,97% atau terealisasi 94,97%. Capaian ini lebih meningkat dibandingkan tahun 2020, namun lebih rendah

dari rata-rata APM Provinsi Lampung tahun 2021 yang bernilai 99,10%. APM SMP Lampung Barat tahun 2021 yang ditargetkan 91,94% nyatanya terealisasi 74,49% atau tercapai 81,02%. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang berhasil pada angka 82,85%, juga lebih rendah dibandingkan rata-rata APM SMP Provinsi Lampung yang tercapai pada angka 82,03%.

Ketiga, angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat di Lampung Barat. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Angka RLS di Lampung Barat tahun 2021 ditargetkan 7,42 tahun, realisasinya melegakan karena melebihi target di angka 8,07 tahun atau tercapai 108,76% kinerja. Realisasi tahun 2021 ini meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2020, hamper juga menyapai rata-rata lama sekolah Provinsi Lampung yang ada di angka 8,08 tahun. Jika melihat data BPS Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat menempati urutan ke tujuh kabupaten dengan RLS tertinggi.

Keempat, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun keatas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka HLS Lampung Barat tahun 2021 adalah 12,26 tahun, terealisasi sebesar 99,43% dari angka yang ditargetkan sebesar 12,33 tahun. Realisasi tahun 2021 ini menungguli realisasi tahun sebelumnya sebesar 0,01 tahun. Sementara jika dibandingkan dengan rata-rata HLS Provinsi Lampung tahun 2021 yang berada pada angka 12,73 tahun, capaian HLS Lampung Barat masih tertinggal 0,47 tahun. Peringkatnya dengan 15 kabupaten di Provinsi Lampung belum masuk dalam 5 besar HLS terlama.

Kelima, angka melanjutkan sekolah, adalah persentase siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu

dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu. Angka melanjutkan sekolah ini menggambarkan seberapa banyak siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang dan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ini. Target melanjutkan sekolah tahun 2021 ada pada angka 90,83%, realisasinya angka melanjutkan sekolah adalah 100% atau tercapai 110,09% dari target kinerja. Realisasi ini meningkat dari tahun 2020 yang berada pada angka 91,24%.

Keenam, nilai rata-rata ujian nasional, adalah sistem evaluasi pengukuran pencapaian kompetensi lulusan peserta didik pada jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah. Sebelum tahun 2020, ujian nasional menjadi parameter kelulus siswa dari suatu jenjang pendidikan. Namun, sejak pandemi melanda Indonesia tahun 2020, pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat *Corona Virus Disease* (Covid-19), menghapuskan ujian nasional dan menggantinya dengan asesmen nasional. Asesmen nasional menilai mutu satuan pendidikan dengan melihat hasil belajar mendasar siswa (literasi, numerasi, karakter), kualitas belajar-mengajar, serta iklim satuan pendidikan.

Keenam indikator kinerja tersebut diperoleh menggunakan formula yang berbeda, berikut ini adalah daftar cara perhitungan indikator kinerja yang menjadi parameter meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Lampung Barat tahun 2021.

Tabel 32. Cara perhitungan Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan di Lampung Barat

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi
Angka Partisipasi Kasar SD	$\frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 th}} \times 100\%$	111,91%	103,32%
Angka Partisipasi Kasar SMP	$\frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	99,93%	103,66%
Angka Partisipasi Murni SD	$\frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat usia 7-12 th}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 th}} \times 100\%$	100%	94,97%
Angka Partisipasi Murni SMP	$\frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajat usia 13-15 th}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 th}} \times 100\%$	91,94%	74,49%
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	$\frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{lama sekolah penduduk ke } - i)$	7,42 th	8,07 th
Angka Harapan Lama Sekolah		12,33 th	12,26 th

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target	Realisasi
	$HLS^t_a = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E^t_i}{P^t_i}$		
Angka Melanjutkan Sekolah	$Y1 = \frac{a}{b} \times 100\%$	90,83 %	100%
Nilai Rata-Rata Ujian Nasional SD	Jumlah rata-rata nilai UN SD x 100% jumlah SD di Lampung Barat	210,21	-
Nilai Rata-Rata Ujian Nasional SMP	Jumlah rata-rata nilai UN SMP x 100% jumlah SMP di Lampung Barat	236,21	-

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat Tahun 2021, BPS tahun 2020, diolah tim, 2022.

Keterangan:

P15+	= jumlah penduduk berusia 15 th keatas
LS ke-I	=
Tidak pernah sekolah	= 0
Masih sekolah SD-S1	= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1
Masih S2/S3	= konversi ijazah terakhir+1
Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir	= konversi ijazah terakhir
Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terkahir	= konversi ijazah terakhir
= kelas terakhir - 1	
HLS^t_a	= harapan laam sekolah pada umur a di tahun t
E^t_i	= jumlah penduduk usian I yang bersekolah pada tahun t
i	= usia (a, a+1, ..n)
FK	= faktor koreksi pesantren
Y1	= angka melanjutkan pad jenjang SD ke SMP
a	= jumlah siswa yang duduk di kelas 6 SD pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 SMP pada tahun ajaran sekarang
b	= jumlah siswa yang duduk di kelas 6 SD pada tahun ajaran lalu

Berikut ini adalah perkembangan realisasi 6 indikator kinerja untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan tahun 2019 sampai tahun 2021 serta capaian target RPJMD sampai tahun 2021.

Tabel 33. Realisasi 6 Indikator Kinerja untuk Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	Target RPJMD 2022	Capaian Akhir RPJMD s.d 2021
	Realisasi	Realisasi	Realisasi		
Angka Partisipasi Kasar SD	98,68%	103,24%	103,32%	111,93%	92,31%
Angka Partisipasi Kasar SMP	101,42%	101,68%	103,66%	99,95%	103,71%
Angka Partisipasi Murni SD	88,55%	93,86%	94,97%	100%	94,97%

Angka Partisipasi Murni SMP	76,39%	76,14%	75,49%	91,99%	82,11%
Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,85 th	8,06 th	8,07 th	7,44 th	1,08%
Angka Harapan Lama Sekolah	12,24 th	12,25 th	12,26 th	12,35 th	0,99%
Angka Melanjutkan Sekolah	89,26%	91,24%	100%	90,85%	110,07%
Nilai rata-rata Ujian Nasional SD	220,15 poin	0	0	210,31 poin	0,00%
Nilai rata-rata Ujian Nasional SMP	213,89 poin	0	0	236,31 poin	0,00%

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

a) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar di Lampung Barat pada 2 jenjang pendidikan mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam periode RPJMD 2018-2022, beberapa kali mengalami penurunan namun tidak signifikan. Tingginya APK ini memberi fakta bahwa partisipasi sekolah penduduk Lampung Barat diluar usia batas sekolah pada jenjang pendidikan sudah cukup tinggi. Partisipasi penduduk pada jenjang SMP sederajat diluar batas usian sekolah lebih banyak dibandingkan dengan partisipasi penduduk untuk masuk sekolah dini pada jenjang SD sederajat. Hal ini terlihat dari capaian APK SMP yang lebih tinggi dari APK SD. Tingginya APK menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan di Lampung Barat, sekaligus menunjukkan kemudahan akses masyarakat dalam menempuh pendidikan. APK juga digunakan sebagai penentu tingkat kualitas layanan pembelajaran dan layanan satuan pendidikan di Lampung Barat.

Kemajuan pendidikan dikaitkan dengan seberapa besar APK SD dan SMP, hal ini karena APK menunjukkan partisipasi penduduk yang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK SD tahun 2021 terealisasi 103,32%, tercapai 92,31% dari target akhir RPJMD. Sementara APK SMP tahun 2021 terealisasi 103,66%, tercapai 103,71% dari target akhir RPJMD. Hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah bahwa partisipasi penduduk untuk bersekolah pada jenjang pendidikan diluar usia pendidikan masih belum optimal, penyebabnya bisa jadi karena kurangnya sara prasarana atau daya tampung yang sekolah yang belum sesuai dengan jumlah kebutuhan penduduk untuk bersekolah pada satu jenjang sekolah. Dalam

Kabupaten Lampung Barat, pemerintah terus berupaya meningkatkan infrastruktur sekolah agar layak nyaman dan sesuai rasio jumlah penduduk untuk sekolah.

Faktor yang dapat berpengaruh terhadap tidak tercapainya target indikator ini dapat disebabkan karena kurangnya inisiatif masyarakat untuk mendaftarkan anaknya bersekolah lebih awal yang dapat disebabkan oleh faktor kesulitan ekonomi ataupun kesulitan akses dikarenakan faktor geografis/jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal dan tidak tersedianya akses kendaraan untuk ke sekolah.

b) Angka Partisipasi Murni (APM)

Capaian APM SD tahun 2021 adalah 94,97%, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka kinerja sampai dengan tahun 2021 ini mencapai 94,97%. Realisasi indikator APM SD di tahun 2021 yang lebih rendah dari target sejalan dengan rendahnya capaian APK SD tahun 2021 yang menunjukkan bahwa terdapat 5,03% siswa belum mencapai atau lebih dari usia 7-12 tahun. Kondisi ini dapat disebabkan karena masih adanya masyarakat yang terlambat mendaftarkan anaknya sebagai siswa SD sesuai usianya atau masih ada yang lebih awal memasukkan anaknya sebagai siswa SD sebelum usia 7 tahun. Jika dilihat dari ketercapaian atau realisasi APK tidak mencapai target dikarenakan adanya Permendikbud No. 14 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang mensyaratkan siswa baru SD harus berusia 7 tahun atau per bulan juli berusia 6 tahun.

APM SMP berdasarkan target 2021 adalah 91,94% terealisasi 75,49%. Realisasi di tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 76,14% dan jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMD maka pencapaian tahun 2021 sebesar 82,11%. Realisasi indikator APM SMP di tahun 2021 yang lebih rendah dari target menunjukkan bahwa terdapat 23,86% penduduk usia 13-15 tahun yang mengikuti pendidikan sekolah menengah pertama belum sesuai usia SMP. Kondisi ini dapat disebabkan karena masih adanya masyarakat yang terlambat mendaftarkan anaknya sebagai siswa SMP sesuai usianya atau masih ada yang lebih awal memasukkan anaknya sebagai siswa SMP sebelum usia 13 tahun.

c) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka RLS tahun 2021 di Lampung Barat mengalami penambahan setiap tahunnya sejak periode awal RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Lampung Barat memiliki harapan lebih lama untuk menempuh pendidikan. Rata-rata lama sekolah tahun 2021 adalah 8,07 tahun, artinya rata-rata penduduk Lampung Barat sudah menempuh pendidikan pada separuh jenjang menengah pertama. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan untuk mewujudkan salah satu Pitu Program yang memberi kesempatan sekolah bagi setiap penduduknya. Jika dilihat dari capaian angka rata-rata lama sekolah tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk Lampung Barat rata-rata pernah menduduki kelas tertinggi sampai pada jenjang SMP.

d) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah kabupaten Lampung Barat berdasarkan target tahun 2021 adalah 12,33 tahun dan terealisasi 12,26 tahun, berdasarkan data dari BPS. Dilihat dari capaian angka harapan lama sekolah tersebut didefinisikan bahwa lamanya sekolah yang ditempuh oleh penduduk Lampung Barat adalah sampai dengan kelas 3 SMA sederajat atau lebih. Tahun 2021 capaian kinerjanya adalah sebesar 12,26 tahun atau 99,43% bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka capaian kinerjanya mencapai 99,28%. Sama dengan RLS, untuk meningkatkan HLS maka langkah yang ditempuh adalah mengupayakan agar tidak ada anak yang putus sekolah. Upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain melalui program seragam gratis, pemberian beasiswa bagi siswa yang akan melanjutkan sekolah tinggi.

e) Angka Melanjutkan Sekolah

Target kinerja tahun 2021 adalah 90,83%, terealisasi sebesar 100% atau tercapai 110,09%. Jika dilihat dari capaian angka melanjutkan sekolah tersebut dari jenjang SD ke SMP berdasarkan target IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 melebihi target IKU.

f) Rata-Rata Nilai Ujian Nasional

Sejak pandemi melanda Indonesia tahun 2020, pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat *Corona Virus Disease* (Covid-19), menghapuskan ujian nasional dan menggantinya dengan asesmen nasional. Asesmen nasional menilai mutu satuan pendidikan dengan melihat hasil belajar mendasar siswa (literasi, numerasi, karakter), kualitas belajar-mengajar, serta iklim satuan pendidikan.

Keberhasilan capaian-capaian indikator yang berpengaruh terhadap peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan ini tidak terlepas dari upaya keras dan berkelanjutan pemerintah melalui penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung peningkatan akses dan kualitas. Diantara program yang dimaksud adalah program pengelolaan pendidikan dan program pembangunan kurikulum. Indikator dari program pengelolaan pendidikan adalah persentase penduduk usia 5-18 tahun yang mengikuti Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan dengan target 94,15% terealisasi 77,04%. Melihat dari capaian target indikator ini dikarenakan adanya sebagian warga Lampung Barat sekitar 22,96% tidak bersekolah atau bersekolah tidak sesuai dengan usia sekolah. Sementara indikator dari program pendidikan non formal adalah jumlah mata pelajaran muatan lokal pada kurikulum muatan lokal, target pada tahun 2021 sebesar 3 mata pelajaran teralisasi 1 mata pelajaran. Jika dilihat dari realisasi indikator ini belum mencapai target dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga dipilih mata pelajaran yang menjadi prioritas terlebih dahulu.

Faktor penunjang indikator keberhasilan meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di bidang pendidikan sangat tinggi, dapat dilihat dari program unggulan Pemkab Lampung Barat untuk pendidikan seperti seragam gratis bagi siswa, beasiswa pendidikan kesenian, peningkatan mutu pendidikan baik sarana dan prasarana sekolah maupun pendidik dan tenaga kependidikannya. Selain itu, ada kinerja perangkat daerah lain yang beririsan dengan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan ini, adalah Dinas PUPR. Dalam rangka mewujudkan infrastruktur jalan dan bangunan sekolah yang layak dan memadai kebutuhan siswa, pendidik dan tenaga pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan di setiap wilayah di Lampung Barat. Optimalisasi hasil dari menempuh pendidikan bagi penduduk juga dipengaruhi oleh asupan gizi seimbang yang diperoleh dari ketersediaan pangan yang cukup dan seimbang gizi.

Sementara meningkatnya kualitas pendidikan ini akan menjadi salah satu dari 3 indikator utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah indeks ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kemajuan suatu daerah yang salah satunya dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya yang dicerminkan dari indeks pendidikan yang dihitung dari angka harapan lama sekolah, APK, APM, angka melanjutkan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Melalui pendidikan, seorang individu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga produktivitas yang dihasilkan akan tinggi. Pengetahuan dan keterampilan yang tinggi akan menjadi modal seseorang untuk menanggalkan kemiskinan dan menuju individu yang berdaya dan mandiri sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses implementasi selama tahun 2021 yaitu belum optimalnya capaian indikator kinerja karena masa pandemi Covid-19 yang mempengaruhi menurunnya pendanaan program kegiatan dan minat partisipasi sekolah penduduk. Maka rekomendasi yang disarankan untuk meningkatkan kinerja tahun selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan implementasi program sesuai target dan memastikan ketepatan sasaran program menggunakan sumber pendanaan yang tersedia. Meningkatkan infrastruktur pendidikan serta kebijakan kesempatan belajar yang sama bagi masyarakat Lampung Barat.

10. Sasaran Strategis 10 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat

Capaian Kinerja

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan nasional negara Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Kecerdasan diperoleh dari banyaknya pengetahuan seseorang. Selain melalui kegiatan belajar mengajar, pengetahuan dapat diperoleh dari

membaca buku atau literasi jenis lainnya. Kemajuan zaman membawa serta persaingan antar individu dan negara dalam berkompetisi di berbagai bidang, prestasi pendidikan, persaingan industri kerja, kerjasama politik, dan lainnya. Hal ini berdampak pada perlunya seseorang meningkatkan ilmu pengetahuannya. Pemerintah daerah Lampung Barat mendukung hal tersebut dengan menyediakan perpustakaan daerah yang berada dibawah tanggungjawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Perpustakaan sebagai pusat informasi dan ilmu pengetahuan memiliki tugas dan peluang besar untuk berperan serta aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui koleksi bahan pustaka yang dikelola dan fasilitas yang tersedia, perpustakaan dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan akses informasi dalam rangka peningkatan kecerdasan religi, intelektual, kognisi, afeksi, dan kinetik masyarakat.

Sasaran meningkatnya minat baca masyarakat diukur dengan persentase pengunjung yang menjadi anggota perpustakaan. Perpustakaan memiliki peranan strategis untuk turut mendukung mencerdaskan kehidupan bangsa. Maju mundurnya perpustakaan ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat, bahkan minat baca dijadikan salah satu indikator yang dapat menunjukkan kemajuan suatu bangsa. Pada tahun 2021, realisasi persentase pengunjung yang menjadi anggota perpustakaan adalah 3,49%. Realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 2,74%, sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 127,37%. Jumlah minat baca tahun 2021 ini meningkat cukup banyak dari tahun 2020 yang capaian minat bacanya sebesar 48,99%. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian per tahun 2021 sudah sebesar 116,72%. Berikut ini adalah cara perhitungan capaian indikator minat baca masyarakat.

Tabel 34. Cara Perhitungan Capaian Indikator Minat Baca Masyarakat

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengunjung yang menjadi anggota perpustakaan	$\frac{\text{Jml pengunjung perpustakaan}}{\text{Jml anggota perpustakaan keseluruhan}} \times 100\%$	2,74%	3,49%	127,37%

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Sementara perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021 serta target akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 35. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021
Persentase pengunjung yang menjadi anggota perpustakaan	1,22%	3,49%	2,99%	116,72%

Sumber: diolah tim, 2022.

Jumlah pengunjung diambil dari data pengunjung di perpustakaan daerah. Jumlah pengunjung keseluruhan tahun 2021 sebanyak 7.124 orang dan jumlah anggota perpustakaan 6.868 orang, meningkat bila dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah pengunjung sebanyak 2.631 orang dan jumlah anggota perpustakaan 214 anggota. Berikut disampaikan tabel jenis perpustakaan dan jumlah kunjungan pada tahun 2021:

Tabel 36. Jenis Kepustakaan di Lampung Barat dan Jumlahnya

NO	JENIS PERPUSTAKAAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	SATUAN
1	Jumlah Perpustakaan Umum	1	1	1	Unit
2	Jumlah Perpustakaan Sekolah	182	327	332	
3	Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi	1	1	1	Unit
4	Judul buku	11.224	12.438	13.144	Unit
	Perpustakaan Umum	11.224	12.438	13.144	Unit
5	Pustakawan Dan Tenaga Teknis Perpustakaan	1	1	3	Unit
	Perpustakaan Umum	1	1	3	Unit
6	Jumlah Perpustakaan memenuhi standar	184	185	185	Unit
	a. Perpustakaan Umum	1	1	1	Unit
	b. Perpustakaan sekolah	182	182	185	Unit
	c. Perpustakaan Pekon	1	2	2	Unit
7	Jumlah pemustaka ke perpustakaan	7.558	2.631	4.064	Unit
	a. Jumlah pemustaka ke perpustakaan umum	7.558	2.631	7.124	Unit
8	Jumlah Anggota Perpustakaan	4.407	4.877	6.868	Unit
	a. Jumlah anggota Perpustakaan Umum	4.407	4.877	7.124	Unit

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021.

Perpustakaan umum dapat berperan membina dan meningkatkan minat baca masyarakat, karena dengan membaca diharapkan seseorang akan memperoleh informasi dari bahan pustaka yang dibaca dan memperoleh pengertian mendalam tentang suatu peristiwa atau gejala. Dengan adanya minat baca akan diperoleh hasil yang maksimal, baik itu informasi, pengertian, pengetahuan, keterampilan, motivasi atau fakta

seperti yang disajikan oleh bahan bacaan. Namun di sisi lain ternyata minat dan kebiasaan membaca masyarakat yang masih rendah tampaknya turut memberi andil bagi rendahnya kualitas manusia Indoensia yang tergambar dalam Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) Indonesia berada pada posisi 111 dari 175 negara menurut kondisi tahun 2004.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif dan inovatif berbasis pengetahuan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serius untuk meningkatkan minat baca masyarakat bahkan menjadikan Lampung Barat sebagai kabupaten literasi. Melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah berkomitmen dan berusaha untuk meningkatkan indeks minat baca masyarakat Kabupaten Lampung Barat dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut baik memperkenalkan buku kepada anak-anak usia dini sampai dengan layanan perpustakaan masyarakat secara umum.

Story telling merupakan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat bertujuan untuk memperkenalkan anak usia dini pada minat dan kegemaran membaca, peserta pada kegiatan ini tentu bukan hanya dari anak usia dini saja namun juga didampingi oleh orang tua mereka. Dengan ikut sertanya orang tua dalam kegiatan semacam ini, orangtua dapat menjadi sasaran sosialisasi minat baca untuk dapat membimbing anak-anaknya belajar mencintai buku karena seperti yang diketahui orang tua adalah guru pertama dalam lingkungan keluarga.

Jumlah pengunjung dan anggota perpustakaan di Lampung Barat mengalami fluktuasi sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2018 jumlah pengunjung mencapai 6.850 orang dengan jumlah anggota 55 orang. Tahun 2019 jumlah pengunjung bertambah menjadi 7.558 orang dengan keanggotaan 45 orang. Tahun 2020 jumlah pengunjung menurun sampai berjumlah 2.631 orang dengan keanggotaan 214 orang. Sementara tahun 2021 jumlah pengunjung sebanyak 7.124 orang dan jumlah anggota perpustakaan 6.868 orang.

Pada era kemajuan teknologi saat ini, pemerintah juga terus berinovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Pemerintah menyadari teknologi telah mengambil alih dunia banyak orang, banyak orang lebih senang berlama-lama menggunakan teknologi komunikasi

telepon pintar dari pada membaca buku. Membaca buku berlama-lama dianggap membosankan dan konvensional. Oleh karena hal tersebut, pemerintah menciptakan perpustakaan digital yang dapat dikunjungi oleh siapa saja dan darimana saja. Inovasi ini muncul dilatarbelakangi oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan sosial sehingga jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2020 menukik tajam. Keberhasilan inovasi ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan yang kembali meningkat di tahun 2021 meski masih dalam masa pandemi.

Selain perpustakaan *online*, pemerintah juga tetap melanjutkan program-program peningkatan minat baca masyarakat pekon dan anak usia dini dengan menambah dan mengembangkan perpustakaan pekon dan sekolah melalui banyak kegiatan menarik, kreatif dan menyenangkan untuk anak dan masyarakat umum.

11. Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Capaian Kinerja

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pada tahun 2021, PDRB per kapita Lampung Barat ADHB mencapai Rp.24.714.990, realisasi ini belum mencapai angka yang ditarget sebesar Rp.27.561.067 atau tercapai kinerja 89,67%. Realisasi pendapatan per kapita ini bertambah 1,20 juta rupiah lebih dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 23,41 juta rupiah lebih. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian tahun 2021 ini sudah mencapai 81,79%. Pendapatan per kapita Lampung Barat tahun 2021 ini juga masih berada dibawah pendapatan per kapita Provinsi Lampung yang sebesar Rp.40.950.417. Namun, perlu diketahui bahwa indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan per kapita penduduk. Indikator ini

lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreatifitas usaha dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Namun dengan segala keterbatasannya, indikator PDRB per kapita dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah perkembangan pendapatan per kapita sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 37. Perkembangan Pendapatan Per Kapita Lampung Barat Tahun 2018-2021

INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021
PDRB Per Kapita	Juta (Rp)	21,92	23,43	23,41	24,71	30,215	81,79 %

Sumber: BPS Lampung Barat, 2022.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Besarnya pendapatan per kapita Lampung Barat tahun 2021 ini memang menjadi pendapatan yang paling rendah dibandingkan dengan 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kondisi ini selaras dengan jumlah penduduk yang menempati urutan kelima kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terendah di Provinsi Lampung. Meski sempat mengalami penurunan di tahun 2020 karena dampak pandemi Covid-19, pendapatan per kapita tahun 2021 kembali meningkat di tahun 2021 dengan cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan potensi sumber daya alam dan kegiatan produksi dalam daerah sudah mulai bangkit dalam pembiasaan baru meski masih dalam kondisi pandemi.

Pemerintah terus berupaya dalam komitmen meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dengan meningkatnya pendapatan penduduk akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa program yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat adalah diantaranya, pertama, pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. Pada era kemajuan teknologi ini, komunikasi dan informasi banyak disalurkan dan didapatkan dari teknologi telepon pintar yang terkoneksi dengan internet. Semua hal bias diakses, termasuk juga lapangan usaha yang saat ini banyak dipasarkan melalui jaringan media sosial. Hal ini berkembang seiring dengan

berkembangnya teknologi dan meningkatnya penggunaan internet dikalangan masyarakat umum. Maka pemerataan tower jaringan telekomunikasi sangat berpengaruh terhadap keterbukaan informasi dan peluang usaha masyarakat.

Kedua, pembangunan jalan dan jembatan. Jalan dan jembatan sebagai urat nadi jaringan perhubungan yang memindahkan barang dan orang dari satu daerah ke daerah lain. Kondisi jalan dan jembatan yang mantap sangat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat dalam produktivitasnya untuk menambah nilai ekonomi bagi keberlangsungan kebutuhan kehidupan mereka. Maka pemerintah melalui Dinas PUPR terus melakukan perbaikan dan pembangunan jalan kabupaten dan jalan lingkungan menjadi jalan mantap dengan standar memadai. Ketiga, pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan. Ketersediaan pangan akan mencukupi kebutuhan pangan yang bergizi seimbang bagi masyarakat. Masyarakat bergizi seimbang akan memiliki kesehatan yang mumpuni untuk produktifitasnya. Sehingga masyarakat yang produktif akan mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik primer ataupun tersier. Pendapatan per kapita ini juga dipengaruhi oleh kinerja Dinas Ketahanan Pangan.

Keempat, pengembangan sistem distribusi, stabilitas harga dan kelembagaan pangan. Pemerintah selalu berupaya menjaga stabilitas harga pasar yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperindag. Hal ini bertujuan untuk menjaga keuntungan pedagang dan kemampuan daya beli masyarakat, terutama terhadap kebutuhan pokok. Selain menjaga stabilitas harga pasar dalam daerah, pemerintah juga menyediakan kesempatan untuk memasarkan hasil perkebunan untuk dijual keluar daerah. Biasanya hasil produksi perkebunan dari dalam daerah Lampung Barat dikirim ke Jakarta dan sekitarnya. Mobilitas pemasaran hasil produksi ini membantu meningkatkan pendapatan masyarakat karena harga jual hasil produksi didalam dan diluar daerah berbeda. Peningkatan harga jual di luar daerah dipengaruhi oleh biaya transportasi yang digunakan dari daerah produksi sampai ke tempat tujuan pemasaran. Selain itu, adanya lumbung padi yang dibentuk pemerintah bersama masyarakat di banyak kelompok tani pada kecamatan-kecamatan di Lampung Barat membantu menjaga ketersediaan pangan masyarakat.

Kelima, peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemasaran hasil perkebunan. Perkebunan adalah sektor perekonomian yang paling besar dan darinya sebagian besar pendapatan daerah didapatkan. Terutama komoditas kopi yang telah menjadi sentra kopi kualitas tinggi di Indonesia. Komoditas lada, kakao, kayu manis, kelapa dalam, cengkeh, aren, dan kemiri adalah komoditas yang dibudidayakan dan dikembangkan di Lampung Barat. Pemerintah telah berhasil dan terus berupaya meningkatkan daya saing dan pemasaran hasil produksi komoditas perkebunan ini salah satunya dengan pemasaran kopi asal Lampung Barat di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Hasilnya, kopi robusta Lampung Barat telah mendapat sertifikasi indikasi geografis dari Ditjen HAKI KemenkumHAM dan ditetapkan menjadi kawasan perkebunan kopi nasional. Komoditas lada juga sudah lama dikenal sebagai primadona.

Keenam, peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura. Melalui program pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan, penyuluhan pertanian, dan program-program lain dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan perangkat daerah lain yang mendukung sektor pertanian sebagai upaya peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura. Hortikultura menjadi bagian peningkatan pendapatan per kapita karena sektor tanaman pangan dan hortikultura adalah sektor yang paling potensial untuk dikembangkan di Lampung Barat sesuai dengan kontur dan kesuburan tanah.

Melalui program-program yang disebutkan tersebut menggambarkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita adalah tugas *multi stakeholder* yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat. Rekomendasi yang disarankan untuk tahun selanjutnya adalah mengoptimalkan program-program yang mendukung peningkatan pendapatan per kapita masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat, ketimpangan menurun, dan merata bagi seluruh masyarakat.

12. Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Prestasi Olahraga

Capaian Kinerja

Olahraga dapat memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia. Olahraga juga dapat

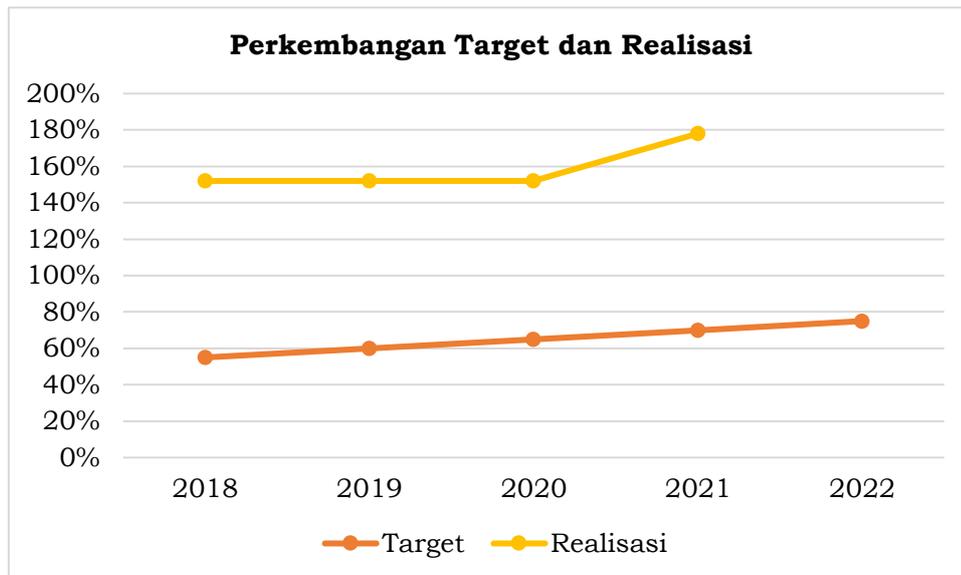
membangun karakter dan jati diri bangsa melalui nilai-nilai sportivitas, disiplin, dinamis, dan etos kerja keras. Oleh karena hal tersebut, olahraga menjadi bagian dari upaya pembangunan daerah. Sehingga urgensi olahraga dalam pembangunan daerah adalah perannya pada pembangunan sumber daya manusia. Peningkatan prestasi olahraga di Lampung Barat dilihat melalui jumlah atlet yang berprestasi di berbagai cabang olahraga. Melalui kegiatan penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Kabupaten Lampung Barat, ditargetkan jumlah atlet yang berprestasi di berbagai cabang olahraga dalam kejuaraan dan pekan olahraga tersebut adalah 70% dari jumlah seluruh atlet di Lampung Barat. Tingginya minat berkompetisi dalam olahraga ternyata melonjak sehingga realisasi jumlah atlet berprestasi dalam berbagai cabang olahraga adalah 178%. Atau terealisasi 254,28%. Capaian ini meningkatkan sebanyak 26% jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2020. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 75%, capaian tahun 2021 ini sudah melebihi target akhir. Berikut ini adalah perbandingan realisasi peningkatan prestasi olahraga tahun 2020 dan 2021 serta target akhir RPJMD:

Tabel 38. Perbandingan Realisasi Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja RPJMD s.d 2021
Persentase cabang olahraga yang berprestasi	17,65%	178%	75%	237,33%

Sumber: diolah tim, 2022.

Ralisasi kinerja peningkatan prestasi olahraga melalui indikator persentase cabang olahraga yang berprestasi ini cenderung stabil sejak tahun 2018 sampai dengan 2019. Namun menukik tajam pada tahun 2020, sementara tahun 2021 kembali mengalami peningkatan. Berikut ini adalah grafik perkembangan realisasi kinerja prestasi olahraga.



Grafik 12. Perkembangan Target dan Realisasi Persentase Cabang Olahraga Berprestasi Tahun 2018- 2022

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021

Pada tahun 2021, ada 26 atlet dari total 69 atlet binaan yang menjuarai 6 cabang olahraga di tingkat Provinsi Lampung. Dua diantaranya merupakan atlet PON. Jumlah atlet yang berprestasi di berbagai cabang olahraga ini bertambah 19 orang dari tahun 2020. Prestasi ini membanggakan Kabupaten Lampung Barat, sehingga pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembinaan kepada para atlet akan mampu menjadi atlet unggul dan berdaya saing.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Kondisi jasmani dan rohani yang kuat akan memberikan landasan yang kuat pula terhadap pengembangan sumber daya manusia. Bangsa yang kuat dan besar terutama ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Sehingga olahraga merupakan bagian tak terpisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Pemerintah Lampung Barat melalui kegiatan penyelenggaraan, pengembangan dan permasalahan festival dan olahraga yang dilakukan sebanyak 44 kali selama tahun 2021, berharap masyarakat dapat meningkatkan kegiatan olahraga dengan memanfaatkan kegiatan olahraga yang telah disediakan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menyediakan, mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana olahraga rekreasi di 3 tempat. Tujuannya adalah untuk pemenuhan fasilitas olahraga umum yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Semua upaya ini dilakukan pemerintah Lampung Barat berdasarkan kesadaran bahwa jumlah

penduduk yang terus bertambah merupakan sumber untuk memperoleh bibit olahragawan yang berpotensi dalam berbagai cabang olahraga.

Bagi masyarakat umum, senam bersama yang rutin dilakukan setiap minggu dapat diikuti untuk menyehatkan badan, sementara pemerintah juga terus berfokus membina cabang olahraga yang dipertandingkan baik dalam wilayah kabupaten atau dalam tingkat Provinsi Lampung dan tingkat nasional. Pengembangan cabang olahraga ini menyesuaikan karakteristik postur tubuh rata-rata orang di Indonesia dengan memanfaatkan sarana darat, air dan udara yang dimiliki daerah. Saat ini, cabang olahraga (cabor) yang dibina oleh Pemerintah Lampung Barat ada 6 cabang olahraga. Pertama, pencak silat, membina 20 atlet daerah untuk persiapan berbagai pertandingan pencak silat. Sebanyak 9 atlet pencak silat berprestasi di berbagai kejuaraan seperti kejuaraan sirkuit daerah pencak silat Pengprov IPSI Lampung dan *Tryout* pencak silat Lampung vs Bekasi. Jumlah atlet berprestasi di cabor ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu sebanyak 1 atlet berprestasi di cabang olahraga pencak silat. Kedua, cabang olahraga tenis, membina 12 atlet tenis dengan prestasi dari 5 atlet dalam 10 kali kejuaraan sirkuit tenis. Tahun sebelumnya ada 1 atlet yang berprestasi di cabang olahraga tenis meja. Ketiga, cabang atletik, dari 7 atlet yang dibina, terdapat 2 atlet yang berprestasi pada kejuaraan lari cepat 100 meter, kejuaraan lompat jauh, dan lempar cakram di tingkat Provinsi Lampung. Keempat, cabang olahraga karate. Cabang olahraga ini membina 8 atlet dengan prestasi dari 2 atlet nya menjadi atlet PON dan menjuarai peringkat 3 PON Papua 2021. Kelima, cabang tinju amatir. Cabor ini memiliki 14 atlet binaan dan 5 atlet mendapat prestasi pada kejuaraan tinju amatir tingkat Provinsi Lampung dengan menjuarai peringkat I, II, dan III. Keenam, cabang olahraga bulutangkis. Sebanyak 8 atlet dibina untuk dapat mengikuti kejuaraan bulutangkis, 3 diantaranya menjuarai kejuaraan bulutangkis GLOMPONG Cup Tahun 2021. Jumlah atlet berprestasi di cabang olahraga ini juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang memiliki 1 atlet berprestasi.



Gambar 19. Contoh Kegiatan untuk Meningkatkan Prestasi Olahraga
Sumber: dokumentasi Dinas Porapar, 2022.

Olahraga saat ini menjadi semakin populer karena kemampuannya untuk menyehatkan badan. Banyaknya pergerakan dalam kegiatan olahraga berdampak pada kesehatan. Penyakit jantung, darah tinggi, bahkan obesitas merupakan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kurangnya gerak badan manusia. Maka kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam urusan olahraga ini berkaitan dengan kinerja Dinas Kesehatan. Peningkatan jumlah orang yang berolahraga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Sementara jumlah atlet yang berprestasi di berbagai cabang olahraga baik ditingkat Kabupaten Lampung Barat dan tingkat Provinsi Lampung berdampak pada meningkatnya prestasi olahraga Lampung Barat sehingga dapat menjadi penyemangat bagi pemuda dan masyarakat untuk bergabung atau berpartisipasi dalam olahraga.

Jika menganalisa banyak pesta olahraga internasional seperti FIFA (*Federation Internationale de Football Association*), Olimpiade, Liga Champions UEFA (*Union of European Football Association*), Piala Dunia Kriket ICC (*Internasional Cricket Council*), *Super Bowl*, Wimbledon (kejuaraan tenis), dan *Tour de France* (kejuaraan balap sepeda). Tujuh pertandingan berbagai cabang olahraga tersebut adalah yang paling populer di dunia, masih banyak pertandingan olahraga dalam berbagai cabang baik ditingkat nasional atau antar negara bagian. Indonesia memiliki Pekan Olahraga Nasional (PON) yang diselenggarakan 4 tahun sekali. Ajang olahraga nasional ini mewadahi perunjukan bakat para atlet Indonesia dari berbagai daerah yang

sebelumnya telah terbina dan terseleksi di masing-masing daerahnya. Pada tingkat Asia Tenggara, ada SEA Games (*Southeast Games*) yang merupakan pesta olahraga bagi negara-negara Asia Tenggara yang bertujuan untuk mempererat kerja sama dan integrasi masyarakat kawasan Asia Tenggara untuk membangun masyarakat ASEAN yang kuat.

Negara-negara yang memenangi kejuaraan-kejuaraan olahraga banyak menjadi sorotan dunia karena prestasinya yang membanggakan negara. Banyak penghargaan dan royalti yang didapatkan oleh seorang atlet dan negara pemenang, sehingga memenangi kejuaraan olahraga berarti telah membawa memperkenalkan daerah dan negara kepada publik nasional dan internasional. Banyaknya jenis pertandingan olahraga tersebut adalah kata lain dari perkembangan dan persaingan pembangunan olahraga antar negara yang semakin ketat dan keras. Hal tersebut juga menunjukkan kesadaran negara-negara di dunia akan pentingnya pembangunan olahraga bagi bangsanya. Terutama di era globalisasi ini, pemerintah daerah wajib mendukung negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan olahraga. Olahraga telah terbukti memiliki pengaruh besar membentuk manusia yang berkualitas.

Kelemahan yang disadari dan menjadi perhatian pemerintah adalah masih terbatasnya jumlah cabang olahraga yang dimiliki dalam pembinaan pemerintah, sehingga belum semua minat dan bakat masyarakat dapat tertampung dan terbina sampai sirkuit kejuaraan. Maka rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah melanjutkan program penyelenggaraan kejuaraan dan pecan olahraga tingkat kabupaten untuk lebih banyak cabang olahraga. Sehingga dari implementasi program yang menambahkan cabang olahraga ini dapat ditemukan bibit-bibit atlet yang akan dibina dan diikutsertakan dalam berbagai sirkuit kejuaraan baik di tingkat Provinsi Lampung atau tingkat nasional. Tujuan akhir dari penambahan jumlah cabang olahraga dan jumlah atlet yang berprestasi dalam berbagai cabang olahraga ini adalah untuk membentuk sumber daya manusia yang berdaya asing, dan berkarakter jati diri bangsa yang sportif, disiplin, dinamis, dan etos kerja keras. Karakter yang terbentuk melalui latihan kontinu ini bukan hanya berguna dalam pertandingan sirkuit saja, melainkan juga melekat dan terimplementasi dalam berkehidupan sehari-hari dan berdampak luas terhadap kebijaksanaan diri dalam menyikapi hidup.

13. Sasaran 13 Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan

Capaian Kinerja

Pemuda adalah aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Kemajuan sebuah bangsa bergantung pada para pemudanya, persis seperti apa dikatakan dengan lantang oleh Presiden Indonesia pertama, Ir. Soekarno bahwa 10 pemuda saja bisa mengguncang dunia. Begitulah peran pemuda dalam pembangunan, sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia untuk merdeka, bersatu, dan berdaulat. Pemuda dicirikan sedang mengalami perkembangan secara fisik dan perkembangan emosional secara psikis. Menurut *International Youth Year*, pemuda atau young people adalah mereka dengan batas usia 15 sampai 24 tahun. Letak potensial pemuda adalah karena karakternya yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis, namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Maka dalam kondisi seperti ini, pemuda sangat memungkinkan untuk dibentuk dan ditempa menjadi pribadi yang memiliki semangat pembaharu dan progresif. Pembaruan dan pembangunan bangsa membutuhkan pemuda yang berakhlak mulai, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional (UU 40/2009 tentang Kepemudaan). Pembentukan karakter pemuda yang dibutuhkan dalam pembangunan bangsa tersebut dapat dilakukan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi diri pemuda.

Realisasi peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah Lampung Barat tahun 2021 adalah terdapat 32 pemuda berprestasi dalam berbagai ajang tingkat Provinsi Lampung dan tingkat nasional. Capaian pemuda berprestasi ini adalah 80% dari 40 pemuda yang di targetkan berprestasi. Capaian tahun 2021 ini adalah kebangkitan prestasi pemuda Lampung Barat yang signifikan, berkat kerja keras pemerintah dan partisipasi serta antusiasme pemuda Lampung Barat. Seperti yang diketahui bahwa tahun 2020 adalah awal mula kemunculan pandemi Covid-19 yang dengan cepat memporak-porandakan hampir semua lini kehidupan masyarakat, tidak terkecuali adalah aktivitas kepemudaan. Ada 7 atlet berprestasi di tahun 2020, dari target 35 atlet. Menukik tajam dibandingkan capaian tahun 2019. Peningkatannya kemudian kembali melejit sampai 60% di tahun 2021, setelah pemerintah dan masyarakat secara perlahan membiasakan diri dengan pandemi dan memulai kebiasaan baru dalam

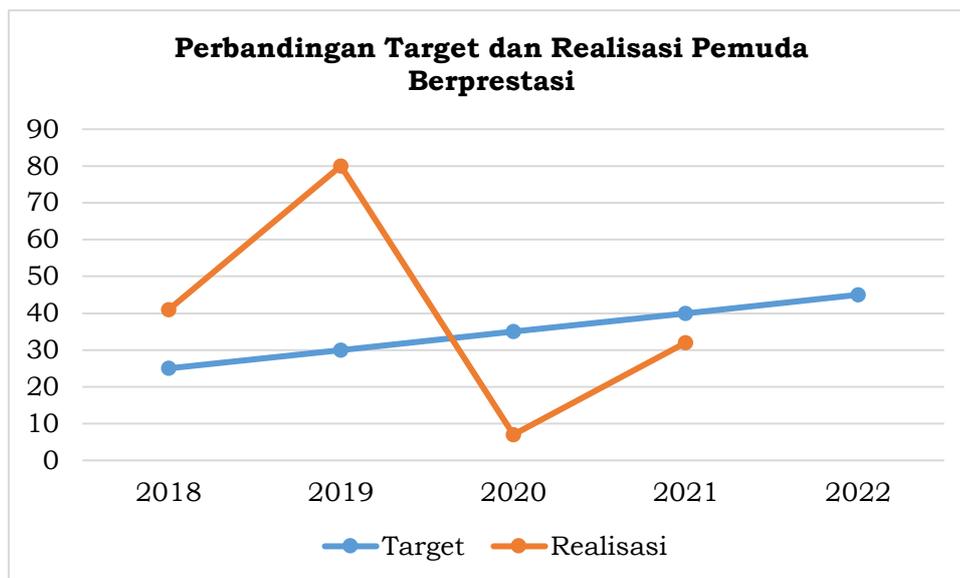
berkehidupan dan bersosial. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian tahun 2021 sudah mencapai 71,11%. Berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja pemuda berprestasi Lampung Barat tahun 2020 dan 2021, target akhir RPJMD, serta capaian kinerja RPJMD.

Tabel 39. Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dan 2021, Target Akhir RPJMD, serta Capaian Kinerja RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target KAHir RPJMD	Capaian Kinerja RPJMD s.d 2021
Jumlah pemuda yang berprestasi	7 orang	32 orang	45 orang	71,11%

Sumber: diolah tim, 2022.

Pemuda berprestasi di Lampung Barat mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan kondisi dan situasi yang mempengaruhinya. Berikut ini adalah perkembangan realisasi kinerja indikator sasaran peran pemuda dalam pembangunan.



Grafik 13. Perbandingan Target dan Realisasi Pemuda Berprestasi Lampung Barat Tahun 2018-2022

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Upaya pencapaian pemuda berprestasi diimplementasikan melalui beberapa program diantaranya koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten. Melalui kegiatan pelatihan pemuda pelopor, kewirausahaan, dan

pemuda mandiri, berhasil mengikutsertakan 30 pemuda untuk terlibat. Kegiatan pengembangan kepeloporan ini ditujukan untuk mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai permasalahan. Kegiatan pengembangan kepeloporan ini merupakan salah satu fungsi dari pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan kepemudaan. Urgensi pemuda dalam pembangunan daerah sangat diseriisi oleh pemerintah. Kementrian Pemuda dan Olahraga telah rutin menggelar kegiatan pemilihan pemuda pelopor dengan bidang perlombaan: 1) pendidikan; 2) agama, sosial dan budaya; 3) pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata; 4) pangan; dan 5) inovasi teknologi. Ajang unjuk kepeloporan ini dipilih sebagai salah satu strategi membangun kepeloporan pemuda dan mengenalkannya melalui media publikasi, sesuai dengan kondisi kemajuan era saat ini. Melalui ajang perlombaan, pemuda akan terpacu dan semangat berinovasi mengembangkan potensi yang ada di sekitarnya.

Layaknya kemegahan potensi sumber daya alam yang dimiliki Lampung Barat, pada tahun 2021, pemuda asal Lampung Barat menjadi duta kopi Indonesia. Kualitas hasil panen kopi asal Lampung Barat memang tidak diragukan lagi, penduduknya telah menjadi pecandu kopi. Melalui duta kopi Indonesia, pemuda berprestasi asal Lampung Barat ini bukan hanya mengenalkan kopi sebagai entitas yang bernilai tinggi, namun juga membawa tradisi, mengenalkan budaya, dan memasarkan produk lokal mendunia. Selain kopi, Lampung Barat juga memiliki rempah berlimpah, yang tumbuh subur ditanah para raja ini. Misalnya lada. Dua pemuda Lampung Barat telah mengikuti seleksi muhibah budaya dan festival jalur rempah Provinsi Lampung tahun 2021. Festival ini mengenalkan rempah sebagai harta tak berwujud yang dimiliki daerah, sehingga keberadaannya harus dilanggengkan dan eksplorasinya harus dikendalikan. Pemuda berprestasi lainnya adalah duta museum Lampung tahun 2021. Kedua pemuda ini dengan bangga dan berani menunjukkan diri bahwa kecintaan dan pengetahuannya tentang budaya Lampung patut diakui. Melalui duta museum Lampung ini, harapan tersiarnya budaya dan pariwisata Lampung dapat meluas terhadap wisatawan lokal dan internasional. Melalui kemampuan berbicara yang lugas dan jelas, duta museum Lampung

diharapkan dapat memberi dampak luas terhadap minat kunjungan budaya dan wisata.



Gambar 20. Dokumentasi Pemuda Berprestasi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan Petugas Paskibraka
Sumber: Laporan Kinerja Dinas Porapar Tahun 2021.

Pemuda berprestasi lainnya menempati beberapa bidang, seperti 3 pemuda yang tergabung dalam Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) di tingkat Provinsi Lampung. Prestasi ini membanggakan mengingat menjadi pasukan yang terpilih adalah hasil seleksi ketat dari berbagai sekolah menengah atas di masing-masing kabupaten. Selanjutnya, ada 2 pemuda yang mewakili Provinsi Lampung dalam ajang pertukaran pemuda antara provinsi. Kegiatan kepemudaan ini berbasis kebudayaan dan pengabdian pada masyarakat. Selama 1 bulan, pemuda terpilih yang mewakili Lampung akan ditempatkan di daerah tujuan pertukaran. Selama dalam daerah tujuan pertukaran tersebut, peserta diwajibkan memahami dan mempelajari kebudayaan masyarakat setempat. Selain itu, pemuda pertukaran ini juga wajib mengenalkan dan memberi edukasi tentang budaya Lampung kepada penduduk setempat. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi penyebaran budaya Lampung, sekaligus mempelajari dan menghargai budaya lain yang hidup berdampingan dengan kita di tanah Indonesia. Selanjutnya, pada bidang olahraga, ada 2 pemuda berprestasi dalam sirkuit tenis junior, dan 2 pemuda lainnya pada kejuaraan atletik usia 16-18 tahun. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, olahraga merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Olahraga mendorong keterbangunan sumber daya manusia.

Seorang pemuda lainnya juga berprestasi dalam olimpiade pendidikan agama islam tingkat nasional dengan meraih medali perak. Sementara itu, 2 pemuda lainnya menjadi juara I duta pelajar putra dan putri tahu 2021. Sebanyak 3 pemuda menerima beasiswa pendidikan kedokteran, dan 12

pemuda lainnya menerima beasiswa pendidikan kesenian. Beasiswa pendidikan tersebut diberikan oleh Pemerintah Lampung Barat untuk meningkatkan tenaga kesehatan yang dampaknya akan meningkatkan profesional medis sehingga kebutuhan penanganan kesehatan masyarakat Lampung Barat dapat terjangkau dalam daerah. Sementara beasiswa pendidikan kesenian bertujuan jangka panjang untuk melestarikan dan membumikan kesenian dan kebudayaan Lampung Barat melalui tantangan kreatif dan profesional di bidang seni.

Tidak ada yang perlu diragukan atas peran pemuda dalam pembangunan daerah dan bangsa. Peristiwa sumpah pemuda menjadi bukti pemersatuan pemuda dari Sabang sampai Merauke untuk bersatu merebut kemerdekaan Indonesia kala itu. Telah banyak bukti peran pemuda dalam pembangunan, contoh lainnya adalah peristiwa '98 yang ditangan pemuda kediktatoran Jenderal Soeharto yang berselimut KKN berhasil dilengserkan. Kebangkitan nasional, kemerdekaan, revolusi, dampai reformasi sebuah adalah peran pemuda. Pemuda lah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa dan negara, baginya tidak ada kekolotan dalam kehidupan bernegara dan berpolitik. Pemuda yang merupakan asset yang mahal dan tidak ternilai harganya harus dibina dan diarahkan kepada hal-hal positif yang mengarah kepada kemandirian individunya, kemampuannya bersosial dan berpolitik, inovatif, mampu mengelola sumber daya, berakhlak, sehat, tangguh, professional, dan berdaya saing.

Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan pemuda berprestasi adalah belum memenuhi target jumlah pemuda berprestasi akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan terhambat dan sumber pendanaan mengalami *refocussing*. Maka rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah menambah sumber pendanaan dan mengoptimalkan pembinaan dan pelatihan pemuda pelopor, kewirausahaan dan pemuda mandiri bagi pemuda-pemudi Lampung di tahun mendatang.

14. Sasaran Strategis 14 Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Capaian Kinerja

Sumber daya manusia merupakan kekuatan utama dalam pembangunan daerah. Sumber daya alam yang melimpah tidak akan dapat dimanfaatkan dengan baik jika tidak ada sumber daya manusia yang

mengelolanya. Namun, sumber daya manusia yang berlebihan juga bisa menjadi bumerang bagi pemerintah daerah dan negara. Kondisi sebenarnya dapat memberi dampak positif dan negatif. Secara positif, banyaknya jumlah penduduk dapat memberi bonus demografi ketika penduduk berusia produktif jumlahnya lebih banyak dari penduduk usia tidak produktif. Sementara dampak negatifnya dapat meningkatkan angka kemiskinan,, kriminalitas meningkat, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah jika penambahan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas publik. Oleh sebab hal tersebut, pemerintah memprogram pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Tujuannya adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, yang manfaatnya akan dirasakan dalam jangka waktu panjang.

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dihitung oleh BPS dengan menggunakan metode geometrik. Data laju pertumbuhan penduduk digunakan untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) juga berkomitmen untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan menggunakan indikator laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran total. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk Lampung Barat adalah 0,98% dari yang ditargetkan sebesar 1,02% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 103,92%. Realisasi ini meningkat dari tahun 2020 yang laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,68%, dan masih lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk rata-rata Provinsi Lampung tahun 2020 yang sebesar 0,87%.

Sementara itu, angka kelahiran adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya. Angka ini digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil

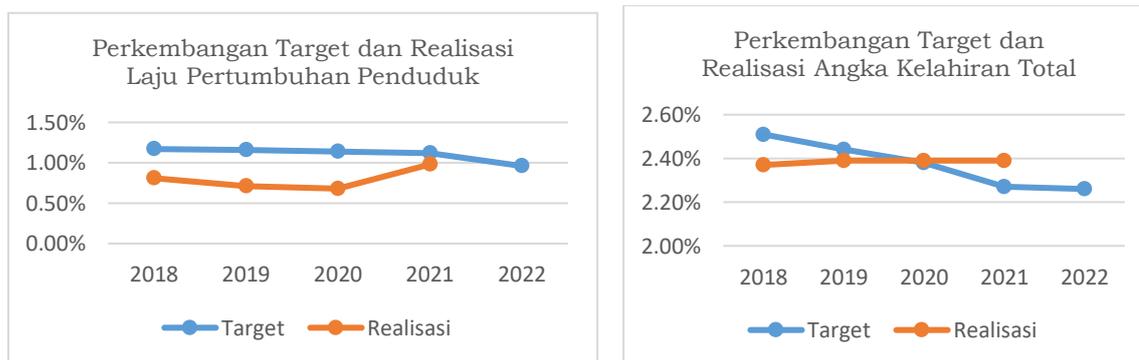
dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Total angka kelahiran di Lampung Barat tahun 2021 adalah 2,39% dari target yang ditetapkan sebesar 2,27%, sehingga capaian kinerja ini sebesar 94,71%. Angka realisasi ini meningkat dari tahun 2020 yang total angka kelahirannya sebesar 0,68%, juga lebih tinggi dari rata-rata angka kelahiran total Provinsi Lampung tahun 2021 yang sebesar 2,22%. Berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021, target akhir RPJMD, dan capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2021.

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021, Target Akhir RPJMD, dan Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja RPJMD s.d 2021
Laju pertumbuhan penduduk	0,93%	0,98%	0,96%	97,91%
Angka kelahiran total	2,39%	2,39%	2,26%	94,24%

Sumber: diolah tim, 2022.

Laju pertumbuhan penduduk Lampung Barat cenderung turun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, kemudian meningkat di tahun 2021. Sementara angka kelahiran total juga relatif stabil sampai dengan tahun 2020, dan meningkat signifikan di tahun 2021. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi kedua indikator terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.



Grafik 14. Perbandingan Target dan Realisasi Angka Kelahiran Total dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2022

Sumber: Laporan Kinerja Dinas PPKBPPPA Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

a) Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Lampung Barat tahun 2021 adalah 0,98%. Hal ini berarti pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan dari tahun 2020, lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung. Analisis paling memungkinkan adalah kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada kurang optimalnya implementasi program dan kegiatan yang mendukung pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Misalnya pada beberapa program yang selama ini berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk seperti kesertaan keluarga berencana bagi pasangan usia subur, pengembangan model operasional Bina Keluarga Balita - Posyandu - Pendidikan Anak Dini Usia, dan program kesehatan reproduksi remaja. Program kesertaan KB bagi pasangan usia subur bertujuan untuk memberi pengetahuan, tujuan dan manfaat dari pentingnya merencanakan keluarga. KB bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi, menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Oleh karena hal tersebut, program kesertaan KB ini sebenarnya salah satu yang paling masif menekan laju pertumbuhan penduduk. Seakan disalahkan, namun pandemi Covid-19 memang telah berdampak pada peningkatan jumlah kelahiran.

Model operasional BKB-Posyandu-PADU memiliki peran besar dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia sehat, cerdas, terampil, berdaya saing yang akan meneruskan tampuk kepemimpinan daerah Lampung Barat. Pengembangan model ini mengajak kerjasama berbagai perangkat daerah untuk sama-sama menciptakan sumber daya manusia masa depan yang berkualitas. Perangkat daerah lainnya yang dimaksud adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan bagian urusan kesejahteraan masyarakat. Peran Dinas Pendidikan adalah menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan memadai untuk anak. Sementara Dinas Kesehatan memastikan perkembangan kesehatan dan kecukupan kebutuhan gizi seimbang pada anak. Bagian kesejahteraan masyarakat

memastikan daya dukung kesejahteraan anak telah tersedia dan mencukupi.

Program kesehatan reproduksi remaja juga sangat penting dilakukan karena dengan memberi edukasi kepada remaja tentang reproduksi remaja, akan menambah pengetahuan kepada remaja itu sendiri, keluarga dan masyarakat tentang pentingnya membangun kebiasaan baik menjaga kebersihan. Kurangnya edukasi reproduksi nyata-nya bisa memicu terjadinya penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang berakibat menghilangkan nyawa. Remaja, orangtua dan masyarakat harus paham bahwa menikah dan memiliki anak saat kondisi fisik dan mental seorang perempuan telah siap jauh lebih baik dan sehat.

Laju pertumbuhan penduduk ideal adalah 0,5% atau satu sampai dua juta per tahun. Maka, Pemerintah Lampung Barat masih memiliki pekerjaan rumah menekan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,48% pada tahun implementasi selanjutnya untuk mencapai persentase laju pertumbuhan penduduk per tahun yang ideal. Rekomendasi kebijakan yang disarankan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Lampung Barat adalah dengan optimalisasi program dan kegiatan dengan beradaptasi pada kondisi baru pandemi Covid-19. Pemerintah dan masyarakat harus mulai terbiasa berkegiatan di era baru berdampingan dengan pandemi yang masih enggan menarik diri. Menerapkan protokol kesehatan dan standar pelayanan baru di masa pandemi akan sangat membantu pencapaian target kinerja. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat program-program pengendalian laju pertumbuhan penduduk membutuhkan pertemuan tatap muka agar hasil yang didapatkan optimal.

b) Angka Kelahiran Total

Realisasi angka kelahiran total di Lampung Barat tahun 2021 lebih banyak dari target, dan meningkat sebanyak 1,71% dari tahun 2020. Meningkatnya realisasi angka kelahiran total di tahun 2021 ini mendefinisikan bahwa terjadi penambahan jumlah penduduk di tahun 2021 melalui kelahiran. Angka nya bahkan lebih banyak dari rata-rata kelahiran total di Provinsi Lampung. Angka kelahiran total 2,39% dapat diartikan bahwa sebanyak 2 atau 3 anak dilahirkan dari pasangan usia

subur untuk meregenerasi keluarga tersebut. Peningkatan jumlah anak yang dilahirkan per wanita subur ini akan berakibat pada meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, begitu juga sebaliknya. Sementara tahun 2020 adalah tahun penekanan kelahiran bayi dari wanita subur yang paling berhasil selama 4 tahun terakhir, dimana 1 atau tidak ada anak yang dilahirkan dari rata-rata pasangan usia subur.

Ternyata tidak hanya di Lampung Barat, jumlah kelahiran terus melonjak sejak awal pandemi, konsekuensi dari terpusatnya kegiatan masyarakat di rumah. Menurut laporan media Kompas dari hasil risetnya terhadap Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, penurunan kontrasepsi jangka panjang dan peningkatan pernikahan usia dini yang terjadi selama pandemi berpotensi meningkatkan jumlah kelahiran. Angka kelahiran ini meningkat 100-200 persen. Hal ini terbukti, dari rata-rata 1 atau tidak ada anak lahir dari pasangan usia subur di tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 2 sampai 3 anak telah lahir dari pasangan usia subur di tahun 2021. Pekerjaan rumah pemerintah masih sebanyak 0,29% untuk sampai pada angka kelahiran total ideal. Maka rekomendasi yang disarankan untuk mengontrol angka kelahiran total ini adalah optimalisasi program kesertaan KB.

15. Sasaran Strategis 15 Meningkatnya Ketahanan Pangan

Capaian Kinerja

Urusan ketahanan pangan sudah menjadi fokus pembangunan internasional (termasuk kedalam tujuan kedua *Sustainable Development Goals* (SDG's)), dalam RPJMD Lampung Barat menjadi pendukung misi kedua. Realisasi peningkatan ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 adalah 91,16 poin dari target 91,1 poin, atau mencapai kinerja 100,06% indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan. Ketersediaan bahan pangan ini lebih berfokus pada ketersediaan bahan pangan pokok berupa beras. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tahun 2021 mengalami menurun sebesar 0,46 poin. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian kinerja per 2021 sudah sebesar 98,65%. Berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021, target akhir RPJMD, dan capaian kinerja RPJMD sampai dengan 2021.

Tabel 41. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021, Target Akhir RPJMD, dan Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja RPJMD s.d 2021
Skor pola pangan harapan	91,62 poin	91,16 poin	92,4 poin	98,65%

Sumber: diolah tim, 2022.

Pencapaian tahun 2021 ini cukup melegakan mengingat dalam kondisi pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih melanda, ketahanan pangan masyarakat masih terkendali. Pencapaian sasaran RPJMD yang merupakan tujuan Dinas Ketahanan Pangan ini didukung oleh sasaran dan indikator sasaran Dinas Ketahanan Pangan. Pencapaian indikator sasaran adalah, pertama, penanganan daerah rawan pangan telah berhasil mencapai target. Satu pekon yang berada pada prioritas 1 kerentanan pangan yaitu Pekon Pancur Mas, Lumbok Seminung, telah berhasil diturunkan pada prioritas 2 yang berarti tingkat rentan pangan sedang. Kedua, ketersediaan pangan masyarakat telah terpenuhi. Ketersediaan energi telah cukup dan sesuai target, yaitu 4.000 Kal/Kap/hr, lebih tinggi dari kecukupan gizi ideal (berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM)) yang berada pada angka 2.400 Kal/Kap/hr. Sementara realisasi ketersediaan protein melebihi target, yaitu 95 Gr/Kap/hr dari target 92 Gr/Kap/hr atau lebih tinggi dari ambang batas minimum angka kecukupan gizi protein (63 Gr/Kap/hr).

Ketiga, meningkatnya keamanan pangan telah diuji di Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Lampung terhadap 5 sampel komoditas yaitu cabai, daun seledri, tomat, kol dan wortel. Hasilnya 99,98% tingkat keamanan pangan untuk dikonsumsi, sebesar 0,2% terdapat cemaran pestisida pada cabai di Kecamatan Sukau namun masih dalam ambang batas aman untuk dikonsumsi. Capaian indikator kinerja sasaran tersebut kemudian di akumulasi untuk dapat menjadi masukan hasil bagi sasaran RPJMD.

Tabel 42. Cara Perhitungan Indikator Kinerja Skor PPH

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Skor PPH Ketersediaan	$Pph = \% \text{ Angka Ketersediaan} \times \text{ bobot masing-masing kelompok pangan}$	91,1 poin	91,62 poin	101	Sangat tinggi

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021.

Berikut ini adalah hasil pengukuran indikator kinerja sasaran peningkatan ketahanan pangan tahun 2021.

Tabel 43. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 15: Meningkatnya Ketahanan Pangan Tahun 2021.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	2021		Capaian
			Target	Realisasi	
Meningkatnya ketahanan pangan daerah		Skro PPH Ketersediaan	91,1 poin	91,16 poin	100,06%
	Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan	Jumlah desa yang bebas dari status rawan pangan	1 pekon	1 pekon	100%
	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	Tingkat ketersediaan energi	4.000 Kal/Kap/hr	4.000 Kal/Kap/hr	100%
		Tingkat ketersediaan protein	92 Gr/Kap/hr	92 Gr/Kap/hr	100%
	Meningkatnya keamanan pangan	Tingkat keamanan pangan segar	> 80%	99,98%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021.

Target dan realisasi ketahanan pangan daerah selalu meningkat setiap tahun dalam periode tahun 2017-2022. Hal ini dimaksudkan untuk secara bertahap menguatkan ketahanan pangan daerah dengan tidak ada lagi pekon yang berada pada prioritas 1. Target penurunan prioritas ketahanan pangan tahun 2021 adalah Pekon Pancur Mas Kecamatan Lumbok Seminung, berhasil diturunkan pada status prioritas 2. Dalam kondisi pandemi, tugas pemerintah bukan lagi hanya mencapai target penguatan ketahanan pangan satu desa saja. Namun juga mempertahankan pekon lain agar tidak berada dalam kondisi kekurangan pangan. Pada tahun keempat pelaksanaan RPJMD, penanganan daerah rawan pangan telah berhasil menurunkan prioritas ketahanan pangan pada 4 pekon dari 5 pekon yang ditargetkan dalam RPJMD. Keempat pekon tersebut adalah Pekon Tembelang Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Pekon Sumber Rejo Kecamatan Batu Ketulis, Pekon Kota Besi Kecamatan Batu Brak, dan Pekon Pancur Mas Kecamatan Lumbok Seminung.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, rata-rata capaian indikator kinerja tahun 2021 belum sampai pada angka 100%. Berikut ini adalah rincian perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan target akhir RPJMD.

Tabel 44. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD

Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian RPJMD s.d 2021
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor PPH ketersediaan	91,16 poin	92,4 poin	98,65%
Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan	Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan	4 pekon	5 pekon	90%
Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat	Tingkat ketersediaan energi	4.000 Kal/Kap/hr	4.100 Kal/Kap/hr	99%
	Tingkat ketersediaan protein	95 Gr/Kap/hr	94 Gr/Kap/hr	102%
Meningkatnya keamanan pangan	Tingkat keamanan pangan segar	99,98%	> 80%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021.

Keberhasilan tujuan ini didasarkan dari 3 aspek ketahanan pangan, yaitu: aspek ketersediaan pangan (kestabilan dan ketersediaan), aspek akses pangan (kemudahan akses) dan aspek pemanfaatan pangan (keseimbangan kecukupan gizi). Kestabilan harga pada tingkat konsumen tidak terlepas dari kestabilan pasokan pangan yang baik yang bersumber dari produksi dalam daerah dan luar daerah. Maka kestabilan harga gabah ditingkat petani merupakan faktor penentu kestabilan harga dan daya beli masyarakat, karena mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani (sawah dan kebun). Kestabilan daya beli masyarakat ini kemudian akan mempengaruhi kemampuan masyarakat menyediakan pangan dengan kecukupan gizi seimbang. Melihat berkembangnya skor PPH tingkat konsumsi, menunjukkan keberagaman pola konsumsi pangan masyarakat Lampung Barat mengarah pada keberagaman, bergizi, seimbang, aman dan halal.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan. Selanjutnya informasi ini dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi melalui arah

dan rekomendasi kebijakan. Indikator yang digunakan FSVA merupakan turunan dari 3 aspek ketahanan pangan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Indikator ketersediaan pangan adalah (a) rasio luas lahan baku sawah terhadap luas lahan total, (b) rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator akses pangan adalah (a) rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk, (b) desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pemanfaatan pangan adalah (a) rasio rumah tangga tanpa akses air bersih, (b) rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk. Berikut ini adalah kelompok prioritas rawan pangan.

Tabel 45. Kelompok Prioritas Daerah Rawan Pangan

Kelompok Prioritas	Keterangan
Daerah dengan Prioritas 1	Daerah rawan pangan dengan tingkat kerawanan pangan tinggi
Daerah dengan Prioritas 2 s/d 3	Daerah rawan pangan dengan kategori rawan pangan
Daerah dengan Prioritas 4 s/d 5	Daerah dengan tingkat ketahanan pangan sedang
Daerah dengan Prioritas 6	Daerah dengan tingkat ketahanan pangan tinggi

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021.

Hasil analisis FSVA tahun 2021 menunjukkan bahwa desa rentan pangan prioritas 1-3 sebanyak 9 pekon dari 136 pekon (6,62%) yang terdiri dari 1 pekon prioritas 1, 1 pekon prioritas 2, dan 7 pekon prioritas 3. Upaya-upaya menangani kerentanan pangan dan peningkatan pangan diarahkan pada kegiatan:

- a) Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan (pembangunan infrastruktur dasar: jalan, listrik, rumah sakit), pemberian bantuan social, pembangunan usaha produktif/UMKM/ padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah;
- b) Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih, sosialisasi dan penyuluhan;
- c) Penyediaan tenaga kesehatan.



Gambar 21. Program Pangan Mandiri dan Pengisian Lumbung Pangan Masyarakat
Sumber: Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021.

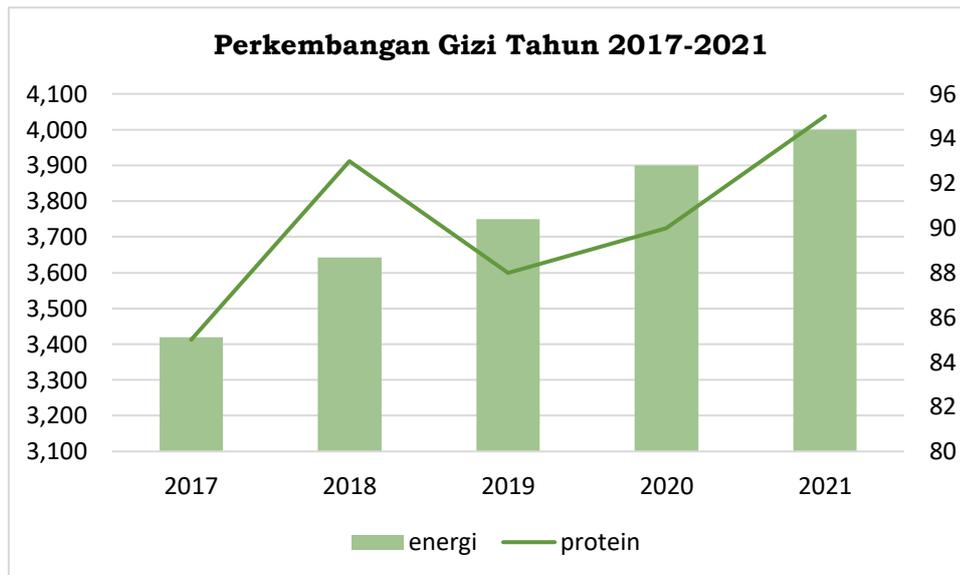
Keseriusan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menguatkan ketahanan pangan masyarakat dilakukan bukan hanya melalui pemberian bantuan pengisian lumbung pangan (27 kelompok) masyarakat yang bersifat fisik, melainkan juga fasilitasi dan pembinaan masyarakat untuk dapat mandiri dalam menyediakan pangan melalui pemanfaatan kebun atau lahan sekitar rumahnya. Pemanfaatan lahan sempit disekitar rumah akhir-akhir memang sedang menjadi tren di berbagai daerah karena telah berhasil mewujudkan desa mandiri dengan lahan terbatas. Maka Kabupaten Lampung Barat dengan anugerah tanah yang luas menjadi peluang besar untuk membentuk kemandirian pangan daerah yang sukses. Bukan hanya padi, berbagai jenis tanaman dapat ditanam untuk membantu ketahanan pangan masyarakat sesuai dengan kontur tanah pada masing-masing wilayah kecamatan. Pemerintah tentu terus mendampingi dan memfasilitasi pengetahuan, teknologi dan bantuan alat pertanian yang dibutuhkan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih harus mendorong peningkatan produksi pangan, pemenuhan pangan masyarakat miskin, memperkuat cadangan pangan, memperkuat kelembagaan pangan, dan kerjasama yang sinergis berbagai perangkat daerah untuk mengarahkan kegiatan yang bersifat padat karya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain untuk mencapai target akhir RPJMD yang baru mencapai 90%, upaya-upaya ini lebih penting untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan masyarakat. Kecukupan pangan merupakan salah satu hak asasi yang layak dipenuhi, sekaligus mendukung stabilitas negara. Hal ini karena kekurangan pangan dapat memicu kelaparan, kemiskinan, dan

kurangnya gizi pada generasi muda sehingga tidak dapat tumbuh optimal. Dampaknya tentu kepada kemajuan dan ketahanan negara. Maka pertahanan pangan bukan hanya soal urusan ekonomi, melainkan juga memiliki fungsi sosial dan politik baik nasional dan global.

Setelah daerah rawan pangan teratasi, langkah penting selanjutnya adalah memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Indikatornya adalah ketersediaan energi dan protein. Ketersediaan per kapita adalah sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natura maupun unsur gizinya (energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral). Ketersediaan pangan didominasi oleh kelompok padi-padian (2.559 kalori), kelompok gula (491 kalori), minyak dan lemak (231 kalori), sayuran dan buah (229 kalori). Sementara beberapa kelompok lain berada dibawah skor maksimum PPH ketersediaan, yaitu kelompok pangan hewani (15,87) dengan skor maksimal 24,0; kelompok minyak dan lemak (4,80) dengan skor maksimal 5,0; dan kelompok kacang-kacangan (9,49) dengan skor minimum 10,0. Meski secara kuantitas (Neraca Bahan Makanan) ketersediaan pangan telah melebihi nilai ideal Angka Kecukupan Gizi, namun secara kualitas (skor PPH ketersediaan 91,16) belum ideal. Hal tersebut disebabkan oleh: (1) beberapa komposisi skor PPH Ketersediaan untuk masing-masing kelompok bahan pangan tersebut belum mencapai skor maksimal. Hal ini berakibat tidak seimbangnya ketersediaan kecukupan gizi yang dipersyaratkan, dan produksi yang masih relatif rendah; (2) Kelompok pangan yang terlalu melebihi skor maksimal akan memberikan kelebihan kontribusi ideal pangan dalam komposisi gizi seimbang.

Kelompok pangan yang terlalu tinggi melebihi skor maksimal memberikan kontribusi berlebih sehingga komposisi gizi tidak bisa disebut seimbang karena kelompok gizi lainnya berada dibawah skor minimum PPH. Namun, ketersediaan pangan per kapita mengidentifikasikan rata-rata individu memperoleh bahan pangan. Meski sumbangan terbesar berasal dari pangan nabati 79,06 kal/kap/hr, sisanya merupakan pangan hewani. Berikut ini adalah perkembangan energi dan protein dalam 5 tahun terakhir.



Grafik 15. Perkembangan Gizi kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2021
Sumber: Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021.

Padi memang merupakan sumber makanan pokok masyarakat Lampung Barat, namun konsumsinya melampaui standar ideal (111,3%). Konsumsi energi dari kelompok minyak dan lemak juga melebihi standar ideal (196,8%), sementara konsumsi umbi-umbian 100%, sayur dan buah 113%, dan kacang-kacangan hampir mencapai standar ideal (96,1%). Sedangkan kelompok pangan hewani, buah biji berminyak, dan gula konsumsinya masih kurang dari 70%. Meski secara keseluruhan konsumsi energi telah cukup baik (berdasar skor PPH), namun ketimpangan terjadi pada keberagaman pangan masyarakat. Hal ini tentu harus segera diatasi mengingat tidak ada satu jenis makanan yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan gizi yang diperlukan tubuh manusia. Setiap kelompok sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk saling melengkapi kebutuhan gizi.

Oleh karena hal tersebut, pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyadari tidak akan bisa memberi bantuan pangan terus menerus. Maka pemerintah berkomitmen untuk terus menciptakan pangan mandiri bagi masyarakat Lampung Barat. Memberi pengetahuan, pelatihan, pendampingan, bantuan sarana prasana dan biaya modal untuk masyarakat dapat memanfaatkan lahan sekitar rumah atau ladang yang dimiliki sehingga menjadi sumber pencukupan gizi dan bahkan juga menjadi sumber pendapatan ekonomi. Pemerintah berupaya untuk membantu masyarakat menambahkan diversifikasi tanaman pangan, tujuannya adalah menyeimbangkan gizi masyarakat.

Ketersediaan pangan masyarakat harus dijamin oleh pemerintah, ini merupakan pemenuhan hak dasar manusia. Ketersediaan pangan ini harus berjalan beriringan dengan ketercapaiannya oleh masyarakat. Ketersediaan pangan yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat sama dengan menjauhkan masyarakat dari kecukupan pangan. Kemudahan akses pangan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat daya beli masyarakat terhadap komoditi pangan. Kestabilan harga pangan ditingkat masyarakat tidak lepas dari kestabilan pasokan pangan baik yang berasal dari produksi dalam daerah atau dari luar daerah.

Dalam menjaga kualitas pangan masyarakat, keamanan pangan juga diuji validitasnya. Bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki uji keamanan pangan yang mumpuni (Universitas Lampung), beberapa komoditas pangan yang berasal merupakan produksi dalam daerah diuji agar kelayakan konsumsinya tervalidasi. Hasilnya, cabai merah tercemar bahan kimia. Meski masih dalam ambang batas aman konsumsi, namun hal ini menjadi satu temuan untuk mengevaluasi diri pemerintah dan petani cabai untuk menggunakan pestisida yang jauh lebih aman sehingga kandungan gizinya tidak sia-sia. Pengawasan pangan masih terus dilakukan pemerintah terhadap setiap komoditas yang beredar di masyarakat, bukan hanya hasil produksi dalam daerah, tetapi juga yang berasal dari luar daerah. Tujuannya adalah memastikan 100% keamanan pangan dari residu pestisida.

Beberapa kendala terjadi dalam implementasi upaya peningkatan ketahanan pangan tahun 2021, kendala ini disadari dan menjadi bahan evaluasi memperbaiki kinerja ditahun 2022. Berikut ini adalah beberapa kendala kinerja tahun 2021:

- a) Masih banyak jenis bahan pangan yang belum mampu dipenuhi dari produksi dalam daerah tapi masih diimpor dari luar daerah seperti daging ayam, telur, kacang-kacangan, dan lainnya;
- b) Ketersediaan data kurang tepat waktu;
- c) Kurang optimalnya sarana dan prasarana petugas pemantau harga pangan pokok strategis;
- d) Tingkat daya beli masyarakat Lampung Barat yang belum baik dan cenderung fluktuatif yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan;

- e) Harga pangan di Kabupaten Lampung Barat cenderung tinggi akibat tingginya biaya transportasi bahan pangan dari pusat produksi terutama pangan yang diimpor dari luar daerah.

Menyadari beberapa kendala ini, Dinas Ketahanan Pangan telah menentukan solusi yang sesuai untuk menangani kendala tersebut. Berikut ini adalah solusi yang bisa digunakan untuk tahun pelaksanaan pencapaian sasaran tahun selanjutnya:

- a) Berkoordinasi dengan instansi teknis dalam upaya peningkatan produksi komoditas yang mendukung energi dan protein dan hewani;
- b) Sosialisasi dan promosi terkait dengan ketersediaan energi dan protein di tingkat rumah tangga;
- c) Melengkapi sarana dan prasarana petugas pemantauan harga;
- d) Koordinasi dengan perangkat daerah terkait, yaitu Dinas Kominfo untuk mengadakan portal perkembangan harga pangan pada situs resmi atau portal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan harga setiap hari;
- e) Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendukung percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- f) Meningkatkan pembinaan, publikasi dan kampanye di berbagai media.

16. Sasaran Strategis 16 Meningkatkan PDRB Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran ini terdiri dari 3 sub sektor yaitu sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, dan sub sektor pertanian. Akumulasi ketiga sub sektor ini menjadi nilai peningkatan PDRB sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian. Realisasi kinerja tahun ini adalah Rp.664.285.584,67, lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar Rp.3.834.317. Realisasi kinerja tahun 2021 ini juga lebih besar dari realisasi tahun 2020 dan target akhir RPJMD. Berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021, serta target akhir RPJMD.

Tabel 46. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD
PDRB sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	Rp.3.210.775,66	Rp.664.285.584,67	Rp.3.834.317

Sumber: diolah tim, 2022.

Berikut ini adalah capaian masing-masing sub sektor yang mendukung peningkatan PDRB sub sector pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian:

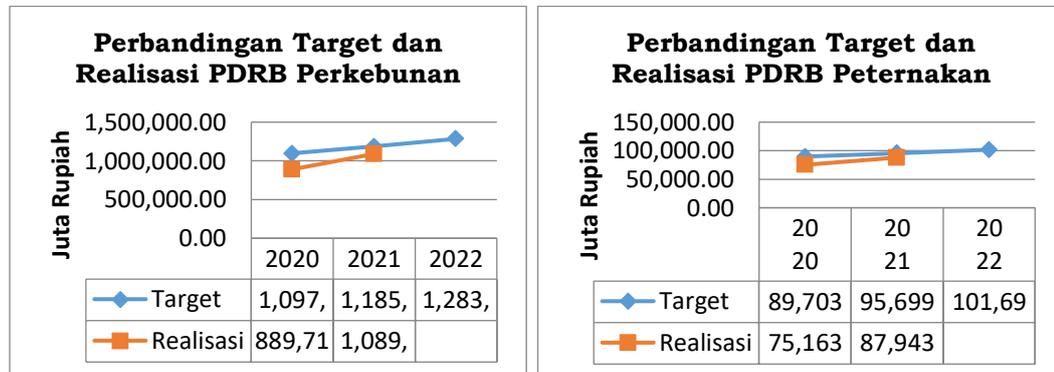
a) Perkebunan dan Peternakan

Sektor perkebunan di Lampung Barat adalah sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan. Komoditas unggulan salah satunya adalah kopi. Lampung Barat menjadi daerah penghasil kopi terbesar di Provinsi Lampung. Oleh karena hal tersebut, komoditas kopi memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Kopi dan komoditas lainnya telah memberi nilai tambah PDRB sektor perkebunan pada tahun 2021 sebanyak Rp.1.089.450,02. Realisasi ini lebih rendah dari angka yang ditarget sebesar Rp.1.185.528,26, sehingga capaian kinerjanya adalah 91,90%. Meski belum mencapai target kinerja, capaian kinerja tahun 2021 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang capaiannya sebesar 81,10%. Hal ini berarti PDRB sektor perkebunan mengalami pertumbuhan. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, tahun 2021 telah mencapai kinerja sebesar 84,85%.

Selain sektor perkebunan, pemerintah Lampung Barat juga mengembangkan sektor peternakan sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan daging bagi masyarakat Lampung Barat. Saat ini pemerintah sedang konsentrasi pada pengembangan ternak sapi potong untuk menyeimbangkan kebutuhan gizi masyarakat, selain dari beberapa ternak yang sudah banyak dipelihara masyarakat. Pada tahun 2021, sub sektor peternakan telah merealisasikan penambahan PDRB sebanyak Rp.87.943,92 atau tercapai 91,90% dari angka yang ditargetkan sebesar Rp.95.699,66. Capaian ini menurun sebesar 14,19% dari tahun 2020, artinya PDRB sektor peternakan mengalami pertumbuhan negatif.

Capaiannya terhadap target akhir RPJMD juga telah sampai pada angka 86,48%.

Berikut ini adalah grafik perbandingan target dan realisasi PDRB sektor perkebunan dan peternakan tahun 2020 dan 2021 serta perbandingannya dengan target akhir RPJMD.



Grafik 16. Perbandingan Target dan Realisasi PDRB Perkebunan dan Peternakan Tahun 2020 dan 2021 serta Perbandingan Capaiannya dengan Target Akhir RPJMD

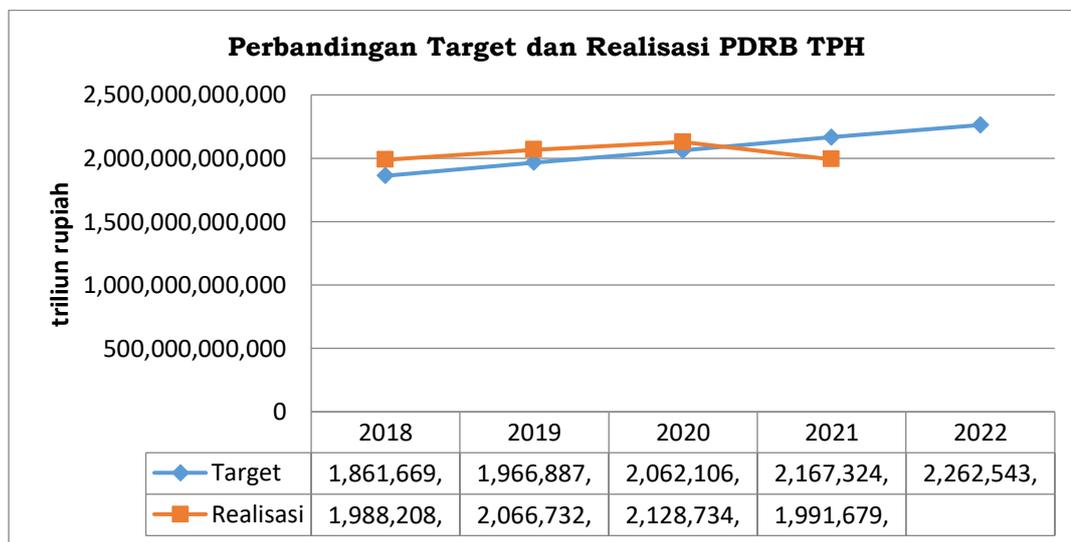
Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Barat Tahun 2021, diolah tim, 2022.

b) Tanaman Pangan dan Hortikultura

Komoditas pangan merupakan sektor yang selalu dibutuhkan manusia, terlebih konsumsi di Indonesia sangat besar. Bahan pangan diperoleh dari hasil penanaman tanaman pangan pada lahan pertanian. Pertanian adalah sektor yang hampir separuh jumlah rakyat Indonesia bekerja didalamnya. Maka pemerintah berkomitmen untuk membina ruang perekonomian sektor pertanian. Hal ini karena sektor pertanian mampu menjadi pondasi kuat dalam mendukung ekonomi daerah dan negara.

Kelompok tanaman yang termasuk didalam komoditas pangan adalah tanaman pangan, tanaman hortikultura non tanaman hias dan kelompok tanaman lain penghasil bahan baku produk pangan. Tanaman pangan yang menjadi sumber kehidupan manusia ini dikelompokkan berdasarkan umur menjadi tanaman semusim dan tanaman tahunan. Pada tahun 2021, sektor tanaman pangan dan hortikultura telah memberi nilai tambah PDRB sebesar Rp.1.991.679.361.410. Realisasi ini belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp.2.167.324.910.000, sehingga capaian kinerjanya adalah 91,90%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian PDRB sektor

tanaman pangan dan hortikultura terus mengalami penurunan. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian di tahun 2021 sudah sebesar 88,03%. Berikut ini adalah grafik perbandingan target dan capaian PDRB sector tanaman pangan dan hortikultura tahun 2018 sampai dengan 2022.



Grafik 17. Perbandingan Target dan Realisasi PDRB TPH Tahun 2018-2022
Sumber: Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Barat Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

a) Perkebunan dan Peternakan

Lahan-lahan perkebunan di Kabupaten Lampung Barat didominasi oleh tanaman kopi (52.914 Ha), disusul lada (6.931 Ha), kakao (1.609 Ha), kayu manis (640 Ha), kelapa dalam (453Ha), cengkeh (804Ha), aren (392Ha), dan kemiri (97Ha). Kopi robusta merupakan komoditas perkebunan yang sangat mendominasi di Kabupaten Lampung Barat dan menjadi salah satu produk unggulan serta merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Barat. Areal pertanaman kopi tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan budidaya kopi robusta telah diusahakan secara turun temurun oleh masyarakat Lampung Barat. Selain komoditas kopi, komoditas aren juga merupakan Produk Unggulan Daerah (PUD) yang telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Lampung Barat Nomor B/336/KPTS/III.2/2014, tanggal 11 September 2014 tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Lampung Barat.

Produk kopi robusta Lampung Barat telah mendapat Sertifikasi Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2014 dengan nama “KOPI ROBUSTA LAMPUNG”. Selain itu perkebunan kopi di Kabupaten Lampung Barat juga telah ditetapkan sebagai Kawasan Perkebunan Kopi Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Kpts/PD.300/1/2016 tanggal 16 Januari 2016 sehingga menunjukkan keberadaan perkebunan kopi di Lampung Barat sangat menentukan eksistensi perkopian nasional. Pengakuan ini tentu menjadi bukti bahwa kopi merupakan daya ungkit utama perekonomian daerah Lampung Barat. Namun produksi kopi dan komoditas perkebunan lainnya tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang paling signifikan adalah komoditas kopi, aren, dan kayu manis. Berikut ini adalah perbandingannya.

Tabel 47. Perkembangan Komoditas Perkebunan Lampung Barat

NO	KOMIDITI	TAHUN 2020	TAHUN 2021	Peningkatan/ penurunan (%)
		Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	
1	Kopi Robusta	57.930	44.866	-23%
2	Lada	3.325	3.097	-7%
3	Kakao	2.053	1.878	-9%
4	Kayu Manis	716	547	-24%
5	Kelapa Dalam	628	549	-13%
6	Cengkeh	85	75	-12%
7	Aren	498	367	-26%
8	Kemiri	147	145	-1%

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021.

Penurunan produksi komoditas perkebunan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan perkebunan dengan mengatasi beberapa permasalahan yang menjadi penyebab penurunan hasil produksi komoditas perkebunan seperti membina dan mendampingi intensifikasi dan peremajaan tanaman kopi; mengoptimalkan fungsi SEKOLAH KOPI sebagai wadah pendidikan non formal bagi petani, masyarakat dan pelaku usaha kopi; peningkatan mutu dan nilai tambah melalui pembinaan pasca panen dan pengolahan serta penyaluran bantuan UPH; penyediaan bantuan sarana prasarana pertanian.

Sementara pada sektor peternakan, pemerintah mendukung pengembangan ternak sapi potong sebagai salah satu komoditas unggulan Kabupaten Lampung Barat sebagai upaya peningkatan

produksi dan produktivitas melalui peningkatan angka kelahiran dengan perbaikan sistem perkawinan baik lineminasasi Buatan (IB) maupun kawin alam, perbaikan manajemen pakan ternak serta peningkatan pelayanan kesehatan hewan dengan mengoptimalkan peran Puskesmas. Hal ini sejalan dengan program pemerintah pusat yaitu SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komodita Andalan negeri) yang merupakan penyempurnaan dari UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) dimana kegiatan pendukungnya antara lain adalah pelaksanaan IB dan pelayanan informasi pasar ternak.

Populasi ternak yang saat ini ada di Lampung Barat adalah sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, dan itik. Dari 6 jenis ternak ini, menghasilkan produksi daging sebanyak 3.132.935 Kg dan produksi telur sebanyak 2.161.535 Kg per tahun 2021. Populasi ternak yang ada sekarang ini ada yang mengalami penambahan, ada pula yang mengalami penurunan. Berikut ini adalah data perbandingannya.

Tabel 48. Perbandingan Komoditas Peternakan di Lampung Barat

No	Jenis Ternak	Tahun		Peningkatan / Penurunan (%)
		2020	2021	
Populasi				
1	Sapi (ekor)	8.063	7.500	-6,98%
2	Kerbau (ekor)	375	380	1,33%
3	Kambing (ekor)	81.780	80.600	-1,44%
4	Domba (ekor)	6.413	6.450	0,58%
5	Ayam Buras (ekor)	2.300.900	2.301.000	0,00%
6	Itik (ekor)	68.626	68.900	0,40%
Produksi				
1	Daging (Kg)	3.127.000	3.132.935	0,19%
2	Telur (Kg)	2.160.000	2.161.535	0,07%

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021.

Populasi ternak sapi dan kambing mengalami penurunan, sementara populasi ternak lainnya mengalami peningkatan. Kabupaten Lampung Barat belum terdapat perusahaan *breeding* maupun *feedloter* yang mengelola ternak besar secara intensif dan profesional. Ternak yang ada merupakan ternak masyarakat yang pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

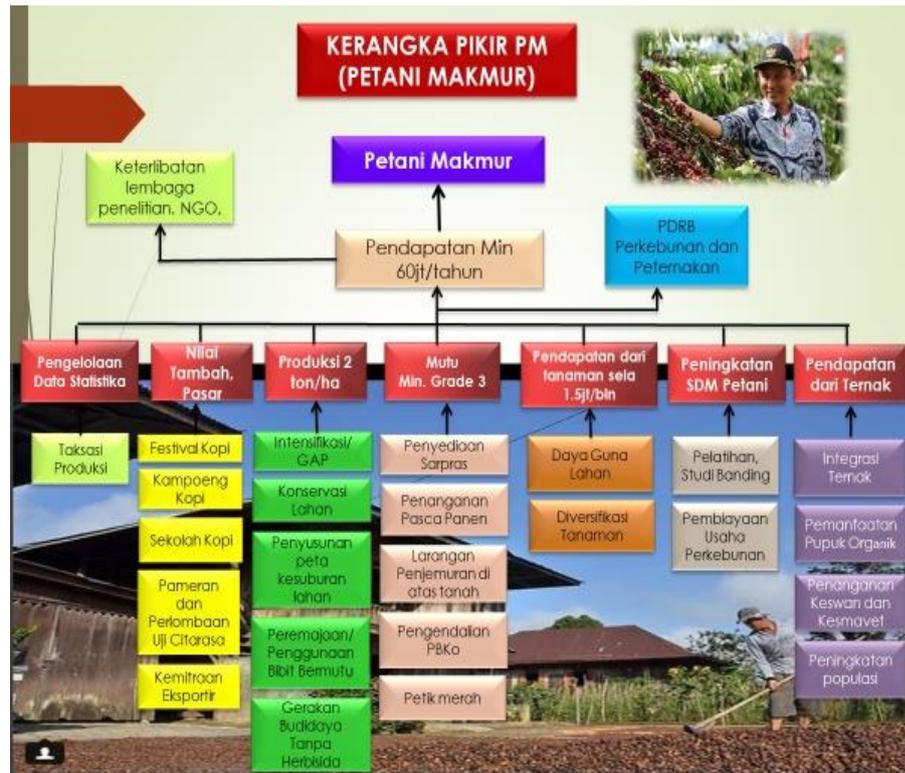
Kebijakan pemerintah diikuti dengan upaya pembinaan yang intensif dari petugas Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten

Lampung Barat serta pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi yang dapat meningkatkan produktivitas ternak. Pada hakikatnya upaya kesehatan, termasuk kesehatan hewan, merupakan tanggungjawab bersama dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan melalui status kesehatan hewan nasional dan pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM) sehingga mencapai kondisi kesehatan, produksi dan produktivitas hewan yang meningkat secara optimal.

Salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah kesehatan hewan adalah dengan membentuk Puskesmas. Disamping pelayanan kesehatan hewan dan reproduksi yang bersifat individual, Puskesmas juga mengemban amanah yang bersifat publik yakni pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan. Dalam hal ini Puskesmas merupakan ujung tombak yang berhadapan langsung dengan kasus dilapangan sehingga dapat melakukan deteksi dini, pelaporan dini dan respon dini (*early warning system*). Diharapkan kasus penyakit hewan menular dapat dikendalikan dan tidak menyebar serta dapat dibebaskan kembali.

Dinas Perkebunan dan Peternakan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) dalam pelayanan kesehatan hewan yang berjumlah 6 (enam) Puskesmas untuk melayani 15 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat. Masyarakat dapat datang membawa hewan ternaknya ke Puskesmas pada jam kerja untuk mendapatkan pelayanan pengobatan, vaksinasi dan konsultasi kesehatan hewan. Model pelayanan ini kami sebut sebagai pelayanan pasif. Selain model pelayanan pasif, Dinas Perkebunan dan Peternakan juga melaksanakan model pelayanan aktif yaitu mendatangi peternak dan pemilik hewan peliharaan dari kandang ke kandang melalui permohonan masyarakat secara berkelompok maupun melalui komunitas-komunitas pecinta hewan ternak.

Dalam upaya untuk mencapai target PDRB sektor perkebunan dan peternakan yang telah ditetapkan telah merumuskan suatu kerangka fikir dalam meningkatkan pendapatan petani yaitu kerangka fikir “Petani Makmur” sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 22. Kerangka Fikir Petani Makmur

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2021.

Program petani makmur bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang didukung peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Program ini adalah kerjasama lintas sektor, pemerintah, swasta dan masyarakat bersama-sama berupaya mewujudkan peningkatan pertanian.

Jika melihat hasil kinerja sektor perkebunan dan peternakan yang merupakan produk pangan masyarakat, maka kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan ini beririsan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan. Peningkatan produksi komoditas perkebunan dan peternakan berarti bahwa ketersediaan pangan masyarakat tercukupi, begitu juga sebaliknya, penurunan hasil produksi akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan masyarakat. Sementara keberagaman komoditas pangan dan ketersediaan daging dari beberapa jenis ternak terutama sapi berdampak pada kualitas pangan. Pangan yang berkualitas berarti memiliki kandungan gizi yang seimbang, tidak didominasi oleh karbohidrat.

Kendala yang dihadapi Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam pencapaian sasaran pada Tahun 2021 ini antara lain adalah:

- 1) Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan kurang dapat dipenuhi dikarenakan kendala jumlah dan kemampuan sumber daya manusia petugas Dinas Perkebunan dan Peternakan yang terbatas;
- 2) Terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang sesuai dengan basis pendidikan untuk bekerja di Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- 3) Kondisi iklim yang kurang mendukung sehingga menghambat realisasi kegiatan.

Maka untuk meningkatkan pencapaian sasaran pada tahun mendatang, rekomendasi yang disarankan adalah:

- 1) Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran sebagai bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) agar dilakukan secara berkala setiap bulan dan triwulan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat tepat waktu dan setiap kendala yang dihadapi dapat segera diselesaikan jalan keluarnya;
 - 2) Potensi sumberdaya manusia khususnya petugas perlu untuk terus diberdayakan sehingga dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembangunan perkebunan serta pemberdayaan ekonomi petani. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui diklat-diklat fungsional.
- b) Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat untuk menghasilkan energi, sehingga bisa beraktifitas dengan bebas. Pangan biasanya bersumber dari hayati dan air baik yang diolah atau tidak diolah yang biasanya disebut tanaman pangan. Tanaman pangan menghasilkan banyak nutrisi penting bagi tubuh seperti karbohidrat kompleks dan protein. Padi adalah pangan utama masyarakat Indonesia. Selain itu ada gandum dan jagung, serta umbi-umbian dan kacang-kacangan. Sebagai negara agrari, tanaman pangan cukup mudah ditanam di berbagai wilayah di Indonesia.

Lampung Barat juga merupakan daerah yang menanam tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam daerahnya. Namun, hasil produksi tanaman pangan tahun 2021 mengalami penurunan. Hal-

hal yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja tahun 2021 adalah:

- 1) Penurunan produksi padi dari 136.784 ton tahun 2020 menjadi 111.641 ton di tahun 2021 karena berkurangnya baku lahan sawah sebagai saran laha produksi. Kondisi baku lahan sawah kedepan akan semakin mengkhawatirkan seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi yang lebih menguntungkan dibandingkan sawah. Alih fungsi lahan menjadi lahan permukiman, usaha selain pertanian, dan kolam ikan menjadi ancaman serius. Menyadari ancaman ini, pemerintah segera mengambil tindakan untuk menjaga produksi padi, diantaranya:
 - a. Menjamin ketersediaan infrastruktur irigasi yang baik dan ketersediaan air untuk budidaya padi, baik infrastruktur baru atau rehabilitasi. Pada tahun 2021, pemerintah membangun 3 unit dam parit, 4 unit embung, irigasi tanah dangkal atau irigasi perpompaan 3 unit, dan perbaikan irigasi untuk 12 kelompok tani;
 - b. Pembangunan jalan usaha tani di kawasan tanaman pangan sebanyak 3 unit, masing-masing sepanjang 1 Km, untuk memperlancar mobilisasi sarana produksi, alat mesin pertanian, dan hasil produksi;
 - c. Penyediaan alat mesin pertanian dalam rangka mendukung mempercepat waktu pengolahan tanah dan mempercepat penanaman secara serempak, mellalui bantuan traktor R2 sebanyak 25 unit;
 - d. Pelaksanaan gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) padi melalui gerakan masal bersama petani atau pembinaan peningkatan pengetahuan petani melalui sekolah lapang dan mengadakan stok pestisida dalam rangka pengamanan produksi;
 - e. Pengembangan pupuk organik untuk tanaman padi dengan tujuan menjaga dna mengembalikan unsur hara tanah yang dibutuhkan tanaman dan mengantisipasi kelangkaan pupuk anorganilk. Pengembnagan pupuk organik dilakukan melalui sekolah lapang di 3 kelompok tani.

- 2) Turunnya produksi sayuran dan buah semusim pada sub sector hortikultura dari 58.839 ton pada tahun 2020 menjadi 45.187 ton di tahun 2021, penyebabnya adalah;
- a. Berkurangnya luas panen dari 3.641 Ha tahun 2020 menjadi 3.214 Ha ditahun 2021;
 - b. Permintaan komoditas hortikultura (wortel, buncis, cabe, kol) yang biasanya didistribusikan ke Jakarta dan sekitarnya menurun imbas pandemi Covid-19. Adanya aktivitas PPKM berpengaruh karena acara acara keramaian menurun sehingga kebutuhan bahan sayuran juga menurun;
 - c. Harga sayuran rendah, sebagai imbas dari hukum permintaan dan penawaran. Hasil produksi sayuran tidak terserap di pasaran baik lokal maupun di luar Lampung. Ketersediaan barang tidak diikuti oleh permintaan barang sehingga harga turun. Missal tomat pernah mencapai harga Rp 500 per kg di tingkat petani. Kol Rp 800 per kg. Sawi putih Rp 900 per kg;
 - d. Kenaikan biaya operasional khususnya kenaikan harga pupuk. Kenaikan harga pupuk mencapai 100% s.d. 150%. Hal ini berimbas dengan ketersediaan permodalan petani hortikultura. Dengan modal terbatas sedangkan harga sarana produksi meningkat, menyebabkan berkurangnya dosis pupuk dan obat obatan yang diberikan ke tanaman. Misalnya kebutuhan pupuk NPK sebelumnya diberikan 200 sd. 250 kg per 0,5 ha, sekarang hanya bisa 150 kg. hal ini menurunkan tingkat produksi tanaman;
 - e. Tingginya permodalan hortikultura sedangkan resiko gagal juga tinggi. petani misalnya untuk cabe saat ini per 0,5 ha mencapai 29-35 juta rupiah. Tanaman hortikultura yang beresiko tinggi seperti cabe, kentang. Jika harga jual rendah, petani rugi karena modal yang keluar sudah tinggi. Pada tahun 2021 dimana PPKM diberlakukan, berimbas pada anjloknya harga sayuran;
 - f. Untuk kentang, produksi di Lampung Barat terus menurun disebabkan sulitnya mendapatkan benih kentang yang bagus. Selama ini benih kentang berasal dari daerah lain misalnya Pulau Jawa (Dieng atau Jawa Timur) dan yang lebih cocok lagi dari Brastagi Medan. Benih yang didapat sampai dengan saat ini rentan

penyakit mati gadis pada usia tanaman 40 s.d. 50 hari. Petani di Lampung Barat sedikit yang dapat mengembangkan benih, namun jumlah sekarang hanya mampu untuk kebutuhan sendiri. Secara geografis dan karakteristik wilayah, Lampung Barat sebenarnya cocok untuk budidaya kentang. Namun jika Lampung Barat menjadi sentra kentang, maka produsen kentang di Medan kemungkinan dapat tersaingi. Namun, kondisi sekarang benih dari medan selalu rentan penyakit, sehingga petani enggan menanam kentang kembali. Dengan harga benih 27 ribu rupiah per kg kebutuhan 1 kw per ha, berarti modal benih sudah 27 juta rupiah. Jika setelah tanam terkena penyakit mati gadis, maka petani rugi;

- g. Untuk bawang putih, karakteristi wilayah Lampung Barat walaupun di dataran tinggi, iklim kurang cocok untuk budidaya bawang putih. Di Lampung Barat sendiri ada embun salju yang merupakan penyakit untuk bawang. Beberapa kali dicoba budidayakan, hasil umbi bawang putih hanya daun nya yang membesar sedangkan umbi bawang tidak membesar.

Untuk produksi tanaman hortikultura tahunan mengalami peningkatan, dimana produksi tahun 2020 sebesar 28.722 ton menjadi 42.861 ton pada tahun 2021. Secara umum pencapaian produksi hortikultura didukung oleh:

- 1) Pengembangan kawasan buah untuk komoditas pisang seluas 40 Ha;
- 2) Pengembangan kawasan sayuran (cabe besar) seluas 25 Ha;
- 3) Pengembangan kawasan bawang merah seluas 15 ha;
- 4) Pengenalan dan pengembangan penggunaan benih unggul buah (durian, manggis dan alpukat) dengan luasan 58 Ha;
- 5) Pemasyarakatan dan Pengembangan kawasan buah-buahan melalui bantuan bibit buah-buahan yang tersebar di 15 kecamatan;
- 6) Bantuan sarana produksi cabe rawit dengan budidaya tumpang sari seluas 45 Ha.

Memperhatikan penataan ruang dan wilayah Kabupaten Lampung Barat, dimana penggunaan lahan yang dapat dikelola hanya 40% dari total luas wilayah, keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan membutuhkan upaya-upaya yang cerdas dalam rangka melaksanakan

pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan tidak berdampak merusak lingkungan. Beberapa tantangan yang berpotensi muncul dan perlu menjadi perhatian dalam implementasi program untuk mencapai sasaran peningkatan PDRB tanaman pangan adalah:

- 1) Bertambahnya jumlah penduduk;
- 2) Dampak iklim ekstrim terhadap pelaksanaan budidaya;
- 3) Jumlah produksi pertanian tinggi yang tidak diimbangi kualitas produk;
- 4) Daya dukung lahan yang semakin berkurang;
- 5) Teknologi inovatif terkini dibidang pertanian;
- 6) Lemahnya kapasitas dan kemampuan kelembagaan tani dalam manajemen usaha tani.

Sementara itu, potensi peluang yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah:

- 1) Peningkatan produksi pertanian dalam rangka mengimbangi kebutuhan pangan;
- 2) Peningkatan kemampuan petugas dan petani antisipasi dampak iklim;
- 3) Peningkatan mutu dan kualitas produk pertanian;
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
- 5) Pengembangan pertanian organik;
- 6) Teknologi inovatif terkini ramah lingkungan dibidang pertanian.

17. Sasaran Strategis 17 Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sub Sektor perikanan

Capaian Kinerja

Sektor perikanan adalah potensi yang sangat menjanjikan dan mampu membantu peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Hal ini dapat terlihat dari potensi lahan darat yang dapat dikembangkan untuk budidaya kolam seluas 5.584 Ha dengan tingkat pemanfaatan saat ini mencapai 2.429 Ha. Sementara potensi lahan untuk mina padi adalah 13.710 Ha dengan tingkat pemanfaatan 452 Ha. Potensi perairan umum di Kabupaten Lampung Barat yang menjadi fokus pengembangan perikanan budidaya adalah perairan umum danau ranau, atau disebut dengan Keramba Jaring Apung (KJA). Potensi luasnya 413 Ha, namun pemanfaatannya baru sebesar 84 Ha. Dalam mengupayakan

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya, digunakan indikator pertumbuhan produksi perikanan untuk mencapai sasaran startegis ini. Potensi perikanan di Lampung Barat meliputi perikanan budidaya (budidaya darat dan perairan umum) dan penangkapan ikan perairan umum.

Realisasi peningkatan pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan tahun 2021 adalah 16,17% dari target 14,15%. Rinciannya adalah capaian produksi usaha penangkapan perairan umum sebesar 107,24%, dan capaian produksi usaha budidaya ikan adalah sebesar 136,81%. Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuatif, meski begitu capaiannya selalu melebihi target. Tahun 2019, capaian sasaran ini mencapai 122%, tahun 2020 mengalami penurunan sampai ke angka 106,85%, meningkat lagi tahun 2021 sebesar 114%.

Tabel 49. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 17

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Pertumbuhan produksi perikanan	$\frac{(\text{produksi 2021} - \text{produksi 2020})}{\text{Produksi 2020}} \times 100$	14,15	16,17	114	Sangat tinggi

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Pertumbuhan PDRB perikanan tahun 2021 belum mampu mengungguli capaian PDRB tahun 2019, namun PDRB perikanan tahun 2021 sudah lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB tahun 2020. Peningkatannya sebesar 7,15%. Berikut ini adalah perbandingan target dan capaian indikator kinerja peningkatan pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan tahun 2020, 2021 dan capaian akhir RPJMD.

Tabel 50. Target dan Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan Tahun 2020-2021

Indikator Kinerja	2020		2021		2022	Capaian 2021 s.d Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
PDRB sub sektor perikanan	160.605,87	239.012,66	180.391,57	283.434,75	197.691,12	114,29 %

Sumber: Laporan kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021, RPJMD Lampung Barat Tahun 2017-2022, diolah tim, 2022.

Tahun pertama penyebaran pandemi Covid-19 memang menyebabkan penurunan capaian kinerja dari tahun 2019 ke tahun 2020,

yaitu 2,11 poin. Belum siapnya pemerintah dan masyarakat dengan kondisi pandemi yang statusnya mengancam ketahanan Negara. Bersama dengan datangnya pandemi Covid-19, banyak kebijakan pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 yang lebih menekankan pembatasan mobilitas telah berdampak pada kemerosotan ekonomi masyarakat. Namun tahun 2021 capaian kinerja kembali mengalami peningkatan, sebesar 1,11 poin dari capaian kinerja tahun 2020. Memang, tahun 2020 berjalan dengan belanja tak terduga bernominal tinggi untuk penanganan pandemi Covid-19, namun pemerintah segera mengupayakan perencanaan pemulihan ekonomi masyarakat. Sebagai salah satu sumber pendapatan sebagian masyarakat Lampung Barat sejak lama, optimalisasi kembali sektor perikanan mampu membantu pemulihan ekonomi masyarakat.

Peningkatan capaian kinerja tahun 2020 ke tahun 2021 ini dipengaruhi beberapa hal, diantaranya:

- a) Meningkatnya jumlah produk olahan ikan, yang menjadi salah satu faktor pendukung Tingkat Konsumsi Ikan (TKI) masyarakat. Target TKI yang ditetapkan tahun 2021 adalah 31,20 kg/kapita/tahun, capaiannya sebesar 31,54 kg/kapita/tahun atau 101,09%;
- b) Meningkatnya jumlah kelas kelompok budidaya ikan (Pokdakan), tahun 2021 mencapai 475 kelompok tersebar diseluruh kecamatan. Sebanyak 101 kelompok kelas madya dan 374 kelompok kelas pemula, dengan komoditas utama pengembangan budidaya ikan adalah ikan nila, ikan mas, dan ikan lele. Peningkatan jumlah Pokdakan sangat berperan dalam peningkatan produksi perikanan dan peningkatan konsumsi ikan masyarakat;
- c) PDRB sub sektor perikanan mencapai Rp.283.434.750, didukung produksi perikanan budidaya pembesaran, perbenihan, tangkap dan pengolahan hasil perikanan.

Kenaikan pendapatan sub sektor perikanan sebesar Rp.44.422,09 juta tahun 2021 atau 8,3% dari tahun sebelumnya dipengaruhi oleh produksi perikanan tangkap perairan umum (586,20 ton dengan total pendapatan Rp.14.021,45 juta), perikanan budidaya/ pembesaran (9.935,41 ton dengan total pendapatan Rp.252.240,22 juta), pembenihan (72.078.250 ekor dengan total pendapatan Rp.13.482,56 juta), dan pengolahan hasil perikanan (38,90 ton dengan total pendapatan Rp.3.960.500). Diantara

beberapa jenis budidaya, budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) yang merupakan budidaya perairan umum memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi perikanan budidaya, yaitu sebanyak 6.209,42 ton. Peningkatan jumlah produksi KJA ini didukung oleh penambahan berkala jumlah keramba jarring apung yang saat ini mencapai 435 unit. Sehingga rata-rata produksi per satu unit keramba per tahun adalah 14,27 ton. Jumlah produksi ikan budidaya tertinggi adalah budidaya kolam yang mencapai hasil produksi sebanyak 3.355,98 ton, terakhir mina padi sebanyak 370,01 ton. Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi produksi usaha penangkapan perairan umum dan produksi usaha budidaya ikan tahun 2021.

Tabel 51. Target dan Realisasi Produksi Usaha Penangkapan Perairan Umum dan Budidaya Ikan Tahun 2021

Jenis Produksi	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)
Usaha penangkapan perairan umum	546,64	586,20	107,24
Usaha budidaya ikan	9.935,41	7.262,05	136,81

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021, 2022.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Dalam tahap pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ke 17 yaitu meningkatnya pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat menyusun program-program yang tidak hanya meningkatkan produksi perikanan, melainkan juga fasilitasi, pemantauan, dan pelatihan dan pendampingan, serta bantuan modal dan lapangan usaha.

Urgensi sub sektor perikanan dalam pembangunan daerah adalah bahwa konsumsi ikan dapat membantu meningkatkan kecerdasan sumber daya manusia. Konsumsi ikan dapat membantu pencegahan stunting, yaitu kurangnya asupan gizi anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kasus stunting di Lampung Barat tahun 2021 berjumlah 13,57%. Meski lebih rendah dibandingkan angka stunting Provinsi Lampung (18,5%) dan angka stunting nasional (24,4%), bahkan lebih rendah dari batas minimum yang disyaratkan WHO (20%), namun angka 13,57% adalah angka yang harus tetap menjadi perhatian utama pemerintah.



Gambar 23. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil dan Pembelajaran Penangkar Ikan Asli Perairan Umum Indonesia
Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021.

Peningkatan konsumsi ikan masyarakat Lampung Barat harus dimulai dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Perikanan. Dimulai dengan mengembangkan kapasitas pembudidaya ikan, langkah ini penting karena sebagai petani pengetahuan manajemen dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pengembangan kelompok perikanan serta pemasaran produk ikan. Beberapa petani mungkin memang telah memulai usaha perikanan, namun dengan pemerintah turun tangan akan mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan dan hasil produksi perikanan petani. Informasi tentang potensi lahan, cara mengelola lahan menjadi tempat budidaya ikan, cara melakukan budidaya, pemasaran hasil panen, bahkan juga pemutaran untung hasil panen sering luput dari pengetahuan masyarakat awam.

Kabupaten Lampung Barat memang tidak lagi memiliki wilayah kelautan, namun Indonesia tetaplah menjadi negara bahari. Perairan umum Danau Ranau juga anugerah bagi ketersediaan konsumsi ikan dan sumber pencaharian masyarakat. Sehingga selain perikanan budidaya, penangkapan ikan perairan umum juga menjadi komoditas menjanjikan. Tercatat 475 kelompok budidaya ikan telah difasilitasi pembentukannya sampai tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan ketertarikan masyarakat untuk menjadi pembudidaya ikan, selain juga berarti peningkatan kapasitas pembudidaya ikan. Produsen ikan tertinggi adalah Kecamatan Lumbok Seminung, sebagai wujud nyata pengoptimalan budidaya ikan (baik budidaya darat atau budidaya kermaba jarring apung). Disusul Kecamatan Sumberjaya, Kecamatan Kebun Tebu, dan kecamatan lainnya yang rata-rata produksi ikan budidaya adalah 662,36 ton/tahun.



Gambar 24. Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Pembudidaya Ikan, Fasilitasi Bantuan Pendanaan dan Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha, dan Pembinaan Rekomendasi Izi Usaha Perikanan
Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021.

Bagian yang menjadi inti dari pelaksanaan sebuah program adalah pendampingan dan pemantauan sasaran program. Hal ini karena kejenuhan mungkin terjadi, kompetensi perlu di *upgrade*, semangat perlu didorong, inovasi perlu diciptakan, pasar hasil produksi ikan perlu diperluas, teknologi perlu diterapkan untuk efektivitas dan efisiensi, bahkan strategi pemasaran produk perlu diganti. Maka konsistensi dan sinergi vertikal dan horizontal perlu dibangun dan dijaga. Secara vertikal, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menaruh komitmennya untuk mendukung produksi perikanan dan peningkatan konsumsi ikan salah satunya dengan menempatkan penyuluh perikanan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Lampung Barat. Meski program-programnya berasal langsung dari KKP, namun penyuluh perikanan juga berperan dalam menyalurkan bantuan pendukung produksi perikanan. Bukan berarti berjalan berlainan arah dengan Dinas Perikanan, namun justru saling melengkapi. Secara horizontal, Dinas Perikanan memahami betul bahwa dampak kinerjanya adalah membantu mengurangi angka stunting yang termasuk dalam urusan kesehatan (Dinas Kesehatan). Selain itu, optimalisasi potensi lahan budidaya perikanan juga menjadi lapangan kerja masyarakat, pekon juga menjadi lebih berdaya.



Gambar 25. Bantuan Benih dan Pakan Ikan Nilem, Pemasaran Hasil Produksi Perikanan dan Bantuan Sarana Pemasaran Perikanan Keliling
Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021.

Pada tahun keempat pelaksanaan RPJMD, PDRB sub sektor perikanan memang telah melebihi target akhir RPJMD. Namun, ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kinerja Dinas Perikanan. Pertama, serapan anggaran baru mencapai 98,77%. Belum terserap secara optimalnya anggaran ini menjadi evaluasi Dinas Perikanan untuk meningkatkan kinerja program dan inovasi yang mendukung peningkatan PDRB sub sektor perikanan. Kedua, berkaitan dengan dampak produksi perikanan. Melihat laporan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, angka stunting Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 meningkat 0,37% setelah tahun sebelumnya berhasil turun 1,13%. Produksi perikanan yang meningkat 1.084,57 ton dibanding tahun 2020 justru tidak sebanding dengan penurunan jumlah stunting. Padahal, jika dilihat kembali data jumlah produk olahan ikan, tahun 2021 mencapai 101,09%. Capaian jumlah produk olahan ikan tersebut telah menjawab isu strategis pembangunan bidang perikanan, maka ketidakselarasan peningkatan produksi perikanan dengan penurunan stunting perlu dikaji dari aspek lain yang juga berkaitan atau berpengaruh besar terhadap angka stunting.

18. Sasaran Strategis 18 Meningkatnya Pertumbuhan Industri Sektor Pariwisata

Capaian Kinerja

Pariwisata adalah perjalanan atau perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi diluar tempat tinggalnya untuk rekreasi atau liburan. Berada dalam bentang alam yang bergelombang dan berbukit, Kabupaten Lampung Barat memiliki pesona alam yang menakjubkan. Banyak destinasi wisata terbentuk alami berkat kuasa Tuhan. Potensi alam ini mampu menjadi sumber daya perekonomian masyarakat sekitar tempat

wisata dan pemerintah daerah. Potensi pariwisata dikembangkan melalui desa wisata yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan industri sektor pariwisata, digunakan 2 indikator kinerja yang akan membantu melihat progres pertumbuhan industri sektor pariwisata. Pertama, rata-rata lama tinggal, yaitu jumlah hari atau malam yang dihabiskan wisatawan ditempat rekreasi. Realisasi indikator kinerja rata-rata lama tinggal wisatawan ini adalah 2 hari. Jika dibandingkan dengan target 2,5 hari, maka capaian kinerja indikator ini adalah 80%. Realisasi ini juga menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang rata-rata lama tinggal wisatawan di Lampung Barat adalah 3 hari. Sebab penurunan rata-rata lama tinggal wisatawan ini adalah masih adanya pandemi Covid-19 yang menempatkan Kabupaten Lampung Barat berada pada PPKM level 3, menyebabkan destinasi wisata ditutup pada triwulan 2 dan 3 tahun 2021. jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian pada tahun 2021 sudah sebesar 66,66%.

Indikator kinerja kedua adalah jumlah kunjungan wisatawan, yaitu banyaknya wisatawan nusantara dan internasional yang berkunjung di destinasi-destinasi wisata Lampung Barat. Realisasi kunjungan wisatawan nusantara di total semua destinasi Lampung Barat tahun 2021 adalah 153.414 wisatawan, dengan 0 wisatawan internasional dari kunjungan total di 38 destinasi wisata. Realisasi kunjungan wisatawan ini lebih banyak dari target 17.805 wisatawan, sehingga capaian kerjanya mencapai 861%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (18.161 orang), capaian kinerja tahun 2021 ini sudah melebihi target akhir RPJMD sebesar 844,7%. Namun sebenarnya jumlah kunjungan wisatawan tahun 2021 ini berkurang drastis dari jumlah kunjungan tahun 2020 sampai 139.284 orang. Sejak periode RPJMD tahun 2018-2021, kunjungan wisatawan paling ramai memang terjadi tahun 2020. Kunjungannya saat itu mencapai 292.698 wisatawan. Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi lama tinggal dan kunjungan wisatawan di destinasi wisata Lampung Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Berikut ini adalah perbandingan realisasi

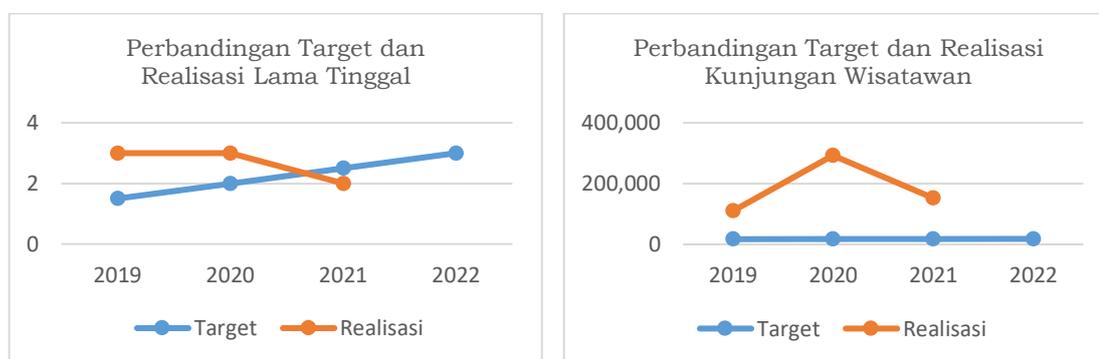
kinerja tahun 2020 dan 2021, target akhir RPJM, serta capaian kinerja RPJM sampai dengan tahun 2021.

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021, Target Akhir RPJMD, dan Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja RPJMD s.d 2021
Rata-rata lama tinggal	3 hari	2 hari	3 hari	66,66%
Jumlah kunjungan wisatawan	292.698 orang	153.414 orang	18.161 orang	844,74%

Sumber: diolah tim, 2022.

Kedua indikator pertumbuhan industri pariwisata di Lampung Barat ini kompak mengalami penurunan pada tahun 2021, masih karena dampak pandemi Covid-19. Pembatasan sosial yang diperketat menyebabkan sektor pariwisata lebih banyak tutup daripada dibuka untuk umum. Perkembangan kedua indikator industri pariwisata di Lampung Barat dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.



Grafik 18. Perbandingan Target dan Realisasi Lama Tinggal dan Kunjungan Wisatawan Tahun 2019-2022.

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

a) Rata-Rata Lama Tinggal

Rata-rata lama tinggal wisatawan berpengaruh terhadap peningkatan industri pariwisata. Hal ini karena semakin lama wisatawan tinggal pada satu destinasi wisata, berarti semakin banyak biaya dan akomodasi yang dikeluarkan wisatawan tersebut dan menjadi pemasukan bagi pengelola pariwisata. Ada 2 faktor yang mempengaruhi lama tinggal wisatawan di destinasi wisata. Pertama, faktor dari tempat

wisata. Meliputi 1) objek dan daya tarik wisatawan. Pemerintah dan Pokdarwis tidak semena-mena menetapkan sebuah pemandangan menjadi destinasi wisata yang patut dipasarkan dan dijadikan objek wisata. Meski memiliki bentang alam yang bagus dan pemandangan asri dapat dinikmati bahkan dari pinggir jalan, namun ada kategori yang ditetapkan untuk dijadikan destinasi wisata. Objek yang ditetapkan menjadi destinasi wisata di Lampung Barat sesuai dengan persiapan dan analisis peluang pemasaran yang banyak dicari masyarakat sebagai tujuan rekreasi;

2) pemasaran, memanfaatkan berbagai media seperti media cetak dan elektronik. Pemerintah Lampung Barat telah memanfaatkan media elektronik untuk memasarkan budaya dan pariwisata Lampung Barat. Kedua media ini masih dipilih karena masih ada kalangan masyarakat yang membaca surat kabar cetak, sementara pengguna media social lebih banyak diisi oleh kalangan anak-anak muda. Meski telah banyak dari masing-masing destinasi wisata di Lampung Barat memasarkan destinasinya secara mandiri, namun pemerintah tetap melakukan pemasaran secara keseluruhan destinasi wisata. Bekerjasama dengan komunitas pariwisata dan tokoh publik, pemasaran pariwisata dilakukan melalui videografi;

3) Fasilitas/ infrastruktur, jalan adalah factor penting sebagai akses menuju lokasi wisata. Tanpa jalan yang memadai, pengunjung akan enggan untuk mendatangi lokasi wisata karena pada dasarnya banyak pengunjung bepergian ke lokasi wisata untuk rekreasi, sehingga tidak ingin disulitkan dengan jalanan yang belum layak. Maka pemerintah Lampung Barat melalui Dinas Porapar bersama dengan Pokdarwis sekitar lokasi wisata dan bekerjasama dengan Dinas PUPR membangun infrastruktur yang diperlukan sebagai penunjang pariwisata. Pembangunan infrastruktur ini juga sangat memperhatikan status alam, karena banyak diantaranya adalah bagian dari yang tidak boleh dilakukan pembangunan beton demi menjaga kelestarian alam;

4) Tata laksana (pelayanan, keamanan, serta kenyamanan), hal ini yang mendasari pemerintah memberdayakan Pokdarwis di sekitar lokasi wisata untuk dapat mengelola tempat wisata dengan tetap menjaga kelestarian alam. Bukan hanya manajemen pengelolaan tempat wisata

yang menjadi fokus pemberdayaan, namun juga urgensi pengelolaan wisata dan manfaat yang akan diperoleh warga sekitar; e) tipe akomodasi yang tersedia, meliputi akomodasi yang disediakan pengelola wisata. Seperti penginapan. Akomodasi ini menyesuaikan jenis pariwisata, karena tidak semua pariwisata di Lampung Barat dibangun akomodasi seperti penginapan. Kejelasan ketersediaan jenis akomodasi di lokasi wisata ini sudah diinformasikan dengan jelas pada profil pariwisata agar pengunjung dapat memahami dan mempersiapkan diri dalam kunjungannya; f) stabilitas daerah, pemerintah Lampung Barat menjamin keamanan wilayah termasuk pada destinasi wisata yang tidak jarang lokasinya berada sedikit jauh dari pemukiman warga.

Kedua, faktor dari wisatawan atau alasan berwisata. Alasan berwisata biasanya ada 2, berekreasi dan kegiatan bisnis. Ada wisatawan yang memang berniat melakukan perjalanan rekreasi, dan beberapa lainnya berwisata ketika dalam perjalanan bisnis kemudian mampir sebentar. Keduanya potensial. Pada destinasi wisata Lampung Barat didominasi oleh alasan berwisata pertama. Banyak pengunjung dari dalam daerah dan dari luar daerah yang menyengajakan diri bepergian untuk melakukan rekreasi.



Gambar 26. Budaya sebagai Salah Satu Destinasi Wisata Lampung Barat
Sumber: Dokumentasi Dinas Porapar, 2022.

b) Jumlah Kunjungan Wisatawan

Pariwisata menjadi identitas sebuah daerah, mengelolanya dengan baik akan membuat banyak orang penasaran dan memutuskan berkunjung untuk tujuan rekreasinya. Selain tentu saja memberi pemasukan ekonomi bagi masyarakat sekitar destinasi dan pemerintah daerah. Pemerintah Lampung Barat telah menyadari potensi pariwisata yang dikandung bumi sekala bhak ini, pemerintah juga terus berupaya

mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata dengan tetap menjaga kelestarian alam. Beberapa program yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan industri pariwisata adalah pertama melakukan promosi pariwisata. Kemajuan zaman telah membawa manusia pada pesatnya penggunaan teknologi, dunia dalam genggamannya adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan betapa di masa sekarang ini semua orang bisa dengan mudah mengakses banyak informasi dan bahkan berkeliling dunia secara maya. Pemerintah Lampung Barat memanfaatkan teknologi sebagai sarana strategis untuk memasarkan destinasi wisata. Melalui media sosial, masyarakat dapat melihat dan menikmati berbagai destinasi wisata di Lampung Barat. Informasi-informasi penting seperti nama-nama destinasi, lokasi, biaya tiket masuk, akses, bahkan fasilitas dapat didapat oleh semua orang yang mengakses internet. Jenis media sosial yang saat ini paling masif dikalangan anak muda adalah Instagram. Oleh karena hal tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat juga aktif di media sosial tersebut. Tujuannya adalah untuk mengenalkan dan mempromosikan budaya dan pariwisata Lampung Barat.

Selain melalui akun resmi Dinas Porapar, beberapa destinasi wisata di Lampung Barat juga memiliki akun media sosial sendiri, pengelolanya adalah masyarakat sekitar destinasi wisata atau Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang biasanya diisi banyak anak muda. Sekali lagi, pemuda berperan penting dalam pembangunan daerah. Pemerintah melalui Dinas Porapar juga bergandeng tangan dengan komunitas pariwisata. Banyak pemuda saat ini telah sukses di media sosial dan memiliki banyak pengikut di dunia maya sehingga apapun yang dilakukan pemilik akun tersebut akan menjadi atensi banyak orang dari berbagai daerah. Menggandeng komunitas atau individu *traveller* atau penggiat wisata daerah sangat membantu mengenalkan dan mempromosikan budaya dan wisata Lampung Barat.

Total destinasi wisata di Lampung Barat sampai dengan tahun 2021 adalah 38 destinasi wisata. Pengelolanya oleh Pokdarwis, melalui program pengembangan dan pemasaran destinasi pariwisata oleh pemerintah. Destinasi-destinasi wisata tersebut belum terkelola semuanya, hal ini karena pengelolaan destinasi wisata yang tidak boleh

sembarangan dan membutuhkan modal penyediaan sarana prasarana untuk keamanan dan kenyamanan pengunjung. Maka pemerintah melalui program fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata, salah satunya adalah membantu akomodasi penyediaan sarana prasarana di destinasi wisata. Beberapa destinasi lainnya merupakan hasil rebug dan gotong royong masyarakat pengelola destinasi wisata setempat. Pada tahun 2019, destinasi wisata yang terkelola Pokdarwis ada 19 destinasi, meningkat di tahun 2020 dengan sebanyak 32 destinasi terkelola Pordarwis. Kemudian pada tahun 2021, 35 destinasi terkelola Pokdarwis. Pemerintah terus berupaya memberi pendampingan agar kesemua destinasi wisata dapat terkelola oleh Pokdarwis, sehingga kelestariannya tetap terjaga dari sampah pengunjung yang dibuang sembarang dan perusakan lainnya karena tidak adanya pengawasan dan pengelolaan.

Destinasi wisata yang ada di Lampung Barat ini terus berkembang dan bertambah banyak jumlahnya karena kemampuan masyarakat dan pemerintah melihat objek alam yang dapat menjadi destinasi wisata. Sampai dengan tahun 2021, terhitung ada sekitar 16 destinasi wisata yang terhitung baru, bahkan diantaranya memiliki pengunjung terbanyak tahun 2021 dibandingkan destinasi wisata lainnya. Misalnya Pinus *Ecopark* yang berlokasi di Sukapura, Sumberjaya. Total jumlah pengunjungnya adalah 11.782 wisatawan, menjadi destinasi dengan pengunjung terbanyak ketiga di tahun 2021. Selain itu, destinasi wisata baru yang mendapat jumlah pengunjung terbanyak adalah Berlian Muda, wisata alam buatan yang berlokasi di Pagar Dewa, Sukau. Jumlah total pengunjungnya selama tahun 2021 adalah 9.768, terbanyak keempat. Sementara destinasi dengan pengunjung terbanyak selama tahun 2021 adalah Kampung Kopi Rigis, Rigis Jaya, Air Hitam, dengan total pengunjung 16.417 wisatawan. Kedua adalah Area Jaya, Sindang Pagar, Sumberjaya, yang jumlah pengunjungnya 12.784 wisatawan.

Pengembangan desa wisata adalah salah satu bentuk percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa. Oleh karena hal tersebut, melalui program pengembangan destinasi wisata, pemerintah berkomitmen

untuk terus mendampingi dan memberdayakan masyarakat untuk mengelola kawasan strategis pariwisata. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata yang diangkat dan dikembangkan ini akan memberikan nilai tambah manfaat serta menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan strategis pariwisata. Kendala yang dihadapi dalam pertumbuhan industri pariwisata ini adalah belum semua destinasi wisata terkelola oleh Pokdarwis. Maka rekomendasi yang disarankan adalah pemerintah akan melakukan pemberdayaan, pendampingan dan monitoring kepada masyarakat sekitar lokasi wisata agar mau dengan sadar dan tanggungjawab melakukan pengelolaan destinasi wisata.

19. Sasaran Strategis 19 Meningkatnya Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) Sektor Industri dan Perdagangan

Capaian Kinerja

Sasaran ini terdiri dari 2 sektor, yaitu industri dan perdagangan. Perindustrian adalah salah satu sektor perekonomian yang memiliki potensi memacu pembangunan ekonomi Lampung Barat. Pembangunan ekonomi daerah adalah proses pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja dan merangsang kegiatan ekonomi di Lampung Barat. Sektor perindustrian menyerap tenaga kerja, penyediaan bahan baku, pemasaran dan lainnya yang mendukung berjalannya sebuah industri. Maka sektor perindustrian berpotensi membantu menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. PDRB sektor perdagangan menyumbang 5,35% PDRB Kabupaten Lampung Barat. Sektor perdagangan juga merupakan salah satu sektor perekonomian yang menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB daerah. Sektor perdagangan di Lampung Barat yang memberi nilai tambah pertumbuhan ekonomi daerah adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang menyumbang 12,85% PDRB Kabupaten Lampung Barat.

Rata-rata capaian PDRB sektor perdagangan dan industri Lampung Barat tahun 2021 adalah 150,3%. Capaian ini berasal dari capaian kinerja indikator PDRB sektor perdagangan sebesar 143,7% dan capaian kinerja

PDRB industri sebesar 156,97%. Target kinerja PDRB perdagangan adalah sebesar 669.269 juta rupiah, terealisasi sebesar 961,79 juta rupiah atau kinerjanya tercapai 143,7%. Capaian ini meningkat 12,4% dari capaian PDRB perdagangan Lampung Barat tahun 2020, atau jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah tercapai 142,28%. Sementara jika dibandingkan dengan capaian PDRB Perdagangan Provinsi Lampung yang sebesar 43,510 milyar, capaian Lampung Barat belum mampu mengungguli.

Capaian kinerja PDRB industri adalah 156,97%, merupakan perbandingan realisasi kinerja sebesar 400,61 juta rupiah dengan target kinerja 255.200 juta rupiah. Capaian ini meningkat 17,92% dibandingkan capaian PDRB industri Lampung Barat tahun 2020, perbandingannya dengan target akhir RPJMD sudah mencapai 155,42%. Sama dengan PDRB perdagangan, PDRB industri Lampung Barat belum mampu mengungguli capaian kinerja Provinsi Lampung yang PDRB industrinya mencapai 73,095 milyar rupiah. Data capaian kinerja indikator PDRB perdagangan dan industri ini merupakan hasil statistik yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat. Berikut ini adalah perbandingan capaian tahun 2020, capaian tahun 2021, target 2022 dan capaian Provinsi Lampung.

Tabel 53. Perbandingan Capaian Tahun 2020 dan 2021, Target Kinerja Tahun 2022, dan Capaian Kinerja Provinsi Lampung Tahun 2021

Indikator Kinerja	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Capaian Kinerja RPJMD s.d 2021
PDRB Perdagangan	870,03 juta rupiah	961,79 juta rupiah	675,961 juta rupiah	142,28%
PDRB Industri	377,07 juta rupiah	400,61 juta rupiah	257,751 juta rupiah	155,42%

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Koperindag Lampung Barat Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Sektor perekonomian adalah sektor yang mengalami kontraksi paling besar sejak terjadinya pandemi Covid-19, maka pemulihan ekonomi menjadi fokus pemerintah selain penanganan dan pencegahan pandemi. Pemerintah dan masyarakat harus mulai beradaptasi dengan pandemi dalam berkegiatan sehari-hari. Hal ini karena pandemi yang belum juga henggang dari daerah Lampung Barat akan menyebabkan kemerosotan yang semakin besar di bidang ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang

mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dan pemerintah harus dilakukan dengan proaktif.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

a) PDRB Perdagangan

Dalam mendukung peningkatan PDRB perdagangan, beberapa kebijakan telah ditetapkan dan diimplementasikan kedalam program dan kegiatan. Pertama, upaya penyediaan sarana prasarana distribusi perdagangan. Pada tahun 2021, jumlah sarana prasarana distribusi perdagangan telah berjumlah 3 unit. Sarana prasarana tersebut yaitu berupa revitalisasi pasar rakyat berupa kios dan los pasar pagar dewa di Kecamatan Sukau seluas 76,16m², rehabilitasi area parker pasar simpang sari Kecamatan Sumber Jaya seluas 579,24m², dan konsultasi perencanaan pembangunan berupa pemeriksaan *soil test* pasar Seblat Kecamatan Sukau dan pasar Purajaya Kecamatan Sumber Jaya.

Kedua, stabilitas harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting ditingkat pasar desa. Laju pertumbuhan harga rata-rata tahun 2021 adalah 0,142%. Harga bahan pokok dan barang penting yang dianalisis fluktuasinya adalah harga ditingkat pasar rakyat/tradisional, yang merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan untuk menstabilkan harga dengan harapan konsumsi masyarakat tetap naik sehingga menaikkan nilai tambah dari transaksi perdagangan di Kabupaten Lampung Barat. Data capaian diatas menunjukkan bahwa fluktuasi harga kebutuhan bahan pokok dari tahun sebelumnya hingga tahun 2021 tidak terlalu besar dan mencapai target kinerja yakni dibawah 5%.



Gambar 27. Salah Satu Kegiatan Stabilitas Harga Pasar
Sumber: Dokumentasi Dinas Koperindag, 2022.

Ketiga, perlindungan konsumen melalui program tertib niaga serta mendorong dan memfasilitasi pemasaran produk koperasi dan UMKM. Nilai tambah PDRB Sektor Perdagangan sangat ditunjang oleh perputaran penjualan produk baik dari sektor perdagangan besar maupun eceran. Berdasarkan data, pelaku usaha di Kabupaten Lampung Barat didominasi oleh pelaku usaha mikro, sehingga salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan fasilitas perluasan pemasaran produk UMKM melalui *event* promosi, yang diharapkan mampu mendorong kenaikan penjualan dan omset pelaku usaha perdagangan mikro. Pada tahun 2020 kegiatan fasilitasi pemasaran tersebut tidak dilakukan karena terdampak *refocusing* anggaran, sementara di tahun 2021 terdapat 27 jenis produk UMKM yang difasilitasi.

Keempat, persentase alat Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP) yang tertera sah. Perlindungan konsumen merupakan hal strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan selaku OPD yang diberi mandat melaksanakan urusan perdagangan. Kepercayaan konsumen akan sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan transaksi di wilayah Kabupaten Lampung Barat atau tidak, oleh karenanya Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan program perlindungan konsumen berupa pelaksanaan Tera dan Tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya. Pada tahun 2021 2,7% potensi UTTP telah dilakukan Tera dan Tera Ulang, mengalami kenaikan 50% dari tahun sebelumnya.

Dalam hal pencapaian kinerja, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan juga sangat tergantung dengan *crosscutting* program dari instansi terkait, diantaranya perangkat daerah yang berada dibawah lingkup Kementerian Pertanian (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, dan Dinas) dan anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Barat, dalam hal pelaksanaan pemantauan harga kebutuhan pokok dan barang penting, serta pemantauan ketersediaan sembako dan komoditas pertanian. Dalam hal pemasaran produk UMKM Dinas

Koperindag juga melaksanakan kerjasama pemasaran dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Lampung Barat, khususnya UMKM kerajinan. Pencapaian PDRB perdagangan ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Pengeluaran dan pendapatan masyarakat;
- 2) Tumbuhnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Unit di Lampung Barat (17 unit sampai dengan 2021) baik Pertamina atau pertashop. Hal ini meningkatkan transaksi perdagangan sehingga berdampak pada peningkatan angka PDRB perdagangan;
- 3) Kebijakan Penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi 0% ditahun 2021 menunjang naiknya transaksi sector perdagangan;
- 4) Upaya pemulihan ekonomi daerah yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berdampak pada menggeliatnya kembali kegiatan ekonomi masyarakat, menaikkan konsumsi tingkat rumah tangga, sehingga sektor perdagangan saat ini sudah mulai menunjukkan perbaikan setelah pada tahun 2020 terkena dampak negatif pandemi Covid-19.

b) PDRB Sektor Industri

Sektor industri merupakan salah satu sector yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi karena perannya mengatasi masalah pengangguran dan terciptanya ekonomi berbasis agroindustri yang bersifat padat karya. Sebanyak 5,35% PDRB sektor industri yang memberi nilai tambah pada PDRB Kabupaten Lampung Barat ini diperoleh dari hasil implementasi kebijakan-kebijakan yang mendukung tercapainya PDRB sektor industri. Pertama, upaya pelaksanaan kebijakan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) berupa pengembangan sentra Industri Kecil Menengah (IKM), peningkatan kapasitas produksi IKM, fasilitasi pemasaran produk dan juga layanan kemasan produk. Seluruh kegiatan tersebut untuk mendukung pertumbuhan IKM di Kabupaten Lampung Barat. Sampai dengan tahun 2021, ada 12 jenis usaha dengan jumlah unit usaha mencapai 823 unit atau bertambah 33 unit dari tahun 2020. Berikut ini adalah daftar IKM tahun 2020 dan 2021.

Tabel 54. Jenis dan Jumlah Usaha IKM Tahun 2020 dan 2021

No	Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha	
		2020	2021
1	Industri Olahan Pangan	357	382
2	Industri Tekstil	24	25
3	Industri Pengolahan Kayu	207	83
4	Industri Kimia Farmasi	2	2
5	Industri Pengolahan Kayu	83	88
6	Industri Pengolahan Karet Dan Plastik	18	18
7	Industri Galian Bukan Logam	28	28
8	Industri Pengolahan Besi / Logam	13	13
9	Industri Peralatan Pertanian (Alsintan)	9	9
10	Industri Jasa	122	122
11	Industri Lainnya	71	71
12	Industri Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	63	63
Jumlah		790	823

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Koperindag Lampung Barat Tahun 2021.

Agroindustri adalah bidang industri yang paling cocok dibangun dan dikembangkan di wilayah Lampung Barat. Potensi daerah yang sebagian besarnya adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi sumber daya yang bisa dikelola oleh industri kecil dan menengah. Keberadaan bahan baku tersebut harus dikelola berdasar pengetahuan dan batas pakai bahan dari alam agar tidak terjadi eksploitasi alam. Sesuai dengan perannya dalam mengurangi kemiskinan, upaya pengembangan sentra IKM dilakukan pemerintah daerah Lampung Barat secara berkelanjutan. Tujuannya adalah pemerataan kegiatan industri di berbagai wilayah agar disparitas pendapatan semakin kecil dan urbanisasi ke wilayah dengan kegiatan industri yang pesat tidak meningkat.

Pertumbuhan IKM Lampung Barat tahun 2021 sebesar 4,1%, hal ini tentu saja sangat berdampak pada peningkatan realisasi PDRB industri yang mencapai 111,78%. Bahkan target akhir RPJMD juga telah terpenuhi, namun komitmen pemerintah bukan sekedar target yang berupa angka, melainkan lebih dari itu adalah untuk pembangunan ekonomi dan kemandirian masyarakat. Berikut ini adalah beberapa factor menunjang keberhasilan peningkatan PDRB industri:

- 1) Penjualan dan omset pelaku IKM;

- 2) Pertumbuhan IKM sebesar 4,1% disertai dengan peningkatan produktivitas dan penjualan produk IKM yang menjadi faktor penunjang utama penghitungan nilai tambah yang menjadi salah satu dasar perhitungan nilai PDRB sektor industri;
- 3) Upaya pemulihan ekonomi daerah melalui berbagai program seperti pemberian bantuan sosial bagi UMKM terdampak Covid-19, bantuan alat produksi, kemudahan perizinan serta fasilitasi sertifikasi bagi produk UMKM hingga fasilitasi pemasaran dan peningkatan kapasitas pemasaran digital bagi para pelaku usaha IKM.

Jika melihat faktor-faktor keberhasilan peningkatan PDRB industri tersebut, dapat diketahui bahwa pencapaian ini dipengaruhi oleh kinerja Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PTSP Naker) Kabupaten Lampung Barat dalam hal kemudahan pemberian izin usaha UMKM. Dalam banyak hasil penelitian ilmiah dinyatakan bahwa pertumbuhan nilai tambah sektor industri secara statistik positif signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa semakin banyak tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan industri, maka disparitas pendapatan juga semakin kecil.

20. Sasaran Strategis 20 Meningkatnya Nilai Investasi

Capaian Kinerja

Penanaman modal atau investasi merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yaitu segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di negara Republik Indonesia. Urgensi investasi bagi pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berhasil merealisasikan jumlah investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2021 sebesar Rp.112.921.542.189. Realisasi ini melebihi target Dinas PTSP dan Tenaga Kerja yang telah ditetapkan sebesar Rp.90.000.000.000, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 125,47%. Realisasi investasi ini menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, sebanyak Rp.562.433.362 atau sekitar 0,50%. Sementara jika dibandingkan dengan

target RPJMD yang sebesar Rp.3.849.756.556, capaiannya hampir 3.000%. berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 serta target akhir RPJMD.

Tabel 55. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD
Nilai investasi	Rp.113.483.975.551	Rp.112.921.542.189	Rp.3.849.756.556

Sumber: diolah tim, 2022.

Secara nasional, Kementerian Investasi/BKPM menargetkan pada tahun 2021 jumlah realisasi investasi yang ada di Indonesia sebesar Rp.900 triliun dan terealisasi sebesar Rp.901,02 Triliun, capaian ini melebihi 100,1 % dari realisasi yang ditargetkan. Menurut rilis resmi dari Kementerian Investasi, berdasarkan sebaran wilayah realisasi investasi tahun 2021 di luar pulau Jawa masih lebih besar dari pada pulau Jawa, Tumbuh sebesar 12,2 % dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 lalu.

Berikut ini adalah perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Lampung Barat tahun 2018-2021.



Grafik 19. Perkembangan Realisasi Investasi di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2021

Sumber: Laporan Kinerja Dinas PTSP dan Tenaga Kerja Tahun 2021.

Nilai investasi terbesar terjadi pada tahun 2019, jauh melebihi dari angka yang ditargetkan. Pada tahun 2020, nilai investasi menukik tajam akibat terjadinya pandemic Covid-19 yang berdampak luas pada semua

sektor kehidupan masyarakat dan dunia usaha juga pemerintahan. Sementara capaian tahun 2021 adalah prestasi yang patut diapresiasi karena dalam kondisi yang masih pandemi, pemerintah berhasil mendorong kembali laju investasi. Pandemi masih ada namun perekonomian harus bangkit, pemerintah mengerahkan banyak cara untuk sampai pada pencapaian ini.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah pusat dan daerah daerah terus mendorong peningkatan realisasi investasi baik PMDN maupun PMA. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong realisasi investasi ialah dengan terus mempermudah birokrasi perizinan dan memangkas tahap-tahap perizinan investasi. Inovasi dalam membantu investor salah satunya yaitu aplikasi *Online Singel Submission* (OSS). Aplikasi OSS tersebut memudahkan penanam modal dalam melakukan pengisian dan pengurusan izin berusahanya. Dalam penyusunan/ formulasi untuk menghitung capaian kinerja peningkatan nilai investasi ini, digunakan sumber data sekunder, artinya untuk mengetahui jumlah investasi PMDN/ PMA berdasarkan realisasi perizinan berusaha yang diakses melalui *lkpmonline.bkpm.go.id*. Hal ini dikarenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKPM Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang mewajibkan kepada PMA/ PMDN untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap tiga bulan secara daring dan berkala melalui *lkpmonline.bkpm.go.id* guna memantau perkembangan realisasi penanaman modal.

Realisasi investasi di Lampung Barat tahun 2021 yang sebesar Rp.112.921.542.189,00 ini berasal dari klasifikasi usaha diantaranya sebagai berikut:

a) Investasi Skala Mikro Kecil

Total investasi skala mikro kecil tahun 2021 adalah sebesar Rp.13.195.003.100 (Tiga belas milyar seratus sembilan puluh lima juta tiga ribu seratus rupiah). Sektor yang dominan antara lain:

- 1) Perdagangan dan reparasi dengan nilai investasi sebesar Rp.6.855.000.000,- (56,28%) yang terdiri dari 99 unit usaha;

- 2) Tanaman pangan, perkebunan dan peternakan dengan realisasi investasi sebesar Rp.466.003.000,- (3,86%) dengan jumlah unit usaha sebanyak 14;
- 3) Hotel dan restoran dengan realisasi investasi sebesar Rp.495.200.000,- (4,1%) dengan jumlah unit usaha sebanyak 16;
- 4) Industri Makanan dengan realisasi investasi sebesar Rp.855.550.010,00 (7,11%) dengan jumlah unit usaha sebanyak 48;
- 5) Jasa Lainnya dengan realisasi investasi sebesar Rp.1.682.750.000,- (13,93%) dengan jumlah unit usaha sebanyak 35;
- 6) Lainnya dengan realisasi investasi sebesar Rp.1.721.000.000,00 (14,25%) dengan jumlah unit usaha sebanyak 84.

b) Investasi per sektor

Ada beberapa sektor yang tumbuh dan memerlukan perizinan berusaha di Lampung Barat, yang memberikan nilai investasi bagi pemerintah. Berikut ini adalah jenis perizinan usaha dan realisasi investasinya.

Tabel 56. Realisasi Investasi per Sektor Usaha di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No.	JENIS PERIZINAN BERUSAHA	REALISASI INVESTASI (Rp.)
1	Sektor Ketenagalistrikan	88.075.816.767,-
2	Sektor Pertanian	466.003.000-
3	Sektor Lingkungan hidup dan Kehutanan	-
4	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-
5	Sektor Kelautan Dan Perikanan	-
6	Sektor Kesehatan	1.682.750.000--
7	Sektor Obat Dan Makanan	858.550.010,-
8	Sektor Perindustrian	11.650.722.322-
9	Sektor Perdagangan	7.971.500.090,-
10	Sektor Perhubungan	-
11	Sektor Komunikasi Dan Informatika	-
12	Sektor Pariwisata	495.200.000-

No.	JENIS PERIZINAN BERUSAHA	REALISASI INVESTASI (Rp.)
13	Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan	-
14	Sektor Ketenagakerjaan	-
15	Sektor Perkoperasian dan UMKM	1.721.000.000,-
Jumlah		112.921.542.189,0-

Sumber: Laporan Kinerja Dinas PTSP dan Tenaga Kerja Tahun 2021.

Sektor-sektor perizinan usaha tersebut mendaftarkan diri pada beberapa waktu yang berbeda selama tahun 2021. Jika melihat data *lkpmonline.bkpm.go.id*, nilai investasi terbesar didapat pada triwulan kedua pada sektor usaha besar. Kontribusi usaha besar pada triwulan ini adalah 69%, sementara kategori Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berkontribusi 17%, dan pelaku usaha non IUMK berkontribusi sebesar 14%. Sementara investasi terendah terjadi pada triwulan ketiga, turun hingga 79,9% dari triwulan kedua. Berikut ini adalah rekapitulasi yang merinci realisasi investasi yang dapat dipahami secara mudah.

Tabel 57. Rekapitulasi Realisasi Investasi Tahun 2021 Kabupaten Lampung Barat

No.	Periode Laporan	IUMK		NON IUMK		BESAR		JUMLAH	
		Unit Usaha	NILAI INVESTASI (Rp)						
1	Triwulan 1	81	4.779.200.000	20	4.010.600.100	3	19.294.706.753	101	28.084.506.853
2	Triwulan 2	123	5.546.303.100	21	7.192.900.000	3	46.272.731.875	144	59.011.934.975
3	Triwulan 3	30	1.753.000.000	2	97.222.222	3	10.029.607.919	32	11.879.830.141
4	Triwulan 4	1	1.116.500.000	1	350.000.000	8	12.478.770.220	5	13.945.270.220
JUMLAH		235	13.195.003.100	44	11.650.722.322	8	61.050.718.877	282	112.921.542.189

Sumber: Laporan Kinerja Dinas PTSP dan Tenaga Kerja Tahun 2021.

Persentase capaian kinerja jumlah investasi PMDN/PMA tahun ini turun 8,53 poin dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 134%. Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini adalah pandemi Covid-19. Dampak dari covid-19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Berbagai stimulus telah diberikan pemerintah untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemberian berbagai macam bantuan sosial pasca pandemi covid-19 diharapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat menopang perputaran ekonomi. Khususnya pertumbuhan ekonomi di Lampung Barat yang sebagian pelaku usaha bergerak pada sektor perkebunan dan perdagangan. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, berusaha memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan investasinya di Lampung Barat. Melalui program promosi, pendampingan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal serta dengan memberika data potensi investasi sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi di Lampung Barat.

21. Meningkatnya Kontribusi dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perekonomian Daerah

Capaian Kinerja

Koperasi dan UMKM mampu menjadi tulang punggung perekonomian daerah Lampung Barat yang handal, mampu berkembang sebagai badan usaha sekaligus gerakan ekonomi masyarakat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri, serta menjadi wadah yang efektif untuk menggalang kekuatan ekonomi warga di semua kegiatan atau sektor perekonomian daerah. UMKM dan koperasi memiliki daya saing tinggi, diantaranya 1) mempunyai fleksibilitas; 2) memiliki produktivitas tinggi, 3) dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen dan kaidah ekonomi modern, akan mampu melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan, fungsi dan perannya secara optimal dalam perekonomian daerah. Alasan-alasan ini yang menjadikan pemerintah pusat sampai daerah menempatkan pentingnya meningkatkan kontribusi dan daya saing koperasi yang sehat dan UMKM dalam perekonomian daerah. Dalam upaya mengukur peningkatan kontribusi dan daya saing UMKM dalam perekonomian daerah, digunakan 2 indikator yaitu jumlah koperasi yang sehat dan persentase peningkatan UMKM. Pada tahun 2021, Kabupaten Lampung Barat telah berhasil membentuk 27 koperasi sehat dan berdaya saing dari target yang direncanakan sebanyak 12 unit koperasi. Artinya tercapai 225%, meningkat 0,56% dari tahun 2020 dan tercapai 180% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD.

Sementara itu, realisasi peningkatan kemitraan UMKM adalah sebesar 67,4%. Realisasi kinerja ini mencapai kinerja sebesar 842,5% dari target yang telah ditetapkan, yaitu 8%. Capaian ini memang menurun dari tahun sebelumnya, namun tidak signifikan, hanya sebesar 0,03 poin. Perbandingannya dengan target akhir RPJMD juga telah mencapai 464%. Meski capaian kinerja persentase peningkatan kemitraan UMKM ini telah jauh melebihi target, namun pemerintah masih berkomitmen untuk terus meningkatkan persentase kemitraan UMKM perekonomian masyarakat semakin maju dan mandiri. Capaian indikator ini diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

Tabel 58. Cara Perhitungan Capaian Indikator Persentase Peningkatan UMKM yang Bermitra Tahun 2021

Indikator Sasaran	Cara Perhitungan	Target Realisasi Capaian		
Meningkatnya kemitraan UMKM	$\frac{\text{Jumlah UMKM yang bermitra tahun 2021}}{\text{Jumlah UMKM yang bermitra}} \times 100\%$	8%	67,4%	842,5%

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Koperindag Tahun 2021.

Maka selanjutnya, berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja indikator tahun 2020 dan tahun 2021, target akhir RPJMD, dan capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2021.

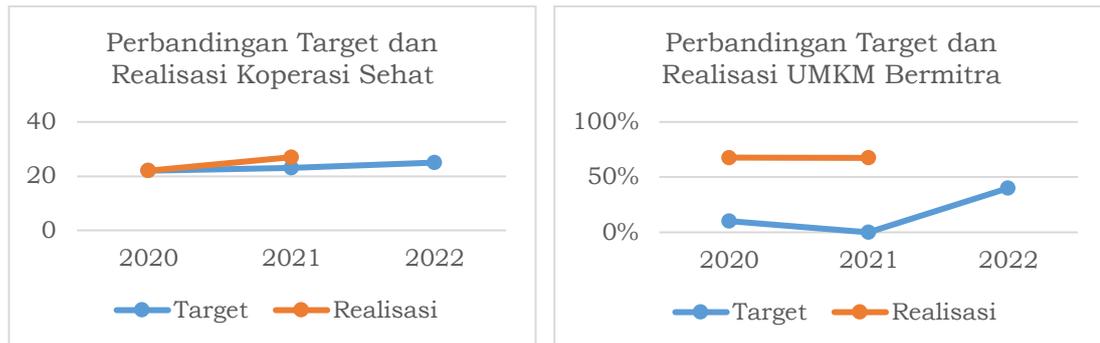
Tabel 59. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tahun 2020 dan 2021, Target Akhir RPJMD, dan Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja RPJMD s.d. 2021
Jumlah koperasi sehat	22 unit	27 unit	15 unit	180%
Persentase peningkatan UMKM	67%	67,4%	10%	674%

Sumber: diolah tim, 2022.

Pemerintah Lampung Barat bersungguh-sungguh dalam mengembangkan koperasi yang sehat dan UMKM bermitra agar mampu menjadi salah satu strategi utama pembangunan daerah yang pelaksanaannya diwujudkan dengan komitmen bersama yang kuat dan didukung oleh upaya-upaya sistematis dan konseptual secara konsisten dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak (pemerintah, masyarakat, sektor swasta). Pemerintah harus memperkuat landasan kebijakan,

masyarakat harus dipahami dan ditingkatkan pengetahuannya, sementara pihak swasta dalam membantu dan bekerjasama dalam produksi dan pemasaran hasil usaha UMKM. Sehingga hasil yang akan diraih bukan hanya tercapainya target kinerja, melainkan juga kemandirian perekonomian masyarakat. Berikut ini adalah perbandingan capaian kinerja koperasi sehat dan UMKM bermitra yang berkontribusi dan berdaya saing dalam perekonomian Lampung Barat:



Grafik 20. Perbandingan Target dan Realisasi Koperasi Sehat dan UMKM Bermitra Tahun 2020-2022

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Koperindag Tahun 2021.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

a) Jumlah Koperasi yang Sehat

Pengukuran koperasi sehat dilakukan sesuai dengan kertas kerja penilaian koperasi sehat berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Maka penjabaran capaian koperasi sehat tahun 2021 adalah bahwa jumlah koperasi sehat tahun 2021 sebanyak 27 koperasi yang merupakan bagian dari 53 unit Koperasi yang Aktif. Jumlah Koperasi pada tahun 2021 adalah 165 unit koperasi, terdiri dari koperasi aktif 53 unit, koperasi yang diajukan pembubaran 74 unit dan koperasi tidak aktif sebanyak 38 unit.

Jika dibandingkan antara jumlah koperasi aktif dengan total koperasi yang ada saat ini, persentasenya masih sekitar 16,36%. Namun capaian 27 koperasi pada tahun 2021 ini adalah pencapaian melalui program pemberdayaan dan perlindungan. Pemerintah melalui Dinas Koperindag selalu berupaya memaksimalkan fungsi koperasi sebagai salah satu strategi pembangunan daerah melalui aspek

perekonomian. Melalui pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi, pemerintah telah berupaya membina dan mempertahankan koperasi yang ada agar tidak bubar. Namun beberapa persyaratan koperasi aktif telah pelan-pelan terlucuti dari koperasi-koperasi yang kemudian saat ini berstatus diusulkan bubar. Hal ini juga menjadi permasalahan bagi Dinas Koperindag untuk konsisten melanjutkan pembinaan dan pemberdayaan koperasi menjadi sehat kembali. Berikut ini adalah rincian penyebaran lokasi koperasi di 15 kecamatan.

Tabel 60. Sebaran Koperasi di 15 Kecamatan

No	Lokasi Koperasi	Dalam Proses Pembubaran	Aktif	Tidak Aktif	Belum Rat	Baru	Sehat
1	Kec.Balik Bukit	23	21	8	1	1	12
2	Kec.Sukau	3	2	1	1	0	0
3	Kec.Lumbok Seminung	3	1	1	0	0	0
4	Kec.Batu Brak	4	1	2	0	0	0
5	Kec.Belalau	3	2	0	0	0	1
6	Kec.Batu Ketulis	2	4	2	0	0	2
7	Kec.Pagar Dewa	3	2	1	1	0	1
8	Kec.Sekincau	4	5	2	1	0	4
9	Kec.Way Tenong	14	2	8	8	0	1
10	Kec.Air Hitam	3	3	4	1	0	1
11	Kec.Sumber Jaya	8	2	4	2	0	2
12	Kec.Kebun Tebu	1	3	2	1	1	1
13	Kec.Gedung Surian	1	1	1	0	0	1
14	Kec.Suoh	2	1	1	0	0	1
15	Kec.Bandar Negeri Suoh	0	0	1	1	0	0
Jumlah Total =165 koperasi		74	50	38	17	2	27

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Koperindag Lampung Barat Tahun 2021.

Dalam pencapaian target koperasi sehat yang memiliki kontribusi dan daya saing dalam perekonomian daerah ini merupakan hasil kerja sama internal Dinas Koperindag yang menyediakan layanan fasilitas pendirian koperasi ke notaris dengan membebaskan biaya notaris bagi koperasi baru. Kemudian pihak internal yang berpengaruh terhadap kinerja ini adalah notaris yang ditunjuk sebagai notaris akta pendirian koperasi. Beberapa factor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini adalah:

- 1) Adanya dukungan pendanaan yang cukup dari APBD Kabupaten terhadap pelaksanaan program kegiatan;
 - 2) Optimalnya kinerja aparatur pembina dan pengawas koperasi petugas pendamping lapangan dalam menjalankan pembinaan terhadap sumber daya koperasi;
 - 3) *Tagline* “untung bareng koperasi” serta aplikasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga kesadaran masyarakat tentang urgensi mengelola usaha koperasi.
- b) Meningkatnya Kemitraan UMKM

UMKM adalah usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha kecil. Penggolongannya berdasarkan besaran omzet per tahun, jumlah asset, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Inilah alasan kenapa UMKM mampu menjadi roda penggerak perekonomian daerah bahkan negara. Walaupun usahanya kecil sampai menengah, produksinya tidak sekala perusahaan besar, namun keberadaannya yang banyak dan kegiatannya yang bergerak terus menerus mampu menumbuhkan perekonomian. Bukan hanya bagi pemilik usaha dari hasil pemasaran saja, melainkan juga bagi warga sekitarnya melalui pemberdayaan sebagai tenaga kerja IKM tersebut. Pencapaian kinerja kemitraan UMKM berada pada angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan target kinerjanya. Sebesar 674% perbandingan realisasi kinerja 67,4% UMKM telah bermitra dari target 10%. Meksi mengalami penurunan dari capaian tahun 2020, namun hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap capaian kinerja, bahkan capaian 2021 ini sudah melebihi target akhir RPJMD sebesar 464%.

Total UMKM bermitra adalah sebanyak 591, sebagian besar UMKM memanfaatkan jasa keuangan perbankan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang terdata dalam aplikasi SIKP (Sistem Informasi Kredit Program), yaitu sebanyak 586 debitur. Meningkat drastis dari jumlah UMKM yang memanfaatkan jasa keuangan KUR tahun 2020 yang berjumlah 301 debitur. Sementara itu jumlah UMKM yang memanfaatkan permodalan melalui UPTD PP KUMKM sebanyak 5 mitra, berkurang 11 UMKM dari tahun 2020. Kenaikan debitur pada

perbankan disebabkan karena mudahnya persyaratan serta besarnya alokasi dana KUR yang dikucurkan pemerintah pusat lewat bank yang ditunjuk. Akan tetapi disatu sisi terdapat penurunan mitra di UPT PP KUMKM, hal ini disebabkan oleh menurunnya minat pelaku usaha Koperasi dan UMKM dan mengalihkan akses permodalannya ke Kredit Usaha Rakyat.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tidak bisa bekerja sendiri, melainkan terdapat *crosscutting* kinerja dengan instansi lain, dalam hal ini bagian perekonomian Setdakab Lampung Barat selaku penanggung jawab Sistem Informasi Kredit Program aplikasi yang menunjang pengajuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga memudahkan Koperasi dan UMKM mendapat akses pembiayaan. Sementara faktor penunjang keberhasilan indikator peningkatan kemitraan UMKM ini adalah:

- 1) Sosialisasi masif program Kredit Usaha Rakyat kepada pelaku usaha;
- 2) Sinergitas optimalisasi program KUR yang dilakukan dengan semua *stakeholder* terkait;
- 3) Optimalisasi aplikasi Sistem Informasi Kredit Program.

Pemerintah bersama dengan masyarakat dan sektor privat harus selalu berinovasi sebagai strategi pengembangan usaha dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Pengembangan UMKM dan koperasi menjadi komponen penting bagi pembangunan Lampung Barat. Proses dan cara untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut sangat penting, terutama melalui upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya memahami kebutuhan pasar dan potensi perekonomian yang dapat dikembangkan UMKM, berinovasi, memanfaatkan perkembangan teknologi, dan *upgrade* kompetensi pelaku usaha. Pendekatan demikian diharapkan lebih menjamin terwujudnya perekonomian yang lebih adil dan merata, berdaya saing dengan basis efisiensi di berbagai sektor dan keunggulan kompetitif, berwawasan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari, dengan partisipasi masyarakat yang lebih menonjol dan desentralisasi pembangunan untuk meningkatkan kapasitas dan memaksimalkan potensi daerah, serta bersih dari KKN.

Pandemi adalah salah satu tantangan terbesar bagi keberlangsungan UMKM dan koperasi yang kemudian berdampak pada melambatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah. Program penyelamatan dan pemulihan ekonomi hendaknya tidak hanya dipandang sebagai *crash-program* yang bersifat sementara, tetapi juga harus dipandang sekaligus sebagai proses percepatan transformasi struktural dan pembangunan yang berkelanjutan untuk meletakkan landasan bagi terwujudnya struktur ekonomi yang kuat dengan peran serta masyarakat dan dunia usaha yang lebih besar, terutama kontribusi UKM dan Koperasi dalam pembentukan nilai tambah, kepemilikan aset dan daya saing.

22. Sasaran Strategis 22 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Capaian Kinerja

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2018-2022 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya. Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahap sebelumnya. Meski demikian pelaksanaan reformasi birokrasi harus mencakup seluruh satuan kerja pemerintah daerah dan seluruh aparatur pemerintah daerah, bukan hanya satuan kerja yang berhubungan langsung dengan area perubahan. Sasaran reformasi birokrasi 2020-2024 adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Pengukuran pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan indikator kinerja yang digunakan yakni indeks reformasi birokrasi. Pada tahun 2021, Lampung Barat memperoleh nilai indeks reformasi birokrasi predikat CC atau terinterpretasi cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Realisasi indeks reformasi birokrasi ini melebihi predikat yang ditetapkan yaitu C sehingga capaian kinerjanya sudah 100%. Realisasi ini juga sudah mencukupi target akhir RPJMD yang menargetkan indeks reformasi birokrasi ber predikat C.

Tabel 61. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2022

Indikator Kinerja	2019		2020		2021		Target Akhir RPJMD
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	C	CC	C	CC	C

Sumber: Bagian Organisasi Setdakab, 2022.

Berdasarkan Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi KemenPANRB Tahun 2021, nilai indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tahun 2020 adalah 55,06 atau kategori CC meningkat bila dibandingkan dengan nilai indeks reformasi birokrasi tahun sebelumnya 54,56. Dengan hasil tersebut target capaian RPJMD terealisasi 100 %. namun demikian perlu ditingkatkan lagi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Reformasi birokrasi Pemerintah Lampung Barat terindeks CC sejak tahun 2019. Namun jika dilihat nilai indeksnya, maka sebenarnya indeks reformasi birokrasi Lampung Barat mengalami peningkatan. Tahun 2020 nilai indeks reformasi birokrasi Lampung Barat adalah 55,06, meningkat dari nilai indeks tahun 2019 yang sebesar 54,46. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, tahapan yang telah dilakukan pemerintah yaitu menyusun *roadmap*, setelah itu dilanjutkan dengan *coaching* dan asistensi pelaksanaan *roadmap* sebagai implementasi program reformasi birokrasi, pembentukan *learning* reformasi birokrasi dan *sharing experience*. Memperhatikan rekomendasi dari KemeNPANRB, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani, melalui penyempurnaan beberapa hal diantaranya:

- a) Penyempurnaan point 1,2,3,4,5,6 dan 13 yang dikoordinatori oleh Bagian Organisasi Setdakab Lampung Barat dan unit kerja serta bagian yang terkait dalam hal:
 - 1) Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat pemerintah daerah dan pemerintah daerah melalui *review road map* reformasi birokrasi berdasarkan PermenPANRB Nomor 26

Tahun 2020 sehingga program yang dituangkan dalam *roadmap* RB berfokus pada upaya-upaya kongkret dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima;

- 2) Mengoptimalkan implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan melakukan *monitoring* pelaksanaan rencana aksi secara menyeluruh dan berkala, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan asesor RB;
 - 3) Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif dan dinamis baik ditingkat Pemda dan PD;
 - 4) Melakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang telah dan akan terbit, sehingga dapat diidentifikasi kebijakan yang tidak harmonis dan berpotensi memperlambat proses pelayanan public;
 - 5) Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382-393 tahun 2019 tentang langkah strategis dan konkret penyederhanaan birokrasi, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional secara menyeluruh;
 - 6) Menyusun peta proses bisnis dan peta lintas fungsi pada PD, serta disesuaikan dengan penyederhanaan jabatan atau organisasi;
 - 7) Mengoptimalkan implementasi pelayanan public di tingkat PD, antara lain dengan memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar, meningkatkan kecepatan penanganan pengaduan, serta menginformasikan hasil survey eksternal kepada *stakeholder* dan menindaklanjutinya dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan.
- b) Penyempurnaan point 7 yang dikordinatori oleh Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Barat dalam hal : Meningkatkan penerapan SPBE dengan menyusun *Grand Design* pengembangan SPBE, serta pengintegrasian sitem informasi, baik dalam manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat;
- c) Penyempurnaan point 8 yang dikoordinatori oleh Badan Pengembangan sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lampung Barat dalam hal mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM, antara lain dengan

- memanfaatkan hasil *assessment* sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara menyeluruh, serta memetakan *talenta/talent pool* sebagai dasar penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi jabatan;
- d) Penyempurnaan point 9 yang dikordinatori oleh Bapeda Kabupaten Lampung Barat dalam hal mengoptimalkan *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja individu secara berjenjang dan berkala, serta memanfaatkan hasilnya sebagai dasar dalam pemberian *reward and punishment*;
- e) Penyempurnaan point 10,11 dan 12 yang dikordinatori oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam hal:
- 1) Memperkuat upaya pengawasan internal dalam hal penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, *Whistleblowing System*, kebijakan benturan kepentingan, serta penerapan SPIP dengan mendorong setiap unit kerja untuk mengidentifikasi dan melakukan pengendalian resiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja;
 - 2) Mengoptimalkan peran APIP sebagai *quality Assurance and Consulting*, baik dalam hal yang berkaitan dengan keuangan maupun kinerja unit kerja;
 - 3) Melakukan upaya pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja strategis sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan RB di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
- f) Dalam rangka untuk meningkatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi serta nilai hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan kunjungan lapangan (studi pembelajaran) ke Kabupaten/Kota yang telah optimal pelaksanaan reformasi birokrasi dan daerah yang pelaksanaan implementasi SAKIP-nya mendapatkan predikat A atau BB.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran strategis ini adalah:

- a) *Reviu road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 2020-2024 telah terintegrasi dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026;
- b) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan reformasi birokrasi antara lain mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat,

- prima, dan transparan kepada masyarakat serta meningkatkan juga taraf kehidupan aparaturnya;
- c) Indikator-indikator sasarannya yang telah dilakukan adalah bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kinerja.

23. Sasaran Strategis 23 Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Capaian Kinerja

Dalam rangka upaya menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sekaligus sebagai pemenuhan atas tuntutan publik terhadap akuntabilitas kinerja, pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem anggaran dan sistem akuntansi pemerintahan. Sistem ini mengukur keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan dengan melakukan evaluasi tingkat capaian kinerja yang dapat direalisasikan sebagai wujud penggunaan anggaran. Hasil evaluasi akan memberi umpan balik atas kegagalan pencapaian berupa perbaikan strategi di masa yang akan datang.

Ada 2 indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah Lampung Barat yaitu nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Berikut ini adalah target dan realisasi kedua indikator di tahun 2021.

Tabel 62. Target dan Realisasi Indikator Peningkatan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Lampung Barat Tahun 2021

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Nilai indeks
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Hasil Penilaian dari KEMENPAN RB	BB	B	95,93
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Hasil Penilaian dari BPK RI	WTP	WTP	100 %

Sumber: Bappeda, Bagian Organisasi dan BPKAD Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas KemenPANRB tahun 2020, nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 memperoleh predikat B yang mana nilai ini

masih menggunakan nilai tahun 2020 yaitu B. Nilai indeks akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 63. Perkembangan Hasil Evaluasi SAKIP Lampung Barat Tahun 2016-2020 dan Target Akhir RPJMD

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	2016	2017	2018	2019	2020	Target Akhir RPJMD
1	Perencanaan Kinerja	30	19,01	21,74	21,48	21,53	22,01	BB
2	Pengukuran Kinerja	25	12,95	14,47	14,63	15,22	15,96	
3	Pelaporan Kinerja	15	10,80	9,90	10,00	10,40	10,70	
4	Evaluasi Kinerja	10	5,74	4,51	4,96	5,60	5,90	
5	Pencapaian Kinerja	20	7,65	10,08	11,52	11,77	12,58	
6	Nilai Evaluasi Hasil	100	56,15	60,43	62,58	64,52	67,15	
7	Predikat		CC	B	B	B	B	

Sumber: Bagian Organisasi Setdakab Lampung Barat, 2022.

Sedangkan untuk indikator opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama 12 kali berturut-turut sejak tahun 2010. Hal ini menunjukkan akuntabilitas keuangan maupun kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah berada di level tinggi, namun demikian perlu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja opini BPK tahun 2020 dan 2021, serta target akhir RPJMD.

Tabel 64. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Opini BPK Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD
Opini BPK	WTP	WTP	WTP

Sumber: diolah tim, 2022.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

a) SAKIP

Dengan memperhatikan rekomendasi dari KemenPANRB, Kabupaten Lampung Barat telah melakukan perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya:

- 1) Menyempurnakan kualitas perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, seperti: memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil; memastikan kualitas indikator kinerja yang terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja; keselarasan antar dokumen perencanaan; serta keterpaduan perencanaan. Adapun tindak lanjut yang sudah dilaksanakan adalah pembahasan terhadap dokumen perencanaan untuk penyempurnaan kinerja yang dituangkan kedalam berita acara;
- 2) Menyempurnakan penjenjangan kinerja dari level pemerintah daerah ke Perangkat Daerah hingga individu. Hasil penyempurnaan tersebut diselaraskan dengan proses bisnis organisasi dan penganggarannya, serta ditindaklanjuti dengan perbaikan Renstra Perangkat Daerah dan Perjanjian Kinerja individu. Tindak lanjut yang sudah dilaksanakan penyusunan perjanjian kinerja hingga ke level individu;
- 3) Melakukan identifikasi dan pemetaan *crosscutting* antar-PD dalam mengawal program prioritas pembangunan daerah adapun tindaklanjut yang sudah dilaksanakan melakukan identifikasi dan pemetaan *crosscutting* dan menfokuskan program untuk menjawab isu dan permasalahan capaian kinerja 2021;
- 4) Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan mewajibkan setiap penanggungjawab program melakukan evaluasi yang didasarkan pada capaian hasil program dan keterpaduan lintas program PD, serta memastikan setiap program dan kegiatan memiliki keterkaitan secara langsung terhadap pencapaian sasaran strategis sehingga program prioritas daerah relevan dengan isu strategis daerah dan tergambar kolaborasi antar program. Adapun tindak lanjut yang sudah dilaksanakan adalah evaluasi dihadapan kepala daerah sebagai

tanggung jawab perangkat daerah dalam melaksanakan sasaran-sasaran kabupaten;

- 5) Mengoptimalkan *monitoring* dan evaluasi capaian sasaran kinerja secara berjenjang dan berkala melalui rencana aksi, serta memanfaatkan hasilnya sebagai dasar dalam pemberian *reward and punishment*. Adapun tindak lanjut yang sudah dilaksanakan adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap rencana aksi baik level pemerintah daerah maupun level individu dan implementasi terhadap *reward and punishment* atas pencapaian kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah;
- 6) Meningkatkan rasa kepemilikan (*ownership*), pemahaman, dan komitmen terhadap kinerja oleh kepala perangkat daerah dan jajarannya dalam rangka peningkatan capaian kinerja. Adapun tindak lanjut yang sudah dilaksanakan adalah pelaksanaan rapat rutin (*ngopi bebakhong*), evaluasi dan rapat koordinasi baik di tingkat kabupaten maupun perangkat daerah sebagai salah satu cara meningkatkan kepemilikan, pemahaman dan komitmen kepala daerah beserta jajarannya.

Hasil akuntabilitas kinerja yang telah dicapai, belum mendapatkan hasil sesuai target RPJMD, yaitu mendapat predikat BB. Namun demikian, untuk mencapai target tersebut diupayakan untuk meningkatkan kualitas pada semua komponen, dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal maupun pencapaian kinerja. Beberapa upaya telah dilaksanakan yakni:

- 1) Perencanaan kinerja
 - a. Renstra memuat sasaran dan indikator sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang SMART. Renstra tersebut dipublikasi di website resmi Pemerintah Daerah atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses;
 - b. Tujuan dan sasaran renstra berorientasi hasil. Target kinerja ditetapkan dengan baik;
 - c. Dokumen renstra selaras dengan RPJMD;
 - d. Dokumen renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Target jangka menengah

- dalam renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan. Dokumen renstra telah direviu secara berkala.
- 2) Perjanjian Kinerja (PK) dilengkapi IKU dan telah dipublikasikan. Dokumen PK yang disusun selaras dengan RPJMD/Renstra dan telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah
 - a. PD menyusun rencana aksi mencantumkan target secara periodik atas kinerja. Rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja;
 - b. PK telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.
 - 3) Pengukuran kinerja
 - a. Dilakukan penyelarasan Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Kinerja Eselon III dan IV (pengukuran berjenjang);
 - b. Melakukan pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala (bulanan/triwulanan/semester).
 - 4) Peningkatan Pelaporan Kinerja:
 - a. *Meng-upload* laporan kinerja kedalam website resmi Pemerintah Daerah atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses;
 - b. Menyajikan data kinerja dengan perbandingan yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan untuk semua capaian kinerja;
 - c. Menyusun laporan kinerja yang menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
 - 5) Evaluasi Internal:
 - a. Pelibatan kepala daerah untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah;
 - b. Melakukan evaluasi program, yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan;
 - c. Melakukan pemantauan atas rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja yaitu kemajuan dan hambatan pencapaian kinerja.

6) Pencapaian Kinerja:

- a. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melakukan berbagai macam inovasi;
- b. Menjalinkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. Laporan kinerja yang disusun menyajikan informasi capaian kinerja pada tahun berjalan, dan tahun sebelumnya. Batang tubuh laporan kinerja didukung oleh bukti pendukung seperti Pengukuran Kinerja Sasaran. Informasi capaian kinerja harus dapat diandalkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat terverifikasi dan *up to date*.

b) Opini BPK

Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, berdasarkan hasil audit terhadap proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, yang meliputi :

- 1) Pemeriksaan atas Laporan Keuangan;
- 2) Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal;
- 3) Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan pencapaian untuk indikator sasaran adalah: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berikut ini adalah rincian opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah.

Tabel 65. Rincian Penilaian Laporan Keuangan Daerah Lampung Barat Tahun 2021

No.	Data Dukung	Opini BPK
1.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdiri dari:	
	- Neraca	Wajar sesuai SAP
	- Laporan Realisasi Anggaran	Wajar sesuai SAP
	- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	Wajar sesuai SAP
	- Laporan Operasional	Wajar sesuai SAP
	- Laporan Arus Kas	Wajar sesuai SAP
	- Laporan Perubahan Ekuitas	Wajar sesuai SAP
	- Catatan atas Laporan Keuangan	Wajar sesuai SAP

No.	Data Dukung	Opini BPK
2.	Sistem Pengendalian Intern	Memadai dan relevan
3.	Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Sesuai SAP

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Lampung Barat, 2022.

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian atas seluruh data dukung adalah memperoleh opini wajar dan sesuai standar akuntansi pemerintah, sehingga tercapailah target kinerja opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan predikat WTP, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor: 31.A/LHP/XVIII.BLP/05/2021 Tanggal 03 Mei 2021.

Faktor penunjang keberhasilan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten Lampung adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan kinerja dalam RPJMD, RKPD, maupun Renstra Perangkat Daerah selalu dievaluasi dan diperbaharui sehingga sasaran strategis diupayakan secara optimal dapat berorientasi pada hasil. Antara program dan kegiatan dengan sasaran strategis, target kinerja diupayakan selaras;
- b) Pencapaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat cukup baik didukung pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berprestasi dalam skala nasional;
- c) Penerapan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan, antara lain proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, pengelolaan keuangan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah, pengelolaan aset menggunakan Sistem Informasi Aset Daerah, dan Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP);
- d) *Monitoring* dan evaluasi kinerja dilakukan secara terus menerus, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja dapat ditingkatkan, baik efisiensi maupun efektifitasnya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; serta meningkatkan kualitas dan efektifitas

perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah dengan *stake holder* terkait.

24. Sasaran Strategis 24 Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Capaian Kinerja

Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara pemerintahan. Pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publi, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administrasi publik. Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan kepada masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, orientasinya adalah pelayanan publik yang prima. Masyarakat harus merasakan dampak dari setiap program dan kegiatan yang diimplementasikan oleh pemerintah.

Orientasi pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, sebagai parameter keberhasilan kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, pemerintah daerah Lampung Barat melakukan survei kepuasan masyarakat untuk mendapatkan indeks kepuasan masyarakat. Urgensi survei kepuasan masyarakat adalah untuk mengetahui pendapat pengguna layanan atas layanan yang diberikan pemerintah. Hal ini bertujuan agar pemberi layanan mengetahui kekurangan dan kelemahan apa saja yang masih ada pada unit pelaksana, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. Selain itu survei kepuasan masyarakat juga bertujuan agar penyelenggara layanan mendapatkan masukan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Survey juga dilakukan agar penyelenggara layanan selalu dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pada tahun 2021, survei kepuasan masyarakat telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui bekerjasama dengan pihak ketiga dari perguruan tinggi sebagai pihak independen yang tidak dapat mempengaruhi jawaban survei yang diberikan oleh pengguna layanan

sebagai sampel survei. Hasilnya, nilai indeks kepuasan masyarakat Lampung Barat terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat mencapai nilai 77,25 atau predikat B yang berarti kinerja unit pelayanan publik di Lampung Barat sudah baik. Realisasi ini melebihi target kinerja yang ditetapkan bermutu pelayanan predikat C atau kurang baik. Capaian tahun 2021 ini sama dengan capaian tahun 2020 yang mendapat predikat B atau berkinerja pelayanan publik baik. Namun secara nilai, realisasi nilai tahun 2021 meningkat dari tahun 2020 sebesar 0,5 poin. Jika dibandingkan target akhir RPJMD yang menargetkan predikat C, capaian kinerja tahun 2021 sudah melebihi target. Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 66. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKM Tahun 2019-2022

Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat	C	C	C	B	C	B	C

Sumber: Laporan Akhir Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021, LAKIP Lampung Barat Tahun 2020, diolah tim, 2022.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap perangkat daerah pemberi layanan akan meminta masyarakat memberi pendapat mengenai 9 unsur pelayanan, diantaranya yaitu persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis layanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; serta sarana dan prasarana. Berikut ini adalah ringkasan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap perangkat daerah pemberi layanan.

Tabel 67. Penyajian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Lampung Barat Tahun 2021

Unsur Pelayanan	Nilai Indeks	Mutu
1. Persyaratan		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,15	B
RSUD Alimuddin Umar	3,14	B
Dinas PTSP dan Tenaga Kerja	3,18	B
Dinas Perhubungan	3,11	B
2. Sistem, mekanisme dan prosedur Pelayanan		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,14	B
RSUD Alimuddin Umar	3,09	B

Unsur Pelayanan	Nilai Indeks	Mutu
Dinas PTSP dan Tenaga Kerja	3,13	B
Dinas Perhubungan	3,06	C
3. Waktu penyelesaian Pelayanan		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,01	C
RSUD Alimuddin Umar	3,02	C
Dinas PTSP dan Tenaga Kerja	3,08	B
Dinas Perhubungan	3,08	B
4. Biaya/ Tarif Pelayanan		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,52	B
RSUD Alimuddin Umar	3,30	B
Dinas PTSP dan Tenaga Kerja	3,20	B
Dinas Perhubungan	3,22	B
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,11	B
RSUD Alimuddin Umar	3,06	B
Dinas PTSP dan Tenaga Kerja	3,06	B
Dinas Perhubungan	3,08	B
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,14	B
RSUD Alimuddin Umar	3,07	B
Dinas PTSP dan Tenaga Kerja	3,13	B
Dinas Perhubungan	3,11	B
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,13	B
RSUD Alimuddin Umar	3,10	B
Dinas PTSP dan Tenaga Kerja	3,11	B
Dinas Perhubungan	3,04	C
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan terhadap Pelayanan		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,03	C
RSUD Alimuddin Umar	3,04	C
Dinas PTSP dan Tenaga Kerja	3,11	B
Dinas Perhubungan	3,03	C
9. Sarana dan Prasarana Pelayanan		
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,09	B
RSUD Alimuddin Umar	3,18	B
Dinas PTSP dan Tenaga Kerja	3,22	B
Dinas Perhubungan	3,21	B

Sumber: Laporan Akhir SKM Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Berdasarkan hasil survei yang disajikan dalam tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa lebih banyak dipuaskan. Hal ini terlihat dari mutu pelayanan yang baik lebih mendominasi dibandingkan dengan mutu kurang baik. Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan kualitas pelayanan publik ini adalah:

- a) Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

- b) Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan yang lebih berkualitas;
- c) Penyediaan dan publikasi dokumen standar pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik;
- d) Semakin meningkatnya budaya kerja aparatur dalam melayani masyarakat.

Beberapa masukan yang diberikan oleh masyarakat sebagai responden survei dan pihak ketiga sebagai pelaksana survei kepuasan pelayanan ini adalah perbaikan pada unsur-unsur pelayanan yang masih bermutu C. Hal yang paling perlu diperbaiki menurut responden adalah penyederhanaan birokrasi (sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan) serta efisiensi waktu penyelesaian pelayanan. Sehingga perbaikan yang dilakukan dapat dirasakan oleh masyarakat pengguna layanan dan meningkatkan indeks mutu pelayanan.

25. Sasaran Strategis 25 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Capaian Kinerja

Dalam upaya mengukur peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintah, digunakan 1 indikator kinerja yaitu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD). LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yang masing-masing urusan ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri.

Pada tahun 2021, pemerintah Lampung Barat mendapatkan predikat 'sangat tinggi' atas LPPD nya kepada menteri melalui Gubernur Lampung sebagai wakil pemerintah pusat. Capaian predikat sangat tinggi ini telah didapat Kabupaten Lampung Barat berturut-turut sejak tahun 2019. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian per tahun 2021 ini telah memenuhi target 100%. Berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021 serta target akhir RPJMD.

Tabel 68. Perkembangan Realisasi Kinerja Indikator LPPD Tahun 2021

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	2020	Tahun 2021		Target Akhir RPJMD
		Realisasi	Target	Realisasi	
Predikat laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)	Hasil Penilaian dari KEMENDAGRI	Sangat tinggi	Sangat tinggi	100%	Sangat Tinggi

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Lampung Barat, 2022.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Predikat laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) pada tahun 2019 tercapai dengan predikat sangat tinggi (sesuai target) sama dengan kondisi tahun 2018. Indikator LPPD mencapai target dikarenakan LPPD menjelaskan arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang pada dasarnya merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antar pemerintah dan pemerintah daerah, atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.

Pencapaian indikator nilai LPPD Kabupaten Lampung Barat selama 5 tahun terakhir secara berturut juga sangat baik, bahkan selalu menduduki peringkat pertama atas nilai hasil evaluasi LPPD diantara 15 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berbanding lurus dengan pencapaian akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan indikator yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah perkembangan capaian indeks LPPD tahun 2014-2018.

Tabel 69. Perkembangan Capaian Predikat LPPD Lampung Barat Tahun 2014-2018

NO	TAHUN	NILAI	PREDIKAT
1	2014	3,1055	Sangat Tinggi
2	2015	3,2169	Sangat Tinggi
3	2016	3,5009	Sangat Tinggi
4	2017	3,3003	Sangat Tinggi
5	2018	3,3435	Sangat Tinggi

Sumber: diolah tim, 2022.

Faktor penunjang indikator keberhasilan predikat laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) adalah:

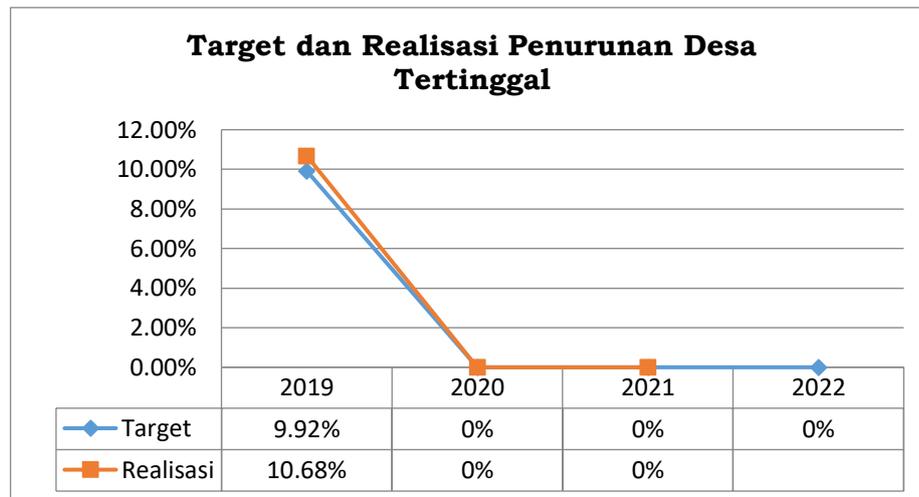
- a) Perencanaan kinerja dalam RPJMD, RKPD, maupun Renstra Perangkat Daerah selalu dievaluasi dan diperbaharui sehingga sasaran strategis diupayakan secara optimal dapat berorientasi pada hasil. Antara program dan kegiatan dengan sasaran strategis, target kinerja diupayakan selaras;
- b) Pencapaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat cukup baik didukung pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berprestasi dalam skala nasional;
- c) *Monitoring* dan evaluasi kinerja dilakukan secara terus menerus, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja dapat ditingkatkan, baik efisiensi maupun efektifitasnya.

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator sasaran dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah dengan *stakeholder* terkait.

26. Sasaran Strategis 26 Menurunnya Desa Tertinggal

Capaian Kinerja

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Tertinggal adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/ transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. (Bappenas, Indeks Pembangunan Desa). Desa tertinggal adalah desa yang memiliki nilai Indeks Desa Membangun (IDM) kurang dari atau sama dengan 50. Target penurunan desa tertinggal tahun 2021 adalah 0% dan terealisasi 0% atau tercapai 100% kinerja. Realisasi ini meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yang realisasi kinerjanya 0,76%. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian tahun 2021 sudah 100%. Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi penurunan desa tertinggal tahun 2019 sampai tahun 2022.



Grafik 21. Perbandingan Target dan Realisasi Penurunan Desa Tertinggal Tahun 2019-2022

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tahun 2021.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Desa PDT Nomor 3 Tahun 2018, Kabupaten Lampung Barat keluar dari status kabupaten tertinggal. Dalam menentukan status kabupaten tertinggal dan tidak tertinggal, Kementerian Desa dan PDT melakukan evaluasi kuantitatif dan kualitatif. Dalam dokumen IDM itu juga dicontohkan, untuk status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal memiliki nilai skor dan situasi yang berbeda. Adanya status kondisi desa itu diharapkan pendekatan kebijakan dan intervensi yang akan dilakukan juga berbeda. Dua status itu melekat, karena minimnya atau desa tidak memiliki fasilitas dasar, seperti pasar, jalan dan kondisinya, fasilitas kesehatan dan tenaganya.

Dalam melihat skor dan ambang batas IDM itu, setidaknya terdapat tiga status desa yang masuk dalam kondisi rentan. Mulai dari status desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Rentan dalam arti, jika ada salah satu skor indikator yang bergeser, maka dengan seketika semakin menurun, misalnya dari status desa berkembang akan menjadi desa tertinggal atau desa sangat tertinggal. Faktor kerentanan itu adalah terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam, konflik sosial berkepanjangan. tiga hal kerentanan itu memungkinkan status desa berkembang akan turun skor dan statusnya, jika faktor kerentanan itu tidak segera ditangani. Status desa berkembang adalah nilai tengah, dan rentan. Faktor-faktor tertentu akan dapat membuat statusnya turun, tapi juga bisa naik menjadi desa maju dan desa mandiri. Agar posisinya bisa

naik menjadi desa maju, sebuah desa berkembang harus mampu mengolah daya potensi desa, mengelola informasi yang baik untuk warga, memiliki inovasi dan prakarsa, dan kewirausahaan.

Setelah mendapat status desa maju, desa itu diharapkan menjadi desa mandiri jika fasilitas dasar desa sudah terpenuhi. Desa yang mandiri mampu mengelola potensi desa yang dimiliki, memiliki inovasi dan kewirausahaan desa. Dengan status Desa Mandiri, berdasarkan indikator ukur IDM, diharapkan desa itu memiliki kemampuan tiga dimensi sekaligus: mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan. Perkembangan status pekon berdasarkan indeks desa membangun (IDM) di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 70. Perkembangan Penyebaran Status Pekon di Kabupaten Lampung Barat

NO	STATUS PEKON	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mandiri	-	-	-	2	10	40
2	Maju	1	2	2	30	44	61
3	Berkembang	32	57	59	85	76	30
4	Tertinggal	72	62	61	14	1	
5	Sangat Tertinggal	26	10	9	0		

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Pada tahun 2021, Lampung Barat menduduki peringkat 33 nasional dari 514 kabupaten/kota atas evaluasi dan penilaian dalam program Indeks Desa Membangun (IDM) oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDPT).

IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan yang merupakan program rutin setiap tahun yang diadakan Kemendes-PDPT. Selain itu, IDM ini sebagai indikator untuk melihat kemajuan masing-masing pekon (desa) seperti misalnya bidang dan aspek kesehatan, lingkungan hidup, kemiskinan serta keberhasilan pekon dengan ukuran yang telah ditetapkan Kemendes-PDPT capaian peringkat ke-33 nasional kabupaten yang berdiri tahun 1991 tersebut dengan klasifikasi desa mandiri. Desa mandiri ialah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan

masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Secara umum, upaya pelaksanaan skema peningkatan keberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh pandemi. Aktivitas-aktivitas yang terdapat unsur pengumpulan banyak orang diminimalisir. Namun demikian Dinas PMP terus melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pekon yang berhubungan dengan indikator IDM, evaluasi dan pembinaan dilakukan bersama tim yang beranggotakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pekon, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

27. Sasaran Strategis 27 Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Tertib

Capaian Kinerja

Sasaran 27 merupakan bagian dari upaya mencapai misi ke-5 RPJMD, yaitu “Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif”. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib diukur dari persentase konflik SARA yang terselesaikan dan kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan. Kehidupan yang tertib, aman dan damai merupakan bentuk kehidupan universal yang dicita-citakan oleh umat manusia. Untuk mewujudkannya, disusunlah norma-norma perilaku kehidupan yang disepakati bersama sebagai panduan kolektif, baik dalam perspektif bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Salah satu norma yang disusun dalam rangka mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat adalah norma hukum, yakni yang lazimnya disebut hukum negara. Di samping itu, terdapat pula sejumlah norma lain yang berfungsi sama, yang antara lain berupa norma kesopanan, adat istiadat, kebiasaan, kesusilaan dan norma agama.

Pada tahun 2021, kedua indikator kehidupan bermasyarakat yang tertib terealisasi 100% dari target 100%, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Baik indikator penyelesaian konflik SARA atau indikator penyelesaian kasus K3 berhasil diselesaikan dengan baik oleh pemerintah. Capaian ini sama dengan capaian kinerja tahun 2020, dimana setiap gangguan atau kasus yang terjadi di masyarakat telah diselesaikan. Berikut

ini adalah cara perhitungan capaian indikator kehidupan bermasyarakat yang tertib.

Tabel 71. Cara Perhitungan Indikator Penyelesaian Konflik SARA dan Penyelesaian Kasus K3

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase konflik SARA yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah konflik yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Konflik dalam 1 tahun}} \times 100 \%$	100%	100%	100%
Persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yg terselesaikan}}{\text{Pelanggaran K3 yg dilaporkan masyarakat dan hasil operasi}} \times 100\%$	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Kesbangpol, SatpolPP Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Perkembangan realisasi kinerja sasaran mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib sejak tahun 2019 sampai 2021 serta target akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 72. Perbandingan Realisasi Kinerja Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Tertib Tahun 2019-2021 serta Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD
Persentase konflik SARA yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%
Persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%

Sumber: diolah tim, 2022.

a) Persentase Konflik SARA yang Terselesaikan

Capaian indikator sasaran 27 ini, terutama pada Persentase konflik SARA yang terselesaikan sebesar 100% dari target 100% dengan tingkat capaian 100%. Kondisi ini disebabkan antara lain pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) potensi konflik yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Kedua potensi/gejala konflik tersebut antara lain:

- 1) Pendirian rumah ibadah (Vihara) di Pemangku Bedeng, Pekon Padang Cahya, Kecamatan Bali Bukit.

Masyarakat sekitar menolak pendirian rumah ibadah tersebut dengan alasan tidak ada satupun masyarakat sekitar yang memeluk agama Konghucu/Budha. Inisiator pendirian vihara bukan warga masyarakat Pekon Padang Cahya, status tanah yang akan didirikan rumah ibadah tersebut tidak diketahui oleh aparat pekon keabsahannya. Perangkat kecamatan dan pekon akan menindaklanjuti pembangunan rumah ibadah asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku/seluruh kriteria persyaratan terpenuhi.

- 2) Penguasaan lahan hutan lindung oleh warga masyarakat di Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya.

Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya adalah pekon definitif yang telah ditetapkan pada tahun 1954. Pekon ini lahir dan berkembang dari program BRN (Biro Rekonstruksi Nasional), dimana pada tahun 1951-1952 sebanyak 250 KK atau sekitar 680 jiwa dari daerah Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya) ditransmigrasikan ke daerah ini. Seiring dengan perkembangannya saat ini di Pekon Sukapura telah bermukim sekitar 679 KK atau sekitar 1629 jiwa. Demikian juga dengan kondisi desanya telah banyak mengalami perkembangan. Pemukiman, sarana dan prasarana umum (seperti sekolah dan pasar) telah berdiri, bahkan lahan kawasan hutan seluas 50 Ha telah dialihfungsikan menjadi areal perumahan karyawan PLTA Way Besay dengan mekanisme tukar guling.

Pada tahun 1994 sesuai dengan kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), sebagian wilayah pekon masuk ke dalam wilayah Hutan Lindung (Register 45B Bukit Rigis), termasuk areal pemukiman penduduk. Dengan adanya kebijakan tersebut maka masalah kepastian hak penguasaan lahan (land tenure) mengemuka. Hal ini menyebabkan masyarakat Pekon Sukapura merasa perlu untuk mendapatkan kejelasan status pemukiman dan lahan mereka. Mengingat kenyataan sejarah dan fakta dilapangan masyarakat menginginkan areal pemukiman mereka dikeluarkan dari kawasan hutan lindung. Sejak mengemukanya permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menangani permasalahan

tersebut sebagai upaya untuk menyelesaikannya, namun demikian keputusan akhir atas selesainya konflik ini ada dipemerintah pusat.

b) Persentase Kasus Ketertiban, Keamanan dan Keindahan yang Terselesaikan

Untuk tingkat capaian indikator sasaran 27, meningkatnya pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat berfokus pada hal upaya meningkatnya pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sehingga pengukuran sasaran kinerja terdiri atas 2 indikator program, yaitu 1) Persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan; 2) Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang terselesaikan.

1) Persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang terselesaikan

Capaian kinerja realisasi 100 % didapat dari rasio jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan sejumlah 2.231 pelanggaran dari 2.231 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi. Jumlah 2.231 pelanggaran didapat dari pelanggaran K3 yang terselesaikan secara non yustisi sebesar 2.231 pelanggaran dan secara pro yustisi sebesar 0 (nol) pelanggaran, kemudian untuk jumlah 2.231 pelanggaran didapat dari jumlah pelanggaran yang dilaporkan dari hasil operasi non yustisi sebesar 2.231 pelanggaran dan dari hasil operasi pro yustisi sebesar 0 (nol) pelanggaran.

2) Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang terselesaikan

Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan oleh Satpol-PP yang dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yaitu; tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol-PP. Data jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan dan dipantau ditahun yang bersangkutan terdiri dari jumlah pengaduan yang ditangani 415, jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk 592, jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi 20 Perda dan Perkada, dan jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi dan

ditegakkan 8 Perda dan Perkada. Sehingga dapat diketahui persentase penegakan perda dan perkada yang terselesaikan adalah 40%.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

a) Persentase Konflik SARA yang Terselesaikan

Sebagaimana disinggung sebelumnya, indikator kinerja konflik SARA yang terselesaikan dominan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol. Perangkat daerah lainnya memberikan dukungan secara tidak langsung. Secara umum kondisi Kabupaten Lampung Barat di tahun 2021 dalam kondisi yang sangat kondusif permasalahan yang muncul berlatar sosial budaya dan Penguasaan lahan hutan lindung oleh warga masyarakat. Permasalahan mendasar adalah kurangnya pemahaman tentang perbedaan yang tidak perlu disikapi dengan kekerasan, dari keseluruhan hal tersebut Badan Kesbangpol telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikannya agar tidak meluas dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan agar situasi dan kondisi di Kabupaten Lampung Barat tetap kondusif. Upaya tersebut diantaranya adalah:

- 1) Memfasilitasi pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial yang anggota terdiri dari Lintas SKPD baik vertikal dan horizontal sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 42 Tahun 2014 tentang tim terpadu penanganan konflik sosial;
- 2) Memanfaatkan organisasi yang telah dibentuk di kecamatan dan desa/kelurahan seperti FKDM, FKUB dan FPK sebagai wadah deteksi dini konflik yang akan berkembang;
- 3) Memfasilitasi pihak yang berkonflik dalam suatu musyawarah untuk menemukan solusi terbaik agar tidak terjadi bentrokan;
- 4) Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan.

Dari upaya tersebut diatas, sehingga seluruh kejadian, konflik dan kasus tersebut diatas dapat terselesaikan sehingga kondisi tetap kondusif sesuai dengan target yang telah ditetapkan (100%).



Gambar 28. Pertemuan Pemkab Lambar dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait penyelesaian permasalahan listrik di Pekon Roworejo-Sidorejo Suoh dan Penyelesaian Sengketa Agraria Sukapura
Sumber: Laporan Kinerja SatpolPP Tahun 2021.

Dalam pertemuan di Gedung Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Jakarta, pukul 14.00 WIB peserta yang hadir adalah Sekjen KLHK, Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kepala Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan, Kepala Sub Direktorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis Pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Bupati Lampung Barat Hi. beserta jajaran (Kabag SDA, Kabag Tapem dan lain-lain). Hadir secara virtual Kepala BPKH Wilayah XX Bandarlampung, GM UIW Lampung PT PLN. Bupati Lampung Barat memimpin langsung acara di KLHK dan menyerahkan secara langsung dokumen pendukung terkait permasalahan Listrik di Suoh dan Permasalahan Agraria di Sukapura kepada Sekjen KLHK. Sekjen KLHK meminta pihak terkait dan jajaran KLHK membantu percepatan permasalahan di Lambar. Seperti Permasalahan Listrik di Sidorejo-Roworejo Suoh dan Sengketa Agraria di Sukapura.

b) Persentase Kasus K3 yang terselesaikan

Sebagaimana disinggung sebelumnya, upaya penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dominan dilaksanakan oleh Satpol PP. Perangkat daerah lainnya memberikan dukungan secara tidak langsung. Disamping itu, pelaksanaan kebijakan diwarnai dengan adanya Pandemi yang menginterupsi kelancaran kegiatan. Satpol PP sendiri sebagai *leading sector* pencapaian sasaran

penurunan gangguan keamanan dan ketertiban fokus pada penanganan pelanggaran prokes Pandemi, terutama pada paruh kedua tahun 2021.

Namun demikian, adanya kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan mewabahnya pandemi Covid-19 untuk membatasi segala bentuk aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi di daerah, serta himbauan menunda perjalanan ke luar daerah, mungkin justru mengurangi potensi terjadinya pelanggaran perda di Lampung Barat. Dampaknya sebagaimana dijelaskan diatas jumlah pelanggaran peraturan daerah menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 29. Kegiatan Penertiban Pelanggaran Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19

Sumber: Laporan Kinerja SatpolPP Tahun 2021.

Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan dan dipantau ditahun yang bersangkutan diantaranya jumlah pengaduan yang ditangani 415, jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk 592, jumlah perda dan Perkada yang memuat sanksi 20 Perda dan Perkada, dan jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi dan ditegakkan 8 Perda dan Perkada. Kegiatan patroli secara rutin oleh petugas Pol-PP dalam rangka *monitoring* dan operasi penegakan perda dilakukan secara intensif dengan melakukan jadwal patroli di wilayah Lampung Barat dengan pola *shift* selama 24 jam dalam sehari baik melalui *monitoring* terbuka maupun *monitoring* tertutup dengan dukungan personil dari Pol PP Intelijen. Intensifikasi koordinasi baik di internal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat maupun dengan institusi penegak hukum lainnya (kepolisian, kejaksaan, TNI, dsb) serta kerjasama kemitraan

melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) kerjasama, dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan penegakan peraturan perundang-undangan di Lampung Barat. Selain itu dukungan personil dari Linmas turut berkontribusi bagi terwujudnya perlindungan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

Strategi penegakan Perda secara preventif dilakukan melalui dukungan, peran serta dan pola kerjasama dengan kemitraan dalam rangka turut menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perda di Kabupaten Lampung Barat. Meningkatnya peran serta masyarakat juga menjadi faktor pendorong secara tidak langsung terhadap penurunan jumlah pelanggaran perda di Kabupaten Lampung Barat melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan masyarakat.



Gambar 30. Kegiatan Penertiban dan Keamanan
Sumber: Laporan Kinerja Satpol PP Tahun 2021

Permasalahan yang timbul terkait implementasi strategi penegakan perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP adalah belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan cenderung membuka ruang melakukan pelanggaran kembali. Bahkan upaya yang sampai pada level putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran Perda pun belum cukup efektif. Apalagi di masa pandemi Covid19, keterbatasan aktivitas sosial berpotensi mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, termasuk dengan cara melanggar peraturan. Pandemi juga berpengaruh terhadap ruang gerak petugas operasional Pol PP dalam penegakan Perda.

28. Sasaran Strategis 28 Menurunnya Kasus Kekerasan kepada Perempuan dan Anak

Capaian Kinerja

Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Korban kasus kekerasan memang bisa dari kalangan mana saja, perempuan atau laki-laki, anak-anak atau dewasa. Namun, kasus kekerasan banyak terjadi kepada perempuan dan anak-anak karena sifatnya yang dianggap lemah dan tidak berdaya oleh pelaku kekerasan. Berdasarkan data Sistem Informasi Online (SIMFONI) Kementerian PPPA menunjukkan kasus kekerasan paling banyak terjadi di rumah tangga, fasilitas umum, dan tempat lainnya, sedangkan kasus kekerasan ditempat kerja dan sekolah jumlahnya kecil. Kekerasan seksual menempati urutan pertama korban terbanyak, disusul kekerasan fisik, psikis, kekerasan lainnya, penelantaran, *trafficking*, dan eksploitasi. Dampak buruk yang terjadi dari tindak kekerasan ini adalah kehamilan yang tidak diinginkan, disrupsi dari lingkungan, gangguan mental, luka fisik dan kematian, dan lingkungan menjadi pasif. Usia korban kekerasan terbanyak ada pada rentang usia 13-17 tahun, usia 25-44 tahun, 6-12 tahun, 18-24 tahun, 0-5 tahun, 45-59 tahun, dan 60 tahun lebih.

Pemerintah melalui Dinas PPKBPPPA selalu berupaya hadir dan membantu menangani kasus kekerasan yang dilaporkan masyarakat. Pada tahun 2021, ada sebanyak 6 kasus kekerasan yang dilaporkan terdiri dari 4 kasus kekerasan terhadap anak dan 2 kasus kekerasan perempuan. Kasus ini berhasil ditangani 100%, sehingga capaian kerjanya adalah 100%. Berikut ini adalah cara perhitungan, target, realisasi, dan capaian kinerja penanganan kasus kekerasan kepada perempuan dan anak tahun 2021.

Tabel 73. Cara Perhitungan Indikator Persentase Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan yang Tertangani

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kasus kekerasan pada anak dan perempuan yang tertangani	$\frac{\text{Jmlh kasus kekerasan yang tertangani}}{\text{Jumlah total kasus kekerasan}} \times 100\%$	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Dinas PPKBPPPA Lampung Barat Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Setiap kasus kekerasan yang terjadi dan dilaporkan selalu didampingi dan dibantu penyelesaiannya oleh pemerintah. Upaya maksimal dilakukan untuk memberi perlindungan kepada perempuan dan anak. Berikut ini adalah perkembangan realisasi kinerja penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2020 dan 2021, target akhir RPJMD serta capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2021.

Tabel 74. Perkembangan Realisasi Kinerja Indikator Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja RPJMD s.d. 2021
Persentase kasus KDRT yang ditangani	100%	100%	100%	100%

Sumber: diolah tim, 2022.

Urgensi penanganan kasus kekerasan adalah karena dampak yang ditimbulkannya dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Sehingga pemerintah hadir dan berkomitmen untuk terus ada disamping masyarakat korban kekerasan yang membutuhkan bantuan dan perlindungan.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Beberapa jenis kekerasan adalah fisik, seksual, emosial atau psikis, ancaman, dan pembatasan aktivitas. Penyebab kekerasan ini antara lain: pertama, faktor individu perempuan, pernikahan resmi yang diakui Negara melalui catatan sipil Kantor Urusan Agama (KUA) lebih sedikit mengalami kekerasan dibandingkan dengan perempuan yang menikah dalam status pengesahan perkawinan yang belum tuntas. Intensitas bertengkar dengan suami juga berpengaruh, perempuan yang menyerang lebih dulu beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan yang tidak menyerang suami atau pasangan. Kedua, faktor pasangan. Resiko kekerasan terhadap perempuan meningkat jika suami memiliki pasangan lain, menganggur, minum miras, mabuk satu kali seminggu, pengguna narkoba, dan sering berkelahi. Ketiga, faktor ekonomi. Perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan. Keempat, faktor sosial budaya, seperti

timbul khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran memiliki resiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual pasangan dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan beresiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dibandingkan mereka yang tinggal di pedesaan.

Pelaku kekerasan terbanyak tercatat oleh SIMFONI adalah laki-laki. Hubungannya dengan korban paling banyak adalah sebagai suami atau istri, pacar atau teman, orangtua, keluarga atau saudara, kategori lain, tetangga, majikan, dan rekan kerja. Maka melalui program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, pemerintah berharap dapat memberi edukasi tentang bahaya kekerasan dan pelatihan tindakan jika mengalami atau melihat kekerasan. Pemerintah memberi pelayanan kepada para korban kekerasan berupa layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Seperti yang telah terjadi pada 6 kasus kekerasan pada tahun 2021, 2 kasus kekerasan pada perempuan dan 4 lainnya kasus kekerasan pada anak.

Kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan kesiapan menikah pasangan muda, pengetahuan yang cukup akan menjadi bekal dalam menjalani rumah tangga dengan pasangan, bekal ilmu agama juga menjadi kekuatan supranatural yang memberi ketenangan dan sikap tenang dalam menyikapi kehidupan berumah tangga. Bukan hanya soal perempuan, pencegahan kekerasan pada anak juga dimulai dari orangtua yang siap memiliki dan mendidik anak. Melalui program pemenuhan hak anak, program perlindungan perempuan, dan program perlindungan khusus anak, pemerintah hadir ditengah masyarakat untuk memberi perlindungan masyarakat dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara aspek ekonomi lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh yang tingkat upah nya masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga. Namun sesungguhnya faktor ekonomi dan pendidikan saling berkaitan. Faktor ekonomi yang menjadi tolok ukur kesejahteraan kehidupan dipengaruhi

oleh tingkat pendidikan. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi berarti pengetahuan dan keterampilan juga tinggi sehingga dapat digunakan untuk produktivitas dirinya yang menjadi nilai tambah ekonomi dengan bekerja. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan dan penanganannya. Data menurut SIMFONI Kementerian PPPA, korban kekerasan didominasi oleh mereka yang berpendidikan SMA, SMP, SD, perguruan tinggi, tidak sekolah, kategori lainnya, TK, PAUD. Berdasarkan urutan jenjang pendidikan korban kekerasan tersebut, memang tidak menjamin kekerasan tidak akan terjadi kepada mereka yang berpendidikan tinggi, namun berpendidikan yang semakin tinggi mengurangi resiko terjadinya kekerasan.

Faktor sosial budaya, memilih lingkungan yang positif akan memberi dampak baik terhadap cara diri berpendapat dan menilai sebuah peristiwa, sehingga kecemasan tidak menjadi bayangan yang mengerikan sehingga memicu pertengkaran dan kekerasan. Maka menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman sangat membantu mencegah terjadinya kekerasan.

Permasalahan dalam upaya menurunkan kasus kekerasan pada anak dan perempuan adalah tidak semua kasus kekerasan dilaporkan, penyebabnya adalah anggapan tindak kekerasan sebagai aib keluarga. Maka rekomendasi yang disarankan adalah pemerintah melalui Dinas PPKBPPPA akan mengoptimalkan sosialisasi, advokasi, jangkauan dan pendampingan terhadap korban kekerasan, dan membentuk satuan tugas PPPA di setiap pekon.

29. Sasaran Strategis 29 Meningkatnya Kesetaraan Gender

Capaian Kinerja

Gender adalah hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Gender merujuk pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, dan bagaimana hubungan sosial ini dikonstruksikan. Peran gender bersifat dinamis dan berubah antar waktu. Gender berperan mempelajari kondisi perilaku didalam masyarakat atau komunitas bahwa kegiatan, tugas atau tanggungjawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender dapat berubah, dan dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama dan lingkungan geografi, ekonomi dan politik. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran

ganda didalam masyarakat. Perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi dan kemasyarakatan. Laki-laki lebih terfokus pada produksi dan politik kemasyarakatan. Namun, sebenarnya laki-laki dan perempuan memiliki peran dan hak yang sama, tidak ada penggolongan khusus tugas dan peran laki-laki dan perempuan baik dalam rumah tangga atau dalam sektor politik sosial dan sektor lainnya.

Kesadaran gender harus dipahami dan diterima oleh kedua jenis gender. Ada faktor-faktor sosial yang menentukan antara laki-laki dan perempuan atas dasar tingkah laki, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses dan mengontrol sumber daya. Kesadaran ini membutuhkan penerapan melalui analisa gender menjadi proyek, program dan kegiatan. Selama ini, laki-laki identik dengan bekerja diluar rumah, mencari nafkah dan tidak mengurus pekerjaan rumah. Sementara perempuan selalu dikaitkan dengan kegiatan rumah tangga, memasak, menyapu, mengepel, mengurus anak. Sejak dulu peranan perempuan dalam rumah tangga disalahkaprahkan oleh persepsi masyarakat terdahulu hingga hampir-hampir membudaya. Oleh karena hal tersebut, pemerintah memberi fokus pada urusan penyetaraan gender ini termasuk kedalam urusan penting, tujuannya adalah menyetarakan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan social. Perempuan berhak bekerja di bidang politik, teknik, bahkan menjadi pengusaha, begitu juga dengan laki-laki yang berhak menjadi perancang busana, atau tukang masak terkenal.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat meletakkan urusan peningkatan kesetaraan gender kedalam salah satu sasaran startegis utamanya, sehingga ini menjadi urusan wajib pemerintah. Dalam upaya mencapai peningkatan kesetaraan gender, digunakan 2 indikator kinerja untuk membantu derajat kesetaraan gender. Indikator pertama adalah indeks pembangunan gender, yang ditargetkan meningkatkan sebesar 91,74 poin di tahun 2021. Melalui Dinas PPKBPPPA, realisasi indikator ini adalah sebesar 93 poin, lebih besar dari target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerjanya adalah 101,37%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, capaian kinerja tahun 2021 lebih unggul 0,44%. Sementara untuk mencapai target akhir RPJMD yang sebesar 91,80 poin, capaian tahun 2021 sudah mencapai 101, 30%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

yang per tahun 2021, 53% merupakan pegawai ber jenis kelamin perempuan, dan 47% ber jenis kelamin laki-laki. Capaian ini menempatkan Kabupaten Lampung Barat mengungguli rata-rata indeks pembangunan gender Provinsi Lampung yang sebesar 90,37 poin, sehingga Lampung Barat berada di posisi keempat pembangunan gender tertinggi di Provinsi Lampung.

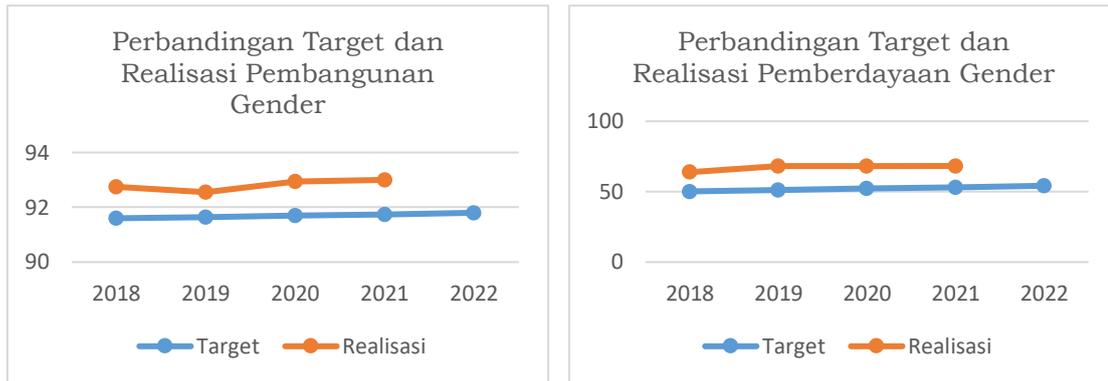
Indikator kedua adalah indeks pemberdayaan gender yang tahun 2021 ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 53,2 poin. Realisasi kinerja ini berhasil mendapat 68,21 poin atau tercapai kinerja sebesar 128,21%. Realisasi kinerja ini sama dengan poin realisasi yang dicapai tahun 2020, namun secara persentase capaian kinerja, angkanya menurun 2,46%. Hal ini karena target kinerja tahun 2020 yang lebih kecil dari target kinerja tahun 2021, maka ketika realisasi yang tercapai sama, persentase capaiannya tetap berbeda. Meski begitu, kinerja pemberdayaan gender tahun 2021 ini telah tercapai sebesar 125,84% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD. Capaian indeks pembangunan gender tahun ini lebih besar dari capaian Kabupaten Lampung Tengah yang sebesar 61,96 poin, namun masih berada dibawah capaian Provinsi Lampung yang sebesar 69,06 poin. Berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja kedua indikator ini pada tahun 2020 dan 2021, target akhir RPJMD, serta capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2021.

Tabel 75. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Kesetaraan Gender

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja RPJMD s.d 2021
Indeks pembangunan gender	92,55 poin	93 poin	91,80 poin	101,30%
Indeks pemberdayaam gender	68,21 poin	68,21 poin	54,2 poin	125,84%

Sumber: diolah tim, 2022.

Sementara perkembangan target dan capaian indikator peningkatan kesetaraan gender dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.



Grafik 22. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Tahun 2018-2022

Sumber: Laporan Kinerja Dinas PPKBPPPA Tahun 2021, diolah tim, 2022.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Ada 2 indikator yang digunakan pada sasaran meningkatnya kesetaraan gender, yaitu indeks pemberdayaan gender (IDG) dan indeks pembangunan gender (IPG) yang pengukurannya dilakukan oleh Biro Pusat Statistik. Indeks pembangunan gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender dimaknai sebagai kesamaan kondisi baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Keadilan gender merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat tidak ada pembakuan peran, beban ganda, sub ordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender dapat diukur salah satunya adalah indeks pembangunan gender (IPG). Dengan kata lain IPG ini merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender.

Realisasi pembangunan gender Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 mencapai 92,95 poin (rilis BPS Tahun 2021). Ketimpangan gender yang terjadi di kabupaten Lampung Barat pada tahun sebelumnya tampak pada pengeluaran per kapita disesuaikan. Sedangkan pada angka harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah hampir terjadi persamaan gender. Sementara realisasi pemberdayaan gender di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 mencapai 68,24 poin. Indeks

ini menunjukkan peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dengan pencapaiannya melebihi terhadap target yaitu sebesar 128,27 %.

Pencapaian kedua indikator ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Barat telah memperhatikan pembangunan dengan pengarusutamaan gender. Adanya peningkatan indeks pemberdayaan gender menunjukkan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, dan penurunan indeks pembangunan gender berarti ketimpangan gender yang terjadi semakin menurun. Pengarusutamaan gender diperlukan sebagai strategi mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, perempuan dan laki-laki.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kesetaraan gender adalah faktor sosial budaya, dimana paradigma dalam budaya patriarki masyarakat lama yang menempatkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan. Rekomendasi kebijakan yang disarankan diantaranya adalah dengan optimalisasi pelibatan perempuan dalam pembangunan daerah (mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan).

30. Sasaran Strategis 30 Menurunnya Kemiskinan dan Ketimpangan Daerah

Capaian Kinerja

a) Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah situasi dimana individu atau suatu rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini tidak serta merta diakibatkan oleh kemalasan, tetapi terdapat faktor sosial ekonomi yang melatarbelakangi situasi ini terjadi. Kemiskinan adalah hambatan sosial yang lebih luas. Peningkatan kemiskinan akan menjadi masalah sosial karena kemiskinan akan mendorong individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan. Kemiskinan juga menjadi masalah sosial ketika stratifikasi sosial menciptakan tingkatan dan batasan dalam masyarakat. Akibatnya, terjadi penyimpangan dan batasan dalam interaksi dan komunikasi antara orang-orang di tingkat atas dan bawah.

Menurut BPS, penduduk miskin di Indonesia tahun 2021 mencapai 27,55 juta orang. Peledakan penduduk miskin terjadi tahun 2020, dampak pandemi yang kala itu menjadi tahun pertama melanda. Sementara di Kabupaten Lampung Barat tingkat kemiskinan tahun 2021 sebesar 12,82% sedangkan jumlah penduduk miskin sendiri di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 39.360 jiwa. Angka ini lebih besar dari target yang telah ditetapkan sebesar 12,50%, sehingga capaian kinerja penurunan angka kemiskinan adalah 97,44%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami kenaikan dimana pada tahun 2020 sebesar 12,52% setara dengan 38.120 jiwa, sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami kenaikan sebanyak 0,3%. Terhadap target akhir RPJMD, capaian tahun 2021 ini sudah sebesar 93,16%. Tingkat kemiskinan di Lampung Barat tahun 2021 ini lebih tinggi dari rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Lampung yang sebesar 11,67% ditahun yang sama. Berikut ini adalah perkembangan kemiskinan di Lampung Barat.

Tabel 76. Perkembangan Kemiskinan di Lampung Barat Tahun 2018-2021

Indikator	2018	2019	2020	2021	Target Akhir RPJMD
Kemiskinan	13,54%	12,92%	12,52%	12,82%	12%

Sumber: BPS Lampung Barat Tahun 2022.

b) Indeks Gini

Indeks gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Indeks gini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di wilayah Lampung Barat. Nilai rasio gini berkisar anatar 0 hingga 1. Nilai rasio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan rasio gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Dengan kata lain, rasio gini diupayakan mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan pendapatan antar penduduk.

Pada tahun 2021, indeks gini Kabupaten Lampung Barat tercatat 0,295 poin, lebih rendah 0,001 poin dibandingkan dengan indeks gini pada tahun 2020 yang sebesar 0,296 poin. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 hampir sama dengan tahun 2020. Realisasi indeks gini tahun 2021 ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 0,28 poin. Sehingga capaian kinerja indeks gini adalah sebesar 94,64%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, realisasi tahun 2021 ini adalah sebesar 86,53%. Nilai indeks rasio gini Lampung Barat tahun 2021 lebih rendah dari nilai indeks Provinsi Lampung yang sebesar 0,32 poin. Berikut ini adalah perkembangan indeks gini dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 77. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019-2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	Target Akhir RPJMD
Indeks Gini	Poin	-	0,314	0,296	0,295	0,26

Sumber: BPS Lampung Barat, 2022.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

a) Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan berkaitan dengan indeks gini. Semakin rendahnya nilai indeks gini yang berarti semakin meratanya pendapatan masyarakat, akan berdampak pada semakin rendahnya kemiskinan. Hasil Perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung garis kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dengan data SUSENAS-nya. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan, yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan, sehingga garis kemiskinan merupakan penjumlahan garis kemiskinan makanan dengan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan

makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non-makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Melihat tabel 52, dapat disimpulkan bahwa peningkatan angka kemiskinan berarti bahwa jumlah penduduk miskin di Lampung Barat meningkat. Kondisi-kondisi tersebut memburuk akibat pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020. Jumlah kemiskinan tahun 2020 yang lebih rendah dari tahun 2021 padahal pandemi terjadi sejak tahun 2020 tersebut disebabkan oleh periode perhitungan angka kemiskinan oleh BPS yang dilakukan per bulan Maret. Pada bulan Maret tahun 2020, masyarakat belum merasakan dampak pandemi karena pada bulan tersebut pandemi baru mulai menyeruak dan menyebar.

Kemiskinan dapat terjadi karena berbagai hal, misalnya ketersediaan pangan yang cukup gizi, rumah yang tidak layak huni, pendidikan yang rendah, dan kesehatan yang menurun. Maka penanganan kemiskinan merupakan kerjasama semua pihak. Ketersediaan pangan yang menjadi tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Perikanan akan memberi dampak pada konsumsi masyarakat. Namun pangan yang cukup gizi ini akan dapat dicapai oleh masyarakat yang memiliki pendapatan yang cukup, maka stabilitas harga yang dipantau oleh Dinas Koperindag mengambil peran keterjangkauan daya beli masyarakat. Program penanganan rumah tidak layak huni oleh Dinas PUPR juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang membantu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Sementara Dinas Kesehatan berperan untuk memastikan keterjangkauan fasilitas kesehatan bagi masyarakat terutama yang berada di pelosok daerah dan jauh dari fasilitas kesehatan pertama berupa Puskesmas. Beberapa perangkat daerah juga mengambil peran dalam upaya penurunan angka kemiskinan ini. Ada yang melalui upaya peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda, ada yang memfasilitasi informasi lowongan kerja dan pelatihan tenaga kerja.

Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan dengan optimalisasi program bantuan sembako untuk masyarakat tidak

mampu, tersedianya jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin baik melalui kelompok usaha bersama maupun kelompok usaha perempuan.

Dan jika dihubungkan dengan dampak pandemi covid-19 di tahun 2020, maka capaian angka kemiskinan ini tidak terpengaruh oleh kondisi pandemi covid-19 dikarenakan pengukuran angka kemiskinan dilakukan pada bulan Maret Tahun 2020 di saat dampak pandemic belum terasa di masyarakat.

b) Indeks Gini

Tingginya realisasi daripada target memberi deskripsi bahwa angka ketimpangan pendapatan masyarakat di Lampung Barat tahun 2021 lebih banyak dari yang ditargetkan sebagai angka minimum. Hal ini menyebabkan capaian kinerja indeks gini belum mencapai 100%. Ada kalangan masyarakat yang sudah tercukupi semnetara masyarakat yang lain masih dalam kondisi kekurangan. Angka ketimpangan ini masih lebih rendah jika dibandingkan rata-rata ketimpangan Provinsi Lampung di tahun yang sama. Hal ini menunjukkan keadaan rata-rata antar masyarakat Provinsi Lampung mengalami ketimpangan yang cukup serius. Urgensi indeks gini dalam pembangunan daerah adalah dengan nilai indeks gini yang dikeluarkan oleh BPS menjadi alat ukur pemerintah memperbaiki dan meningkatkan kinerja.

Meski realisasi kinerja indeks gini tidak mencapai target, namun indeks gini tahun 2021 ini mengalami penurunan dari tahun 2020. Beberapa hal yang mempengaruhi adalah capaian kinerja penurunan angka stunting di Lampung Barat yang ditargetkan 24% dan terealisasi 5,5%. Perhitungan angka stunting adalah semakin rendah realisasi kinerja dari target kinerja maka capaian kinerjanya semakin meningkat. Kedua, tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja yang berarti ada peluang dan kesiapan bekerja sebesar 83,23%. Lewat peningkatan keahlian dan sertifikasi, magang, kemitraan tentang industri, dan investasi yang menyerap tenaga kerja. Ketiga, meningkatnya jumlah koperasi sehat di tahun 2021 menjadi 27 koperasi sehat dari yang ditargetkan 23 koperasi sehat. Koperasi sehat menjadi salah satu kebijakan yang mampu mendorong turun ketidakmerataan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan lewat penguatan industri kecil

startegis, pemaksimalan potensi lokal perhutanan sosial, reforma agrarian, peningkatan skala usaha petani dan nelayan, serta pengembangan destinasi wisata.

Keempat, menurunkan kemiskinan lewat stabilitas harga pangan, pengurangan beban penduduk miskin, dan subsidi tepat sasaran. Pemerintah masih terus berupaya untuk menurunkan kemiskinan terutama di masa pandemi ini dengan memberikan bantuan sosial sebagai langkah pencegahan kelangkaan pasokan makanan karena menurunnya produksi pangan. Kelima, menurunkan ketimpangan kekayaan melalui pajak atau subsidi, program afirmasi yang efektif, kredit UMKM pertanian dan perikanan. Rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah meningkatkan kinerja aspek-aspek yang menjadi daya dukung dan memberi pengaruh terhadap penurunan indeks gini, sehingga ketimpangan dapat semakin ditekan.

31. Sasaran Strategis 31 Menurunnya Pengangguran

Capaian Kinerja

Pengangguran atau tunakarya adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum bisa memperolehnya. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Pengangguran adalah masalah perekonomian, banyaknya pengangguran menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang. Sehingga dapat menimbulkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya seperti kejahatan. Pengangguran juga berdampak buruk bagi individu yang menganggur tersebut, potensi diri menurun dan keterampilan kerja menghilang. Sedangkan bagi masyarakat, pengangguran membuat penghasilan pajak menurun serta tingkat kesejahteraan masyarakat juga menurun olehnya.

Dalam upaya menurunkan pengangguran, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas PTPS dan Tenaga Kerja menggunakan indikator tingkat pengangguran terbuka. Maksudnya adalah tenaga kerja yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan dapat menurun. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka di Lampung Barat ditargetkan ada pada angka 0,75%. Realiasinya, ada 2,83% pengangguran terbuka.

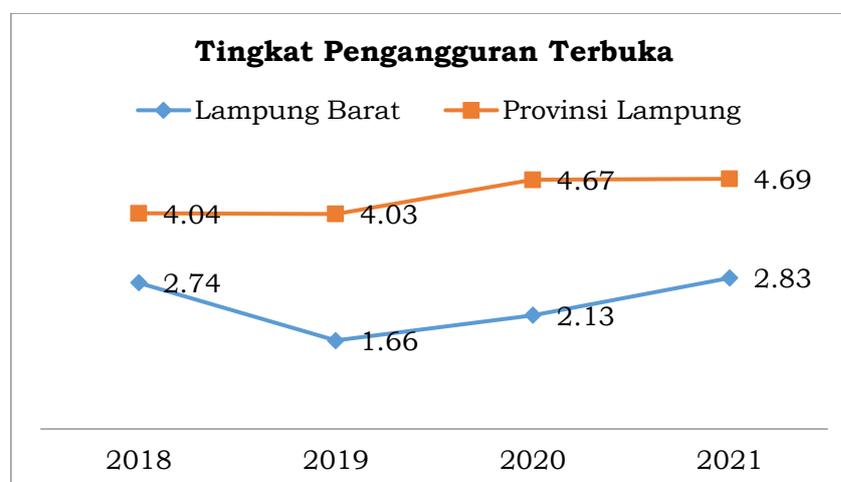
Sehingga capaian kinerjanya adalah -177%. Artinya ada lebih banyak pengangguran dari target jumlah pengangguran minimum di tahun 2021. Perhitungan ini adalah salah satu yang menggunakan rumus semakin kecil realisasi dari target yang ditetapkan maka capaian kinerjanya semakin bagus. Jadi, capaian kinerja tahun 2021 belum memenuhi target. Capaian ini juga meningkat dari tahun 2020 yang tingkat pengangguran terbukanya sudah sebesar -66,25%, artinya ada lebih banyak pengangguran terbuka di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 dan 2021 serta target akhir RPJMD.

Tabel 78. Perbandingan Realisasi Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 dan 2021 serta Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD
Tingkat pengangguran terbuka	2,13%	2,83%	0,71%

Sumber: diolah tim, 2022.

Meski terjadi penambahan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 0,7% dari tahun 2020, Kabupaten Lampung Barat merupakan kabupaten dengan tingkat pengangguran terendah se Provinsi Lampung. Bahkan nilai tingkat pengangguran terbuka Lampung Barat jauh hampir separuh dari rata-rata pengangguran terbuka Provinsi Lampung. Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi penurunan tingkat pengangguran terbuka.



Grafik 23. Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Barat dan Provinsi Lampung Tahun 2018-2021.

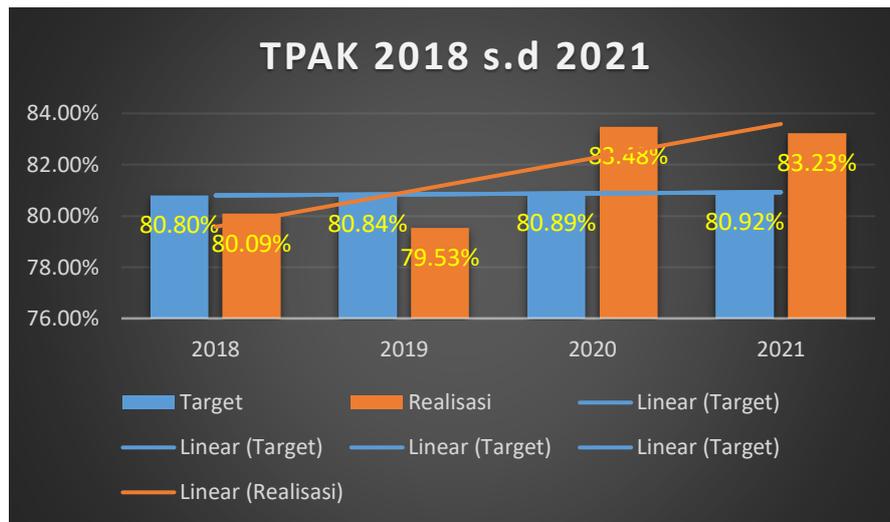
Sumber: lampung.bps.go.id, diolah tim, 2022.

Selama 4 tahun terakhir, penurunan tingkat pengangguran terbuka paling besar terjadi pada tahun 2019, kemudian melonjak sejak tahun 2020. Begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung yang pencapaian terbesarnya pada tahun 2019. Sejak tahun 2018 sampai tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Lampung Barat selalu lebih sedikit dibandingkan pengangguran terbuka rata-rata Provinsi Lampung.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Selain karena jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan lapangan kerja, pengangguran juga disebabkan oleh ketidakterampilan seseorang serta pendidikan yang rendah. Maka Dinas PTSP dan Tenaga Kerja bekerjasama dengan Dinas Porapar serta Dinas Koperindag untuk membangun keterampilan dan kemandirian pemuda dalam bidang perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, pemuda juga harus didorong untuk aktif dan berprestasi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan karena pengalaman prestasinya diluar daerah yang banyak dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Pemuda berprestasi dan mandiri serta ulet memanfaatkan sumber daya yang ada akan selalu mampu menciptakan peluang pemasukan perekonomian bagi diri dan keluarganya.

Dalam berupaya menurunkan pengangguran, pemerintah memberi bantuan kepada setiap masyarakat untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja melalui program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Program ini ditujukan kepada angkatan kerja dengan memberikan berbagai macam pelatihan ketenagakerjaan sehingga angkatan kerja memiliki keterampilan kerja. Program lainnya adalah penempatan tenaga kerja, bertujuan memberikan layanan kepada angkatan kerja dalam mencari pekerjaan dengan menyediakan berbagai informasi lowongan pekerjaan. Program-program ini berhasil meningkatkan partisipasi angkatan kerja sampai 83,23%. Pada bulan Desember tahun 2020, persentase TPAK sebesar 83,48 % sedangkan pada bulan Desember 2021 persentase TPAK sebesar 83,23 %. Nilai persentase TPAK ini mengindikasikan selama dua tahun ini terdapat potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja di Kabupaten Lampung Barat.



Grafik 24. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Lampung Barat Tahun 2018-2021
Sumber: Laporan Kinerja Dinas PTSP dan Tenaga Kerja Tahun 2021.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi nilai TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingginya TPAK dan tingginya jumlah pengangguran terbuka memperjelas kondisi bahwa sebenarnya ada banyak tenaga kerja yang siap bekerja memproduksi barang dan atau jasa namun diantara mereka banyak yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan. Penyebab kondisi ini adalah pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak lapangan usaha mengalami kendala bahkan harus pailit dan memberhentikan pekerjaannya. Meski tahun 2021 adalah tahun kedua bencana pandemi melanda, namun banyak sector yang belum bangkit seperti sedia kala. Kondisi perekonomian dalam dan

luar negeri yang masih labil juga menyebabkan tidak banyak sektor usaha yang berani mempekerjakan tenaga kerja sejumlah sebelum pandemi.

Luasnya lahan pertanian Lampung Barat berpengaruh terhadap lapangan usaha yang sebagian besarnya bekerja pada sektor pertanian. Sektor pertanian berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Lampung Barat sampai 77,71%. Berikutnya adalah sektor jasa yang menyerap 18,29% tenaga kerja, dan yang terakhir usaha manufaktur dengan jumlah tenaga kerja sebesar 4%. Sementara itu jika dilihat terhadap latar belakang pendidikan, tenaga kerja di Lampung Barat masih didominasi oleh penduduk dengan pendidikan SLTA, kondisi ini dapat diartikan bahwa masih minimnya pilihan lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Lampung Barat yang diperuntukan untuk lulusan SLTA.

Posisi Kabupaten Lampung Barat sebagai kabupaten dengan tingkat pengangguran terbuka terendah di Provinsi Lampung memberi penjelasan bahwa pemerintah telah berupaya maksimal menekan angka pengangguran terbuka. Upaya meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan fasilitasi lowongan pekerjaan telah memberi hasil yang cukup memberi sedikit kelegaan, namun masih tingginya jumlah pengangguran terbuka menjadi permasalahan. Maka untuk tahun selanjutnya, pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui optimlaisasi pelatihan tenaga kerja dan keterbukaan informasi lowongan pekerjaan sehingga memiliki kemampuan dan daya saing untuk bekerja dalam berbagai sektor.

D. AKUNTABILITAS ANGGARAN TAHUN 2021

Akuntabilitas anggaran adalah pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Akuntabilitas anggaran dimulai sejak proses penyusunan dokumen perencanaan yang merupakan dasar penyusunan dokumen penganggaran. Berikut ini adalah proses efisiensi anggaran selama proses penyusunan dokumen perencanaan tahun 2021.

Tabel 79. Efisiensi Anggaran selama Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2021

Tahap Perencanaan	Pagu Anggaran	Keterangan	Efisiensi
Rancangan awal RKPD	1.317.490.484.815	Perangkat daerah mengusulkan anggaran untuk mendanai program	139.095.605.921

Tahap Perencanaan	Pagu Anggaran	Keterangan	Efisiensi
Rancangan RKPD	1.250.868.746.140	dan kegiatan tahun 2021	
Rancangan akhir RKPD	1.178.394.878.894	Bappeda bersama dengan tim (BPKD, Bag. Administrasi Pembangunan, Bag. Organisasi)	
Penetapan RKPD	1.178.394.878.894	memverifikasi usulan program dan kegiatan perangkat daerah	

Sumber: diolah tim, 2022.

Efisiensi penggunaan anggaran saat proses penyusunan dokumen perencanaan tahun 2021 tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan realisasi kinerja dan anggaran tahun sebelumnya, urgensi urusan prioritas pemerintah Lampung Barat, hasil musrenbang, dan pokok-pokok fikiran DPRD. Realisasi anggaran pendukung sasaran strategis daerah pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 80. Realisasi Anggaran Pendukung Sasaran Startegis Daerah Tahun 2021



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tersedianya Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap	- Persentase jalan dengan kondisi mantap (persen) - Persentase jembatan dengan kondisi mantap (persen)	74,00% 84,22%	66,10% 82,33%	89,32 97,75	Rp62.134.776.766	Rp53.502.084.251	Rp8.632.692.515
2	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	- Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi (Persen) - Persentase desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet (persen) - Persentase desa yang dialiri listrik (persen)	36,76% 97,79% 97,06%	37,40% 98,50% 98,53%	101,74 100,72 101,51	Rp13.499.136.619	Rp12.942.171.527	Rp556.965.092
3	Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik	- Persentase jaringan irigasi yang berfungsi (persen)	56,00%	56,00%	100,00	Rp15.159.117.040	Rp14.031.714.600	Rp1.127.402.440
4	Meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	- Persentase penanganan rumah tidak layak huni (persen) - Persentase perumahan layak huni (persen)	47,40% 95,22%	85,80% 98,58%	181 103,52	Rp3.143.998.500	Rp3.036.592.500	Rp107.406.000
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Indeks Kualitas lingkungan hidup (poin)	63,57 Poin	65,99 Poin	103	Rp10.978.192.786	Rp10.255.835.532	Rp722.357.254
6	Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan	- Persentase ketaatan RT RW (Persen)	100,00%	100,00%	100,00	Rp2.032.254.500	Rp1.838.453.080	Rp193.801.420



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	- Persentase desa tangguh bencana (persen) - Resptime tanggap bencana (jam)	17,64% 1x24	9,56% 1x24	54,19 100,00	Rp5.763.161.296	Rp5.208.987.404	Rp554.173.892
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat	- Usia harapan hidup (tahun) - angka kematian ibu (per 1.000 kelahiran hidup) - angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) - Persentase kasus gizi buruk yang ditangani	67,84 tahun 121 poin 4,1 poin 100%	67,65 tahun 145 poin 4,55 poin 100%	99,71 80,16 90,24 100,00	Rp109.558.126.580	Rp93.798.468.056	Rp15.759.658.524
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	- angka partisipasi kasar (APK) - SD (Persen) - SMP (Persen) - angka partisipasi murni (APM) - SD (Persen) - SMP (Persen) - Angka rata-rata lama sekolah (Tahun) - Angka Harapan lama sekolah (Tahun)	111,91% 99,93% 100% 91,94% 7,42 tahun 12,33 tahun	103,32% 103,66% 94,97% 75,49% 8,07 tahun 12,26 tahun	92,32 103,73 94,97 82,10 108,76 99,43	Rp87.814.408.832	Rp86.136.494.138	Rp1.677.914.694



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Angka melanjutkan sekolah (persen)	90,83%	100,00%	110,09			
		- Nilai rata Ujian Nasional (UN)						
		- SD (Poin)	210,21	-				
		- SMP (Poin)	236,21	-				
10	Meningkatnya minat baca masyarakat	- Persentase pengunjung yang menjadi anggota perpustakaan	2,74%	3,49%	127,37	Rp4.375.645.082	Rp4.196.513.025	Rp179.132.057
11	Meningkatnya pendapatan masyarakat	- Pendapatan perkapita (Rupiah)	27.561.067,00	24.714.990,00	89,67	Rp1.342.950.900	Rp936.131.547	Rp406.819.353
12	Meningkatnya prestasi olahraga	- Persentase cabang olahraga yang berprestasi (persentase)	70%	178%	254,28			
13	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	- Jumlah pemuda yang berprestasi (orang)	40 orang	32 orang	80			
14	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	- laju pertumbuhan penduduk (persen)	1,02%	0,98%	103,92	Rp5.706.655.000	Rp5.361.390.259	Rp345.264.741
		- angka kelahiran total (TFR) (Persen)	2,27%	2,39%	94,71			
15	Meningkatnya ketahanan pangan	- skor pola pangan harapan (poin)	91,1 poin	91,62 poin	100,06	Rp4.896.186.900	Rp4.641.950.612	Rp254.236.288
16	Meningkatnya Pertumbuhan produk	- Produk Domestik Regional bruto (PDRB)	3.622.160,33	663.893.500.000	18.339	Rp14.638.439.419	Rp13.921.480.438	Rp716.958.981



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Domestik Regional bruto (PDRB) Subsektor Pertanian, Peternakan, Pemburuan dan jasa Pertanian	Subsektor Pertanian, Peternakan, Pemburuan dan jasa Pertanian (Juta Rupiah)						
17	Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Subsektor perikanan	- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Subsektor perikanan (Juta Rupiah)	180.391,57 juta rupiah	283.434,75 juta rupiah	157,12	Rp6.390.353.740	Rp6.324.978.281	Rp65.375.459
18	Meningkatnya Pertumbuhan Industri sektor Pariwisata	- Rata-rata lama tinggal (hari) - Jumlah Kunjungan wisatawan (Orang)	2,5 hari 17.805 orang	2 hari 153.414 orang	80,00 861			
19	Meningkatnya Pertumbuhan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri dan perdagangan	- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (Juta Rupiah) - Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor perdagangan (Juta Rupiah)	25.200 juta rupiah 669.269 juta rupiah	400,61 juta rupiah 961,79	156,97 143,70	Rp3.390.593.500	Rp3.168.869.049	Rp221.724.451
20	Meningkatnya nilai investasi	- Nilai investasi (Rupiah)	3.849.756.556	112.921.542.189	2.933,21	Rp1.342.950.900	Rp936.131.547	Rp406.819.353
21	Meningkatnya kontribusi dan daya saing koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam perekonomian daerah	- Jumlah Koperasi yang sehat (Unit) - Tingkat Pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Persen)	23 8%	27 67,4%	117,00 842,5	Rp5.494.705.420	Rp4.837.323.143	Rp657.382.277
22	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	- Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)	C	CC	183,53	Rp14.623.896.327	Rp13.709.558.058	Rp914.338.269



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Predikat)	BB	B	95			
		- Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Predikat opini)	WTP	WTP	100	Rp217.271.140.942	Rp209.091.143.910	Rp8.179.997.032
24	Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Predikat)	C	B	110	Rp716.683.500	Rp715.407.200	Rp1.276.300
25	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintah	- Predikat laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD) (Predikat)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100	Rp939.430.900	Rp929.047.200	Rp10.383.700
26	Menurunnya desa tertinggal	- Presentase desa tertinggal (Persen)	0%	0%	100	Rp5.817.368.887	Rp5.528.987.007	Rp288.381.880
27	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib	- Persentase konflik SARA yang terselesaikan (Persen)	100,00%	100,00%	100	Rp13.355.332.819	Rp12.653.303.175	Rp702.029.644
		- Persentase kasus ketertiban, keamanan, dan keindahan (K3) yang terselesaikan (Persen)	100,00%	100,00%	100			
28	Menurunnya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak	- Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani (Persen)	100,00%	100,00%	100	Rp256.403.800	Rp240.087.780	Rp16.316.020
29	Meningkatnya kesejahteraan gender	- Indeks pembangunan gender (Point)	91,74 poin	93 poin	101,37	Rp706.866.100	Rp697.638.426	Rp9.227.674
		- Indeks Pemberdayaan gender (ponit)	53,2 poin	68,21 poin	128,21			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	Capaian (%)	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah	- angka kemiskinan (Persen) - Indeks Gini (Point)	12.50% 0,28 poin	12.82% 0,295 poin	94,33 94,64	Rp2.865.955.700	Rp2.856.687.597	Rp9.268.103
31	Menurunnya Pengangguran	- tingkat Pengangguran terbuka (persen)	0,75%	2,83%	-177	Rp460.996.900	Rp451.825.797	Rp9.171.103

Sumber: Laporan Kinerja Perangkat Daerah Lampung Barat, diolah tim, 2022.

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari perbandingan ketercapaian target indikator sasaran dengan realisasi penggunaan anggaran pendukungnya. Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian kinerja indikator sasaran adalah lebih dari 150%. Sementara realisasi anggaran mencapai 93,05%, artinya anggaran yang digunakan secara optimal untuk implementasi setiap program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis Pemerintah Daerah Lampung Barat adalah 93,05% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan. Ada sebesar 6,95% anggaran yang di efisiensi penggunaanya. Efisiensi anggaran ini terjadi karena anggaran yang digunakan untuk implementasi program dan kegiatan sudah optimal sesuai kebutuhan penggunaan anggaran.

E. INOVASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Inovasi adalah pilihan kreatif, pengaturan, serta seperangkat manusia dengan sumber-sumber material baru, dan juga menggunakan cara-cara yang unik guna menghasilkan peningkatan atas pencapaian yang telah menjadi tujuan sebelumnya. Inovasi menjadi daya ungkit capaian indikator kinerja pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, inovasi terbagi menjadi 3 macam yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya. Tahun 2021, jumlah inovasi yang diinisiasi oleh perangkat daerah, kepala daerah, dan masyarakat pekon berjumlah 271 inovasi yang sudah dilaporkan dalam sistem IGA (*Innovative Government Award*). Jumlah total inovasi tersebut terdiri dari 155 inovasi pelayanan publik, 9 inovasi tata kelola pemerintahan, dan 107 inovasi bidang lainnya yang menjadi kewenangan daerah. Berikut ini adalah beberapa inovasi yang dikelompokkan dalam misi Kepala Daerah Lampung Barat:

Misi 1. Mengembangkan Wilayah Melalui Pembangunan Infrastruktur secara Berkeadilan, dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan

1. Dinas PUPR: Cerita Indah Bantuan Rumah Swadaya di Bumi Sekala Bekhak

Kebutuhan akan hunian bagi masyarakat menjadi kebutuhan primer, baik bagi masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan. Kebiasaan masyarakat di perdesaan membangun rumah sangat sederhana terkadang kurang memperhatikan aspek kesehatan sehingga tidak layak huni. Rumah sebagai tempat berteduh, beristirahat, berkreasi dan tempat menciptakan manusia produktif dan berkualitas.



Gambar 31. Salah Satu Contoh Pembangunan Rumah Swadaya
Sumber: Laporan Kinerja Dinas PUPR Tahun 2021

Tujuan inovasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau akan tetapi memenuhi persyaratan keamanan dan kenyamanan dan kesehatan dalam lingkup heterogonis potensi-potensi daerah, khususnya potensi bahan bangunan budaya serta karakteristik fisik kawasan. Dengan hasil inovasi berupa masyarakat yang mempunyai berpenghasilan rendah (MBR) sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini dan memiliki rumah yang layak huni.

2. Dinas Sosial: Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS_RTLH) adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat rumah tangga miskin baik secara menyeluruh maupun sebagian sehingga tercipta rumah yang layak bagi tempat tinggal. Harapan dengan adanya inovasi ini memberikan manfaat berupa bantuan perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan bagi fakir miskin sehingga terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.



Gambar 32. Kegiatan RS RTLH oleh Dinas Sosial
Sumber: Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021

3. Dinas Lingkungan Hidup: *Grand Design* Kabupaten Tangguh Bencana

Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah rawan bencana karena berada pada patahan semangka, topografinya berupa pegunungan dan memiliki curah hujan yang tinggi. Hal ini menyebabkan Lampung Barat selalu dalam kondisi waspada terhadap bencana gempa bumi dan tanah longsor. Salah satu Inovasi yang dilakukan Kabupaten Lampung Barat untuk mengatasi hal tersebut diatas adalah dengan pembuatan *grand design* Kabupaten Tangguh Bencana dengan melibatkan lintas perangkat daerah.

Sasaran inovasi ini adalah untuk menguatkan komitmen kebijakan strategi Kabupaten Tangguh Bencana dan mensosialisasikan rencana aksi sebagai Kabupaten Tangguh Bencana.



Gambar 33. Kegiatan Penyusunan *Grand Design* Kabupaten Tangguh Bencana
Sumber: Laporan Kinerja BPBD Tahun 2021

4. Dinas Lingkungan: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Kabupaten Lampung Barat memiliki taman kehati yang berada pada Kecamatan Lumbok Seminung dengan berdekatan dengan danau ranau dengan luasan taman sekitar 11 Hektar. Taman kehati ini berisi beberapa spesies tanaman baik kayu keras, *Multy Purpose Tree Species* (MPTS), dan tanaman hias, serta spesies fauna: insecta, arachnida, reptilia, mammalia, dan aves. Taman Kehati juga di lengkapi fasilitas umum berupa hotel dan sarana rekreasi. Keanekaragaman hayati berperan sebagai indikator dari sistem ekologi sebagai sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem sehingga dapat mempengaruhi komunitas organisme, perkembangan dan stabilitas ekosistem.

Misi 2: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdayasaing

1. RSUD Alimurdin Umar: JELITA TBC (Jemput, Layani Penyakit TBC)

Tuberkulosis (TBC atau TB) adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri mikobakterium tuberkulosa. Bakteri ini merupakan bakteri basil yang sangat kuat sehingga memerlukan waktu lama untuk mengobatinya. Bakteri ini lebih sering menginfeksi organ paru-paru dibandingkan bagian lain tubuh manusia. Berdasarkan data tahun 2016 menunjukkan bahwa kasus insiden TB secara global berjumlah 10,4 juta kasus yang setara dengan 120 kasus per 100.000 penduduk dengan perkiraan insiden TB sebesar 45% ada di wilayah Asia Tenggara. Jumlah kasus baru TB Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 420.994 kasus dengan

risiko berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki memiliki resiko 1,4 kali lebih besar dibandingkan perempuan. Sedangkan berdasarkan survei prevalensi laki-laki 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang kemungkinan dikarenakan perilaku merokok dan kurangnya kepatuhan minum obat.

Anggota keluarga dengan kasus TB BTA positif yang tinggal serumah merupakan kelompok masyarakat yang memiliki potensi paling rentan untuk tertular penyakit TB. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penularan tuberkulosis tidak hanya dapat menular pada orang dewasa namun juga pada anak balita yang serumah dengan penderita tuberkulosis. Hal ini karena beberapa dari anggota keluarga tersebut sangat sulit untuk menghindari kontak dengan penderita dan ketidaktahuan penderita maupun keluarga terkait cara penularan penyakit tuberkulosis ini. Karena masih banyak pasien TBC yang belum ditemukan maka kami Puskesmas Kenali melakukan kegiatan JELITA TBC (Jemput, Layani Penyakit TBC) sekaligus sebagai upaya untuk menumbuhkan kepekaan dan kepedulian antar anggota keluarga dalam penyembuhan penyakit TBC.

Tujuan dari inovasi ini adalah membantu dan memberikan informasi dan edukasi dalam pencegahan penularan tuberkulosis sehingga diharapkan keluarga khususnya menjadi pelopor dalam memutus mata rantai penularan TBC.

2. Dinas Kesehatan: Tuman Balita (Pemantauan Pertumbuhan Balita Dirumah)

Kegiatan ini berupa pemantauan melalui kunjungan rumah yang bertujuan untuk menggali permasalahan yang dihadapi keluarga termasuk kepatuhan mengkonsumsi makanan untuk pemulihan gizi dan memberikan nasehat sesuai masalah yang dihadapi. Dengan harapan akan terjadi interaksi antara petugas, ibu balita dan balita gizi kurang/ buruk dengan cara memantau pertumbuhan anak balita supaya tidak berkelanjutan dan dilakukan konseling pada otu balita sesuai kasus. Hasil dari inovasi ini adalah:

- a) Bertambahnya pengetahuan orang tua balita dalam menghadapi kasus gizi buruk/kurang;
- b) Partisipasi masyarakat lebih meningkat;
- c) Partisipasi aparat pekon dalam penanganan balita kasus gizi buruk/kurang dan stunting lebih agresif;

- d) Orang tua paham pentingnya pemberian makanan balita yang baik dan benar.



Gambar 34. Kegiatan Tuman Balita
Sumber: Dinas Kesehatan, 2022.

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon: Pembinaan Pokjantal Posyandu Dalam Konvergensi Stunting

Dalam rangka mendukung pencapaian target SDG's dimana salah satu *goals* yang ingin dicapai adalah peningkatan dan percepatan kesehatan ibu dan anak serta pemberdayaan perempuan, maka seluruh pilar kelembagaan masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan pemberdayaan perempuan diharapkan mendapat perhatian lebih serius untuk dilakukan. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendukung ini adalah dengan dilaksanakannya pembinaan pokjantal posyandu dalam konvergensi stunting. Kegiatan inovasi ini bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan kompetensi pokjantal posyandu sebagai garda depan pelayanan kesehatan bayi dan anak;
- b) Menunjang percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKABA) serta konvergensi stunting;
- c) Meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar;
- d) Mengurangi angka konvergensi stunting.



Gambar 35. Pembinaan Pokjanal Posyandu Dalam Konvergensi Stunting
Sumber: Dinas PMP, 2022

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: PM BERAKSI (Pendidikan Merata Biaya Operasional Sekolah Siswa)

Kegiatan ini untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan dan penyaluran serta penggunaan dana BOS di sekolah. Selain itu juga untuk *memonitoring* pelaporan penggunaan dana BOS disatuan pendidikan. Secara umum program BOS ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Metode kegiatan ini berupa pendampingan dengan cara diskusi bersama kepala, bendahara, dan administrasi satuan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat terkait permasalahan pembuatan laporan keuangan dalam pengelolaan dana BOS yang akan dilaporkan. Selain pendampingan terkait laporan, Satuan Pendidikan juga diberi pelatihan terkait pengelolaan Dana BOS, diharapkan satuan pendidikan memahami akan pentingnya pelaporan yang benar dan sesuai aturan yang telah ditetapkan.



Gambar 36. Salah Satu Kegiatan PM BERAKSI
Sumber: Dokumentasi Balitbang, 2022.

Misi 3. Meningkatkan Perekonomian Yang Berorientasi Pada Agro-wisata berbasis Sumberdaya Lokal

1. PM-PENYALUR UMKM (Peningkatan *Monitoring* Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Dalam Rangka Pengembangan Wirausaha Bagi UMKM)

Dalam merangsang kegiatan ekonomi usaha produktif di Kabupaten Lampung Barat, pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah memegang peranan penting yang mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Akses permodalan dari lembaga keuangan formal sering menjadi kendala khususnya bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya. Melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat telah memulai program penyaluran pinjaman dana bergulir sejak tahun 2003 hingga sekarang. Dan ini diperkuat dengan pembentuka BLUD atau UPTD. Manfaat dari inovasi ini adalah:

- a) Meningkatkan kerjasama antara pihak UMKM dan UPTD;
- b) Adanya pihak UMKM yang menitip setoran ke UPTD.

Misi 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Amanah dengan Berorientasi pada Pelayanan Publik

1. Bappeda: Aplikasi Pelangi Pesagi

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berinovasi dengan menggunakan aplikasi perencanaan yang terintegrasikan dengan aplikasi keuangan yang diberi nama Aplikasi PELANGI PESAGI "PErencanaan LANGsung Integrasi dengan PEnganggaran menjadi SATu sinerGI". Aplikasi ini terdiri dari:

- a) Input Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b) Input Rencana Strategis (Renstra);
- c) Input Usulan Mufawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat pekon, kecamatan dan kabupaten;
- d) Input usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- e) Input Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD);
- f) Input Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- g) Input Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Implementasi Aplikasi PELANGI PESAGI merupakan salah satu wujud komitmen Pemkab Kabupaten Lampung Barat dalam program pencegahan korupsi sebagaimana telah disepakati bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor:G/320/B.01/HK dan Nomor:139/08/PEMKAB-LB/01/2018 tentang Kerjasama *e-Planning* dan *e-Budgeting* dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi.



Gambar 37. Aplikasi Pelangi Pesagi
Sumber: Dokumentasi Bappeda, 2022.

Misi 5. Mengembangkan Perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif

1. Badan Kesbangpol: Fasilitasi Layanan Partai Politik (Si ITIK)

Kegiatan inovasi ini untuk membantu kelancaran administrasi dana Sekretariat Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam rangka proses pencairan bantuan keuangan bagi partai politik hasil pemilu tahun 2019 maka dibentuk Fasilitasi Layanan Partai Politik (Si ITIK) pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat. Manfaat dari inovasi ini adalah:

- a) Tersalurkan dana bantuan keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilu 2019;
- b) Terkoordinasinya proposal pengajuan bantuan keuangan dan laporan pertanggungjawaban atas dana bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- c) Terfasilitasinya proses pencairan dana bantuan keuangan kepada partai politik hasil pemilu tahun 2019.



Gambar 38. Kegiatan Fasilitasi Layanan Partai Politik
Sumber: Dokumentasi Kesbangpol, 2022.

2. Dinas PPKBPPPA: Pembentukan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)

Puspaga adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. Tujuan dari Inovasi ini adalah:

- a) Tersedianya *one stop service* layanan satu pintu keluarga *holistic integrative* berbasis hak anak;
- b) Tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua;
- c) Tersedianya tempat konsultasi bagi anak, orangtua, atau orang yang bertanggung jawab terhadapnya;
- d) Tersedianya tempat terhubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga;
- e) Menguatnya kemampuan berkeluarga dalam mengasuh dan melindungi anak.



Gambar 39. Proses Pembentukan Puspaga
Sumber: Dokumentasi PPKBPPPA, 2022.

Berikut ini adalah pengelompokan inovasi berdasarkan perangkat daerah.

Tabel 81. Pengelompokan Inovasi Berdasarkan Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Inovasi
1	Dinas PUPR	Cerita Indah Bantuan Rumah Swadaya di Bumi Skala Bekhak
2	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial- Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)
3	Dinas Lingkungan Hidup	<i>Grand Design</i> Kabupaten Tangguh Bencana
4	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
5	RSUD Alimuddin Umar	Jelita TBC (Jemput, Layani Penyakit TBC)
6	Dinas Kesehatan	Tuman Balita (Pemantauan Pertumbuhan Balita dirumah)
7	Dinas PMP	Pembinaan Pokjanal Posyandu dalam Konvergensi Stunting
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PM BERAKSI (Pendidikan Mertaa Biaya BOS)
9	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	PM-PENYALUR UMKM (Peningkatan <i>Monitoring</i> Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Dalam Rangka Pengembangan Wirausaha Bagi UMKM)
10	Bappeda	Aplikasi Pelangi Pesagi (PERencanaan LANGsung Integrasi dengan PENGanggaran menjadi SATu sinerGI)
11	Badan Kesbangpol	Fasilitasi Layanan Partai Politik (Si ITIK)
12	Dinas PPKBPPPA	Pembentukan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)

Sumber: Dokumentasi Balitbang Lampung Barat, 2022.



BAB IV

Penutup



BAB IV PENUTUP

Kesimpulan yang dapat disampaikan sebagai penutup dari laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 ini adalah bahwa rata-rata capaian kinerja 55 indikator dari 31 sasaran startegis lebih dari 100%. Ada 2 realisasi kinerja yang jauh dibawah target dengan predikat rendah dan sangat rendah yaitu persentase desa tangguh bencana dan tingkat pengangguran terbuka. Kemudian juga ada 2 indikator kinerja yang tidak dapat terealisasi yaitu nilai rata-rata ujian nasional jenjang SD dan SMP yang disebabkan oleh penghapusan pelaksanaan ujian nasional di Indonesia sejak pandemi Covid-19 melanda tahun 2020. Meksi begitu, rata-rata capaian kinerja indikator sasaran yang mencapai predikat sangat tinggi menunjukkan pencapaian kinerja yang signifikan dan menunjukkan keberhasilan mewujudkan misi dan tujuan pemerintah Lampung Barat yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022.

Sumber daya pendanaan untuk mendukung pencapaian indikator-indikator tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat yang dialokasikan sebesar Rp.614.675.729.655, terealisasi penggunaannya sebesar Rp.571.949.255.139 atau 93,05%. Sehingga efisiensi penggunaan anggaran implementasi indikator kinerja tahun 2021 ini sebesar 6,95%.

Demikian laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tahun 2021. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban berupa informasi kinerja. Laporan kinerja ini juga diharapkan akan bermanfaat bagi publik sebagai informasi atau evaluasi, serta menjadi upaya berkesinambungan bagi Kabupaten Lampung Barat meningkatkan kinerja.

LIWA, 29 Maret 2021


BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS



Lampiran



DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021

NO	JENIS PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	DOKUMENTASI
1	Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2021 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	
2	Penghargaan terhadap Kabupaten Lampung Barat atas penyusunan SAKIP tahun 2019 dengan predikat "B"	Kementerian Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
3	Penghargaan Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021, Lampung Barat dinobatkan sebagai kabupaten sangat inovatif dengan peringkat ke-5 kategori kabupaten inovatif	Kementerian Dalam Negeri	
4	Desa Wisata Kampoeng Wisata Rgis Jaya, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat meraih predikat terbaik ketiga dalam penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	



NO	JENIS PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	DOKUMENTASI
5	Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus dipastikan meraih penghargaan Nugra Jasadarma Pustaloka dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) untuk kategori Pejabat Publik pada tahun 2021.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI)	
6	Lampung Barat meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2019 kategori kabupaten terbaik pertama dalam penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung,	Pemerintah Provinsi Lampung	
7	Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) Bupati Lampung Barat	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	
8	Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten penerima anugerah Parahita Ekapraya tahun 2020	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	

NO	JENIS PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	DOKUMENTASI
9	Kabupaten Lampung Barat menerima anugerah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) <i>Award</i> .	Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Kesehatan Lingkungan.	
10	Penghargaan Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) level III,	Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung	
11	Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat menerima penghargaan atas predikat kepatuhan tinggi penilaian kepatuhan standar pelayanan tahun 2021.	Ombudsman Republik Indonesia (RI)	

Sumber: berbagai sumber diolah tim, 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

INSPEKTORAT

Jalan Tulip No. 03 Way Mengaku Liwa Telp. (0728) 21159

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja kepada kepala daerah.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Ir. Sudarto M, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641022 199203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

INSPEKTORAT

Jalan Tulip No. 03 Way Mengaku Liwa Telp. (0728) 21159

CHECKLIST REVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PERNYATAAN	CHECK LIST	KET	
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menyampaikan data penting IP (Informasi Pemerintah)	√	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√	Capaian kinerja disajikan per triwulan untuk masing-masing sasaran
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√	
II.	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√	Bagian Organisasi Setdakab LB
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan daya yang memadai	√	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√	
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√	Kasubbag. Perencanaan pada SKPD
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√	
		7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) bulanan merupakan gabungan partisipasi dibawahnya	-	

NO.	PERNYATAAN	CHECK LIST	KET	
III.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategi	√	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja (IK)	√	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)	√	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√	Perbandingan Data dengan tahun lalu dan dengan Target RPJMD
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√	
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-	
		10. IKU dan IK telah SMART	-	

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Ir. Sudarto M, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641022 199203 1 002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PAROSIL MABSUS**

Jabatan : Bupati Lampung Barat

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Liwa, Oktober 2021

Bupati Lampung Barat,





LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dengan kondisi mantap	64,18%
		Persentase jembatan dengan kondisi mantap	81,33%
2	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase desa yang terhubung dengan moda transportasi	36,76%
		Persentase desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet	98,50%
		Persentase desa yang dialiri listrik	98,50%
3	Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi	56,14%
4	Meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	82,19%
		Persentase perumahan layak huni	94,70%
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas lingkungan hidup	71,94 Point
6	Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukan	Persentase ketaatan RT RW	100%
7	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Persentase desa tangguh bencana	10,29%
		Respon time tanggap bencana	1x24 Jam

8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat	Usia harapan hidup	67,73 Tahun
		angka kematian ibu (per 1.000 kelahiran hidup)	121 Point
		angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	4,1 Point
		Persentase kasus gizi buruk yang ditangani	100%
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	angka partisipasi kasar (APK)	
		SD	111,89%
		SMP	99,93%
		angka partisipasi murni (APM)	
		SD	103,24%
		SMP	101,68%
		Angka rata-rata lama sekolah	8,06 Tahun
		Angka Harapan lama sekolah	12,33 Tahun
		Angka melanjutkan sekolah	91,24 Tahun
		Nilai rata Ujian Nasional (UN)	
		SD	214,70 Point
		SMP	213,80 Point
10	Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase pengunjung yang menjadi anggota perpustakaan	2,74%
11	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita	26.572.352
12	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	70%

13	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah pemuda yang berprestasi	40 Orang
14	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	laju pertumbuhan penduduk	0,93%
		angka kelahiran total (TFR)	2,27%
15	Meningkatnya ketahanan pangan	skor pola pangan harapan	91,62 Point
16	Meningkatnya Pertumbuhan produk Domestik Regional bruto (PDRB) Subsektor Pertanian, Peternakan, Pemburuan dan jasa Pertanian	Produk Domestik Regional bruto (PDRB) Subsektor Pertanian, Peternakan, Pemburuan dan jasa Pertanian (Juta Rupiah)	3.438.822 Juta Rupiah
17	Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Subsektor perikanan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Subsektor perikanan (Juta Rupiah)	239.013 Juta Rupiah
18	Meningkatnya Pertumbuhan Industri sektor Pariwisata	Rata-rata lama tinggal	3 Hari
		Jumlah Kunjungan wisatawan (Orang)	292.698 Orang
19	Meningkatnya Pertumbuhan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri dan perdagangan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri (Juta Rupiah)	383.951 Juta Rupiah
		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor perdagangan (Juta Rupiah)	998.680 Juta Rupiah
20	Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi	1.134.839.755.516 Rupiah
21	Meningkatnya kontribusi dan daya saing koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam perekonomian daerah	Jumlah Koperasi yang sehat	22 Unit
		Tingkat Pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM)	68%

22	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat C
23	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat BB
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Predikat WTP
24	Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat B
25	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintah	Predikat laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD)	Predikat sangat tinggi
26	Menurunnya desa tertinggal	Presentase desa tertinggal	0%
27	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang tertib	Persentase konflik SARA yang terselesaikan	100%
		Persentase kasus ketertiban, keamanan, dan keindahan (K3) yang terselesaikan	100%
28	Menurunnya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani	100%
29	Meningkatnya kesejahteraan gender	Indeks pembangunan gender	91,74 Point
		Indeks Pemberdayaan gender	53,2 Point
30	Menurunnya kemiskinan dan ketimpangan daerah	angka kemiskinan	13,0%
		Indeks Gini	0,30 Point
31	Menurunnya Pengangguran	tingkat Pengangguran terbuka	0,80%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	86.194.645.342,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	145.000.000,00
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	51.392.265.955,00
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.662.870.100,00
5	PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	169.084.000,00
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.040.643.258,00
7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.946.927.300,00
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.706.800.000,00
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.778.000.000,00
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	855.801.250,00
11	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	13.411.183.054,00
12	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	11.949.495.000,00
13	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	4.664.952.000,00
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	40.886.988.691,00
15	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	156.198.000,00
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	317.548.000,00
17	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	148.948.500,00
18	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.995.050.000,00
19	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.911.549.200,00
20	PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	2.162.253.000,00
21	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.646.635.500,00
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	253.955.000,00
23	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.082.597.596,00
24	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	365.470.100,00
25	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	300.162.000,00
26	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAMPAHLAWAN	24.646.000,00
27	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	331.567.900,00

28	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	76.560.000,00
29	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	52.869.000,00
30	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN	234.984.000,00
31	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	51.843.000,00
32	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	608.827.800,00
33	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDERDAN ANAK	43.420.000,00
34	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	265.506.300,00
35	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	55.000.000,00
36	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	656.522.500,00
37	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DANKETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.207.767.700,00
38	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	60.000.000,00
39	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	122.866.000,00
40	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAHGARAPAN	97.825.000,00
41	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DANSANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.326.114.000,00
42	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	560.882.500,00
43	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAUKERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	348.712.075,00
44	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMANHAYATI (KEHATI)	3.090.282.866,00
45	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	36.744.600,00
46	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	64.080.900,00
47	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN. PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	87.081.500,00
48	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	84.027.835,00
49	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.667.338.257,00
50	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.814.877.200,00
51	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	272.992.000,00
52	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	526.734.900,00
53	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	55.467.000,00
54	PROGRAM PENATAAN DESA	875.000.000,00
55	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.503.430.100,00

56	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.054.101.300,00
57	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	84.037.500,00
58	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.761.360.000,00
59	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	342.484.000,00
60	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.563.433.850,00
61	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.843.543.606,00
62	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.577.134.000,00
63	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	24.418.900,00
64	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	28.690.000,00
65	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	46.739.400,00
66	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	90.029.100,00
67	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH.USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)	305.016.300,00
68	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.543.227.900,00
69	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	323.089.900,00
70	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	326.122.000,00
71	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	34.000.000,00
72	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEPEMUDAAN	1.040.511.700,00
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	1.825.459.600,00
74	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIKSEKTORAL	285.558.000,00
75	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	560.867.250,00
76	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.905.744.000,00
77	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	850.000.000,00
78	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.486.775.304,00
79	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	71.502.000,00
80	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	89.948.000,00
81	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.224.661.120,00
82	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	323.624.900,00
83	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	354.392.200,00
84	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	876.290.900,00
85	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.320.877.200,00
86	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.167.791.200,00

87	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.618.012.400,00
88	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	171.703.000,00
89	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.600.350.000,00
90	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	388.000.000,00
91	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	80.369.000,00
92	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	610.731.100,00
93	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	292.746.600,00
94	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	158.774.500,00
95	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	142.761.000,00
96	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	52.681.500,00
97	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.640.708.000,00
98	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.017.897.000,00
99	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.348.778.300,00
100	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	20.795.142.330,00
101	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20.828.488.500,00
102	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.105.913.400,00
103	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.622.842.000,00
104	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	189.486.531.030,00
105	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.615.713.400,00
106	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.598.485.200,00
107	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.670.276.282,00
108	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH	1.104.318.500,00
109	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.090.575.500,00
110	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN.	430.475.000,00
111	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	534.315.800,00
112	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.014.991.540,00
113	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	610.989.300,00

114	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	351.653.700,00
115	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	761.977.900,00
116	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	77.394.800,00
117	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	945.506.872,00
118	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	915.047.000,00
119	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	123.396.400,00
120	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	811.301.700,00
TOTAL		Rp 592.299.273.463

Liwa, Februari 2021

